

KEMENTERIAN PANRB

LAPORAN KEUANGAN 2024

BAGIAN ANGGARAN 048
UNAUDITED





LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024 (UNAUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

Jakarta, 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

> Jakarta, 13 Februari 2025 Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Reni Suzaria

NIP 19680831 199401 2 001

DAFTAR ISI

I	al

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	47
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	89
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	135
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	161
F. Pengungkapan Penting Lainnya	175
VI. Lampiran Pendukung	
A. Laporan Keuangan Cetakan Aplikasi SAKTI	
B. Surat Hasil Rekonsiliasi	
C. Berita Acara Rekonsiliasi Internal	
D. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	
E. Memo Jurnal Penyesuaian	
F. Telaah Laporan Keuangan	

TA

- Tabel 1 Perlakuan Akuntansi Atas Saldo pada Rekening Lainnya
- Tabel 2 Perlakuan Akuntansi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
- Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang
- Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
- Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
- Tabel 6 Rincian Revisi DIPA TA 2024
- Tabel 7 Rincian Perubahan DIPA Berdasarkan Program TA 2024
- Tabel 8 Rincian Perubahan DIPA Satker KASN TA 2024
- Tabel 9 Rincian Perubahan DIPA Satker Menpan TA 2024
- Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024
- Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024
- Tabel 12 Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 13 Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan 2023
- Tabel 14 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4251 TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 15 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4251 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 16 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4257 TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 17 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4257 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 18 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4258 TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 19 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4258 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 20 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4259 TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 21 Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4259 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
- Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2024
- Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024
- Tabel 25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker KASN TA 2024
- Tabel 26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Menpan TA 2024
- Tabel 27 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 28 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 29 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024
- Tabel 30 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 31 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2024
- Tabel 33 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 34 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2024
- Tabel 36 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 37 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2024
- Tabel 39 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 40 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

- Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium TA 2024
- Tabel 42 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 43 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Lembur TA 2024
- Tabel 45 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Lembur TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 46 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Lembur Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2024
- Tabel 48 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 49 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024
- Tabel 51 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 52 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 53 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024
- Tabel 54 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 55 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 56 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024
- Tabel 57 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 58 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 59 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024
- Tabel 60 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 61 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 62 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024
- Tabel 63 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 64 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 65 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024
- Tabel 66 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 67 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2023 dan TA 2022
- Tabel 68 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2024
- Tabel 69 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 70 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 71 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2024
- Tabel 72 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 73 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 74 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024
- Tabel 75 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 76 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Satuan Kerja TA 2023 dan TA 2022
- Tabel 77 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024
- Tabel 78 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

Tabel 79 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Tabel 80 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

Tabel 81 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

Tabel 82 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Tabel 83 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024

Tabel 84 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023

Tabel 85 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Tabel 86 Rincian Pagu, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output Prioritas Nasional VII TA 2024

Tabel 87 Rincian Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 88 Rincian Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 89 Rincian Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 90 Rincian Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 91 Rincian Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 92 Rincian Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Tabel 93 Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

Tabel 94 Rincian Perbandingan Piutang Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 95 Rincian Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 96 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 Tabel 97 Rincian Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 98 Rincian Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Tabel 99 Rincian Mutasi Persediaan

Tabel 100 Rincian Perbandingan Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 101 Rincian Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 102 Rincian Perbandingan Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 103 Rincian Mutasi Tanah

Tabel 104 Rincian Tanah per 31 Desember 2024

Tabel 105 Rincian Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022

Tabel 106 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Tabel 107 Rincian Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 108 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Tabel 109 Rincian Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan Desember 2023

Tabel 110 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 111 Rincian Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 112 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Tabel 113 Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 114 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Tabel 115 Rincian Perbandingan Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 116 Rincian Perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 117 Rincian Mutasi Piutang Tagihan TP/TGR

Tabel 118 Rincian Perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 119 Rincian Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 120 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024

Tabel 121 Rincian Perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

Tabel 122 Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 123 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Tabel 124 Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud Satker KASN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 125 Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud Satker Menpan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 126 Rincian Aplikasi yang Tidak Tercatat dalam Laporan Barang Satker Menpan per 31 Desember 2024

Tabel 127 Rincian Aplikasi yang Sudah Tidak Aktif Digunakan Satker Menpan per 31 Desember 2024

Tabel 128 Rincian Perbandingan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 129 Rincian Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Tabel 130 Rincian Transaksi RPATA per 31 Desember 2024

Tabel 131 Rincian Perbandingan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 132 Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Tabel 133 Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 134 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Tabel 135 Rincian Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan Desember 2023

Tabel 136 Rincian Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 137 Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga

Tabel 138 Rincian Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Satker KASN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 139 Rincian Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Satker Menpan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 140 Rincian Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 141 Rincian Perbandingan Pendapatan Operasional Berdasarkan Satuan Kerja TA 2023 dan 2022

Tabel 142 Rincian Perbandingan Pendapatan PNBP TA 2024 dan TA 2023

Tabel 143 Rincian Perbandingan Beban Operasional TA 2024 dan TA 2023

Tabel 144 Rincian Perbandingan Beban Operasional Per Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Tabel 145 Rincian Perbandingan Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023

Tabel 146 Rincian Perbandingan Beban Pegawai per Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Tabel 147 Rincian Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dengan Beban Pegawai pada LO TA 2024

Tabel 148 Rincian Penyesuaian Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO Satker MENPAN TA 2024

Tabel 149 Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Pegawai Satker MENPAN TA 2024

Tabel 150 Rincian Perbandingan Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023

- Tabel 151 Rincian Perbandingan Beban Persediaan per Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 152 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 153 Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa per Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 154 Rincian Perbandingan Belanja Barang&Jasa di LRA dan Beban Barang&Jasa di LO TA 2024
- Tabel 155 Rincian Penyesuaian Belanja Barang&Jasa di LRA dan Beban Barang&Jasa di LO TA 2024
- Tabel 156 Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Barang dan Jasa TA 2024
- Tabel 157 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023
- Tabel 158 Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan Berdasarkan per Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 159 Rincian Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dengan Beban Pemeliharaan pada LO TA 2024
- Tabel 160 Rincian Penyesuaian Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO TA 2024
- Tabel 161 Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Pemeliharaan Semester I TA 2024
- Tabel 162 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 163 Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023
- Tabel 164 Rincian Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan LO TA 2024
- Tabel 165 Rincian Penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO TA 2024
- Tabel 166 Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Perjalanan Dinas TA 2024
- Tabel 167 Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 168 Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi di Neraca dan Beban Penyusutan dan Amortisasi di LO TA 2024
- Tabel 169 Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023
- Tabel 170 Rincian Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak TA 2024
- Tabel 171 Rincian Jurnal Penyesuaian atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024
- Tabel 172 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 173 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024
- Tabel 174 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 dan 2023
- Tabel 175 Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023
- Tabel 176 Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di LRA dan LO TA 2024
- Tabel 177 Rincian Penyesuaian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di LO TA 2024
- Tabel 178 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 dan 2023
- Tabel 179 Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023
- Tabel 180 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit-LO TA 2024 dan 2023
- Tabel 181 Rincian Perbandingan Ekuitas Awal 1 Januari 2024 dan 2023
- Tabel 182 Rincian Perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 183 Rincian Perbandingan Koreksi Atas Reklasifikasi TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 184 Rincian Perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 185 Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024
- Tabel 186 Rincian Jurnal Manual yang Memengaruhi Akun Koreksi Lain-lain TA 2024
- Tabel 187 Rincian Perbandingan Transaksi Antar Entitas TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 188 Rincian Perbandingan DKEL Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 189 Rincian Perbandingan DDEL Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 190 Rincian Perbandingan Transfer Keluar Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 191 Rincian Transfer Keluar TA 2024
- Tabel 192 Rincian Perbandingan Transfer Masuk Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023
- Tabel 193 Rincian Transfer Masuk TA 2024

Tabel 194 Rincian Pengesahan Hibah Langsung Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023 Tabel 195 Rincian Pengesahan Hibah Langsung Satker MENPAN TA 2024

Tabel 196 Rincian Perbandingan Kenaikan/Penurunan Ekuitas TA 2024 dan TA 2023

Tabel 197 Tabel Pengelolaan Piutang Lainnya pada Neraca Satker MENPAN TA 2024

Tabel 198 Daftar Revisi DIPA MENPAN per satker sampai dengan 31 Desember 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya: (1) Ketidaksesuaian nilai Penghentian Aset dari Penggunaan - Peralatan dan Mesin dengan Berita Acara Penghapusan, dan Data Master Aset dari aplikasi SIMAN, termasuk di dalamnya berpengaruh terhadap nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar karena adanya Likuidasi Satker KASN dan (2) Ketidaksesuaian penyajian nilai persediaan dengan pemeriksaan fisik persediaan oleh Inspektorat;

Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada paragraf ketiga di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 18 Februari 2025

Inspektur Kementerian PANRB

Aan Syaiful Ambia

NIP. 196709161988031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2023 (unaudited) selaku BA 048 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 3 Februari 2025

Rini Widyantini

CIKINDO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

iii

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 sebesar Rp0 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.711.574.797.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp433.338.930.871 atau mencapai 96,43% dari alokasi anggaran sebesar Rp450.466.107.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp217.867.807.578 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.167.879.322; Aset Tetap sebesar Rp185.826.274.565; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; dan Aset Lainnya sebesar Rp29.873.653.691.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.802.023.480 dan Rp214.065.784.098.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp459.768.331.137 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp459.768.331.137.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp2.428.360.324 dan Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp457.339.970.813.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp163.324.631.271, ditambah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar (Rp1.639.438.791); ditambah Defisit-LO sebesar (Rp457.339.970.813); ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp509.720.562.431; sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp214.065.784.098.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 September 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uralan		TAHUN 2024				TAHUN 2023	
	Cat.	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	%	Realisasi	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	1.711.574.797	1.711.574.797	0	811.254.408	
JUMLAH PENDAPATAN		0	1.711.574.797	1.711.574.797	0	811.254.408	
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	146.913.233.000	145.334.254.028	(1.578.978.972)	98,93	124.396,635.905	
Belanja Barang	B.4	247.584.204.000	232.266.903.912	(15,317,300,088)	93,81	209.390.097.898	
Belanja Modal	B.5	55.968.670.000	55.737.772.931	(230.897.069)	99,59	34.058.084.850	
JUMLAH BELANJA		450.466.107.000	433.338.930.871	(17.127.176.129)	96,20	367.844.818.653	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Desember 2024 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Rini Widyantini

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

	,	,	(Dalam Ruplan)
URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1	980.460.983	440.132.021
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.2	0	49.569.744
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	487.703.112	1.540.600.696
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Be PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4 C.1.5	(2.438.516) 485.264.596	1,540,600,696
Persediaan	C.1.6	702.153.743	1.142.794.896
Jumlah Aset Lancar	30000000	2.167.879.322	3.173.097.357
ASET TETAP	C.2	LIZOTIOTSISEE	3.273.037.337
Tanah	C.2.1	60.334.049.494	32.784.833.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	173.738.580.179	152.259.916.225
Gedung dan Bangunan	C.2.3	91.915.184.122	85.949.348.532
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.598.328.550	1.461.578.550
Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5 C.2.6	1.447.364.549 (143.207.232.329)	1.351.922.885 (138.934.673.202)
	C.2.0	The second second	
Jumlah Aset Tetap	N EVE	185.826.274.565	134.872.925.990
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	Access 1		TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan	C.3	764.867.146	783.048.964
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti		(764.867.146)	783.048.964
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan			
Ganti Rugi (Netto)	135,48	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang	817	0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	46.447.825.380	36.436.921.600
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	3.488.838.700	11.686.842.500
Aset Lain-lain	C.4.3	5.631.935.307	171,100,000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset			
Lainnya	C.4.4	(25.694.945.696)	(10.930.667.800)
Jumlah Aset Lainnya		29.873.653.691	37.364.196.300
JUMLAH ASET		217.867.807.578	175.410.219.647
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	3.802.023.480	12.085.588.376
JUMLAH KEWAJIBAN	E.K.	3.802.023.480	12.085.588.376
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	214.065.784.098	163.324.631.271
JUMLAH EKUITAS		214.065.784.098	163.324.631.271
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		217.867.807.578	175.410.219.647

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023	NAIK/TURUN	%
EKUITAS AWAL	E.1	163.324.631.271	147.233.168.165	16.091.463.106	10,93
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(457.339.970.813)	(375.739.758.544)	(81.600.212.269)	21,72
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI					
EKUITAS	E.3	(1.639.438.791)	(439.882.261)	(1.199.556.530)	272,70
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	430.650	(430.650)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	(662.758.740)	(440.312.911)	(222.445.829)	50,52
Koreksi Lain-lain	E.3.3	(976.680.051)	0	(976.680.051)	C
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	509.720.562.431	392.271.103.911	117.449.458.520	29,94
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	50.741.152.827	16.091.463.106	34.649.689.721	215,33
EKUITAS AKHIR	E.6	214.065.784.098	163.324.631.271	50.741.152.827	31,1

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Desember 2024 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Repolik moon Widyantini

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	289.632.940
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		0	289.632.940
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	145.347.317.028	124.252.951.905
Beban Persediaan	D.3	4.370.300.511	4.386.805.430
Beban Barang dan Jasa	D.4	131.983.450.323	98.332.313.508
Beban Pemeliharaan	D.5	13.007.938.923	11.956.601.748
Beban Perjalanan Dinas	D.6	134.985.384.602	115.149.970.547
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	30.071.501.234	22.299.622.630
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	2.438.516	0
JUMLAH BEBAN		459.768.331.137	376.378.265.768
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.9	(459.768.331.137)	(376.088.632.828)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET			
Pendapatan Pelepasan Aset		1,433,000,000	284.182.998
Beban Pelepasan Aset		155.784.540	46,105,344
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET		1.277.215.460	238.077.654
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON			
OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.186.319.364	114.796.630
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		35,174,500	4,000,000
The state of the s		33.174.300	4.000.000
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.151.144.864	110.796.630
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10	2.428.360.324	348.874.284
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(457.339.970.813)	(375.739.758.544)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(457.339.970.813)	(375.739.758.544)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Desember 2024 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Rini Widyantini

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	289.632.940
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		0	289.632.940
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	145,347,317,028	124.252.951.905
Beban Persediaan	D.3	4.370.300.511	4.386,805,430
Beban Barang dan Jasa	D.4	131.983.450.323	98.332.313.508
Beban Pemeliharaan	D.5	13.007.938.923	11.956.601.748
Beban Perjalanan Dinas	D.6	134.985.384.602	115.149.970.547
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	30.071.501.234	22.299.622.630
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	2.438.516	0
JUMLAH BEBAN	0,0	459.768.331.137	376.378.265.768
JOMEAN BEDAN		(459,768.331.137)	(376.088.632.828)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.9	(433,700,331,137)	(370.000.032.020)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET			
Pendapatan Pelepasan Aset		1.433.000.000	284.182.998
Beban Pelepasan Aset	A M	155.784.540	46.105.344
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET		1.277.215.460	238.077.654
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON			
OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.186.319.364	114.796.630
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		35.174.500	4.000.000
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.151.144.864	110.796.630
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10	2.428.360.324	348.874.284
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0.10	(457.339.970.813)	(375.739.758.544)
SORPLOS/DEPISIT SEDELUM POS LOAR BIASA			
POS LUAR BIASA		AND MARKET OF THE PARKET	
Beban Luar Blasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(457.339.970.813)	(375.739.758.544)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

> Jakarta, Desember 2024 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

VOLIK INDONESINI Widyantini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	2024	2023	NAIK/TURUN	%
EKUITAS AWAL	E.1	163.324.631.271	147.233.168.165	16.091.463.106	10,93
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(457.339.970.813)	(375.739.758.544)	(81.600.212.269)	21,72
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI					
EKUITAS	E.3	(1.639.438.791)	(439.882,261)	(1.199.556.530)	272,70
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	430.650	(430.650)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	(662.758.740)	(440.312.911)	(222.445.829)	50,52
Koreksi Lain-lain	E.3.3	(976.680.051)	0	(976.680.051)	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	509.720.562.431	392.271.103.911	117.449.458.520	29,94
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	50.741.152.827	16.091.463.106	34.649.689.721	215,33
EKUITAS AKHIR	E.6	214.065.784.098	163.324.631.271	50.741.152.827	31,1

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Desember 2024 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Rini Widyantini

Profil dan Kebijakan Teknis

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai salah satu Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan Pemerintahan Kementerian PANRB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian PANRB ditetapkan sebagai Bagian Anggaran 048 menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sejak TA 2017, jumlah satuan kerja (satker) pada Kementerian PANRB bertambah menjadi 2 (dua) satker yaitu satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan kode Satker 427950 dan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kode satker 015416. Laporan Keuangan ini merupakan laporan keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan kedua satker tersebut.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, maka pada tanggal 23 Agustus 2024 tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara telah secara hukum berhenti dan seluruh tugasnya dialihkan ke Kementerian PANRB serta BKN.

Oleh karena itu, pelaporan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara (015416) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga ini hanya menyangkut pelaporan Satker KASN hingga proses likuidasi selesai yaitu pada Bulan Oktober 2024 dan tergabung dalam Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Triwulan III 2024.

A.1.1 Profil dan Kebijakan Teknis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

Cikal bakal dasar hukum pembentukan Kementerian PANRB adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN) yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 1959. BAPEKAN merupakan Lembaga negara pertama yang mengurusi urusan pendayagunaan aparatur negara yang dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan setingkat Menteri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam rangka memperkuat tugas BAPEKAN, pada tahun 1960 pemerintah membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Selanjutnya pada tahun 1966 pemerintahan Orde Baru membentuk Panitia Pembantu Presiden yang kemudian diberi nama Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah atau disebut dengan Tim PAAP dan Panitia Koordinasi Efisiensi Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintah atau Proyek 13 yang kemudian diubah menjadi Sektor Penyempurnaan dan Penertiban Administrasi Negara atau Sektor Publik.

Walaupun pada tanggal 5 Mei 1962 BAPEKAN dibubarkan, namun BAPEKAN telah tercatat dalam sejarah menjadi akar lahirnya nomenklatur Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara atau Menpan pada tahun 1968. Dengan pembentukan Menpan, Tim PAAP dan Sekretariat Sektor P dilebur ke dalam Menpan. Sejarah nomenklatur Menpan sudah beberapa kali diubah, terakhir berganti nama menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sejak tahun 2009 seiring ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Penetapan Perpres tersebut dimaksudkan oleh Presiden sebagai penguatan peran dan tanggung jawab untuk lebih mengoptimalisasikan implementasi Reformasi Birokrasi sebagai salah satu agenda strategis kenegaraan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, satker Menpan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. satker Menpan berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, satker Menpan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia aparatur dan manajemen aparatur sipil negara, kebijakan pengawasan penerapan sistem merit, serta pelaksanaan kebijakan aparatur sipil negara;
- d) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;
- e) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- f) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB;
- g) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB.

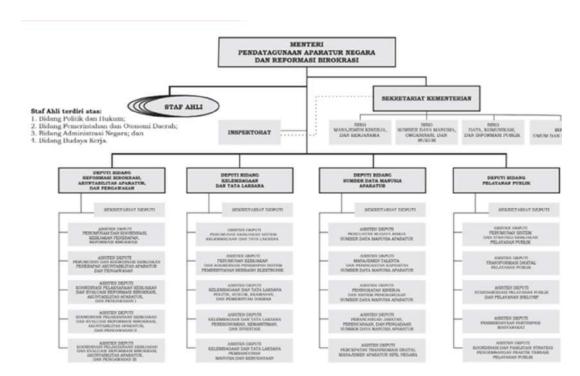
Selanjutnya sesuai dengan arahan dari Menteri PPN/Bappenas, maka untuk penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Visi Kementerian PANRB adalah "Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong". Sedangkan Kementerian PANRB melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian sebagai berikut:

- Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik *digital bureaucracy*.
- Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
- Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
- Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
- Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Visi dan Misi Kementerian PANRB tersebut disusun dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Renstra tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Presiden Nomor

18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Struktur Organisasi satker Menpan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian PANRB

Nilai-nilai budaya Kementerian PANRB sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara adalah BerAKHLAK dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- 2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
- 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

A.1.2 Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai salah satu Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan Pemerintahan Kementerian PANRB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian PANRB ditetapkan sebagai Bagian Anggaran 048 menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sejak TA 2017, jumlah satuan kerja (satker) pada Kementerian PANRB bertambah menjadi 2 (dua) satker yaitu satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan kode Satker 427950 dan Satker Komisi Aparatur Sipil Negara dengan kode satker 015416. Laporan Keuangan ini merupakan laporan keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan kedua satker tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Tugas, fungsi dan wewenang KASN tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Ketua KASN Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KASN. Dalam Perka tersebut telah ditentukan penetapan kelompok kerja berdasarkan bidang pengawasan KASN, yang meliputi:

- a) Pengawasan Penerapan Sistem Merit
- b) Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

c) Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN.

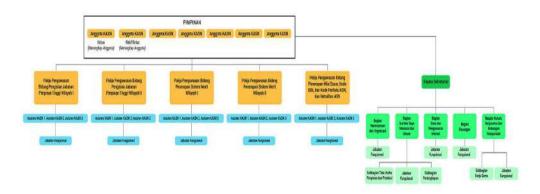
Penetapan kelompok kerja berdasarkan bidang pengawasan dikombinasikan dengan lingkup wilayah instansi pemerintah yakni instansi pemerintah kementerian/lembaga dalam lingkup: bidang politik, hukum dan keamanan; bidang perekonomian; bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan bidang kemaritiman dan investasi; serta lingkup pengawasan wilayah provinsi termasuk di dalamnya wilayah kabupaten/kota dalam lingkup wilayah provinsi tersebut dengan mempertimbangkan wilayah kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan tugas tersebut, sesuai penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan KASN, Anggota KASN ditugaskan sebagai koordinator pengawasan, dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I;
- 2. Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II;
- Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I;
- Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II; dan
- Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

Masing-masing Kelompok Kerja didukung oleh Asisten KASN dan pejabat fungsional. KASN dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Sekretariat KASN memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Anggota KASN, dan melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem serta menyelenggarakan fungsi kehumasan.

Gambar 1: Struktur Organisasi KASN



Visi KASN adalah mendukung visi Presiden RI melalui terwujudnya ASN kelas dunia, sedangkan Misi KASN adalah mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN dan melaksanakan tata kelola KASN yang mandiri, profesional, dan akuntabel.

Pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, maka pada tanggal 23 Agustus 2024 tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara telah secara hukum resmi berhenti dan seluruh tugasnya dialihkan ke Kementerian PANRB serta BKN.

Pengalihan atas pendanaan, pegawai, barang milik/kekayaan negara, dan dokumen pada Sekretariat KASN dialihkan ke Kementerian PANRB dengan tenggat waktu penyelesaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 23 Agustus 2024. Terkait dengan proses Likuidasi Satuan Kerja KASN telah dilaksanakan seluruhnya dan Penyampaian laporan ini mencerminkan bahwa seluruh hak dan kewajiban telah diperhitungkan sesuai dengan kondisi keuangan terkini.

Sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun, seluruh proses pengalihan dari KASN ke Kementerian PANRB telah selesai dilaksanakan, selanjutnya akan dilakukan proses pengalihan dari Kementerian PANRB ke BKN.

Program Prioritas Nasional Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 pada Kementerian PANRB

terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada:

- Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pelaksanaannya
- 2. Prioritas Nasional VII Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rincian Capaian Output per Prioritas Nasional dikelola dalam dokumen manajerial pada Kementerian PANRB yang digunakan dalam rangka proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.

Capaian
Output
Proyek
Prioritas
Nasional

Program Prioritas Nasional Komisi Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- 1. Prioritas Nasional 04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 2. Prioritas Nasional 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Analisa capaian kinerja dan anggaran terdapat dalam tabel 6 Laporan Keuangan ini, adapun analisa pencapaian dan permasalahan atas capaian output Prioritas Nasional KASN Tahun 2024 diatas adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah

Sampai dengan 23 Agustus 2024 KASN telah melakukan penetapan Nilai Sistem merit terhadap 65 Lembaga. Penetapan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pleno Penetapan hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit yang telah terlaksana pada 29 April 2024 dengan melibatkan instansi paguyuban ASN yakni Kementerian PANRB, BKN, dan LAN. Berdasarkan hasil pleno tersebut telah ditetapkan dengan rincian yakni: 3 LPNK, 1 Lembaga Negara, 1 LNS, 12 Provinsi dan 46 Kab/Kota.

Adapun rincian jumlah instansi yang ditetapkan berdasarkan pengkategorian hasil penilaian sebagai berikut:

- Kategori Sangat Baik: 2 LPNK, 1 Lembaga Negara, 2 Provinsi dan 4 Kab/Kota
- Kategori Baik: 1 LPNK, 1 LNS, 7 Provinsi dan 13 Kab/Kota
- Kategori Kurang: 1 Provinsi, 9 Kab/Kota
- Kategori Buruk: 2 Provinsi, 22 Kab/Kota

Jika dilihat berdasarkan capaian tersebut, jumlah capaian IP yang ditetapkan KASN lebih besar daripada target yang direncanakan KASN pada periode Januari-April 2024. Hal ini disebabkan oleh, target yang disusun merupakan fokus penyelesaian tugas KASN untuk melakukan penilaian baru terhadap 30 IP yang belum dinilai sistem meritnya sebagaimana target populasi dalam RPJMN 2020-2024 dan 7 IP yang akan ditargetkan untuk meningkat nilai sistem meritnya pada kategori baik ke atas. Sedangkan 26 IP lainnya diluar target Januari-April 2024, merupakan IP yang dilakukan monev atas penilaian di tahun sebelumnya yang juga ditetapkan pada pleno April 2024 ini.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target, sebagai berikut:

- a) Pemetaan terhadap 37 Lembaga Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan dilakukan penilaian penerapan sistem merit tahun 2024. 37 IP ini merupakan IP yang ditargetkan untuk dilakukan penilaian baru dan peningkatan baik ke atas mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024 pada periode Januari-April 2024.
- b) Menyelesaikan proses verifikasi penilaian mandiri penerapan sistem merit pada
 63 instansi pemerintah.

2. Evaluasi Penerapan Talent Committee dan Succession Committee di Instansi Pemerintah

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka kegiatan ini tidak dilaksanakan karena bukan merupakan kegiatan prioritas dalam pelaksanaan kinerja KASN periode Januari-April 2024. KASN berfokus pada penyelesaian pencapaian target RPJMN 2020-2024.

3. Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Sampai 23 Agustus 2024, KASN menerima 72 ASN yang diadukan atas dugaan pelanggaran NKK, dimana 69 ASN (96%) telah diselesaikan prosesnya yang menghasilkan 36 ASN (52%) terbukti melanggar dan diberikan rekomendasi kepada PPK, dan 33 ASN (48%) tidak terbukti melanggar dan diberikan surat jawaban kepada pelapor. Selanjutnya, dari 36 ASN yang direkomendasikan tersebut, terdapat 15 ASN (42%) yang telah dijatuhkan sanksi oleh PPK.

4. Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Sampai dengan Triwulan I KASN dalam rangka melaksanakan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KASN telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terdiri dari:

1) Kegiatan Pencegahan yang terdiri dari:

- a) Rapat Satgas Netralitas ASN pada tanggal 23 Februari 2024 dan 15
 Maret 2024
- b) Webinar Netralitas ASN pada tanggal 6 Februari 2024 dengan tema "Pemilu Semakin Dekat, Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Nekat" dan Webinar 3 April 2024 dengan tema "Belajar dari Pemilu 2024 menuju Pilkada Serentak 2024"
- c) Advertorial Netralitas ASN: Finalisasi storyboard video advertorial. KASN telah menyiapkan surat kepada setiap instansi pemerintah yang memuat himbauan untuk mensosialisasikan video advertorial tersebut agar informasinya dapat diketahui oleh ASN secara luas. Video advertorial ini juga direncanakan akan ditayangkan di beberapa media iklan yang lebih strategis melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga penyiaran.

2) Pelaksanaan Survei Nasional Netralitas ASN

Kegiatan evaluasi pengawasan netralitas ASN dilaksanakan melalui kegiatan survei nasional netralitas ASN. Pengambilan data dari responden dilakukan pada tanggal 1 s.d. 31 Maret 2024. Adapun responden dari survei ini adalah ASN dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berjumlah 70.209 responden. Distribusi form survei disampaikan secara resmi melalui surat Ketua KASN Nomor B-822/NK.02.03/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal Survei Nasional Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

3) Penyusunan Policy Brief Pengawasan Penerapan Netralitas ASN

Telah dilakukan kerjasama antara KASN dengan STIA LAN dalam penyusunan *Policy Brief*, dan telah selesai dilakukan finalisasi 2 policy brief (*Policy Brief* Pengawasan Penerapan NKK ASN dan *Policy Brief* Pengawasan Penerapan Netralitas ASN).

5. Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Sampai 23 Agustus 2024, KASN menerima 523 ASN yang diadukan atas dugaan pelanggaran Netralitas, dimana 416 ASN (80%) telah diselesaikan prosesnya yang

menghasilkan 320 ASN (77%) terbukti melanggar dan diberikan rekomendasi kepada PPK, dan 96 ASN (23%) tidak terbukti melanggar dan diberikan surat jawaban kepada pelapor. Selanjutnya, dari 320 ASN yang direkomendasikan tersebut, terdapat 187 ASN (59%) yang telah dijatuhkan sanksi oleh PPK.

Pendekat an Penyusu nan Laporan Keuanga n

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2024 *Unaudited* disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). Laporan Keuangan ini mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PANRB.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada triwulan IV tahun 2019 satuan kerja lingkup Kementerian PANRB mulai mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK. 05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem

perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Kementerian PANRB Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari satker Menpan dan KASN sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

A.2.1. Dasar Hukum dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; Sehubungan dengan telah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang mulai berlakunya tanggal 21 Juni 2023 dan sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, dihimbau

untuk seluruh satuan kerja Kementerian/ Lembaga termasuk Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tidak lagi menggunakan akun belanja khusus COVID-19 mulai Triwulan IIII tahun 2023 dan melakukan revisi/ koreksi dokumen sumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal revisi/koreksi dokumen sumber tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat alasan dan pertimbangan tertentu, agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
- 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
- 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023;
- 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
- 36. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.06/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat:
- 37. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2022 tentang Perubahan Kesebelas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 43. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 44. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 45. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI;
- 46. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tentang Penggunaan Akun Khusus Covid-19.
- 47. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5/PB/PB.6/2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukur an

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

A.5.1 Pendapatan

Pendapat an-LRA

1) Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas negara yang tidak berasal dari pendapatan pajak pusat dan/ atau pendapatan hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- c. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
 - Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- d. Pendapatan Perpajakan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- e. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- f. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pendapat an-LO

(2) Pendapatan - LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara umum pengakuan Pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Pengembalian Belanja Barang/Modal Tahun Anggaran
 Yang Lalu
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat Keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.
- e. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

- f. Pendapatan PNBP-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan PNBP yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- g. Pengakuan Pendapatan– LO lainnya:
- Pendapatan PNBP-LO lainnya yang berasal dari keuantungan penjualan asset diakui pada saat diterima oleh entitas.
- Pendapatan PNNP-LO yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas.
- Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat diterima oleh entitas.
- Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.
- Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkhract) diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan.
- Pendapatan PNBP-LO yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

Belanja A.5.2 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).
- Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Beban A.5.3 Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Beban dibedakan sesuai dengan jenis beban, antara lain:

- a. Pengukuran Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Pengukuran Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Pengukuran Beban Barang dan Jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d. Pengukuran Beban Pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
- e. Pengukuran Beban Perjalanan Dinas dicatat sebesar resume tagihan helanja perjalanan dinas dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
- f. Pengukuran Beban Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- g. Pengukuran Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan

memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Aset A.5.4 Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

A.5.4.1 Aset Lancar

- a. Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
- c. Kas dan Setara Kas diakui pada saat: (1) Memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan (2) Penguasaan dan/ atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.
- d. Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian.
- e. Kas dan Setara Kas diungkapkan secara memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- f. Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- g. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

h. Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga) diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 1: Perlakuan Akuntansi Atas Saldo pada Rekening Lainnya

N		Pasangan	Rekening
О.	Kondisi	Jurnal	Lainnya
1.	Terdapat saldo kas	Penerimaan	Rekening
	pada tanggal	Kembali	Penyaluran
	pelaporan yang	Belanja TAYL	Dana Bantuan
	harus disetorkan ke		
	kas negara dan		
	merupakan hak		
	pemerintah yang		
	berasal dari belanja		
	TAYL		
2.	Terdapat saldo kas	Beban	
	pada tanggal		
	pelaporan yang harus		
	disetorkan ke kas		
	negara dan		
	merupakan hak		
	pemerintah yang		
	berasal dari belanja		
	TAB		
3.	Terdapat saldo dana	Utang	Rekening
	yang tidak lagi	Kepada Pihak	Penampungan
	dipergunakan untuk	Ketiga	Dana
	kegiatan kerjasama/	Lainnya	Kerjasama/
	kemitraan dan		Kemitraan
	menurut perjanjian		
	harus dikembalikan		
	kepada pihak pemberi		
	dana Kerjasama/		
	kemitraan		
4.	Terdapat saldo dana	Utang	

	vona mooih akan	Kanada Dihak	
	yang masih akan	Kepada Pihak	
	dibayarkan oleh pihak	Ketiga	
	penerima dana	Lainnya	
	kepada pihak ketiga		
	(penyedia		
	barang/jasa)		
	berdasarkan tagihan		
	yang telah dilakukan		
	verifikasi oleh pejabat		
	yang berwenang		
5.	Terdapat saldo dana	Pendapatan	
	yang tidak	PNBP	
	dipergunakan untuk	Lainnya	
	kegiatan kerjasama/	(dicatat oleh	
	kemitraan dan akan	K/L Penerima	
	disetorkan ke kas	Dana	
	negara	Kerjasama/	
		Kemitraan)	
	Terdapat saldo kas	Dana Pihak	Rekening
	yang belum terdapat	Ketiga (Untuk	Penampungan
	kepastian	alasan	Dana Titipan,
	sepenuhnya dapat	kepraktisan,	Rekening
	diakui sebagai hak	maka K/L	Penampungan
	pemerintah dan	mengakui	Dana Jaminan,
	berdasarkan	sebagai Dana	Rekening
	ketentuan masih	Pihak Ketiga)	Penampungan
	mungkin		Sementara
	dikembalikan kepada		
	pihak pemilik dana		
	Terdapat saldo kas	Pendapatan	
	yang telah dapat	PNBP	
	diakui sebagai hak	Lainnya	
	pemerintah dan akan		
	disetorkan ke kas		
	negara		
	<u> </u>		

i. Kas Lainnya di Bendahara pengeluaran dapat juga berupa bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Perlakuan akuntansi untuk Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Perlakuan Akuntansi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No.	Kondisi	Pasangan Jurnal
1.	Kas lainnya berupa bunga, jasa giro yang belum disetor ke kas negara	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
2.	Kas lainnya berupa pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi belum disetor ke kas negara	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
3.	Kas lainnya berupa uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan	Utang Kepada Pihak Ketiga

- j. Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.
- k. Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak

dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

m. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan usaha penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 3: Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisih an
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- n. Piutang yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi menjadi Piutang Jangka Panjang Lainnya pada pos Piutang Jangka Panjang.
- o. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau bagian lancar TPA.

Persedia

A.5.4.2 Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan diakui pada saat:
- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
- c. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
- d. Persediaan diukur sebesar:
- 1) Biaya perolehan digunakan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
- Harga pembelian;
- Biaya pengangkutan;
- Biaya penanganan; dan
- > Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan

- Potongan harga; dan
- Rabat, dan lainnya yang serupa.
- 2) Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
- 3) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.

- e. Dalam mencatat Persediaan, pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.
- f. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.
- g. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan minimal setiap akhir semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.
- h. Nilai Pesediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- > Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset A.5.4.3 Aset Tetap

Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah:
- Berwujud
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- > Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- c. Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- d. Pengakuan Aset Tetap sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara didasarkan pada nilai

satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- e. Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/ atau hak kepemilikannya berpindah.
- f. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap
- g. Pengukuran aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- h. Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusut an Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenanganannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan
- Aset Tetap Renovasi berupa Tanah
- Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

A.5.4.4 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka Panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka Panjang. Aset lainnya antara lain Aset tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Kas yang dibatasi penggunaannya, uang muka rekening BUN dan Aset Lain lain.
- b. Aset Tak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

- c. Aset Tak Berwujud (ATB) diakui jika syarat berikut ini terpenuhi, yaitu:
- dapat diidentifikasi;
- dikendalikan, dikuasasi, atau dimiliki oleh entitas;
- kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
- d. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- e. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- f. ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- g. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri atas:
- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- h. ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar-benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun,

dan metode unit produksi. Dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai BUN memutuskan kebijakan akuntansi Amortisasi adalah Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- i. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
- Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, penghapusan.
- j. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi	50

Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser	
Fonogram	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- k. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga
- I. Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- m. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- n. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundangundangan.
- o. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Ekuitas A.6 Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

c. Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Capaian RO Prioritas Nasional Kementerian PANRB Tahun 2024

Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.dari 20 Rincian Output yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut: Prioritas Nasional VII— Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 4 (empat) kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp66.230.744.000,- dan realisasi sebesar Rp59.230.542.694,- dengan rincian sebagai berikut: Kementerian/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Satker: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Satker: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi

No	ВА	Nama BA	Kode PN	<u>Uraian</u> PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	<u>Urajan</u> RO	<u>Satuan</u> RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RQ	Realisasi Volume RO	%	Keterangan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
et	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	8	4350	UAB	1004	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	Laxenan	3.490.000.000	2.670.341.967	76,51	7	8	114,29	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan IRA (Realisasi Net: Rp3.159.267.868) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
2	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	8	6189	PBL	1004	Pembanguna n alat ukur Birokrasi Berkelas Dunia	<u>Rekomendasi</u> Kebijakan	2.856.700.000	2.357.817.533	82,54	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp2.536.832.846) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
э	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6190	UAE	'001	Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	Laporan	2.002.000.000	1.919.234.642	95,87	98.000	92.932	94,83	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan IRA (Realisasi Net: Rp1.939.506.143) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
4	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	CO	6191	PEA	'001	Koordinasi percepatan pelaksanaan kebijakan RB Nasional	Keziatan	6.778.000.000	6.232.631.148	91,95	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp6.374.155.338) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
5	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	со	6192	PEA	'001	Koordinasi Percepatan Implementas	Kegiatan.	4.582.694.000	3.143.584.229	68,6	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara

No	ВА	Nama BA	Kode PN	<u>Uraian</u> PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	<u>Uraian</u> RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Bealisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		dan Transformasi Pelayanan Publik					i Kebijakan SPBE								Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp3.709.478.112) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
6	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6193	PBL	'001	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam	<u>Rekomendasi</u> Kebijakan	625.000.000	578.591.944	92,57	2	2	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp619.625.369) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
7	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6193	PBL	'002	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Perekonomia n, Kemaritiman dan Investasi	Rekomendasi Kebijakan	625.000.000	493.300.951	78,93	3	3	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
8	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6193	PBL	'003	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Pembanguna n Manusia dan Kebudayaan	Rekomendasi Kebijakan	625.000.000	521.697.000	95,01	3	3	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
9	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	8	6194	UAI	'008	Fasilitasi Penerapan Pembelajara n Terintegrasi melalui Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN	Lembaga	3.100.000.000	2.850.748.613	91,96	138	183	132,61	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya . Realisasi Volume RO melebihi dari

No	BA	Nama BA	Kode PN	<u>Uraian</u> PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	<u>Uraian</u> RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Target Volume RO dikarenakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah secara sistem.
10	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	8	6194	UAI	'007	Piloting Persiapan Penerapan Manajemen Penghargaan ASN Berbasis Kinerja	Lembaga	5.400.000.000	5.173.707.277	95,81	10	12	120,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya . Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah secara sistem.
11	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6194	UAI	'005	Penguatan Budaya Kerja ASN	Lembaga	3.000.000	2.701.870.834	90,06	624	627	100,48	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya . Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO

No	ва	Nama BA	Kode PN	<u>Uraian</u> PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	<u>Uraian</u> RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	tidak dapat dirubah secara sistem.
12	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	'006	Fasilitasi Penerapan Manajemen Talenta ASN	Lembaga	3.600.000.000	3.291.757.800	91,44	138	138	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
13	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	'003	Koordinasi Piloting Implementas i Pengadaan CASN yang Fleksibel	Lembaga	8.700.000.000	7.586.177.076	87,20	10	14	140,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya. Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah secara sistem.
14	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	1004	Fasilitasi Penerapan Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN	Lembaga	12.500.000.000	12.338.233.659	98.71	138	194	140,58	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi

No	ва	Nama BA	Kode PN	<u>Uraian</u> PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	<u>Uraian</u> RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah secara sistem.
15	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6195	UAB	'001	Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS)	Sistem Informasi	1.750.000.000	1.579.148.148	90,24	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp1.731.090.685) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
16	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6195	UAI	1003	Peningkatan Penerapan MPP Digital	Pemda	3.000.000.000	2.188.872.024	72,96	25	25	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
17	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6196	QIC	1001	Penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah	Lembaga	2.098.918.000	2.105.404.626	100,31	65	65	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
18	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6198	UAE	1003	Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelengga raan Pemillu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Laperan.	548.382.000	548.378.669	100,00	320	320	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp545.568.720) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
19	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	со	6198	UAE	'002	Pengawasan Netralitas Pegawai ASN	Lappran	649.051.000	649.048.470	100,00	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara

No	ВА	Nama BA	Kode PN	<u>Uraian</u> PN	Kode Program	Kode Kesiatan	Kode KRO	Kode RO	<u>Uraian</u> RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		dan Transformasi Pelayanan Publik					dalam Penyelengga raan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024								Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp647.786.014) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
20	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6198	UAE	'001	Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Lazeran.	299.999.000	299.996.084	100,00	36	36	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LPA (Realisasi Net: Rp297.047.696) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kementerian PANRB memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp466.641.906.000. Selama tahun 2024 telah dilakukan revisi/perubahan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi Rp450.466.107.000. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kebutuhan dan kondisi pada saat pelaksanaan. Rincian anggaran awal dan anggaran setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk periode Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6: Rincian Revisi DIPA TA 2024

(dalam rupiah)

	TA 2024		
Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
Anggaran Pendapatan			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	
Jumlah Anggaran Pendapatan	0	0	
Anggaran Belanja			
Belanja Pegawai	121.332.179.000	146.913.233.000	
Belanja Barang	316.319.480.000	247.584.204.000	
Belanja Modal	28.990.247.000	55.968.670.000	
Jumlah Anggaran Belanja	466.641.906.000	450.466.107.000	

Sedangkan rincian revisi DIPA Kementerian PANRB berdasarkan program untuk periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Rincian Revisi DIPA Berdasarkan Program TA 2024

(dalam rupiah)

		TA 2024			
Kode	Uraian	Anggaran	Anggaran Setelah Revisi		
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	197.870.699.000	151.070.901.000		
048.08.WA	Program Dukungan Manajemen	268.771.207.000	299.395.206.000		
Jumlah Ang	ggaran Belanja	466.641.906.000	450.466.107.000		

Adapun rincian revisi DIPA berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8: Rincian Revisi DIPA Satker KASN TA 2024

Jenis Revisi	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
DIPA Revisi	1	02-01-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	2	26-01-2024	88.592.207.000	Revisi DJA Pembukaan Blokir UU No.20/2023 dan Blokir Automatic Adjustment (AA) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023
DIPA Revisi	3	01-02-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	4	13-02-2024	88.592.207.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan I
DIPA Revisi	5	07-03-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	6	05-04-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	7	18-04-2024	88.592.207.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan II
DIPA Revisi	8	06-05-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	9	22-05-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	10	31-05-2024	88.592.207.000	Revisi Kanwil DJPb, Perbaikan Halaman III DIPA Triwulan II sesuai Surat Kepala KPPN Jakarta IV Nomor S-914/KPN.1204/2024
DIPA Revisi	11	25-06-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	12	12-07-2024	88.592.207.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan III
DIPA Revisi	13	30-07-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	14	06-08-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	15	12-08-2024	88.592.207.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	16	06-09-2024	66.263.535.000	Revisi DJA Pemindahan Pagu Blokir Automatic Adjustment (AA) satker KASN ke satker Menpan, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.2/2024

Tabel 9: Rincian Revisi DIPA Satker Menpan TA 2024

Jenis Revisi	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
DIPA Revisi	1	15-02-2024	378.049.699.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan I
DIPA Revisi	2	27-02-2024	378.049.699.000	Revisi DJA Pembukaan Blokir UU No. 20/2023 dan Blokir Automatic Adjustment (AA) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023
DIPA Revisi	3	20-03-2024	378.049.699.000	Revisi DJA Pembukaan Blokir SDMA (Pekerjaan Penyelenggaraan SPBE Prioritas Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara yang Terintegrasi dengan Layanan Dasar Kepegawaian) dan Kendaraan Dinas
DIPA Revisi	4	04-04-2024	378.049.699.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan II
DIPA Revisi	5	14-05-2024	378.049.699.000	Revisi DJA Optimalisasi Anggaran Kedeputian Pelayanan Publik direlokasi ke anggaran Biro Umum dan Keuangan dan Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik
DIPA Revisi	6	31-05-2024	378.049.699.000	Revisi Kanwil DJPb, Perbaikan Halaman III DIPA Triwulan II
DIPA Revisi	7	14-06-2024	378.049.699.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	8	05-07-2024	378.049.699.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan III
DIPA Revisi	9	13-08-2024	378.049.699.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	10	06-09-2024	400.378.371.000	Revisi DJA, Pemenuhan dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/MK.02/2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Usulan Pemanfaatan Blokir Automatic Adjustment Kementerian PANRB TA 2024, dan Pergeseran Anggaran Antar Satker
DIPA Revisi	11	26-09-2024	400.378.371.000	Revisi KPA
DIPA Revisi	12	13-10-2024	433.461.087.000	Revisi DJA, Pemenuhan dari Perpres No.91/2024 tentang Perubahan atas Perpres No.47/2021 tentang Kementerian PANRB dan Perpres No.92/2024 tentang Badan Kepegawaian Negara yang merupakan turunan dari UU No.20/2023 tetang ASN memuat peralihan tugas dan fungsi KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN & Pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan IV
DIPA Revisi	13	06-11-2024	433.461.087.000	Revisi DJA, Penghapusan RO 6194.AEA.007- Koordinasi Pelaksanaan Transformasi Kebijakan Standar Kompetensi ASN, Pergeseran anggaran dari sisa alokasi satker KASN yang tidak dialihkan ke BKN ke kebutuhan Menteri dan Wakil Menteri
DIPA Revisi	14	19-11-2024	423.999.423.000	Revisi DJA, Pergeseran anggaran berupa relokasi blokir anggaran dari BA Kementerian PANRB ke BA BUN Kementerian Keuangan, Penghapusan Sisa Pagu dan Volume satker KASN yang tidak diusulkan oleh BKN
DIPA Revisi	15	22-11-2024	423.999.423.000	Revisi Kanwil DJPb, Pemenuhan dari Surat Menteri Keuangan Nomor S- 1023/MK.02/2024 hal Penghematan Belanja Perjalanan Dinas
DIPA Revisi	16	29-11-2024	417.285.288.000	Revisi DJA, Pergeseran Anggaran BA Kementerian PANRB ke BA BUN Kementerian Keuangan
				B 1115B4
DIPA Revisi	17	04-12-2024	417.285.288.000	Revisi KPA

Realisasi Pendapatan Rp1.711.574.797

B.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp1.711.574.797. Pendapatan di lingkup Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Penyelesaian Piutang dan Penerimaan Kembali Belanja TAYL dengan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Urajan	TA 2024			
Akun	Oralan	Anggaran	Realisasi	%	
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	-	1.433.000.000	100	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	-	86.371.670	100	
4259	Pendapatan Lain-lain	-	192.203.127	100	
Jumlah Pendapatan		-	1.711.574.797	100	

Kementerian PANRB bukan merupakan instansi pengelola PNBP atau penerima PNBP khusus. Pendapatan yang diterima Kementerian PANRB merupakan pendapatan yang bersifat tidak terencana dan tidak pasti (tentatif dan insidental). Pendapatan Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 sebesar Rp1.711.574.797 tersebut tersebar pada 2 (dua) satuan kerja yaitu satker Menpan dan satker KASN dengan rincian anggaran dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 11: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 (dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	•	100
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	1.711.574.797	100
Jumlah F	Pendapatan	-	1.711.574.797	100

Adapun rincian perbandingan realisasi pendapatan untuk periode TA 2024 dan TA 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.433.000.000	284.182.998	404,25
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	86.371.670	<u>-</u>	100,00
4258	Pendapatan Denda	-	333.732.186	(100)
4259	Pendapatan Lain-lain	192.203.127	193.339.224	(0,59)
Jumlah I	Pendapatan	1.711.574.797	811.254.408	110,98

Sedangkan rincian perbandingan realisasi pendapatan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	408.652.693	(100,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.711.574.797	402.601.715	325,13
Jumlah F	Pendapatan	1.711.574.797	811.254.408	110,98

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Rp1.433.000.000

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (Kelompok Akun 4251)

Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp1.433.000.000. Pendapatan PNBP dari kelompok akun 4251 pada Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 terdapat pada akun Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122).

Realisasi PNBP dari kelompok akun 4251 untuk periode TA 2024 merupakan hasil bersih Lelang aset Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

- Risalah Lelang (RL) 433/0705/2024-01 satker Menpan, pelelang Budi Satrio sebesar Rp1.276.000.000 dengan bukti setor NTPN 62ECD1JNFVELNFRV tanggal 18 September 2024.
- RL 530/07.05/2024-01 satker Menpan, pelelang Ranisa Astria sebesar Rp157.000.000 dengan bukti setor NTPN E0A437QLUPIM3PB7 tanggal 30 Oktober 2024.

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4251 untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 14: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4251 TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
425122	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	1.433.000.000	284.182.998	404,25
Jumlah F	Pendapatan Akun 4251	1.433.000.000	284.182.998	404,25

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4251 untuk periode TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 404,25 persen bila dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas kegiatan lelang aset yang sudah rusak, tidak digunakan lagi dan melebihi masa manfaat aset.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4251 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4251 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-		-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.433.000.000	284.182.998	404,25
	Jumlah Pendapatan Akun 4251	1.433.000.000	284.182.998	404,25

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan Rp86.371.670

B.1.2 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (Kelompok Akun 4257)

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp86.371.670. Pendapatan PNBP dari kelompok akun 4257 pada Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 terdapat pada akun Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai (425791) dan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (425792).

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4257 untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4257 TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	68.189.852	-	100
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	18.181.818	-	100
Jumlah F	Pendapatan Akun 4257	86.371.670	-	100

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4257 untuk periode TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh pada TA 2024 terdapat penyetoran pendapatan penyelesaian ganti rugi baik dari pegawai atas Piutang Lainnya dan ganti rugi dari Bendahara atas Piutang TP/TGR.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4257 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4257 Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	86.371.670	-	100
Jumlah F	Pendapatan Akun 4257	86.371.670	-	100

Realisasi Pendapatan Denda Rp0

B.1.3 Pendapatan Denda (Kelompok Akun 4258)

Realisasi Pendapatan Denda untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp0. Pendapatan PNBP dari kelompok akun 4258 pada Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 terdapat pada akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811).

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBP dari kelompok akun 4258 untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4258 TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	333.732.186	(100)
Jumlah F	Pendapatan Akun 4258	•	333.732.186	(100)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4258 untuk periode TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh pada TA 2024 tidak terjadi wanprestasi atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4258 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4258 Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2024 dan TA 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	333.732.186	(100)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	-	-
Jumlah F	Pendapatan Akun 4258	-	333.732.186	(100)

Realisasi Pendapatan Lain-lain Rp192.203.127

B.1.4 Pendapatan Lain-lain (Kelompok Akun 4259)

Realisasi Pendapatan Lain-lain untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp192.203.127. Pendapatan PNBP dari kelompok akun 4259 pada Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 terdapat pada akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911), Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) dan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913).

Adapun rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4259 untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4259 TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.187.150	95.498.750	(98,76)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	180.364.969	14.277.635	1.163,27
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	10.651.008	83.542.839	(87,25)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	20.000	(100)
Jumlah F	Pendapatan Akun 4259	192.203.127	193.339.224	(0,59)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan dari Kelompok Akun 4259 untuk periode TA 2024 mengalami penurunan sebesar 0,59 persen bila dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dari pengembalian belanja atas belanja pegawai dan belanja modal yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi PNBP kelompok akun 4259 berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21: Rincian Perbandingan Realisasi PNBP Kelompok Akun 4259 Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	•	74.920.507	(100)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	192.203.127	118.418.717	62,31
Jumlah Pendapatan Akun 4259		192.203.127	193.339.224	(0,59)

Realisasi Belanja Rp433.338,930.871

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp433.338.930.871 atau 96,20% dari anggaran belanja sebesar Rp450.466.107.000 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp1.054.946.102. Keseluruhan belanja di Kementerian PANRB berasal dari belanja Rupiah Murni.

Belanja Kementerian PANRB menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

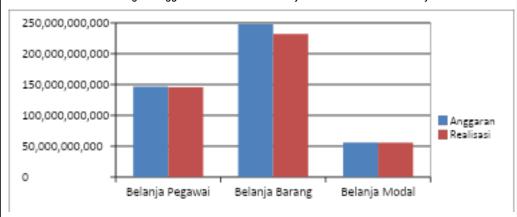
Tabel 22: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			
Oralan	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	146.913.233.000	145.449.782.391	99,00	
Belanja Barang	247.584.204.000	233.195.975.356	94,19	
Belanja Modal	55.968.670.000	55.748.119.226	99,61	
Jumlah Belanja Kotor	450.466.107.000	434.393.876.973	96,43	
Pengembalian Belanja	-	(1.054.946.102)	100	
Jumlah Belanja	450.466.107.000	433.338.930.871	96,20	

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode TA 2024 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1: Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2024



Rincian anggaran dan realiasi belanja berdasarkan program untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2024

Kode	Urajan	TA 2024		
Rode Oralan		Anggaran	Realisasi	%
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	151.070.901.000	140.747.340.102	93,17
048.08.WA	Program Dukungan Manajemen	299.395.206.000	292.591.590.769	97,73
Jumlah Belanja		450.466.107.000	433.338.930.871	96,20

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	33.180.819.000	33.097.549.032	99,75
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	417.285.288.000	400.241.381.839	95,92
Jumlah E	3elanja	450.466.107.000	433.338.930.871	96,20

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker KASN TA 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2024			
Oralan	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	15.192.161.000	15.192.151.361	100,00	
Belanja Barang	17.940.169.000	17.980.771.463	100,23	
Belanja Modal	48.489.000	48.487.200	100,00	
Jumlah Belanja Kotor	33.180.819.000	33.221.410.024	100,12	
Pengembalian Belanja	-	(123.860.992)	100	
Jumlah Belanja	33.180.819.000	33.097.549.032	99,75	

Tabel 26: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satker Menpan TA 2024

Urajan	TA 2024			
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	131.721.072.000	130.257.631.030	98,89	
Belanja Barang	229.644.035.000	215.215.203.893	93,72	
Belanja Modal	55.920.181.000	55.699.632.026	99,61	
Jumlah Belanja Kotor	417.285.288.000	401.172.466.949	96,14	
Pengembalian Belanja	-	(931.085.110)	100	
Jumlah Belanja	417.285.288.000	400.241.381.839	95,92	

Rincian perbandingan realisasi belanja untuk periode TA 2024 dan TA 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 27: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Pegawai	145.334.254.028	124.396.635.905	16,83
Belanja Barang	232.266.903.912	209.390.097.898	10,93
Belanja Modal	55.737.772.931	34.058.084.850	63,66
Jumlah Belanja	433.338.930.871	367.844.818.653	17,80

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja pada Desember TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,80% dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Analisa peningkatan/penurunan secara detil akan dijelaskan pada sub judul per masing-masing realisasi jenis belanja.

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	33.097.549.032	52.607.509.465	(37,09)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	400.241.381.839	315.237.309.188	26,97
Jumlah E	Belanja	433.338.930.871	367.844.818.653	17,80

Realisasi Belanja Pegawai Rp145.334.254.028

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp145.334.254.028 atau 98.93 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp146.913.233.000 setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai sebesar Rp115.528.363. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk periode TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2024		
		Anggaran	Realisasi	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.488.737.000	47.358.333.307	99,73
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	525.318.000	514.816.390	98,00
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.329.125.000	4.311.424.067	99,59
5121	Belanja Honorarium	6.261.389.000	6.224.005.313	99,40
5122	Belanja Lembur	1.327.069.000	1.323.315.000	99,72
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	86.981.595.000	85.717.888.314	98,55
Jumlah Belanja Kotor		146.913.233.000	145.449.782.391	99,00
Pengembalian Belanja Pegawai		-	(115.528.363)	100
Jumlah Belanja Pegawai		146.913.233.000	145.334.254.028	98,93

Adapun rincian realisasi Pengembalian Belanja Pegawai untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

- Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) sebesar Rp29.035.845.
- Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116) sebesar Rp2.414.
- Pengembalian Belanja Honorarium (5121) sebesar Rp38.391.888.
- Pengembalian Belanja Lembur (5122) sebesar Rp1.370.000.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (5124) sebesar Rp46.728.216.

Sehingga jumlah realisasi Pengembalian Belanja Pegawai adalah sebesar Rp115.528.363 dan jumlah realisasi dari Belanja Pegawai Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp145.334.254.028.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.358.333.307	45.780.141.467	3,45
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	514.816.390	289.200.000	78,01
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.311.424.067	2.067.654.868	108,52
5121	Belanja Honorarium	6.224.005.313	7.940.505.723	(21,62)
5122	Belanja Lembur	1.323.315.000	1.076.466.000	22,93
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	85.717.888.314	67.282.024.564	27,40
Jumlah I	Belanja Kotor	145.449.782.391	124.435.992.622	16,89
Pengeml	palian Belanja Pegawai	(115.528.363)	(39.356.717)	193,54
Jumlah I	Belanja Pegawai	145.334.254.028	124.396.635.905	16,83

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Pegawai pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,83% dibandingkan dengan TA 2023.

Analisa peningkatan/penurunan Belanja Pegawai per masing-masing Belanja akan dijelaskan pada sub judul B.2.1.1 sampai dengan B.2.1.6.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	15.143.719.687	19.159.009.177	(20,96)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	130.190.534.341	105.237.626.728	23,71
Jumlah I	Belanja Pegawai	145.334.254.028	124.396.635.905	16,83

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Rp47.329.297.462

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (Kelompok Akun 5111)

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp47.329.297.462 atau 99,66 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp47.488.737.000 setelah dikurangi pengembalian gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp29.035.845 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 32: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2024

Aleum	Urraion	TA 2024			
Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	33.497.408.000	33.485.719.300	99,97	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	675.000	559.624	82,91	
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.830.409.000	1.825.445.030	99,73	
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	420.953.000	416.927.242	99,04	
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.621.620.000	1.616.105.000	99,66	
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.193.342.000	4.187.715.000	99,87	
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	390.797.000	385.642.231	98,68	
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.494.537.000	1.488.064.880	99,57	
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.434.065.000	3.354.675.000	97,69	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	604.931.000	597.480.000	98,77	
Jumlah E	Belanja Kotor	47.488.737.000	47.358.333.307	99,73	
Pengemb	alian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	(29.035.845)	100	
Jumlah E	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.488.737.000	47.329.297.462	99,66	

Adapun rincian realisasi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

- Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS (511111) sebesar Rp8.326.584.
- Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) sebesar Rp20.707.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (511121) sebesar Rp4.289.060.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PNS (511122) sebesar Rp127.464.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) sebesar Rp5.650.000.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) sebesar Rp2.870.000.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS (511126) sebesar Rp289.680.
- Pengembalian Belanja Uang Makan PNS (511129) sebesar Rp801.550.
- Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) sebesar Rp6.660.800.

Sehingga jumlah realisasi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS adalah sebesar Rp29.035.845 dan jumlah realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp47.329.297.462.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33: RIncian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	33.485.719.300	31.236.207.820	7,20
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	559.624	559.858	(0,04)
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.825.445.030	1.629.938.368	11,99
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	416.927.242	379.266.744	9,93
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.616.105.000	1.914.640.000	(15,59)
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.187.715.000	4.101.978.000	2,09
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	385.642.231	200.145.157	92,68
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.488.064.880	1.480.405.520	0,52
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.354.675.000	4.116.040.000	(18,50)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	597.480.000	720.960.000	(17,13)
Jumlah E	Belanja Kotor	47.358.333.307	45.780.141.467	3,45
Pengemb	alian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	(29.035.845)	(38.911.567)	(25,38)
Jumlah E	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.329.297.462	45.741.229.900	3,47

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Kenaikan pada realisasi Belanja Gaji Pokok, Pembulatan, Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, dan Tunjangan Beras dipengaruhi kenaikan pangkat pegawai, terdapat kenaikan gaji pokok sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kenaikan tunjangan PPh sebagai akibat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2024 dan TA 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	5.687.577.606	6.941.363.841	(18,06)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	41.641.719.856	38.799.866.059	7,32
Jumlah E	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	47.329.297.462	45.741.229.900	3,47

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Rp514.816.390

B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (Kelompok Akun 5115)

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp514.816.390 atau 98 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp525.318.000 setelah dikurangi pengembalian gaji dan tunjangan pegawai non PNS sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 35: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2024
(dalam rupiah)

Akun	Urajan		TA 2024	
Akuli	Ofalan	Anggaran	Realisasi	%
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	155.618.000	155.616.390	100,00
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	369.700.000	359.200.000	97,16
Jumlah Belanja Kotor		525.318.000	514.816.390	98,00
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		-	-	-
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		525.318.000	514.816.390	98,00

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36: RIncian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	155.616.390	-	100
511519	Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	359.200.000	289.200.000	24,20
Jumlah B	elanja Kotor	514.816.390	289.200.000	78,01
Pengemb Pegawai	alian Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS		514.816.390	289.200.000	78,01

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,44% dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Kenaikan pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS di tahun 2024 dikarenakan adanya pembayaran gaji dan tunjangan serta tunjangan perumahan Wakil Menteri PANRB berdasarkan PMK Nomor

176/PMK.02/2015, Keppres Nomor 73/M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024 – 2029.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	514.816.390	289.200.000	78,01
Jumlah E Non PNS	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai G	514.816.390	289.200.000	78,01

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Rp4.311.421.653

B.2.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (Kelompok Akun 5116)

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.311.421.653 atau 99,59 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp4.329.125.000 setelah dikurangi pengembalian gaji dan tunjangan PPPK sebesar Rp2.414 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK adalah sebagai berikut:

Tabel 38: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2024 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2024			
	Oralan	Anggaran	Realisasi	%	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.153.303.000	3.153.302.900	100,00	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	55.000	46.847	85,18	
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	151.593.000	150.646.340	99,38	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	31.287.000	30.956.720	98,94	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	498.014.000	498.014.000	100,00	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	141.873.000	141.436.260	99,69	
511628	Belanja Uang Makan PPPK	353.000.000	337.021.000	95,47	
Jumlah Belanja Kotor		4.329.125.000	4.311.424.067	99,59	
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK		-	(2.414)	100	
Jumlah E	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.329.125.000	4.311.421.653	99,59	

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK (511619) sebesar Rp2.414. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.311.421.653.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.153.302.900	1.404.665.316	124,49
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	46.847	24.098	94,40
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	150.646.340	69.102.220	118,01
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	30.956.720	15.014.294	106,18
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	-	71.500.000	(100,00)
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	498.014.000	225.946.000	120,41
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	141.436.260	69.305.940	104,08
511628	Belanja Uang Makan PPPK	337.021.000	212.097.000	58,90
Jumlah E	Belanja Kotor	4.311.424.067	2.067.654.868	108,52
Pengemb	alian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	(2.414)	(35.150)	(93,13)
Jumlah E	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.311.421.653	2.067.619.718	108,52

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 108,52% dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Kenaikan pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK di tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan pegawai PPPK sebanyak 13 orang dan adanya kenaikan gaji sebesar 8% sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	4.311.421.653	2.067.619.718	108,52
Jumlah E	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4.311.421.653	2.067.619.718	108,52

Belanja Honorarium Rp6.185.613.425

B.2.1.4 Belanja Honorarium (Kelompok Akun 5121)

Realisasi Belanja Honorarium untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp6.185.613.425 atau 98,79 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp6.261.389.000 setelah dikurangi pengembalian belanja

honorarium sebesar Rp38.391.888 dengan rincian anggaran dan realisaasi Belanja Honorarium sebagai berikut:

Tabel 41: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Urajan		TA 2024	
	Ofaiaii	Anggaran	Realisasi 6.224.005.313 6.224.005.313 (38.391.888)	%
512111	Belanja Uang Honor Tetap	6.261.389.000	6.224.005.313	99,40
Jumlah E	Belanja Kotor	6.261.389.000	6.224.005.313	99,40
Pengemb	palian Belanja Honorarium	-	(38.391.888)	100
Jumlah Belanja Honorarium		6.261.389.000	6.185.613.425	98,79

Belanja Honorarium berupa Belanja Uang Honor Tetap yang ditujukan untuk membayar Staf Khusus, dan KPRBN, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 120 Tahun 2022.

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Honorarium untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap (512111) sebesar Rp38.391.888, sehingga jumlah realisasi dari Belanja Honorarium Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp6.185.613.425.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Honorarium untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
512111	Belanja Uang Honor Tetap	6.224.005.313	7.940.505.723	(21,62)
Jumlah Belanja Kotor		6.224.005.313	7.940.505.723	(21,62)
Pengembal	ian Belanja Honorarium	(38.391.888)	-	100
Jumlah Be	Jumlah Belanja Honorarium		7.940.505.723	(22,10)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Honorarium pada 31 Desember TA 2024 mengalami penurunan sebesar 22,10% dibandingkan dengan 31 Desember TA 2023. Hal ini disebabkan terdapat pembayaran tagihan Komisi Aparatur Sipil Negara berupa honor Asisten Komisioner KASN non PNS dibayarkan oleh Satker Menpan.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Honorarium berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Honorarium Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

			(da	nlam rupiah)
Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	5.315.612.032	7.127.754.154	(25,42)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	870.001.393	812.751.569	7,04
Jumlah I	Belanja Honorarium	6.185.613.425	7.940.505.723	(22,10)

Belanja Lembur Rp1.321.945.000

B.2.1.5 Belanja Lembur (Kelompok Akun 5122)

Realisasi Belanja Lembur untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp1.321.945.000 atau 99,61 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp1.327.069.000 setelah dikurangi pengembalian belanja lembur sebesar Rp1.370.000 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Lembur adalah sebagai berikut:

Tabel 44: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Lembur TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Urajan			
	Oralan	Anggaran	Realisasi	%
512211	Belanja Uang Lembur	1.138.389.000	1.138.365.000	100,00
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	188.680.000	184.950.000	98,02
Jumlah Belanja Kotor		1.327.069.000	1.323.315.000	99,72
Pengembalian Belanja Lembur		-	(1.370.000)	100
Jumlah Belanja Lembur		1.327.069.000	1.321.945.000	99,61

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Lembur untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Uang Lembur PPPK (512212) sebesar Rp1.370.000. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Lembur Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp1.321.945.000.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Lembur untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 45: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Lembur TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
512211	Belanja Uang Lembur	1.138.365.000	1.006.615.000	13,09
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	184.950.000	69.851.000	164,78
Jumlah Belanja Kotor		1.323.315.000	1.076.466.000	22,93
Pengembalian Belanja Lembur		(1.370.000)	(410.000)	234,15
Jumlah Belanja Lembur		1.321.945.000	1.076.056.000	22,85

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Uang Lembur pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 22,85% dibandingkan dengan 31 Desember TA 2023. Pekerjaan lembur dilaksanakan karena terdapat pekerjaan yang harus segera diselesaikan melibatkan pegawai PPPK terkait

percepatan INA Digital dan penyelesaian peraturan terkait kelembagaan dan tata laksana yang bersifat nasional dan pemeliharaan jaringan internet yang dilaksanakan di luar jam kerja agar tidak mengganggu aktivitas layanan perkantoran, serta terdapat beberapa pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan, sehingga memerlukan kerja lembur di luar jam kerja.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Lembur berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 46: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Lembur Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	353.389.000	351.878.000	0,43
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	968.556.000	724.178.000	33,75
Jumlah E	Belanja Lembur	1.321.945.000	1.076.056.000	22,85

Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Rp85.671.160.098

B.2.1.6 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito (Kelompok Akun 5124)

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp85.671.160.098 atau 98,49 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp86.981.595.000 setelah dikurangi pengembalian belanja tunjangan khusus & belanja pegawai transito sebesar Rp46.728.216 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Transito adalah sebagai berikut:

Tabel 47: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawal Transito
TA 2024

Akun	Urajan	TA 2024		
Akun	Oralan	Anggaran	ggaran Realisasi	%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	80.725.609.000	79.497.785.152	98,48
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6.255.986.000	6.220.103.162	99,43
Jumlah E	Belanja Kotor	86.981.595.000	85.717.888.314	98,55
Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		-	(46.728.216)	100
Jumlah Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		86.981.595.000	85.671.160.098	98,49

Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito berupa Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) yang ditujukan untuk membayar Tunjangan Kinerja PNS.

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (512411) sebesar Rp46.728.216. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp85.671.160.098.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 48: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	79.497.785.152	64.304.109.670	23,63
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6.220.103.162	2.977.914.894	108,87
Jumlah Belanja Kotor		85.717.888.314	67.282.024.564	27,40
Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		(46.728.216)	-	100
Jumlah Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		85.671.160.098	67.282.024.564	27,33

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 27,33% dibandingkan dengan 31 Desember TA 2023. Hal ini diakibatkan adanya perubahan kelas jabatan serta nilai per kelas jabatan di lingkungan Kementerian PANRB berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 TMT 1 Juli 2023 serta penambahan pegawai PPPK Sebanyak 13 pegawai. dan mutasi pegawai dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh proses likuidasi sebanyak 49 pegawai.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	3.787.141.049	4.738.013.182	(20,07)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	81.884.019.049	62.544.011.382	30,92
Jumlah Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito		85.671.160.098	67.282.024.564	27,33

Belanja Barang Rp232.266.903.912

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp232.266.903.912 yang berarti 93,81 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp247.584.204.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang sebesar Rp929.071.444 Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang untuk periode TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 50: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Urajan	TA 2024			
		Anggaran	Realisasi	%	
5211	Belanja Barang Operasional	17.851.256.000	17.762.762.687	99,50	
5212	Belanja Barang Non Operasional	19.702.596.000	18.465.728.887	93,72	
5218	Belanja Barang Persediaan	3.867.533.000	3.781.671.953	97,78	
5221	Belanja Jasa	46.085.842.000	44.574.637.817	96,72	
5231	Belanja Pemeliharaan	12.867.607.000	12.750.968.807	99,09	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	137.591.302.000	126.806.452.982	92,16	
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	9.618.068.000	9.053.752.223	94,13	
Jumlah Belanja Kotor		247.584.204.000	233.195.975.356	94,19	
Pengemb	palian Belanja Barang	-	(929.071.444)	100	
Jumlah E	Belanja Barang	247.584.204.000	232.266.903.912	93,81	

Adapun rincian realisasi Pengembalian Belanja Barang untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

- Pengembalian Belanja Barang Operasional (5211) sebesar Rp70.
- Pengembalian Belanja Barang Non Operasional (5212) sebesar Rp1.244.760.
- Pengembalian Belanja Jasa (5221) sebesar Rp6.120.000.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar Rp819.610.662.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) sebesar Rp102.095.952.

Sehingga jumlah realisasi Pengembalian Belanja Barang adalah sebesar Rp929.071.444 dan jumlah realisasi dari Belanja Barang Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp232.266.903.912.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 51: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
5211	Belanja Barang Operasional	17.762.762.687	18.531.659.806	(4,15)
5212	Belanja Barang Non Operasional	18.465.728.887	15.901.735.179	16,12
5218	Belanja Barang Persediaan	3.781.671.953	3.778.116.692	0,09
5221	Belanja Jasa	44.574.637.817	43.629.147.804	2,17
5231	Belanja Pemeliharaan	12.750.968.807	12.364.211.270	3,13
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	126.806.452.982	106.016.386.872	19,61
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	9.053.752.223	9.952.562.073	(9,03)
Jumlah Belanja Kotor		233.195.975.356	210.173.819.696	10,95
Pengemb	palian Belanja	(929.071.444)	(783.721.798)	18,55
Jumlah I	Belanja Barang	232.266.903.912	209.390.097.898	10,93

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,93% dibandingkan 31 Desember 2023.

Analisa peningkatan/penurunan Belanja Barang per masing-masing Belanja akan dijelaskan pada Sub Judul B.2.2.1 sampai dengan B.2.2.7.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 52: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	17.905.342.145	32.267.441.388	(44,51)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	214.361.561.767	177.122.656.510	21,02
Jumlah Belanja Barang		232.266.903.912	209.390.097.898	10,93

Belanja Barang Operasional Rp17.762.762.617

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional (Kelompok Akun 5211)

Realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp17.762.762.617 yang berarti 99,50 persen dari pagu yang ditetapkan

dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp17.851.256.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang operasional sebesar Rp70 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 53: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Urajan	TA 2024		
Akun	Officiali	Anggaran	Realisasi	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14.148.219.000	14.085.128.050	99,55
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108.718.000	108.717.500	100,00
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	553.774.000	534.732.000	96,56
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.040.545.000	3.034.185.137	99,79
Jumlah Belanja Kotor		17.851.256.000	17.762.762.687	99,50
Pengemb	palian Belanja Barang Operasional	-	(70)	100
Jumlah E	Belanja Barang Operasional	17.851.256.000	17.762.762.617	99,50

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Barang Operasional untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) sebesar Rp70. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Barang Operasional Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp17.762.762.617.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 54: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14.085.128.050	14.419.623.534	(2,32)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108.717.500	136.708.200	(20,47)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	534.732.000	861.180.000	(37,91)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.034.185.137	3.000.548.179	1,12
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	113.599.893	(100,00)
Jumlah E	Belanja Kotor	17.762.762.687	18.531.659.806	(4,15)
Pengemb	alian Belanja Barang Operasional	(70)	(1.576.710)	(100,00)
Jumlah E	Belanja Barang Operasional	17.762.762.617	18.530.083.096	(4,14)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang Operasional pada 31 Desember TA 2024 mengalami penurunan sebesar 4,14% dibandingkan 31 Desember TA 2023, penurunan terjadi diakibatkan adanya likuidasi Komisi Aparatur Sipil Negara Ke Kementerian PANRB sehingga biaya keperluan perkantoran dibebankan pada Kementerian PANRB, meliputi biaya Listrik, biaya telepon, dan gaji satuan pengamanan (pegawai kontrak).

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Operasional berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	4.380.203.260	7.424.498.856	(41,00)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	13.382.559.357	11.105.584.240	20,50
Jumlah E	Belanja Barang Operasional	17.762.762.617	18.530.083.096	(4,14)

Belanja Barang Non Operasional Rp18.464.484.127

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional (Kelompok Akun 5212)

Realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp18.464.484.127 yang berarti 93,72 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp19.702.596.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang non operasional sebesar Rp1.244.760 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 56: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 (dalam rupiah)

Akun	Urajan		TA 2024	
AKUII	Oralan	Anggaran	Realisasi	%
521211	Belanja Bahan	14.221.551.000	13.140.026.434	92,40
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	176.140.000	128.616.000	73,02
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.222.109.000	5.118.413.033	98,01
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	82.796.000	78.673.420	95,02
Jumlah E	Belanja Kotor	19.702.596.000	18.465.728.887	93,72
Pengemb	palian Belanja Barang Non Operasional	-	(1.244.760)	100
Jumlah E	Belanja Barang Non Operasional	19.702.596.000	18.464.484.127	93,72

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Barang Non Operasional untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Bahan (521211) sebesar Rp1.244.760. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Barang Non Operasional Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp18.464.484.127.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 57: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
521211	Belanja Bahan	13.140.026.434	12.555.767.082	4,65
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	128.616.000	711.260.000	(81,92)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.118.413.033	2.511.545.617	103,80
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	78.673.420	113.442.480	(30,65)
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	9.720.000	(100,00)
Jumlah B	Belanja Kotor	18.465.728.887	15.901.735.179	16,12
Pengemb	palian Belanja Barang Non Operasional	(1.244.760)	(39.075)	3.085,57
Jumlah I	Belanja Barang Non Operasional	18.464.484.127	15.901.696.104	16,12

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang Non Operasional pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,12% dibandingkan 31 Desember TA 2023. Peningkatan tersebut diakibatkan adanya penambahan anggaran dan adanya likuidasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Non Operasional berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 58: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	211.077.449	1.875.731.935	(88,75)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	18.253.406.678	14.025.964.169	30,14
Jumlah Belanja Barang Non Operasional		18.464.484.127	15.901.696.104	16,12

Belanja Barang Persediaan Rp3.781.671.953

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan (Kelompok Akun 5218)

Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp3.781.671.953 yang berarti 97,78 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp3.867.533.000 setelah dikurangi pengembalian belanja barang persediaan sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 59: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024

Akun	Urajan	TA 2024		
	Oralan	Anggaran	Realisasi	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.867.533.000	3.781.671.953	97,78
Jumlah Belanja Kotor		3.867.533.000	3.781.671.953	97,78
Pengembalian Belanja Barang Persediaan		-	-	-
Jumlah Belanja Barang Persediaan		3.867.533.000	3.781.671.953	97,78

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Persediaan untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 60: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.781.671.953	3.778.116.692	0,09
Jumlah E	Belanja Kotor	3.781.671.953	3.778.116.692	0,09
Pengemb	alian Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Jumlah E	Belanja Barang Persediaan	3.781.671.953	3.778.116.692	0,09

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Barang Persediaan 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibandingkan 31 Desember TA 2023. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi digunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor, Pembelian Map pertanggungjawaban keuangan, serta amplop dinas KASN, yang seluruhnya digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Peningkatan tersebut diakibatkan adanya penambahan anggaran serta adanya proses likuidasi Komisi Aparatur Sipil Negara ke Kementerian PANRB.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Persediaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 61: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja
TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	82.059.800	502.495.300	(83,67)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	3.699.612.153	3.275.621.392	12,94
Jumlah Belanja Barang Persediaan		3.781.671.953	3.778.116.692	0,09

Belanja Jasa Rp44.568.517.817 B.2.2.4 Belanja Jasa (Kelompok Akun 5221)

Realisasi Belanja Jasa untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp44.568.517.817 yang berarti 96,71 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp46.085.842.000 setelah dikurangi pengembalian belanja jasa sebesar Rp6.120.000 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 62: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Urajan		TA 2024	
AKUII	Officiali	Anggaran	Realisasi	%
522111	Belanja Langganan Listrik	4.215.175.000	4.100.819.397	97,29
522112	Belanja Langganan Telepon	86.304.000	69.014.990	79,97
522113	Belanja Langganan Air	4.200.000	1.655.700	39,42
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.871.765.000	3.857.895.652	99,64
522131	Belanja Jasa Konsultan	6.853.779.000	6.746.417.445	98,43
522141	Belanja Sewa	4.395.333.000	4.372.610.220	99,48
522151	Belanja Jasa Profesi	11.815.585.000	11.180.212.994	94,62
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.843.701.000	14.246.011.419	95,97
Jumlah Belanja Kotor		46.085.842.000	44.574.637.817	96,72
Pengemb	alian Belanja Jasa	-	(6.120.000)	100
Jumlah E	Belanja Jasa	46.085.842.000	44.568.517.817	96,71

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Jasa untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Jasa Profesi (522151) sebesar Rp6.120.000. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Jasa Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp44.568.517.817.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 63: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
522111	Belanja Langganan Listrik	4.100.819.397	3.835.422.990	6,92
522112	Belanja Langganan Telepon	69.014.990	84.314.009	(18,15)
522113	Belanja Langganan Air	1.655.700	1.703.475	(2,80)
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.857.895.652	3.981.769.417	(3,11)
522131	Belanja Jasa Konsultan	6.746.417.445	4.910.570.210	37,39
522141	Belanja Sewa	4.372.610.220	5.838.911.840	(25,11)
522151	Belanja Jasa Profesi	11.180.212.994	10.154.482.054	10,10
522191	Belanja Jasa Lainnya	14.246.011.419	14.670.117.818	(2,89)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	151.855.991	(100,00)
Jumlah E	Belanja Kotor	44.574.637.817	43.629.147.804	2,17
Pengemb	palian Belanja Jasa	(6.120.000)	(9.353.626)	(34,57)
Jumlah E	Belanja Jasa	44.568.517.817	43.619.794.178	2,17

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Jasa pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,17% dibandingkan 31 Desember TA 2023. Hal ini disebabkan adanya percepatan penyusunan perumusan kebijakan dilingkungan Kementerian PANRB, dan adanya pembebanan, pembayaran jasa lainnya dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke Kementerian PANRB disebabkan adanya proses Likuidasi.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Jasa berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 64: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	5.413.541.889	8.905.855.029	(39,21)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	39.154.975.928	34.713.939.149	12,79
Jumlah Belanja Jasa		44.568.517.817	43.619.794.178	2,17

Belanja Pemeliharaan Rp12.750.968.807

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan (Kelompok Akun 5231)

Realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp12.750.968.807 yang berarti 99,09 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp12.867.607.000 setelah dikurangi pengembalian belanja pemeliharaan sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 65: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024

Aleum	Uraian		TA 2024	
Akun	Oralan	Anggaran	Realisasi	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.248.155.000	4.243.126.006	99,88
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	470.421.000	466.471.840	99,16
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	59.740.000	59.739.211	100,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.737.557.000	6.666.422.442	98,94
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.728.000	318.727.754	100,00
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	65.500.000	61.555.000	93,98
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	967.506.000	934.926.554	96,63
Jumlah Belanja Kotor		12.867.607.000	12.750.968.807	99,09
Pengemb	palian Belanja Pemeliharan	-	-	-
Jumlah E	Belanja Pemeliharaan	12.867.607.000	12.750.968.807	99,09

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 66: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.243.126.006	3.386.850.672	25,28
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	466.471.840	428.165.200	8,95
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	59.739.211	59.739.311	-
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.666.422.442	6.921.163.834	(3,68)
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.727.754	669.752.553	(52,41)
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	61.555.000	217.800.000	(71,74)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	934.926.554	680.739.700	37,34
Jumlah E	Belanja Kotor	12.750.968.807	12.364.211.270	3,13
Pengem	balian Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah E	Belanja Pemeliharaan	12.750.968.807	12.364.211.270	3,13

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Pemeliharaan pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,13% dibandingkan 31 Desember TA 2023 Hal ini disebabkan adanya pemeliharaan pada Gedung Kementerian PANB berupa perbaikan kanopi, ruangan yang bocor dan pemeliharaan rutin Gedung dan bangunan Kementerian PANRB.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 67: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja

TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah) Realisasi 2024 Realisasi 2023 Kode Nama Satuan Kerja 2.536.655.533 015416 Komisi Aparatur Sipil Negara 1.651.393.703 (34,90)Menteri Negara Pendayagunaan 11.099.575.104 9.827.555.737 427950 12,94 Aparatur Negara Jumlah Belanja Pemeliharaan 12.750.968.807 12.364.211.270 3,13

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp125.986.842.320

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kelompok Akun 5241)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp125.986.842.320 yang berarti 91,57 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp137.591.302.000 setelah dikurangi pengembalian belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp819.610.662 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 68: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 (dalam rupiah)

Akun	Urajan	TA 2024			
AKUII	Officiali	Anggaran	Realisasi	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.703.627.000	54.315.933.565	90,98	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	947.278.000	829.119.500	87,53	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64.545.260.000	60.588.303.000	93,87	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.395.137.000	11.073.096.917	89,33	
Jumlah E	Belanja Kotor	137.591.302.000	126.806.452.982	92,16	
Pengemb	alian Belanja Perjalanan Dinas Dalam	-	(819.610.662)	100	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	137.591.302.000	125.986.842.320	91,57	

Adapun rincian realisasi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) sebesar Rp797.447.662.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) sebesar Rp170.000.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) sebesar Rp20.628.000.
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (5242119) sebesar Rp1.365.000.

Sehingga jumlah realisasi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebesar Rp819.610.662 dan jumlah realisasi dari Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp125.986.842.320.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 69: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.315.933.565	56.834.931.436	(4,43)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	829.119.500	896.306.229	(7,50)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.588.303.000	37.998.254.227	59,45
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.073.096.917	10.286.894.980	7,64
Jumlah E	Belanja Kotor	126.806.452.982	106.016.386.872	19,61
Pengemb Negeri	alian Belanja Perjalanan Dinas Dalam	(819.610.662)	(647.248.997)	26,63
Jumlah E	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	125.986.842.320	105.369.137.875	19,57

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 19,57% dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini berkaitan dengan adanya percepatan pelaksanaan SPBE secara Nasional, dan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan setiap kebijakan yang disusun pada Kementerian PANRB.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 70: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	6.167.066.044	10.898.298.931	(43,41)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	119.819.776.276	94.470.838.944	26,83
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		125.986.842.320	105.369.137.875	19,57

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp8.951.656.271

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (Kelompok Akun 5242)

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp8.951.656.271 yang berarti 93,07 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp9.618.068.000 setelah dikurangi pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp102.095.952

dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 71: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Urajan	TA 2024		
	Ofaian	Anggaran	Realisasi	%
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	9.618.068.000	9.053.752.223	94,13
Jumlah E	Belanja Kotor	9.618.068.000	9.053.752.223	94,13
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		-	(102.095.952)	100
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		9.618.068.000	8.951.656.271	93,07

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri (524211) sebesar Rp102.095.952. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp8.951.656.271.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 72: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	9.053.752.223	9.952.562.073	(9,03)
Jumlah Belanja Kotor		9.053.752.223	9.952.562.073	(9,03)
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		(102.095.952)	(125.503.390)	(18,65)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		8.951.656.271	9.827.058.683	(8,91)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Negeri pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 8,91% dibandingkan 31 Desember 2023. Hal ini berkaitan dengan adanya adanya instruksi Presiden terkaiat pembatasan perjalanan luar negeri sehingga koordinasi dilaksanakan melalui daring.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 73: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	123.905.804	(100)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	8.951.656.271	9.703.152.879	(7,74)
Jumlah I	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	8.951.656.271	9.827.058.683	(8,91)

Belanja Modal Rp55.737.772.931

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp55.737.772.931 yang berarti 99,59 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp55.968.670.000 setelah dikurangi pengembalian belanja modal sebesar Rp10.346.295. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk periode TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 74: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

(dalam rupiah)

Akı		Urajan	TA 2024		
AKU	un	Oralan	Anggaran	Anggaran Realisasi	%
532	21 E	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.091.270.000	37.995.979.715	99,75
533	31 E	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.434.729.000	2.433.205.227	99,94
536	31 E	Belanja Modal Lainnya	15.442.671.000	15.318.934.284	99,20
Jumla	Jumlah Belanja Kotor		55.968.670.000	55.748.119.226	99,61
Peng	Pengembalian Belanja Modal		-	(10.346.295)	100
Jumla	Jumlah Belanja Modal		55.968.670.000	55.737.772.931	99,59

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Modal untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Modal Lainnya (5361) sebesar Rp10.346.295. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Modal Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp55.737.772.931.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 75: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

Kode	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.995.979.715	9.215.368.330	312,31
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.433.205.227	897.489.861	171,11
5361	Belanja Modal Lainnya	15.318.934.284	23.945.226.659	(36,03)
Jumlah Belanja Kotor		55.748.119.226	34.058.084.850	63,69
Pengembalian Belanja Modal		(10.346.295)	-	100
Jumlah Belanja Modal		55.737.772.931	34.058.084.850	63,66

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 63,66% bila dibandingkan dengan 31 DesemberTA 2023.

Analisa peningkatan/penurunan Belanja Barang per masing-masing Belanja akan dijelaskan pada Sub Judul B.2.3.1 sampai dengan B.2.3.3.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 76: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	48.487.200	1.181.058.900	(95,89)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	55.689.285.731	32.877.025.950	69,39
Jumlah E	Selanja Modal	55.737.772.931	34.058.084.850	63,66

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp37.995.979.715

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Kelompok Akun 5321)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp37.995.979.715 yang berarti 99,75 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp38.091.270.000 setelah dikurangi pengembalian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 77: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2024		
Akuli	Officiali	Anggaran	Realisasi	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.628.754.000	37.533.721.715	99,75
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	462.516.000	462.258.000	99,94
Jumlah E	Belanja Kotor	38.091.270.000	37.995.979.715	99,75
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-
Jumlah E	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.091.270.000	37.995.979.715	99,75

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 78: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.533.721.715	8.964.832.830	318,68
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	462.258.000	250.535.500	84,51
Jumlah E	Belanja Kotor	37.995.979.715	9.215.368.330	312,31
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-
Jumlah E	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.995.979.715	9.215.368.330	312,31

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 312,31% dibandingkan pada 31 Desember TA 2023 yang disebabkan keperluan belanja alat pengolah data bagi pegawai, serta adanya peremajaan meubeler untuk mendukung kinerja pegawai Kementerian PANRB.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 79: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	48.487.200	1.003.938.900	(95,17)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	37.947.492.515	8.211.429.430	362,13
Jumlah E	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.995.979.715	9.215.368.330	312,31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp2.433.205.227

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Kelompok Akun 5331)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp2.433.205.227 yang berarti 99,94 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp2.434.729.000 setelah dikurangi pengembalian belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp0 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 80: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024

Akun	Uraian	TA 2024				
Akun		Anggaran	Realisasi	%		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.434.729.000	2.433.205.227	99,94		
Jumlah Belanja Kotor		2.434.729.000	2.433.205.227	99,94		
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-		
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.434.729.000	2.433.205.227	99,94		

Adapun rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 81: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.433.205.227	897.489.861	171,11
Jumlah E	Belanja Kotor	2.433.205.227	897.489.861	171,11
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan		2.433.205.227	897.489.861	171,11

Berdasarkan tabel di atas untuk belanja penambahan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar 171,11% hal ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan renovasi pada Gedung Kementerian PANRB

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 82: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	177.120.000	(100)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	2.433.205.227	720.369.861	237,77
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.433.205.227	897.489.861	171,11

Belanja Modal Lainnya Rp15.308.587.989

B.5.3 Belanja Modal Lainnya (5361)

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp15.308.587.989 yang berarti 99,13 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2024 sebesar Rp15.442.671.000 setelah dikurangi pengembalian belanja modal lainnya sebesar Rp10.346.295 dengan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 83: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	TA 2024				
AKUII		Anggaran	Realisasi	%		
536111	Belanja Modal Lainnya	14.943.792.000	14.924.340.384	99,87		
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	498.879.000	394.593.900	79,10		
Jumlah E	Belanja Kotor	15.442.671.000	15.318.934.284	99,20		
Pengembalian Belanja Modal Lainnya		-	(10.346.295)	100		
Jumlah Belanja Modal Lainnya		15.442.671.000	15.308.587.989	99,13		

Adapun realisasi Pengembalian Belanja Modal Lainnya untuk periode TA 2024 berupa Pengembalian Belanja Modal Lainnya (536111) sebesar Rp10.346.295. Sehingga jumlah realisasi dari Belanja Modal Lainnya Netto untuk periode TA 2024 adalah sebesar Rp15.308.587.989.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 84: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
536111	Belanja Modal Lainnya	14.924.340.384	23.039.558.659	(35,22)
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	394.593.900	905.668.000	(56,43)
Jumlah E	Belanja Kotor	15.318.934.284	23.945.226.659	(36,03)
Pengembalian Belanja Modal Lainnya		(10.346.295)	0	100
Jumlah Belanja Modal Lainnya		15.308.587.989	23.945.226.659	(36,07)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja modal lainnya pada 31 Desember TA 2024 mengalami penurunan sebesar 36,07% dibandingkan pada 31 Desember TA 2023 yang disebabkan belanja Lisensi telah dilaksanakan pada TA 2023, sehingga pada TA 2024 hanya berfokus pada belanja konsultan renovasi yang menambah nilai gedung dan bangunan Kementerian PANRB.

Sedangkan rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Lainnya berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 85: Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	15.308.587.989	23.945.226.659	(36,07)
Jumlah Belanja Modal Lainnya		15.308.587.989	23.945.226.659	(36,07)

B.3 Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 4 (empat) kegiatan prioritas, yang tersebar di 2 (dua) satuan kerja dengan pagu mencapai Rp66.230.744.000 dan realisasi sebesar Rp59.230.542.694 atau 89,43 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86: Rincian Pagu, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output Prioritas Nasional VII TA 2024

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capai an Outpu t	%
Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	3.490.000.000	2.670.341.967	76,51	Layanan	7	8	114,29
Pembangunan alat ukur Birokrasi Berkelas Dunia	2.856.700.000	2.357.817.533	82,54	Rekomend asi Kebijakan	1	1	100
Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	2.002.000.000	1.919.234.642	95,87	Laporan	98.00 0	92.93 2	94,83
Koordinasi percepatan pelaksanaan kebijakan RB Nasional	6.778.000.000	6.232.631.148	91,95	Kegiatan	1	1	100
Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan SPBE	4.582.694.000	3.143.584.229	68,60	Kegiatan	1	1	100
Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam	625.000.000	578.591.944	92,57	Rekomend asi Kebijakan	2	2	100
Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi	625.000.000	493.300.951	78,93	Rekomend asi Kebijakan	3	3	100

Total Belanja Prioritas Nasional VII	66.230.744.000	59.230.542.694	89,43				
Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	299.999.000	299.996.084	100	Laporan	36	36	10
Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemiliu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	649.051.000	649.048.470	100	Laporan	1	1	10
Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	548.382.000	548.378.669	100	Laporan	320	320	10
Penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah	2.098.918.000	2.105.404.626	100,31	Lembaga	65	65	10
Peningkatan Penerapan MPP Digital	3.000.000.000	2.188.872.024	72,96	Pemda	25	25	10
Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS)	1.750.000.000	1.579.148.148	90,24	Sistem Informasi	1	1	10
Fasilitasi Penerapan Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN	12.500.000.000	12.338.233.659	98,71	Lembaga	138	194	140,
Koordinasi Piloting Implementasi Pengadaan CASN yang Fleksibel	8.700.000.000	7.586.177.076	87,20	Lembaga	10	14	1.
Fasilitasi Penerapan Manajemen Talenta ASN	3.600.000.000	3.291.757.800	91,44	Lembaga	138	138	1
Penguatan Budaya Kerja ASN	3.000.000.000	2.701.870.834	90,06	Lembaga	624	627	100,
Piloting Persiapan Penerapan Manajemen Penghargaan ASN Berbasis Kinerja	5.400.000.000	5.173.707.277	95,81	Lembaga	10	12	1:
Fasilitasi Penerapan Pembelajaran Terintegrasi melalui Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN	3.100.000.000	2.850.748.613	91,96	Lembaga	138	183	132,0
Bisnis Tematik bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	625.000.000	521.697.000	83,47	Rekomend asi Kebijakan	3	3	1

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA ASET

Aset Lancar Rp2.167.879.322

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.167.879.322 dan Rp3.173.097.357.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 87: Rincian Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1141	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	980.460.983	440.132.021	122,77
1143	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	49.569.744	(100)
1152	Piutang Bukan Pajak	487.703.112	1.540.600.696	(68,34)
1162	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	(2.438.516)	-	100
	Piutang Bukan Pajak (Netto)	485.264.596	1.540.600.696	(68,50)
1171	Persediaan	702.153.743	1.142.794.896	(38,56)
Jumlah /	Aset Lancar	2.167.879.322	3.173.097.357	(31,68)

Jumlah Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 31,68 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan yang masih harus diterima dan terdapat koreksi piutang lainnya sebagai akibat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TPKN sebagai tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK Tahun 2023.

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp980.460.983

C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja Dibayar Dimuka *(prepaid)* per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp980.460.983 dan Rp440.132.021.

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari pengeluaran untuk pembayaran secara penuh atas barang/jasa namun manfaat atas barang atau jasa belum diterima seluruhnya, dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya

bukti-bukti legal/dokumen-dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak ketiga seperti kuitansi, *invoice* dll. Belanja Barang Dibayar Dimuka pada Kementerian PANRB merupakan pengakuan secara akrual atas pengadaan lisensi untuk software dengan masa berlaku sampai dengan 12 bulan, namun masa pemanfaatannya melewati tanggal buku yaitu 31 Desember, sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima.

Rincian Memo Jurnal Penyesuaian disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 88: Rincian Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
114112	Belanja Barang Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	980.460.983	440.132.021	122,77
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)		980.460.983	440.132.021	122,77

Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 122,77 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan pengadaan lisensi untuk software dengan masa berlaku sampai dengan 1 tahun yang belum habis masa aktifnya pada akhir periode pelaporan.

Adapun rincian perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 89: Rincian Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	118.226.840	(100)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	980.460.983	321.905.181	204,58
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		980.460.983	440.132.021	122,77

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.2 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp49.569.744 dengan rincian perbandingan disajikan sebagai berikut:

Tabel 90: Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	49.569.744	(100)
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima		1-	49.569.744	(100)

Kementerian PANRB tidak memiliki satker yang mempunyai aktivitas pendapatan. Pendapatan yang diterima merupakan pendapatan yang bersifat insidentil dan tidak rutin.

Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengembalian belanja barang yang tidak menghasilkan BMN pada TA 2024.

Adapun rincian perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 91: Rincian Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	49.569.744	(100)
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima		-	49.569.744	(100)

Piutang Bukan Pajak Rp487.703.112

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp487.703.112 dan Rp1.540.600.696 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 92: Rincian Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
115212	Piutang Lainnya	487.703.112	1.540.600.696	(68,34)
Jumlah Piutang Bukan Pajak		487.703.112	1.540.600.696	(68,34)

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang Bukan Pajak pada Kementerian PANRB hanya terdapat pada satker MENPAN yang merupakan piutang lainnya yang ditagihkan kepada Pihak Ketiga atas Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK TA 2023. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 204 telah disesuaikan dengan hasil LHP TPKN dan LHR Inspektorat Kementerian PANRB, serta terdapat penyetoran ke kas negara. Seluruh proses pencatatan atas Piutang Lainnya dilakukan melalui modul GLP pada aplikasi SAKTI.

Terdapat penurunan nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar 68,34 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 93: Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	1.540.600.696
Mutasi Tambah:	
Koreksi Nilai bertambah Piutang TAYL	24.211.302
Mutasi Kurang:	
Koreksi Nilai berkurang Piutang TAYL	(68.189.852)
Pembatalan Pengakuan Piutang	(951.187.827)
Pembayaran Piutang	(57.731.207)
Saldo per 31 Desember 2024	487.703.112

Mutasi tambah Piutang Bukan Pajak berasal dari Koreksi Nilai bertambah Piutang TAYL sebesar Rp24.211.302 merupakan pengakuan Piutang Lainnya

yang ditagihkan kepada pihak ketiga berupa (Fee Penyedia) berdasarkan hasil pengujian Inspektorat atas bukti pengeluaran belanja, pencatatan berdasasrkan LHP TPKN dan LHR Inspektorat Kementerian PANRB.

Mutasi kurang terhadap Piutang Bukan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Koreksi Nilai berkurang Piutang TAYL
 Koreksi Nilai berkurang Piutang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar
 Rp68.189.852 merupakan hasil pemeriksaan TPKN dan ditagihkan kepada
 Pegawai Non ASN bukan Bendahara sesuai LHR Inspektorat Kementerian
 PANRB direklasifikasi menjadi Piutang Tagihan TP/TGR.

2. Penghentian Pengakuan Piutang

Penghentian Pengakuan Piutang sebesar Rp951.187.827 merupakan pembatalan pengakuan Piutang Lainnya yang telah diyakini kebenarannya oleh TPKN sesuai LHR Inspektorat Kementerian PANRB.

3. Pembayaran Piutang

Pembayaran Piutang sebesar Rp57.731.207 berasal dari penyetoran Piutang Lainnya oleh debitur pegawai PANRB bukan Bendahara.

Adapun rincian perbandingan Piutang Bukan Pajak berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 94: Rincian Perbandingan Piutang Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	487.703.112	1.540.600.696	(68,34)
Jumlah Piutang Bukan Pajak		487.703.112	1.540.600.696	(68,34)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Bukan Pajak Rp2.438.516

C.1.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.438.516 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan piutang tidak tertagih merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Dalam kebijakan akuntansi, penyisihan piutang tidak tertagih dihitung sebagai persentase tertentu dari akun piutang. Piutang yang ditagihkan masih dikategorikan sebagai lancar, untuk itu disisihkan sebesar 5 permil (5/1000) dari nilai piutang berdasarkan pasal 7 ayat (4) PMK Nomor 69/PMK.06/2014.

Rincian perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 95: Rincian Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	2.438.516	-	100
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		2.438.516	-	100

Pencatatan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya dilakukan melalui Modul GLP Aplikasi SAKTI.

Adapun perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 96: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	487.703.112	0,5%	2.438.516
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	_
Macet	-	100%	_
Jumlah	487.703.112		2.438.516
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	487.703.112		2.438.516

Piutang Bukan Pajak (Netto) Rp485.264.596

C.1.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak (Netto) Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp485.264.596 dan Rp1.540.600.696.

Piutang Bukan Pajak (Netto) merupakan selisih piutang antara Piutang Bukan Pajak dikurangi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Rincian perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 97: Rincian Perbandingan Piutang Piutang Bukan Pajak (Netto)

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1152	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	487.703.112	1.540.600.696	(68,34)
1162	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2.438.516)	-	100,00
Jumlah Piutang Bukan Pajak (Netto)		485.264.596	1.540.600.696	(68,50)

Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 68,50 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan saldo Piutang Lainnya TAYL sudah melalui verifikasi oleh TPKN dan beberapa sudah diselesaikan oleh debiturnya.

Persediaan Rp702.153.743

C.1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp702.153.743 dan Rp1.142.794.896 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 98: Rincian Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
117111	Barang Konsumsi	702.153.743	1.142.794.896	(38,56)
Jumlah F	Persediaan	702.153.743	1.142.794.896	(38,56)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Terdapat penurunan nilai Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar 38.56 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 99: Rincian Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.142.794.896
Mutasi Tambah:	
Pembelian	4.252.505.293
Reklasifikasi Masuk	62.233.472
Transfer Masuk	48.957.800
Mutasi Kurang:	_
Habis Pakai	(4.657.971.946)
Usang	(35.174.500)
Reklasifikasi Keluar	(62.233.472)
Transfer Keluar	(48.957.800)
Saldo per 31 Desember 2024	702.153.743

Mutasi tambah terhadap Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembelian

Pembelian sebesar Rp4.252.505.293 berupa persediaan Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan serta Pita Cukai, Materai dan Leges.

2. Reklasifikasi Masuk

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp61.623.932 berupa penambahan persediaan Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan dan Persediaan Lainnya melalui reklasifikasi dari Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan dan Persediaan Lainnya.

3. Transfer Masuk

Transfer Masuk sebesar Rp48.957.800 berupa persediaan Barang Konsumsi ke satker Menpan berasal dari satker KASN berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Persediaan Nomor BA-02/PL.02.01/10/2024 tanggal 27 September 2024.

Mutasi kurang terhadap Persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Habis Pakai

Habis Pakai sebesar Rp4.369.952.887 berupa persediaan Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Pita Cukai, Materai dan Leges serta Persediaan Lainnya.

2. Usang

Usang atau penghapusan persediaan sebesar Rp35.174.500 berupa persediaan Alat Tulis Kantor yang menggunakan kop/identitas KASN sehingga dilakukan ubah status persediaan menjadi rusak/usang berdasarkan Berita Acara Nomor BA-02/PL.02.08/09/2024 tanggal 23 September 2024.

3. Reklasifikasi Keluar

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp61.833.056 berupa pengurangan persediaan Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan dan Persediaan Lainnya melalui reklasifikasi menjadi Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan dan Persediaan Lainnya.

4. Transfer Keluar

Transfer Keluar sebesar Rp48.957.800 berupa persediaan Barang Konsumsi dari satker KASN ke satker Menpan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Persediaan Nomor BA-02/PL.02.01/10/2024 tanggal 27 September 2024.

Adapun rincian perbandingan Persediaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 100: Rincian Perbandingan Persediaan Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	219.195.250	(100)
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	702.153.743	923.599.646	(23,98)
Jumlah Persediaan		702.153.743	1.142.794.896	(38,56)

Rincian barang Persediaan per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Rp185.826.274.565

C.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp185.826.274.565 dan Rp134.872.925.990.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap pada Kementerian PANRB berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Rincian perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 101: Rincian Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1311	Tanah	60.334.049.494	32.784.833.000	84,03
1321	Peralatan dan Mesin	173.738.580.179	152.259.916.225	14,11
1331	Gedung dan Bangunan	91.915.184.122	85.949.348.532	6,94
1341	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.598.328.550	1.461.578.550	9,36
1351	Aset Tetap Lainnya	1.447.364.549	1.351.922.885	7,06
Jumlah N	lilai Perolehan Aset Tetap	329.033.506.894	273.807.599.192	20,17
1371	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(143.207.232.329)	(138.934.673.202)	3,08
Nilai Buk	u Aset Tetap	185.826.274.565	134.872.925.990	37,78

Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 20,17 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Hal ini dikarenakan adanya transfer masuk Tanah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta pembelian peralatan dan mesin yang cukup signifikan. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp185.826.274.565 mengalami kenaikan sebesar 37,78% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Nilai buku tersebut berasal dari nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp329.033.506.894 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp143.207.232.329.

Tanah

Rp60.334.049.494

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp60.334.049.494 dan Rp32.784.833.000 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 102: Rincian Perbandingan Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
131111	Tanah	60.334.049.494	32.784.833.000	84,03
Jumlah 1	anah	60.334.049.494	32.784.833.000	84,03

Terdapat kenaikan nilai aset tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar 84,03% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 103: Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	32.784.833.000
Mutasi Tambah:	
Transfer Masuk	27.549.216.494
Likuidasi Masuk	32.784.833.000
Mutasi Kurang:	
Likuidasi Keluar	(32.784.833.000)
Saldo per 31 Desember 2024	60.334.049.494
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	_
Nilai Buku per 31 Desember 2024	60.334.049.494

Mutasi tambah terhadap Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk

Transfer Masuk sebesar Rp27.549.216.494 berupa aset Tanah di Pekayon ke satker Menpan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 03/S.BN.00/2024 | B-13/II.2/PL.02.01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.

2. Likuidasi Masuk

Likuidasi Masuk sebesar Rp32.784.833.000 berupa aset Tanah di Cipinang ke satker Menpan selaku satker pengampu dari satker KASN yang dilikuidasi. Tanah tersebut diperoleh berdasarkan BAST Barang Milik Negara Nomor BA-01/BMN.KASN/11/2020 tanggal 24 November 2020 serta Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 229/KM.6/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN yang Berasal dari Barang Rampasan

Negara pada Komisi Aparatur Sipil Negara, serta BAST Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Mutasi kurang aset Tanah berasal dari Likuidasi Keluar sebesar Rp32.784.833.000 berupa aset Tanah di Cipinang dari satker KASN yang dilikuidasi ke satker Menpan selaku satker pengampu.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah dapat digunakan untuk mendirikan aset Gedung dan Bangunan, serta aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Tabel 104: Rincian Tanah per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	Luas	Lokasi	Nilai
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	
427950	Menteri Negara Pendayagunaan	2.345 m2	Jatinegara, Jakarta Timur	32.784.833.000
427 900	Aparatur Negara	5.127 m2	Ciracas, Jakarta Timur	27.549.216.494
Jumlah 1	anah	7.472 m2	-	60.334.049.494

Peralatan dan Mesin

Rp173.738.580.179

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp173.738.580.179 dan Rp152.259.916.225 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 105: Rincian Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
132111	Peralatan dan Mesin	173.738.580.179	152.259.916.225	14,11
Jumlah F	Peralatan dan Mesin	173.738.580.179	152.259.916.225	14,11

Terdapat kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar 14,11 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 106: Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Awal Perolehan per 31 Desember 2023	152.259.916.225
Mutasi Tambah:	
Pembelian	37.972.929.715
Transfer Masuk	1.380.634.421
Reklasifikasi Masuk	701.650.764
Likuidasi Masuk	22.267.352.994
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	48.450.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	7.381.500
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(3.316.439.428)
Reklasifikasi Keluar	(925.836.081)
Koreksi Pencatatan	(7.381.500)
Likuidasi Keluar	(22.267.352.994)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(14.382.725.437)
Saldo per 31 Desember 2024	173.738.580.179
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(125.351.403.912)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	48.387.176.267

Mutasi tambah terhadap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembelian

Pembelian sebesar Rp37.972.929.715 berupa aset Alat Angkutan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Unit dll.

2. Transfer Masuk

Transfer Masuk sebesar Rp1.380.634.421 berupa aset Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer Unit, Peralatan Komputer dll ke satker Menpan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 03/S.BN.00/2024 – B-13/II.2/PL.02.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2024 dan dari Perpustakaan Nasional berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan barang Milik Negara Nomor 6921/2/PLK.07/VI.2024 – 06/S.BN.00/2024 tanggal 6 Juni 2024.

3. Reklasifikasi Masuk

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp701.650.764 berupa penambahan aset Alat Kantor & Rumah Tangga serta Peralatan Komputer melalui reklasifikasi dari Peralatan Komputer dan Alat Kerja Penerbangan.

4. Likuidasi Masuk

Likuidasi Masuk sebesar Rp22.267.352.994 berupa aset Alat Angkutan, Alat Rumah Tangga, Komputer Unit, Peralatan Komputer dll ke satker Menpan selaku satker pengampu dari satker KASN yang dilikuidasi. Peralatan dan Mesin tersebut diperoleh berdasarkan BAST Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

5. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp48.450.000 berupa pengembangan aset peralatan komputer.

6. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa aset Alat Kantor & Rumah Tangga sebesar Rp7.381.500.

Mutasi keluar terhadap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Keluar

Transfer Keluar sebesar Rp3.316.439.428 berupa aset Alat Angkutan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga dll dari satker Menpan ke Badan Kepegawaian Negara berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 73/S.BN.05/2024 – 19/PL.03.04/BA/A/2024 tanggal 9 Desember 2024.

2. Reklasifikasi Keluar

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp925.836.081 berupa pengurangan aset Peralatan Komputer dan Alat Kerja Penerbangan melalui reklasifikasi menjadi Alat Kantor & Rumah Tangga serta Peralatan Komputer.

3. Koreksi Pencatatan

Koreksi Pencatatan berupa aset Alat Kantor & Rumah Tangga sebesar Rp7.381.500.

4. Likuidasi Keluar

Likuidasi Keluar sebesar Rp22.267.352.994 berupa aset Alat Angkutan, Alat Rumah Tangga, Komputer Unit, Peralatan Komputer dll dari satker KASN yang dilikuidasi ke satker Menpan selaku satker pengampu.

5. Penghentian Aset Dari Penggunaan

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp14.382.725.437 berupa aset Alat Angkutan, Alat Komunikasi, Komputer Unit, Peralatan Komputer dll yang diklasifikasikan dari aset tetap ke aset lain-lain.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp91.915.184.122

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp91.915.184.122 dan Rp85.949.348.532 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 107: Rincian Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
133111	Gedung dan Bangunan	91.915.184.122	85.949.348.532	6,94
Jumlah (Sedung dan Bangunan	91.915.184.122	85.949.348.532	6,94

Terdapat kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar 6,94 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 108: Rincian Mutasi Gedung dan Banguna	Tabel 108:	Rincian	Mutasi	Gedung	dan	Banguna
--	------------	---------	--------	--------	-----	---------

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	85.949.348.532
Mutasi Tambah:	
Pembelian	913.294.465
Transfer Masuk	3.522.910.363
Likuidasi Masuk	11.048.705.662
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.519.910.762
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	9.720.000
Koreksi Susulan	913.294.465
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	(913.294.465)
Likuidasi Keluar	(11.048.705.662)
Saldo per 31 Desember 2024	91.915.184.122
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(16.818.457.554)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	75.096.726.568

Mutasi tambah terhadap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembelian

Pembelian sebesar Rp913.294.465 berupa aset Bangunan Gedung Tempat Kerja

2. Transfer Masuk

Transfer Masuk sebesar Rp3.522.910.363 berupa aset Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal dan Tugu/Tanda Batas ke satker Menpan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 03/S.BN.00/2024 – B-13/II.2/PL.02.01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.

3. Likuidasi Masuk

Likuidasi Masuk sebesar Rp11.048.705.662 berupa aset Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tugu/Tanda Batas ke satker Menpan selaku satker pengampu dari satker KASN yang dilikuidasi. Gedung dan Bangunan tersebut diperoleh berdasarkan BAST Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

4. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp1.519.910.762 berupa pengembangan aset Bangunan Gedung Tempat Kerja.

5. Reklasifikasi Masuk

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa aset Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp9.720.000.

6. Koreksi Susulan

Koreksi Susulan berupa aset Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp913.294.465.

Mutasi keluar terhadap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Pencatatan

Koreksi Pencatatan berupa aset Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp913.294.465.

2. Likuidasi Keluar

Likuidasi Keluar sebesar Rp11.048.705.662 berupa aset Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tugu/Tanda Batas dari satker KASN yang dilikuidasi ke satker Menpan selaku satker pengampu.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.598.328.550

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.598.328.550 dan Rp1.461.578.550 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 109: Rincian Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
134111	Jalan dan Jembatan	126.829.000	-	100,00
134112	Irigasi	76.283.000	66.362.000	14,95
134113	Jaringan	1.395.216.550	1.395.216.550	-
Jumlah J	alan, Irigasi dan Jaringan	1.598.328.550	1.461.578.550	9,36

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Terdapat kenaikan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024

sebesar 9,36 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan adalah sebagai berikut:

Tabel 110: Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Awal Perolehan per 31 Desember 2023	1.461.578.550
Mutasi Tambah:	
Transfer Masuk	136.750.000
Likuidasi Masuk	66.362.000
Mutasi Kurang:	
Likuidasi Keluar	(66.362.000)
Saldo per 31 Desember 2024	1.598.328.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(1.018.944.925)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	579.383.625

Mutasi tambah terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk

Transfer Masuk sebesar Rp136.750.000 berupa aset Jalan dan Jembatan serta Irigasi ke satker Menpan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 03/S.BN.00/2024 – B-13/II.2/PL.02.01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.

2. Likuidasi Masuk

Likuidasi Masuk sebesar Rp66.362.000 berupa aset Irigasi ke satker Menpan selaku satker pengampu dari satker KASN yang dilikuidasi. Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diperoleh berdasarkan BAST Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Mutasi kurang aset Jalan, Irigasi dan Jaringan keseluruhannya berasal dari Likuidasi Keluar sebesar Rp66.362.000 berupa aset Irigasi dari satker KASN yang dilikuidasi ke satker Menpan selaku satker pengampu.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Aset Tetap Lainnya Rp1.447,364.549

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.447.364.549 dan Rp1.351.922.885 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 111: Rincian Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
135121	Aset Tetap Lainnya	1.447.364.549	1.351.922.885	7,06
Jumlah A	Aset Tetap Lainnya	1.447.364.549	1.351.922.885	7,06

Aset Tetap Renovasi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat kapitalisasi atas biaya renovasi/biaya pengembangan yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, yang bukan milik entitas akuntansi, namun digunakan dalam kegiatan operasional entitas akuntansi yang melakukan renovasi. Berdasarkan hal tersebut, Aset Tetap Renovasi memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1. Aset yang direnovasi bukan milik entitas akuntansi bersangkutan.
- 2. Aset yang direnovasi digunakan untuk kegiatan operasional entitas akuntansi yang merenovasi.
- 3. Sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan oleh entitas akuntansi perenovasi pada pemilik Aset.

Sedangkan Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian, kebudayaan dan olahraga. Berdasarkan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Aset Tetap Lainnya yang disusutkan hanya Alat Musik Modern serta Aset Tetap Renovasi yang menambah masa manfaat, sehingga selain dari kedua kelompok barang tersebut tidak disusutkan.

Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar 7,06 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 112: Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Awal Perolehan per 31 Desember 2023	1.351.922.885
Mutasi Tambah:	
Pembelian	3.917.236.284
Transfer Masuk	40.541.064
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	803.478.500
Likuidasi Masuk	237.269.785
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(10.346.295)
Transfer Keluar	(3.869.738.289)
Koreksi Pencatatan (BMN)	(785.729.600)
Likuidasi Keluar	(237.269.785)
Saldo per 31 Desember 2024	1.447.364.549
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(18.425.938)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.428.938.611

Mutasi tambah terhadap Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembelian

Pembelian sebesar Rp3.917.236.284 berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp54.900.600 dan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp3.862.335.684.

2. Transfer Masuk

Transfer Masuk sebesar Rp40.541.064 berupa Aset Tetap Lainnya ke satker Menpan berasal dari Perpustakaan Nasional berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 6921/2/PLK.07/VI.2024 – 06/S.BN.00/2024 tanggal 6 Juni 2024.

3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP

Penyesuaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp803.478.500 berupa Aset Tetap Renovasi.

4. Likuidasi Masuk

Likuidasi Masuk sebesar Rp237.269.785 berupa Aset Tetap Lainnya ke satker Menpan selaku satker pengampu dari satker KASN yang dilikuidasi. Aset Tetap Lainnya tersebut diperoleh berdasarkan BAST Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Mutasi keluar terhadap Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp10.346.295 berasal dari Pengembalian Belanja TAYL yang menghasilkan aset tetap melalui setoran SSBP dengan NTPN C16341GCAJ8DVK6Q tanggal 29 Agustus 2024.

2. Transfer Keluar

Transfer Keluar sebesar Rp3.869.738.289 berupa Aset Tetap Renovasi dari satker Menpan ke Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan BAST Aset Tetap Renovasi Berupa Tanah dan Bangunan Nomor 80/BN.05/2024 tanggal 18 Desember 2024.

3. Koreksi Pencatatan

Koreksi Pencatatan berupa Aset Tetap Renovasi sebesar Rp785.729.600.

4. Likuidasi Keluar

Likuidasi Keluar sebesar Rp237.269.785 berupa Aset Tetap Lainnya dari satker KASN yang dilikuidasi ke satker Menpan selaku satker pengampu.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp143.207.232.329

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp143.207.232.329 dan Rp138.934.673.202.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Dalam tabel berikut disajikan rincian perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Tabel 113: Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31

Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	125.351.403.912	124.837.739.902	0,41
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.818.457.554	13.250.625.167	26,93
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	126.829.000	-	100
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	19.875.299	7.742.233	156,71
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	872.240.626	827.510.337	5,41
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	18.425.938	11.055.563	66,67
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		143.207.232.329	138.934.673.202	3,08

Adapun rangkuman rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 114: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
131111	Tanah	60.334.049.494	-	60.334.049.494
132111	Peralatan dan Mesin	173.738.580.179	(125.351.403.912)	48.387.176.267
133111	Gedung dan Bangunan	91.915.184.122	(16.818.457.554)	75.096.726.568
134111	Jalan dan Jembatan	126.829.000	(126.829.000)	-
134112	Irigasi	76.283.000	(19.875.299)	56.407.701
134113	Jaringan	1.395.216.550	(872.240.626)	522.975.924
135111	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
135121	Aset Tetap Lainnya	1.447.364.549	(18.425.938)	1.428.938.611
	Jumlah	329.033.506.894	(143.207.232.329)	185.826.274.565

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Rincian perbandingan Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 115: Rincian Perbandingan Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1521	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	764.867.146	783.048.964	(2,32)
1563	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(764.867.146)	(783.048.964)	(2,32)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Netto)		-	-	-

Nilai Piutang Jangka Panjang (Netto) per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan nilai bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Nilai Netto tersebut berasal dari nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (bruto) sebesar Rp764.867.146 dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp764.867.146.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp764.867.146

C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp764.867.146 dan Rp783.048.964.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai negeri non bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Jumlah Piutang TP/TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak

setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara/Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

Rincian perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 116: Rincian Perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	764.867.146	783.048.964	(2,32)
Jumlah F	Piutang Tagihan TP/TGR	764.867.146	783.048.964	(2,32)

Terdapat penurunan nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 sebesar 2,32 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 117: Rincian Mutasi Piutang Tagihan TP/TGR

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	783.048.964
Mutasi Tambah:	
Koreksi Nilai bertambah Piutang TAYL	68.189.852
Piutang baru	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Nilai berkurang Piutang TAYL	
Pembatalan Pengakuan Piutang	
Pembayaran/Angsuran Piutang	(86.371.670)
Saldo per 31 Desember 2024	764.867.146

Mutasi tambah Piutang Tagihan TP/TGR keseluruhannya berasal dari Koreksi Nilai bertambah Piutang TAYL sebesar Rp68.189.852 berupa pengakuan Piutang TGR sesuai LHR Inspektorat Kementerian PANRB yang merupakan reklas dari Piutang Lainnya.

Sementara mutasi kurang Piutang Tagihan TP/TGR keseluruhannya merupakan Pembayaran/Angsuran Piutang sebesar Rp86.371.670, dengan rincian terdiri dari debitur YS sebesar Rp18.181.818 dan debitur pegawai PANRB bukan Bendahara sebesar Rp68.189.852.

Adapun rincian perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 118: Rincian Perbandingan Piutang Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
015416	Komisi Aparatur Sipil Negara	-	-	-
427950	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	764.867.146	783.048.964	(2,32)
Jumlah F	Piutang Tagihan TP/TGR	764.867.146	783.048.964	(2,32)

Sedangkan kronologis dan tahapan penyelesaian TP a.n Y.S dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sesuai LK Kementerian PANRB TA 2015 (Audited), kerugian Negara dari sisa belanja tunjangan kinerja yang tidak disetorkan oleh Sdr. Y.S ke Kas Negara sebesar Rp853.876.643 dicatat sebagai Aset lain-lain karena masih dalam proses penyelesaian TP/TGR dan mengurangi beban pegawai di Laporan Operasional Tahun 2015 (Audited).
- 2. Penerbitan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) tanggal 7 Juni 2016 yang ditandatangani Sdr. Y.S sebesar Rp853.876.643 dan yang bersangkutan telah menyanggupi akan segera mengembalikan ke Kas Negara dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja. Atas dasar SKTJM dimaksud, Kementerian PANRB melakukan reklasifikasi Aset lain-lain menjadi Piutang TP sebesar Rp853.876.643. Sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Y.S telah membayar piutang TP tersebut sebesar Rp14.619.814 sehingga piutang TP pada LK TA 2016 (Audited) tersaji sebesar Rp839.256.829 dan keseluruhannya disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TP.
- BPK RI menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan kepada Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor Surat 28/S/MTP/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 hal Penyampaian Surat Keputusan Pembebanan.
- 4. Kementerian PANRB telah menyampaikan 3 (tiga) kali surat penagihan di TA 2017 kepada Sdr. Y.S terkait pelunasan kerugian negara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Penagihan pertama Nomor 74/KU/99/2017 tanggal 4 Mei 2017 hal Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Bendahara Gaji;

- b. Surat Penagihan kedua Nomor 7/S.KU.02.02/2017 tanggal 11
 September 2017 hal Surat Tagihan Kedua Pelunasan Kerugian
 Negara Bendahara Gaji;
- c. Surat Tagihan ketiga Nomor B/15/S.KU.02.02/2018 tanggal 7 November 2017 hal Surat Tagihan Ketiga Pelunasan Kerugian Negara Bendahara Gaji.
- 5. Pembayaran angsuran piutang TP oleh Sdr. Y.S di TA 2017 adalah sebesar Rp22.183.363 sehingga saldo piutang TP yang tersaji pada LK Tahun 2017 (Audited) adalah sebesar Rp817.073.466. Piutang TP sebesar Rp817.073.466 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet karena dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Penagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. Hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
- 6. Kementerian PANRB telah menyampaikan Surat Pengajuan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Kepada KPKNL Jakarta IV up. Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta dengan Surat Nomor B/109/KU.02.00/2017 tanggal 11 Desember 2017 hal Pengajuan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.
- 7. Sampai dengan 31 Mei 2018, pembayaran angsuran piutang TP oleh Sdr. Y.S. adalah sebesar Rp11.430.325.
- 8. Kementerian PANRB, pada tanggal 26 Juni 2018 telah menerima surat dari Panitia Urusan Piutang Negara cabang DKI Jakarta dengan nomor surat SP3N-3200/PUPNC.10.04/2018, hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara sehingga selanjutnya KPKNL yang akan mengurus piutang TP atas Sdr. Y.S, tidak lagi penagihannya oleh Satker pemilik piutang (Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara). Sesuai surat tersebut, nilai piutang TP yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN KPKNL Jakarta IV adalah sebesar Rp805.643.141.
- Pembayaran angsuran Piutang TP oleh Sdr. Y.S pada semester II tahun 2018 adalah sebesar Rp21.412.360, sehingga saldo Piutang TP yang tersaji pada LK Tahun 2018 adalah sebesar Rp784.230.781. Piutang TP sebesar Rp784.230.781 dimaksud dikategorikan sebagai piutang macet karena pengurusan piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini telah sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.06/2014.

- 10. Sdr. Y.S telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Pembayaran angsuran Piutang TP oleh Sdr. Y.S pada tahun 2019 adalah sebesar Rp818.181, sehingga saldo Piutang TP yang tersaji pada LK Tahun 2019 (Audited) adalah sebesar Rp783.412.600.
- 12. Pembayaran angsuran Piutang TP oleh Sdr. Y.S pada tahun 2020 adalah sebesar Rp272.727, sehingga saldo Piutang TP yang tersaji pada LK Tahun 2020 (Audited) adalah sebesar Rp783.139.873.
- 13. Pembayaran angsuran Piutang TP oleh Sdr. Y.S pada tahun 2021 adalah sebesar Rp90.909, sehingga saldo Piutang TP yang tersaji pada LK Tahun 2021 (Audited) adalah sebesar Rp783.048.964.
- 14. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 Sdr. Y.S tidak melakukan pembayaran angsuran Piutang TP.
- 15. PMK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024, dan diterimanya Surat Dirjen Kekayaan Negara DKI Jakarta, KPKNL Jakarta IV yang secara ringkas menyatakan bahwa Pemerintah memberikan kesempatan kepada para Penanggung Utang Instansi Pemerintah untuk menyelesaikan utangnya melalui mekanisme *Crash Program* Keringanan Utang Tahun 2024.
- 16. Telah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti kepada saudara Y.S. akan *Crash Program* tersebut, dan debitur telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan sesuai S-3114/KNL.0704/2024 dan diberikan jangka waktu sampai 7 Desember 2024 untuk debitur agar melunasi hutangnya dengan keringanan. Akan tetapi sampai dengan tenggat waktu tersebut, debitur tidak melakukan pelunasan atas seluruh piutangnya sesuai nilai *Crash Program* yang telah diberikan dan hanya mampu melakukan cicilan ringan sebesar Rp20.000.000 sebelum dipotong Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) sebesar 10% dengan NTPN 2CABB3CIFKS4RSG4 tanggal 10 Desember 2024, maka yang mengurangi nilai piutang Y.S adalah sebesar Rp18.181.818. Oleh karena itu, telah dilakukan koordinasi dengan KPKPL Jakarta IV dan KPKNL Kota Bekasi dan direncanakan akan dilakukan penyitaan atas aset yang menjadi barang

jaminan atas Piutang TP a.n Y.S pada periode Triwulan II Tahun 2025. Atas pembayaran angsuran piutang TP dari *crash program* tersebut, saldo piutang TP yang tersaji pada LK per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp764.867.146.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp764.867.146

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp764.867.146 dan Rp783.048.964.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan akun yang digunakan untuk mencatat cadangan yang harus dibentuk atas piutang yang tidak tertagih atau estimasi ketidaktertagihan piutang sebesar persentase tertentu dari akun piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 119: Rincian Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	764.867.146	783.048.964	(2,32)
Jumlah F Tagihan	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	764.867.146	783.048.964	(2,32)

Adapun perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Tagihan TP/TGR berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 120: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	764.867.146	100%	764.867.146
Jumlah	764.867.146		764.867.146
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	764.867.146		764.867.146

Aset Lainnya Rp29.873.653.691

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp29.873.653.691 dan Rp37.364.196.300.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kementerian PANRB terdiri dari Aset Tak Berwujud, Dana yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Rincian perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 121: Rincian Perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
1621	Aset Tak Berwujud	46.447.825.380	36.436.921.600	27,47
1631	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.488.838.700	11.686.842.500	(70,15)
1661	Aset Lain-lain	5.631.935.307	171.100.000	3.191,60
Jumlah Nilai Perolehan Aset Lainnya		55.568.599.387	48.294.864.100	15,06
1691	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.582.821.593)	-	100
1693	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(20.112.124.103)	(10.930.667.800)	84,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(25.694.945.696)	(10.930.667.800)	135,07
Nilai Buku Aset Lainnya		29.873.653.691	37.364.196.300	(20,05)

Nilai perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,06 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya. Nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.873.653.691 mengalami penurunan sebesar 20,05 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember

2023. Nilai buku tersebut berasal dari nilai perolehan Aset Lainnya sebesar Rp55.568.599.387 dikurangi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp25.694.945.696.

Aset Tak Berwujud Rp46.447.825.380

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp46.447.825.380 dan Rp36.436.921.600. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 122: Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
162151	Software	46.434.103.680	36.423.199.900	27,48
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	13.721.700	13.721.700	
Jumlah Aset Tak Berwujud		46.447.825.380	36.436.921.600	27,48

Terdapat kenaikan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar 27,48 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai pada Kementerian PANRB dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 123: Mutasi Aset Tak Berwujud

Mutasi tambah terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	36.436.921.600
Mutasi Tambah:	
Pembelian	4.395.742.080
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	10.989.355.200
Reklasifikasi Masuk	232.875.317
Perolehan Lainnya	198.579.000
Likuidasi Masuk	2.205.404.077
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	394.593.900
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(346.500)
Koreksi Pencatatan	(4.395.742.080)
Likuidasi Keluar	(2.205.404.077)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.804.153.137)
Saldo per 31` Desember 2024	46.447.825.380
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(20.084.714.728)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	26.363.110.652

1. Pembelian

Pembelian sebesar Rp4.395.742.080 berupa aset software komputer.

2. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP

Penyesuaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp10.989.355.200 berupa aset software komputer.

3. Reklasfikasi Masuk

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp232.875.317 berupa penambahan aset software komputer melalui reklasifikasi

4. Perolehan Lainnya

Perolehan Lainnya sebesar Rp198.579.000 berupa aset software komputer.

5. Likuidasi Masuk

Likuidasi Masuk sebesar Rp2.205.404.077 berupa aset software komputer sebesar Rp2.191.682.377 dan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp13.721.700 ke satker Menpan selaku satker pengampu dari satker KASN yang dilikuidasi. Aset Tak Berwujud tersebut diperoleh berdasarkan BAST Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

6. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp394.593.900 berupa pengembangan aset software komputer.

Mutasi keluar terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang berupa aset software komputer sebesar Rp346.500 berasal dari Pengembalian Belanja TAYL yang menghasilkan aset tetap melalui setoran SSBP dengan NTPN 9484461QV4D623FQ tanggal 4 Oktober 2024.

2. Koreksi Pencatatan

Koreksi Pencatatan berupa aset software komputer sebesar Rp4.395.742.080.

3. Likuidasi Keluar

Likuidasi Keluar sebesar Rp2.205.404.077 berupa aset software komputer sebesar Rp2.191.682.377 dan Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp13.721.700 dari satker KASN yang dilikuidasi ke satker Menpan selaku satker pengampu.

4. Penghentian Aset Dari Penggunaan

Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp1.804.153.137 berupa aset software komputer yang diklasifikasikan dari aset tetap ke aset lain-lain.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Adapun rincian perbandingan Aset Tak Berwujud berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 124: Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud Satker KASN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
162151	Software	-	1.958.807.060	(100)
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	13.721.700	(100)
Jumlah Aset Tak Berwujud		-	1.972.528.760	(100)

Tabel 125: Rincian Perbandingan Aset Tak Berwujud Satker Menpan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
162151	Software	46.434.103.680	34.464.392.840	34,73
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	13.721.700	0	100
Jumlah Aset Tak Berwujud		46.447.825.380	34.464.392.840	34,73

Terdapat 32 aplikasi dengan nilai Rp0 hasil pengembangan sendiri dan 2 aplikasi diperoleh dari hibah yang tdak dicatat dalam Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri tersebut tidak didukung dengan dokumen perolehan yang memadai berupa SPJ kegiatan. Sementara atas aplikasi yang diperoleh dari hibah juga tidak ditemukan nilai perolehan aplikasi yang bisa dijadikan dasar pencatatan dalam Neraca. Adapun rincian aplikasi yang tidak dicatat dalam Laporan Barang satker Menpan adalah sebagai berikut:

Tabel 126 Rincian Aplikasi yang Tidak Tercatat dalam Laporan Barang Satker Menpan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Aplikasi	Unit Kerja	Keterangan
1.	Aplikasi Agenda Kegiatan	Biro DAKIP	Dibangun sendiri
2.	Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat	Biro DAKIP	Dibangun sendiri
3.	Aplikasi Konfirmasi Kehadiran Kegiatan KemenPANRB	Biro DAKIP	Dibangun sendir
4.	Aplikasi Cloud KemenPANRB	Biro DAKIP	Dibangun sendiri
5.	Aplikasi Perpustakaan	Biro DAKIP	Dibangun sendiri
6.	Portal Layanan	Biro DAKIP	Dibangun sendiri
7.	Portal MAPANRB [Web Mobile]	Biro DAKIP	Dibangun sendiri
8.	Portal Inspektorat	Inspektorat	Dibangun sendiri
9	Aplikasi Pendaftaran Seleksi JPT KemenPANRB	Biro SDMOH	Dibangun sendiri
10.	Aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai	Biro SDMOH	Dibangun sendiri
11.	Aplikasi Kepegawaian	Biro SDMOH	Dibangun sendiri
12.	Aplikasi Surat Tugas	Biro SDMOH	Dibangun sendiri
13.	Aplikasi Layanan Hukum	Biro SDMOH	Dibangun sendiri
14.	Aplikasi Perencanaan dan Evaluasi	Biro MKKS	Dibangun sendiri
15.	Aplikasi RB Internal KemenPANRB	Biro MKKS	Dibangun sendiri
16.	Aplikasi Layanan Administrasi Kerjasama Luar Negeri	Biro MKKS	Dibangun sendiri
17.	Aplikasi Pencatatan Laporan Keuangan	Biro UK	Dibangun sendiri
18.	Aplikasi Tunjangan Kinerja	Biro UK	Dibangun sendiri
19.	Aplikasi Poliklinik KemenPANRB	Biro UK	Dibangun sendiri
20.	Aplikasi e-Office	Biro UK	Dibangun sendiri
21.	Aplikasi Kehadiran Rapat	Biro UK	Dibangun sendiri
22.	Aplikasi Registrasi Tamu	Biro UK	Dibangun sendir
23.	eSAKIP Review	Kedeputian RB Kunwas	Dibangun sendir

24.	Aplikasi Portal Pencatatan Pejabat KLD	Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana	Dibangun sendiri
25.	Evaluasi SPBE	Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana	Dibangun sendiri
26.	EvinBalaks	Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana	Dibangun sendiri
27.	Aplikasi Survey BerAkhlak ASN	Kedeputian SDM Aparatur	Dibangun sendiri
28.	Aplikasi Hasil Evaluasi Jabatan	Kedeputian SDM Aparatur	Dibangun sendiri
29.	Aplikasi Anugerah ASN	Kedeputian SDM Aparatur	Dibangun sendiri
30.	PEK-PPP	Kedeputian Pelayanan Publik	Dibangun sendiri
31.	Aplikasi Berita Acara Evaluasi yanlik	Kedeputian Pelayanan Publik	Dibangun sendiri
32.	Survei Budaya Kerja	Kedeputian SDM Aparatur	Dibangun sendiri
33.	Aplikasi SP4N-LAPOR!	Kedeputian Pelayanan Publik	Hibah dari KSP
34.	MPP Digital	Kedeputian Pelayanan Publik	Hibah dari Pemkab Banyuwangi

Selain itu masih terdapat tiga aplikasi dengan total nilai perolehan sebesar Rp622.250.000 dan nilai buku Rp0 yang sudah tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh unit kerja pengguna. Hal ini dikarenakan ada perubahan arah kebijakan/ketentuan yang mengakibatkan aplikasi tersebut sudah tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan organisasi saat ini. Mengenai ke tiga aplikasi tersebut akan dilaksanakan proses henti guna dan penghapusan dari pencatatan aset pada Modul BMN. Adapun rincian aplikasi yang sudah tidak aktif digunakan untuk kegiatan operasional satker Menpan adalah sebagai berikut:

Tabel 127: Rincian Aplikasi yang Sudah Tidak Aktif Digunakan Satker Menpan per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama Aplkasi	Nilai Perolehan	Unit Kerja
1.	Aplikasi PMPRB Online	381,000,000	Kedeputian RB Kunwas
2.	Aplikasi Integrasi Database Pegawai	49.350.000	Biro SDMOH
3.	Aplikasi PMPZI	191.900.000	Kedeputian RB Kunwas
Jumla	h Aplikasi yang Sudah Tidak Aktif Digunakan	622.250.000	

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Dana yang Dibatasi Penggunannya Rp3.488.838.700

C.4.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.488.838.700 dan Rp11.686.842.500. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang

digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi belanja), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan atau karena belum diterima pekerjaannya. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya ditampung dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

Rincian perbandingan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada Kementerian PANRB disajikan pada tabel berikut:

Tabel 128: Rincian Perbandingan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	3.488.838.700	11.686.842.500	(70,15)
Jumlah Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		3.488.838.700	11.686.842.500	(70,15)

Terdapat penurunan nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar 70,15 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 129: Rincian Mutasi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	11.686.842.500
Mutasi Tambah:	
Penerbitan SP2D-Penampungan atas SPM-	•
Penampungan RPATA Tahun Anggaran Berjalan	3.488.838.700
Mutasi Kurang:	_
Penerbitan SP2D-Pembayaran atas SPM-Penihilan	`
RPATA Tahun Anggaran Yang Lalu	(11.686.842.500)
Saldo per 31 Desember 2024	3.488.838.700

Mutasi tambah Dana Yang Dibatasi Penggunaannya keseluruhannya berasal dari Penerbitan SP2D-Penampungan atas SPM-Penampungan RPATA Tahun

Anggaran Berjalan sebesar Rp3.488.838.700 terkait dengan kegiatan satker Menpan berikut:

- a. Pengadaan Jasa Penyusunan Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N-LAPOR! sebesar Rp79.365.000 sesuai BAST Nomor 1807/BAST.I/D.IV/PANRB/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Perorangan Manajemen Proyek Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional Sub Aplikasi Prioritas Bidang Aparatur Negara sebesar Rp16.600.000 sesuai BAST Nomor 323/BAST/ PPK.D.II.PANRB/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- c. Pengadaan Alat Pengolah Data Tahap XIV Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB TA 2024 sebesar Rp112.100.000 sesuai BAST Nomor 325/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- d. Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Perorangan Manajemen Proyek Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional Sub Aplikasi Prioritas Bidang Bantuan Sosial dan Kepolisian sebesar Rp16.600.000 sesuai BAST Nomor 322/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- e. Pekerjaan Jasa Lainnya Dalam Rangka Penyusunan Dokumen *Brand Guideline* untuk *Rebranding* SP4N-LAPOR! Sebagai Upaya Penguatan Komunikasi Partisipasi Publik sebesar Rp78.310.500 sesuai BAST Nomor 1806/BAST.I/D.IV/PANRB/12/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- f. Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Perorangan Manajemen Proyek Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional Sub Aplikasi Prioritas Bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar Rp16.600.000 sesuai BAST Nomor 324/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 tanggal 28 Desember 2024.
- g. Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Rancangan Awal Renstra Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB 2025-2029 sebesar Rp53.400.000 sesuai BAST Nomor 328/BAST/ PPK.D.II.PANRB/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- h. Pengadaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Perorangan Penyusunan Proses Bisnis Tematik Bidang Bantuan Kesehatan sebesar Rp36.000.000 sesuai BAST Nomor 327/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- Pengadaan Jasa Lainnya Staf Pendukung Menteri PANRB sebesar Rp8.000.000 sesuai BAST Nomor 1306/BAST/BI.PANRB/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.

- j. Pekerjaan Penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas Dalam Rangka Mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara yang Terintegrasi Dengan Layanan Dasar Kepegawaian sebesar Rp2.747.338.800 sesuai BAST Nomor 0816/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- k. Pengadaan Jasa Lainnya Staf Pendukung Menteri PANRB Bidang Reformasi Birokrasi sebesar Rp10.000.000 sesuai BAST Nomor 1307/BAST/BI.PANRB/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- I. Pengadaan Sewa Layanan Chatbot Bulan Juni-Desember 2024 sebesar Rp28.571.400 sesuai BAST Nomor 0820/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- m. Pekerjaan Pengadaan dan Sewa Mesin Fotocopy B/W dan Colour Digital Bulan Desember 2024 sebesar Rp38.370.000 sesuai BAST Nomor 1304/ BAST/BUK.I/PANRB/ 12/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- n. Pengadaan Jasa Layanan *Backup* Internet Pimpinan sebesar Rp20.000.000 sesuai BAST Nomor 1305/BAST/BI.PANRB/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- o. Pekerjaan Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Perorangan Manajemen Proyek Sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional Sub Portal Layanan dan Digital Publik Infrastruktur sebesar Rp16.600.000 sesuai BAST Nomor 331/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- p. Pengadaan Langganan Jaringan Internet Kementrerian PANRB sebesar Rp210.983.000 sesuai BAST Nomor 1303/PPK-BUK.I/PANRB/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Mutasi kurang Dana Yang Dibatasi Penggunaannya keseluruhannya berasal dari Penerbitan SP2D-Pembayaran atas SPM-Penihilan RPATA Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp11.686.842.500 terkait dengan kegiatan:

1. Satker KASN

- a. Pengadaan Langganan Daya dan Jasa Bandwith (Internet) Kantor KASN SMESCO bulan Oktober Desember 2023 sebesar Rp82.119.300 sesuai BAST Nomor BASTP-4/PPK-LDJBISM/12/2023 tanggal 31 Desember 2023.
- b. Pengadaan Langganan Daya dan Jasa Bandwith (Internet) Kantor
 KASN Cipinang bulan Oktober Desember 2023 sebesar

- Rp50.400.000 sesuai BAST Nomor BASTP-4/PPK-LDJBICP/12/2023 tanggal 31 Desember 2023.
- c. Pengadaan Tenaga Keamanan Outsourcing Kantor KASN bulan Desember 2023 sebesar Rp66.129.600 sesuai BAST Nomor BASTP-12/PPK-PJKK/12/2023 tanggal 31 Desember 2023.
- d. Pengadaan Langganan Daya dan Jasa Bandwith (Internet) Kantor KASN MT Haryono bulan Oktober – Desember 2023 sebesar Rp102.071.100 sesuai BAST Nomor BASTP-4/PPK-LDJBIMT/12/2023 tanggal 31 Desember 2023.

2. Satker Menpan

- a. Pengadaan Jasa Penyusunan Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik Bidang Kesehatan Digitalisasi Rekam Medis, Penyelenggaraan Sistem Rujukan *Online* dan Rekam Medis *Online* sebesar Rp59.100.000 sesuai BAST Nomor 264/BAST/PPK.D.II.PANRB/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- b. Pengadaan Jasa Penyusunan Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik Perizinan dan Akreditasi sebesar Rp58.800.000 sesuai BAST Nomor 262/BAST/PPK.D.II.PANRB/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- c. Pengadaan Jasa Penyusunan Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik Bidang Kesehatan Terkait Layanan Telemedicine dan Sistem Personal *Health Care* sebesar Rp58.800.000 sesuai BAST Nomor 263/BAST/PPK.D.II.PANRB/2023 tanggal 22 Desember 2023.
- d. Pengadaan Barang Portal Arsitektur SPBE sebesar Rp10.911.296.000 sesuai BAST Nomor 280/BAST/PPK.D.II.PANRB/2023 tanggal 29 Desember 2023.
- e. Pengadaan Sewa Layanan Chatbot sebesar Rp87.143.500 sesuai
 BAST Nomor 1848/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2023 tanggal 29
 Desember 2023.
- f. Pengadaan Langganan Jaringan Internet sebesar Rp210.983.000 sesuai BAST Nomor 1925/PPK-BUK.I/PANRB/12/2023 tanggal 31 Desember 2023.

Rincian transaksi belanja yang dibayarkan menggunakan mekanisme RPATA per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 130: Rincian Transaksi RPATA per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun Belanja	Uraian	Nilai
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	230.983.000
522131	Belanja Jasa Konsultan	235.165.000
522141	Belanja Sewa	66.941.400
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.100.000
536111	Belanja Modal Lainnya	2.747.338.800
522191	Belanja Jasa Lainnya	96.310.500
	3.488.838.700	

Aset Lain-lain Rp5.631.935.307

C.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.631.935.307 dan Rp171.100.000. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian PANRB serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian perbandingan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 131 Rincian Perbandingan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.600.610.307	-	100
166113	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	31.325.000	171.100.000	(81,69)
Jumlah Aset Lain-lain		5.631.935.307	171.100.000	3.191,60

Terdapat kenaikan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar 3.191,60 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 132: Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Awal Perolehan per 31 Desember 2023	171.100.000
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	16.186.878.574
- Transfer Masuk (Henti Guna)	83.662.500
- Likuidasi Masuk (Henti Guna)	67.800.000
Mutasi kurang:	
- Likuidasi Keluar (Henti Guna)	(67.800.000)
- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(10.809.705.767)
Saldo per 31 Desember 2024	5.631.935.307
Akumulasi Penyusutan/Akumulasi s.d. 31 Desember 2024	(5.610.230.968)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	21.704.339

Mutasi tambah terhadap Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasfikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp16.186.878.574 melalui penghentian aset dari penggunaannya karena sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintah dengan rincian Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.804.153.137 dan Aset Tetap sebesar Rp14.315.686.437.

2. Transfer Masuk (Henti Guna)

Transfer Masuk (Henti Guna) sebesar Rp83.662.500 berupa aset tetap yang sudah dihentikan penggunaan aktifnya dengan rincian terdiri dari peralatan dan mesin sebesar Rp82.467.500 dan aset tetap lainnya sebesar Rp1.195.000 ke satker Menpan berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan BAST Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 03/S.BN.00/2024 — B-13/II.2/PL.02.01/1/2024 tanggal 4 Januari 2024.

3. Likuidasi Masuk (Henti Guna)

Likuidasi Masuk sebesar Rp67.800.000 berupa aset peralatan dan mesin yang sudah dihentikan penggunaan aktifnya ke satker Menpan selaku satker pengampu dari satker KASN yang dilikuidasi. Aset Lain-lain tersebut diperoleh berdasarkan BAST Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Mutasi keluar terhadap Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Likuidasi Keluar (Henti Guna)

Likuidasi Keluar sebesar Rp67.800.000 berupa aset peralatan dan mesin yang sudah dihentikan penggunaan aktifnya dari satker KASN yang dilikuidasi ke satker Menpan selaku satker pengampu.

Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan
 Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp10.809.705.767
 berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah.

Rincian Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasinya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp25.694.945.696

C.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp25.694.945.696 dan Rp10.930.667.800. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 133: Rincian Perbandingan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.582.821.593	-	100
169315	Akumulasi Amortisasi Software	20.084.714.728	10.759.567.800	86,67
169318	Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	27.409.375	171.100.000	(83,98)
Jumlah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		25.694.945.696	10.930.667.800	135,07

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 134: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
162151	Software	46.434.103.680	(20.084.714.728)	26.349.388.952
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	13.721.700	-	13.721.700
	Jumlah Aset Tak Berwujud	46.447.825.380	(20.084.714.728)	26.363.110.652
В.	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya			
169139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	3.488.838.700	-	3.488.838.700
	Jumlah Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.488.838.700	-	3.488.838.700
C.	Aset Lain-lain			
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.600.610.307	(5.582.821.593)	17.788.714
166113	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	31.325.000	(27.409.375)	3.915.625
	Jumlah Aset Lain-lain	5.631.935.307	(5.610.230.968)	21.704.339
	Jumlah	55.568.599.387	(25.694.945.696)	29.873.653.691

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek Rp3.802.023.480

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.802.023.480 dan Rp12.085.588.376.

Rincian perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 135: Rincian Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
2121	Utang kepada Pihak Ketiga	3.802.023.480	12.085.588.376	(68,54)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.802.023.480	12.085.588.376	(68,54)

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 68,54 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan likuidasi KASN ke dalam Menpan sehingga menurunkan pemakaian liistrik dan telepon dan penurunan pekerjaan kontraktual yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang memerlukan mekanisme RPATA.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp3.802.023.480

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.802.023.480 dan Rp12.085.588.376. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Pada Kementerian PANRB, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja yang Masih Harus Dibayar dan Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Sedangkan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada Kementerian PANRB berasal dari utang atas progres pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayarannya. Dalam PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran, pendanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat ditampung dalam RPATA. Sebagai dampak mekanisme RPATA ini pada Laporan Keuangan mengakuinya sebagai akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya. Dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi Transaksi dengan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) satker pada Kementerian/Lembaga melakukan reklasifikasi akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya menjadi Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

Rincian perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 136: Rincian Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	40.730.000	27.667.000	47,22
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	272.454.780	371.078.876	(26,58)
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.488.838.700	11.686.842.500	(70,15)
Ju	mlah Utang kepada Pihak Ketiga	3.802.023.480	12.085.588.376	(68,54)

Terdapat penurunan nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar 68,54 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya mutasi nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 137: Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	12.085.588.376
Mutasi Tambah:	
Penyesuaian Belanja YMHD Tahun Anggaran Berjalan	313.184.780
Reklasifikasi Utang yang belum diterima tagihannya	•
TAB	3.488.838.700
Mutasi Kurang:	_
Penyesuaian Belanja YMHD Tahun Anggaran Yang Lalu	(398.745.876)
Penyesuaian Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	`
TAYL	(11.686.842.500)
Saldo per 31 Desember 2024	3.802.023.480

Mutasi tambah terhadap Utang kepada Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyesuaian Belanja YMHD Tahun Anggaran Berjalan
 Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar (YMHD) Tahun Anggaran
 Berjalan (TAB) sebesar Rp313.184.780 berupa jurnal penyesuaian Belanja
 Pegawai YMHD dan Belanja Barang non kontraktual YMHD dengan rincian
 terdiri dari Belanja Uang Makan PNS bulan Desember 2024 yang
 dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp36.289.000, Belanja Uang Makan
 PPPK bulan Desember 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 sebesar
 Rp4.441.000, tagihan Belanja Langganan Listrik pemakaian bulan
 Desember 2024 sebesar Rp267.865.861, dan tagihan Belanja Langganan
 Telepon pemakaian bulan Desember 2024 sebesar Rp4.588.919.
- Reklasifikasi Utang yang belum diterima tagihannya TAB
 Reklasifikasi Utang yang belum diterima tagihannya TAB sebesar
 Rp3.488.838.700 berupa jurnal manual RPATA untuk mencatat utang

kepada pihak ketiga sehubungan dengan adanya kewajiban sampai akhir periode pelaporan yang belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progres penyelesaian pekerjaan kontraktual.

Mutasi kurang terhadap Utang kepada Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Penyesuaian Belanja YMHD Tahun Anggaran Yang Lalu Penyesuaian Belanja YMHD Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp398.745.876 berupa jurnal balik awal tahun (sesuai PMK 232 Tahun 2022) atas jurnal penyesuaian Belanja Pegawai YMHD Tahun Anggaran Yang Lalu dan Belanja Barang non kontraktual YMHD Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian terdiri dari Belanja Uang Makan PNS bulan Desember 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp24.326.000, Belanja Uang Makan PPPK bulan Desember 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp3.341.000, tagihan Belanja Langganan Listrik pemakaian bulan Desember 2023 sebesar Rp364.177.412, dan tagihan Belanja Langganan Telepon pemakaian bulan Desember 2023 sebesar Rp6.901.464.
- 2. Penyesuaian Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya TAYL Penyesuaian Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya TAYL sebesar Rp11.686.842.500 berupa jurnal balik awal tahun (sesuai PMK 109 Tahun 2023) atas jurnal penyesuaian reklasifikasi utang yang belum diterima tagihannya menjadi utang kepada pihak ketiga lainnya atas progres pekerjaan kontraktual yang belum dilaksanakan pembayaran sampai dengan akhir periode pelaporan TAYL.

Adapun rincian perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 138: Rincian Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Satker KASN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	130.529.763	(100,00)
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	300.720.000	(100,00)
Ju	mlah Utang kepada Pihak Ketiga	-	431.249.763	(100,00)

Tabel 139: Rincian Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga Satker Menpan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(-1-			:- L- \
laai	am	ru	piah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus			
212111	Dibayar	40.730.000	27.667.000	47,22
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	272.454.780	240.549.113	13,26
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.488.838.700	11.386.122.500	(69,36)
Ju	mlah Utang kepada Pihak Ketiga	3.802.023.480	11.654.338.613	(67,38)

EKUITAS

Ekuitas

Rp214.065.784.098

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp214.065.784.098 dan Rp163.324.631.271. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 140 : Rincian Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
391111	Ekuitas	214.065.784.098	163.324.631.271	31,07
Jumlah E	kuitas	214.065.784.098	163.324.631.271	31,07

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 31,07 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Rincian penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas per 31 Desember 2024 disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan bagian Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/ Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional periode 31 Desember 2024 disandingkan dengan Laporan Operasional periode 31 Desember 2023.

Pendapatan Operasional Rp0

Pendapatan Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp289.632.940.

Pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima dari pelaksanaan kegiatan operasional entitas. Pendapatan operasional pada Kementerian PANRB seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehingga tidak terdapat pendapatan dari sumber lain yakni pendapatan perpajakan maupun pendapatan hibah.

Rincian Perbandingan Pendapatan Kegiatan Operasional berdasarkan Satuan Kerja pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 141 : Rincian Perbandingan Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	0	289.632.940	(100,00)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	0	0	-
Jumlah	Pendapatan Kegiatan Operasional	0	289.632.940	(100,00)

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan Kegiatan Operasional pada TA 2024 turun dibandingkan periode sebelumnya. Seluruh Pendapatan Kegiatan Operasional Kementerian PANRB berasal dari Satuan Kerja KASN dan merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada TA 2023 terdapat pendapatan pada Satker KASN yang berasal dari Denda

Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan dari perbaikan transaksi penerimaan negara yang telah disahkan KPPN Jakarta IV, sedangkan pada TA 2024 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan penerimaan di lingkup Kementerian PANRB.

Analisa Penurunan Pendapatan Kegiatan Operasional akan dijelaskan pada D.1

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp289.632.940.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Tabel 142: Rincian Perbandingan PNBP periode TA 2024 dan 2023

AKUN	URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	NAIK (TURUN) %
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	289.612.940	(289.612.940)	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	20.000	(20.000)	(100,00)
Jumlah	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak - LO	0	289.632.940	(289.632.940)	(100,00)

Berdasarkan tabel di atas, pada TA 2024 tidak terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak. PNBP - LO Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TA 2023 seluruhnya berasal dari Satker KASN, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp289.612.940 merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah berdasarkan addendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Bangunan/Gedung dan Pembangunan Hall Serba Guna–Gedung KASN Cipinang beserta fasilitas pendukung Nomor: SP-03/PPK.PJKPG/12/2022 tanggal 23 Desember 2022.
- Realisasi Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp20.000 merupakan perbaikan transaksi penerimaan negara yang telah disahkan KPPN Jakarta IV sesuai Surat Nomor:S-12/KPN.1204.2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Satker 015416.

Beban Operasional Rp459.768.331.137

Beban Operasional

Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp459.768.331.137 dan Rp376.378.265.768, naik sebesar Rp83.390.065.369 atau 22,16% dibandingkan 31 Desember 2023.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas. Beban Operasional Kementerian PANRB meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Rincian Beban Operasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 143: Rincian Perbandingan Beban Operasional periode TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	145.347.317.028	124.252.951.905	21.094.365.123	16,98
Beban Persediaan	4.370.300.511	4.386.805.430	(16.504.919)	(0,38)
Beban Barang dan Jasa	131.983.450.323	98.332.313.508	33.651.136.815	34,22
Beban Pemeliharaan	13.007.938.923	11.956.601.748	1.051.337.175	8,79
Beban Perjalanan Dinas	134.985.384.602	115.149.970.547	19.835.414.055	17,23
Beban Penyusutan dan Amortisasi	30.071.501.234	22.299.622.630	7.771.878.604	34,85
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.438.516	0	2.438.516	-
Jumlah Beban Operasional	459.768.331.137	376.378.265.768	83.390.065.369	22,16

Adapun rincian perbandingan beban operasional berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 144: Rincian Perbandingan Beban Operasional per Satuan Kerja periode TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	34.329.609.180	55.079.835.318	(37,67)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	425.438.721.957	321.298.430.450	32,41
	Jumlah Beban Operasional	459.768.331.137	376.378.265.768	22,16

Beban Pegawai Rp145.347.317.028

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp145.347.317.028 dan Rp124.252.951.905.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran Negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

Rincian perbandingan Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 145: Rincian Perbandingan Beban Pegawai periode TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	33.477.392.716	31.223.999.199	7,22
Beban Pembulatan Gaji PNS	538.917	545.044	(1,12)
Beban Tunj. Suami/ Istri PNS	1.821.155.970	1.628.822.044	11,81
Beban Tunj. Anak PNS	416.799.778	378.985.296	9,98
Beban Tunj.Struktural PNS	1.610.455.000	1.911.760.000	(15,76)
Beban Tunj. Fungsional PNS	4.184.845.000	4.042.236.000	3,53
Beban Tunj.PPH	385.642.231	200.145.157	92,68
Beban Tunj. Beras PNS	1.487.775.200	1.479.464.060	0,56
Beban Uang Makan PNS	3.365.836.450	4.023.577.100	(16,35)
Beban Tunj. Umum PNS	590.819.200	708.790.000	(16,64)
Beban Tunj. Pegawai Non PNS	155.616.390	0	0,00
Beban Tunj. Lainnya Pegawai Non PNS	359.200.000	289.200.000	24,20
Beban Gaji Pokok PPPK	3.153.302.900	1.404.665.316	124,49
Beban Pembulatan Gaji PPPK	44.433	24.098	84,38
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	150.646.340	69.102.220	118,01
Beban Tunjangan Anak PPPK	30.956.720	15.014.294	106,18
Beban Tunjangan Struktural PPPK	0	71.500.000	(100,00)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	498.014.000	225.946.000	120,41
Beban Tunjangan Beras PPPK	141.436.260	69.305.940	104,08
Beban Uang Makan PPPK	338.121.000	211.283.850	60,03
Beban Uang Honor Tetap	6.185.613.425	7.940.505.723	(22,10)
Beban Lembur	1.138.365.000	1.006.205.000	13,13
Beban Uang Lembur PPPK	183.580.000	69.851.000	162,82
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	79.451.056.936	64.304.109.670	23,56
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6.220.103.162	2.977.914.894	108,87
Jumlah	145.347.317.028	124.252.951.905	16,98

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pegawai pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,98% bila dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1. Kenaikan beban Gaji Pokok PNS disebabkan terdapat perpindahan Pejabat/Pegawai ke instansi asal/lain.
- 2. Peningkatan komponen Gaji Induk (beban tunjangan suami/ istri PNS, beban tunjangan anak PNS, dan beban tunjangan beras PNS), disebabkan perubahan status kawin pegawai, serta kenaikan gaji pokok sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- 3. Peningkatan beban Uang Lembur disebabkan meningkatnya kebutuhan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya mendesak sehingga perlu untuk dilaksanakan kerja lembur baik pada hari kerja maupun hari libur.
- Peningkatan beban Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja disebabkan pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB.
- Peningkatan beban Tunjangan PPh sebagai akibat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 6. Peningkatan beban Tunjangan Fungsional disebabkan terjadinya perpindahan dan kenaikan jenjang jabatan para pegawai Fungsional.

Adapun rincian perbandingan beban pegawai berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 146: Rincian Perbandingan Beban Pegawai per Satuan Kerja periode TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	15.143.719.687	19.159.009.177	(20,96)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	130.203.597.341	105.093.942.728	23,89
	Jumlah	145.347.317.028	124.252.951.905	16,98

Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dengan Beban Pegawai di LO pada TA 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 147: Rincian Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO TA 2024

Akun	Uraian Akun	Belanja LRA	Selisih	Beban LO
511111	Beban Gaji Pokok PNS	33.477.392.716	0	33.477.392.716
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	538.917	0	538.917
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.821.155.970	0	1.821.155.970
511122	Beban Tunj. Anak PNS	416.799.778	0	416.799.778
511123	Beban Tunj.Struktural PNS	1.610.455.000	0	1.610.455.000
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4.184.845.000	0	4.184.845.000
511125	Beban Tunj.PPH	385.642.231	0	385.642.231
511126	Beban Tunj. Beras PNS	1.487.775.200	0	1.487.775.200
511129	Beban Uang Makan PNS	3.353.873.450	11.963.000	3.365.836.450
511151	Beban Tunj. Umum PNS	590.819.200	0	590.819.200
511512	Beban Tunj. Pegawai Non PNS	155.616.390	0	155.616.390
511519	Beban Tunj. Lainnya Pegawai Non PNS	359.200.000	0	359.200.000
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	3.153.302.900	0	3.153.302.900
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	44.433	a	44.433
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	150.646.340	0	150.646.340
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	30.956.720	0	30.956.720
511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	0	O	0
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	498.014.000	0	498.014.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	141.436.260	0	141.436.260
511628	Beban Uang Makan PPPK	337.021.000	1.100.000	338.121.000
512111	Beban Uang Honor Tetap	6.185.613.425	0	6.185.613.425
512211	Beban Lembur	1.138.365.000	0	1.138.365.000
512212	Beban Uang Lembur PPPK	183.580.000	0	183.580.000
512411	Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja	79.451.056.936	0	79.451.056.936
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	6.220.103.162	0	6.220.103.162
	Jumlah	145.334.254.028	13.063.000	145.347.317.028

Terdapat penyesuaian sebesar Rp13.063.000 yang seluruhnya berasal dari Satker MENPAN, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 148: Rincian Penyesuaian Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO Satker MENPAN TA 2024

No.	Uraian	Nilai
а	Beban Pegawai LO	145.347.317.028
b	Belanja Pegawai LRA	145.334.254.028
С	Selisih Beban Pegawai LO dengan Blj. Pegawai LRA	13.063.000
Fakt	or yang Mempengaruhi	
Seli	sih Beban Uang Makan PNS	11.963.000
а	Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 yang terbit SP2D pada Januari 2024	(24.326.000)
b	Pengakuan Uang Makan PNS Desember 2024 yang masih harus dibayar	36.289.000
Seli	sih Beban Uang Makan PPPK	1.100.000
С	Pembayaran Uang Makan PPPK Bulan Desember 2023 yang terbit SP2D pada Januari 2024	(3.341.000)
d	Pengakuan Uang Makan PPPK Desember 2024 yang masih harus dibayar	4.441.000
	Jumlah Penyesuaian	13.063.000

Rincian Jurnal Penyesuaian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 149: Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Pegawai Satker MENPAN TA 2024

No.	Uraian	Debit	Kredit	Nominal
1	Menpan: Jurnal Balik Beban Uang Makan PNS Desember 2023	212111	511129	24.326.000
2	Menpan: Jurnal Balik Beban Uang Makan PPPK Desember 2023	212111	511628	3.341.000
3	Menpan: Jurnal Pengakuan Belanja Pegawai Masih Harus Dibayar Uang Makan PNS Desember	511129	212111	36.289.000
4	MenpanJurnal Pengakuan Belanja Pegawai Masih Harus Dibayar Uang Makan PPPK Desember	511628	212111	3.341.000

Beban Persediaan Rp4.370.300.511

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.370.300.511 dan Rp4.386.805.430.

Beban Persediaan merupakan beban yang timbul atas konsumsi barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Rincian Beban Persediaan pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 150: Rincian Perbandingan Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	4.370.300.511	4.386.805.430	(0,38)
Jumlah Beban Persediaan	4.370.300.511	4.386.805.430	(0,38)

Berdasarkan tabel di atas, Beban Persediaan pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,38,% bila dibandingkan dengan TA 2023, hal ini dikarenakan menurunnya penggunaan/pemakaian akan barang persediaan berupa ATK, computer supplies, dan persediaan konsumsi lainnya.

Adapun rincian perbandingan beban persediaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 151: Rincian Perbandingan Beban Persediaan per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	Naik (Turun) %
15416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	217.122.750	718.990.150	(69,80)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	4.153.177.761	3.667.815.280	13,23
	Jumlah	4.370.300.511	4.386.805.430	(0,38)

Seluruh persediaan konsumsi ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh pegawai. Penurunan beban persediaan sejalan dengan penurunan realisasi belanja persediaan, terkait dengan efisiensi anggaran serta memaksimalkan penggunaan persediaan yang tersedia.

Beban Barang dan Jasa Rp131.983.450.323

D.4 Beban Barang Dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp131.983.450.323 dan Rp98.332.313.508.

Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa serta beban aset ekstrakomptabel. Beban barang dan jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Sementara beban aset ekstrakomptabel beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

Rincian Beban Barang dan Jasa pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 152: Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	13.104.667.067	12.877.446.128	1,76
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108.717.500	135.660.200	(19,86)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	534.732.000	861.180.000	(37,91)
Beban Barang Operasional Lainnya	3.034.185.067	3.000.548.179	1,12
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	113.599.893	(100,00)
Beban Bahan	13.138.781.674	12.555.068.007	4,65
Beban Honor Output Kegiatan	128.616.000	711.260.000	(81,92)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.118.413.033	2.511.545.617	103,80
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	78.673.420	113.442.480	(30,65)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	9.720.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	4.004.507.846	3.811.045.449	5,08
Beban Langganan Telepon	66.702.445	83.856.821	(20,46)
Beban Langganan Air	1.655.700	1.565.500	5,76
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.857.895.652	3.981.769.417	(3,11)
Beban Jasa Konsultan	37.556.910.595	26.386.359.292	42,33
Beban Sewa	4.372.610.220	5.824.769.240	(24,93)
Beban Jasa Profesi	11.174.177.219	10.152.697.829	10,06
Beban Jasa Lainnya	35.702.204.885	15.048.923.465	137,24
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	151.855.991	(100,00)
Jumlah	131.983.450.323	98.332.313.508	34,22

Berdasarkan tabel di atas, Beban Barang dan Jasa pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 34,22% bila dibandingkan dengan TA 2023. Peningkatan beban sejalan dengan peningkatan realisasi belanja terkait.

Adapun rincian perbandingan beban barang dan jasa berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 153: Rincian Perbandingan Beban Barang dan Jasa per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	9.874.292.835	18.580.058.652	(46,86)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	122.109.157.488	79.752.254.856	53,11
	Jumlah	131.983.450.323	98.332.313.508	34,22

Adapun perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan Beban Barang dan Jasa di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 154: Rincian Perbandingan Belanja Barang&Jasa di LRA dan Beban Barang&Jasa di LO TA 2024

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
521111	Beban Keperluan Perkantoran	14.085.128.050	(980.460.983)	13.104.667.067
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108.717.500	0	108.717.500
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	534.732.000	0	534.732.000
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3.034.185.067	0	3.034.185.067
521211	Beban Bahan	13.138.781.674	0	13.138.781.674
521213	Beban Honor Output Kegiatan	128.616.000	0	128.616.000
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5.118.413.033	0	5.118.413.033
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	78.673.420	0	78.673.420
522111	Beban Langganan Listrik	4.100.819.397	(96.311.551)	4.004.507.846
522112	Beban Langganan Telepon	69.014.990	(2.312.545)	66.702.445
	Beban Langganan Air	1.655.700	0	1.655.700
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.857.895.652	0	3.857.895.652
522131	Beban Jasa Konsultan	6.746.417.445	30.810.493.150	37.556.910.595
522141	Beban Sewa	4.372.610.220	0	4.372.610.220
522151	Beban Jasa Profesi	11.174.092.994	84.225	11.174.177.219
522191	Beban Jasa Lainnya	14.246.011.419	21.456.193.466	35.702.204.885
	TOTAL	80.795.764.561	51.187.685.762	131.983.450.323

Terdapat penyesuaian sebesar Rp51.187.685.762 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 155: Rincian Penyesuaian Belanja Barang&Jasa di LRA dan Beban Barang&Jasa di LO TA 2024

No.	Uraian	Nilai
а	Beban Barang&Jasa LO	131.983.450.323
b	Belanja Barang&Jasa LRA	80.795.764.561
С	Selisih Beban B&J LO dengan Blj. B&J LRA	51.187.685.762
Fak	tor yang Mempengaruhi	
Seli	sih Beban Keperluan Perkantoran	(980.460.983)
а	MENPAN: Jurnal pengakuan Belanja Barang Dibayar Dimuka (prepaid) atas Lisensi dengan masa berlaku melewati Tahun 2024	(980.460.983)
Seli	sih Beban Langganan Listrik	(96.311.551)
b	MENPAN: Jurnal balik Pembayaran langganan listrik kantor Gd. Sudirman pemakaian Desember 2023, selesai SP2D pada 2024	(233.903.615)
С	MENPAN: Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Langganan Listrik Gd. Sudirman pemakaian Desember 2024	249.438.591
d	MENPAN: Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Langganan Listrik Gd. Cipinang pemakaian Desember 2024	18.427.270
е	KASN: Jurnal Balik Pembayaran langganan listrik kantor Gd. MT Haryono Pemakaian Desember 2023, selesai SP2D pada 2024	(99.445.583)
f	KASN: Jurnal Balik Pembayaran langganan listrik kantor Gd. Cipinang Pemakaian Desember 2023, selesai SP2D pada 2024	(28.769.929)
g	KASN: Jurnal Balik Pembayaran langganan listrik kantor Gd. SMESCO Pemakaian Desember 2023, selesai SP2D pada 2024	(2.058.285)
Seli	sih Beban Langganan Telepon	(2.312.545)
h	MENPAN: Jurnal balik Langganan Telepon Desember 2023 dibayarkan pada TA 2024	(6.645.498)
i	MENPAN: Pengakuan Belanja yang Masih Harus Dibayar Telepon Desember 2024	4.588.919
j	KASN: Jurnal balik Langganan Telepon Desember 2023, selesai SP2D pada TA 2024	(255.966)
Seli	sih Beban Jasa Konsultan	30.810.493.150
k	MENPAN: Pengesahan Hibah Langsung	30.357.599.650
I	MENPAN: Pengesahan Hibah Langsung	452.893.500
	sih Beban Jasa Profesi	84.225
m	MENPAN: Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima, pengembalian Jasa Profesi TA 2023	84.225
Seli	sih Beban Jasa Lainnya	21.456.193.466
n	MENPAN: Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima, pengembalian Jasa Lainnya TA 2023	2.295.000
0	MENPAN: Pengesahan Hibah Langsung	21.453.898.466
	Jumlah Penyesua <mark>ian</mark>	51.187.685.762

Rincian Jurnal Penyesuaian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 156: Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Barang dan Jasa TA 2024

	I			
No.	Uraian	Debit	Kredit	Nominal
Satke	r MENPAN			
1	Jurnal Balik Beban Langganan Listrik Desember 2023	212112	522111	233.903.615
2	Jurnal Balik Beban Langganan Telepon Desember 2022	212112	522112	6.645.498
5	Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima	522151	114311	84.225
6	Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima	522191	114311	2.295.000
7	Pengakuan Belanja Langganan Listrik yang Masih Harus Dibayar	522111	212112	249.438.591
8	Pengakuan Belanja Langganan Listrik yang Masih Harus Dibayar	522112	212112	18.427.270
9	Pengakuan Belanja Langganan Telepon yang Masih Harus Dibayar	522112	212112	4.588.919
10	Pengakuan Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	114112	521111	980.460.983
Satke	r KASN			
1	Jurnal Balik Beban Langganan Listrik Desember 2023	212112	522111	130.273.797
2	Pengakuan Belanja Langganan Telepon yang Masih Harus Dibayar	522112	212112	255.966

Beban Pemeliharaan Rp13.007.938.923

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13.007.938.923 dan Rp11.956.601.748.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

Rincian beban pemeliharan pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 157: Rincian Perbandingan Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.243.126.006	3.311.850.672	28,12
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	59.739.211	59.739.311	(0,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.666.422.442	7.031.629.587	(5,19)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	436.954.594	759.496.459	(42,47)
Beban Pemeliharaan Jaringan	61.555.000	217.800.000	(71,74)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.256.831.735	358.834.519	250,25
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	283.309.935	217.251.200	30,41
Jumlah	13.007.938.923	11.956.601.748	8,79

Berdasarkan tabel di atas, Beban Pemeliharaan pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,79% bila dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan realisasi belanja aset terkait.

Adapun rincian perbandingan beban pemeliharaan berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 158: Rinician Perbandingan Beban Pemeliharaan per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
15416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	1.769.620.543	2.529.799.439	(30,05)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	11.238.318.380	9.426.802.309	19,22
	Jumlah	13.007.938.923	11.956.601.748	8,79

Adapun perbandingan belanja pemeliharaan di LRA dengan beban Pemeliharaan di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 159: Rincian Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO TA 2024

Akun	Uraian Akun	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.243.126.006	0	4.243.126.006
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	466.471.840	(466.471.840)	0
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	59.739.211	0	59.739.211
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.666.422.442	0	6.666.422.442
523129	Beban Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.727.754	118.226.840	436.954.594
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	61.555.000	0	61.555.000
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	934.926.554	321.905.181	1.256.831.735
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	283.309.935	283.309.935
	Jumlah	12.750.968.807	256.970.116	13.007.938.923

Terdapat penyesuaian sebesar Rp256.970.116 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 160: Rincian Penyesuaian Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO TA 2024

No.	Uraian	Nilai
а	Beban Pemeliharaan LO	13.007.938.923
b	Belanja Pemeliharaan LRA	12.750.968.807
С	Selisih Beban Pemeliharaan LO dengan Blj. Pemeliharaan LRA	256.970.116
Fakt	or yang Mempengaruhi	
Selis	sih Beban Barang Persediaan Pemeliharaan G&B	(466.471.840)
а	MENPAN: Belanja barang persediaan pemeliharaan tidak muncul pada LO, karena LO menggunakan basis akrual sedangkan LRA menggunakan basis kas.	(466.471.840)
Beba	an Pemeliharaan Lainnya	321.905.181
b	MENPAN: Jurnal Balik koreksi tambah Beban Dibayar Dimuka atas Pengadaan Lisensi dengan masa berlaku s.d. Tahun 2024	321.905.181
Beba	an Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.226.840
С	KASN: Jurnal Balik koreksi tambah Beban Dibayar Dimuka atas Pengadaan Lisensi dengan masa berlaku s.d. Tahun 2024	118.226.840
Beba	an Pesediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	283.309.935
d	Penggunaan Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	283.309.935
	Jumlah Penyesuaian	256.970.116

Terdapat selisih antara Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan GB yang hanya muncul di LRA, serta Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan hanya muncul di LO, hal ini disebabkan bahan tersebut sudah digunakan dan memberikan manfaat ekonomi. Namun, tidak muncul di LRA karena pengeluarannya sudah dicatat sebelumnya saat pembelian persediaan, bukan saat pemakaian. Perbedaan ini terjadi karena LRA menggunakan basis kas, sedangkan LO menggunakan basis akrual.

Rincian Jurnal Penyesuaian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 161: Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Pemeliharaan Semester I TA 2024

No.	Uraian	Debit	Kredit	Nominal
1	MENPAN: Jurnal Balik Koreksi Tambah Beban Dibayar Dimuka atas Pengadaan Lisensi s.d. Tahun 2024	523199	114112	321.905.181
2	KASN: Jurnal Balik Koreksi Tambah Beban Dibayar Dimuka atas Pengadaan Lisensi s.d. Tahun 2024	523129	114112	118.226.840

Beban Perjalanan Dinas Rp134.985.384.602

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp134.985.384.602 dan Rp115.149.970.547.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

Rincian Beban Perjalanan Dinas pada TA 2024 dan 2023 adalah:

Tabel 162: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	2024	2023	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	53.565.371.914	56.141.986.428	(4,59)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	828.949.500	896.966.229	(7,58)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.567.675.000	37.997.064.227	59,40
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.071.731.917	10.286.894.980	7,63
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	8.951.656.271	9.827.058.683	(8,91)
	Jumlah	134.985.384.602	115.149.970.547	17,23

Pada TA 2024 beban Perjalanan Dinas mengalami peningkatan sebesar 17,23% dibandingkan TA 2023, peningkatan beban sejalan dengan realisasi belanja perjalanan dinas. Peningkatan intensitas kegiatan perjalanan dinas biasa maupun paket meeting baik dalam kota dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun rincian perbandingan beban perjalanan dinas berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 163: Rincian Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	6.167.066.044	11.022.864.735	(44,05)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	128.818.318.558	104.127.105.812	23,71
	Jumlah	134.985.384.602	115.149.970.547	17,23

Adapun perbandingan belanja Perjalanan Dinas di LRA dengan beban Perjalanan Dinas di LO adalah sebagai berikut:

Tabel 164: Rincian Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan LO TA 2024

Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
Beban Perjalanan Dinas Biasa	53.518.485.903	46.886.011	53.565.371.914
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	828.949.500	0	828.949.500
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.567.675.000	0	60.567.675.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.071.731.917	0	11.071.731.917
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	8.951.656.271	0	8.951.656.271
Jumlah	134.938.498.591	46.886.011	134.985.384.602

Terdapat penyesuaian sebesar Rp46.886.011 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 165: Rincian Penyesuaian Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO TA 2024

No.	Uraian	Nilai			
а	Beban Perjalanan Dinas LO	128.818.318.558			
b	Belanja Perjalanan Dinas LRA	128.771.432.547			
С	Selisih Beban Perjalanan LO dengan Blj. Perjalanan LRA	46.886.011			
Fakt	Faktor yang Mempengaruhi				
Beba	an Perjalanan Dinas Biasa	46.886.011			
а	Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang baru diterima pengembaliannya pada TA 2024	46.886.011			
	Jumlah Penyesuaian	46.886.011			

Rincian Jurnal Penyesuaian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 166: Rincian Jurnal Penyesuaian atas Selisih Belanja dan Beban Perjalanan Dinas TA 2024

Uraian	Debit	Kredit	Nominal
Jurnal Balik Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 yang dikembalikan pada TA 2024	524111	114311	46.886.011

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp30.071.501.234

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp30.071.501.234 dan Rp22.299.622.630.

Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi dan perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

Rincian perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 167: Perbandingan Rincian Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	2024	2023	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.689.131.708	14.542.987.445	14,76
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.456.870.774	2.196.976.257	11,83
591312	Beban Penyusutan Irigasi	2.212.066	2.212.066	0,00
591313	Beban Penyusutan Jaringan	44.730.289	44.730.289	0,00
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.370.375	7.370.375	0,00
	Jumlah Penyusutan	19.200.315.212	16.794.276.432	14,33
592115	Beban Amortisasi Software	10.857.703.808	5.505.346.198	97,22
592118	Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	3.915.625	0	
	Beban Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	9.566.589	0	
	Beban Amortisasi Aset Tetap yang tidak	9.566.589	0 5.505.346.198	97,47

Berdasarkan tabel di atas, Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 34,85% dibandingkan dengan TA 2023, penurunan beban sejalan dengan realisasi belanja aset terkait, misalnya pengurangan jumlah aset tetap yang disusutkan akibat penjualan atau penghapusan aset, penurunan nilai atau umur ekonomis dari aset yang disusutkan.

Adapun perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi – Neraca dan Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 168: Perbandingan Akumultasi Penyusutan dan Amortisasi di Neraca dan Beban Penyusutan dan Amortisasi di LO TA 2024

Uraian	Neraca	Peny esuaian	LO
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	125.351.403.912	(125.351.403.912)	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.818.457.554	(15.818.457.554)	0
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	126.829.000	(126.829.000)	0
Akumulasi Penyusutan Irigasi	19.875.299	(19.875.299)	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	872.240.626	(872.240.626)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	18.425.938	(18.425.938)	0
Akumulasi Penyusutan AT yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.582.821.593	(5.582.821.593)	0
Akumulasi Amortisasi Software	20.084.714.728	(20.084.714.728)	0
Akumulasi Amortisasi ATB yang tidak digunakan	27.409.375	(27.409.375)	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	16.689.131.708	16.689.131.708
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0		2.456.870.774
Beban Penyusutan Irigasi	0		2.212.066
Beban Penyusutan Jaringan	0		44.730.289
Beban Penyusutan AT Lainnya	0		7.370.375
Beban Amortisasi Software	0		10.857.703.808
Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan	0		3.915.625
Beban Penyusutan AT yang tidak digunakan	0		9.566.589
Jumlah	142.188.806.391	(151.213.046.317)	30.071.501.234

Selisih antara Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LO sebesar Rp151.213.046.317 terjadi karena Akumulasi di Neraca bersifat kumulatif, sedangkan Beban di LO hanya mencerminkan beban dalam periode berjalan. Perubahan nilai akumulasi dipengaruhi oleh transaksi penghapusan atau penambahan aset, sedangkan beban penyusutan menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight-line Method) sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Adapun rincian perbandingan beban penyusutan dan amortisasi berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 169: Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
15416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	1.157.787.321	3.069.113.165	(62,28)
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	28.913.713.913	19.230.509.465	50,35
	Jumlah	30.071.501.234	22.299.622.630	34,85

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp2.438.516

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.438.516 dan Rp0.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 170: Rincian Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak TA 2024

Akun	Uraian	2024
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	2.438.516
	Jumlah	2.438.516

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih seluruhnya berasal dari Satuan Kerja MENPAN, merupakan penyisihan atas Piutang Lainnya yang ditagihkan kepada Pihak Ketiga yang merupakan tindak lanjut dari Temuan Pemeriksaan LK oleh BPK TA 2023, atas penyisihan ini dilakukan melalui input jurnal manual pada Modul GLP Aplikasi SAKTI. Selain itu, terdapat penyetoran atas Piutang TP/TGR sebesar Rp20.000.000, penyisihan piutang TP/TGR dihasilkan dari jurnal otomatis Modul Piutang Aplikasi SAKTI ketika pencatatan *settlement*, kemudian atas Penyisihan Piutang TP/TGR TAYL tersebut perlu dilakukan penyesuaian atas beban yang sudah lewat Tahun Anggaran, sehingga dilakukan pencatatan jurnal manual melalui Modul GLP Aplikasi SAKTI.

Rincian Jurnal Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 171: Rincian Jurnal Penyesuaian atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024

Uraian	Debit	Kredit	Nominal
Menpan: Penyisihan Piutang Lainnya hasil dari TPKN (Kategori Piutang Lancar)	594212	116212	2.438.516
Menpan: Penyesuaian Penyisihan Piutang TP/TGR YS	594931	391119	18.181.818

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional (Rp459.768.331.137)

D.9 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp459.768.331.137 dan Rp376.088.632.828.

Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan pendapatan dan beban yang dilaksanakan secara normal oleh entitas dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pos Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri dari pendapatan operasional dan beban operasional.

Rincian perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional pada TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 172: Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Operasional	0	289.632.940	(100,00)
Beban Operasional	(459.768.331.137)	(376.378.265.768)	22,16
Jumlah	(459.768.331.137)	(376.088.632.828)	22,25

Surplus /Defisit Kegiatan Non Operasional Rp2.428.360.324

Kegiatan Non Operasional

D.10 Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.428.360.324 dan Rp348.874.284.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 173: Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2024

Uraian	2024
Surplus/defisit Pelepasan Aset	1.277.21
Pendapatan Pelepasan Aset	1.433.00
Beban Pelepasan Aset	155.78
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.151.14
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.186.31
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35.17
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	2.428.36

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp2.619.319.364

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.619.319.364 dan Rp398.979.628.

Rincian pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 174: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	2024	2023	%
Pendapat	tan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usah	a		
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.433.000.000	284.182.998	404,25
Pendapat	tan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Penge	elolaan		
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	68.189.852	0	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1.187.150	95.498.750	(98,76)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	132.633.762	14.277.635	828,96
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	1.020.245	(100,00)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	984.308.600	0	-
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	4.000.000	(100,00)
	Jumlah	2.619.319.364	398.979.628	556,50

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 556,50% bila dibandingkan dengan TA 2023. Hal ini berasal dari transaksi Penjualan Peralatan dan Mesin berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-97/MK.6/KNL.0705/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Risalah Lelang Nomor: 433/07.05/2024-01 tanggal 9 September 2024 dan Nomor: 530/07.05/2024-01 tanggal 22 Oktober 2024.

Selain itu, terdapat Penerimaan Kembali Belanja Barang dan Modal TAYL sebagai tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK TA 2023 yang dijelaskan secara rinci pada CaLK Neraca Laporan Keuangan ini.

Rincian perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 175: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	0	0	-
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	2.619.319.364	398.979.628	556,50
	Jumlah	2.619.319.364	398.979.628	556,50

Adapun rincian perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada LRA dengan LO untuk periode TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 176: Rincian Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di LRA dan LO TA 2024

Uraian	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.433.000.000	0	1.433.000.000
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	68.189.852	0	68.189.852
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	18.181.818	(18.181.818)	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1.187.150	0	1.187.150
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	180.364.969	(47.731.207)	132.633.762
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	10.651.008	(10.651.008)	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	984.308.600	984.308.600
Jumlah	1.711.574.797	907.744.567	2.619.319.364

Terdapat penyesuaian sebesar (Rp907.744.567) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 177: Rincian Penyesuaian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya di LO TA 2024

No.	Uraian	Nilai
а	Pendapatan Non Operasional LO	2.619.319.364
b	Pendapatan LRA	1.711.574.797
С	Selisih Pendapatan LO dan LRA	907.744.567
Fakt	or yang Mempengaruhi	
Selis	sih Pendapatan Penyelesaian GKN Terhadap Bendahara	(18.181.818)
а	Penyetoran Piutang Jangka Panjang a.n. YS sebesar Rp20.000.000 pada tanggal 07/12/2024	(18.181.818)
Selis	ih Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	(47.731.207)
b	Penyetoran Piutang atas temuan pemeriksaan BPK TA 2023, disetorkan sepanjang Tahun 2024	(47.731.207)
Selis	sih Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	(10.651.008)
С	Penyetoran Piutang atas temuan pemeriksaan BPK TA 2023, disetorkan sepanjang Tahun 2024	(10.000.000)
d	Penyetoran Kembali	(651.008)
Selis	sih Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	984.308.600
С	Reklasifikasi	984.308.600
	Jumlah Penyesuaian	907.744.567

Beban dari Kegiatan Non Operasional Rp190.959.040

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode TA 2024 dan TA 2023 masing-masing adalah sebesar Rp190.959.040 dan Rp50.105.344.

Rincian perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 178: Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 dan 2023

Akun	Uraian	2024	2023	%
596111	Beban Pelepasan Aset	155.784.540	46.105.344	237,89
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	35.174.500	0	0,00
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	4.000.000	(100,00)
	Jumlah	190.959.040	50.105.344	281,12

Berdasarkan tabel di atas, Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 281,12% bila dibandingkan dengan TA 2023.

Hal ini disebabkan karena pada TA 2024 terdapat lelang pada Satker MENPAN yang menyebabkan timbul saldo Beban Pelepasan Aset yang mencerminkan dampak pengurangan aset terhadap ekuitas pemerintah, serta terdapat saldo Beban Persediaan Rusak/Usang yang disebabkan adanya perubahan status atas Persediaan Satker KASN menjadi rusak/usang berupa Alat Tulis Kantor (ATK) dengan emblem KASN yang sudah tidak dapat digunakan lagi.

Sedangkan rincian perbandingan beban dari kegiatan non operasional lainnya berdasarkan satuan kerja di lingkup Kementerian PANRB untuk periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 179: Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per Satuan Kerja TA 2024 dan 2023

Kode	Nama Satuan Kerja	2024	2023	NAIK (TURUN) %
015416	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	35.174.500	0	-
427950	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	155.784.540	50.105.344	210,91
	Jumlah	190.959.040	50.105.344	281,12

Beban ini hanya tercermin pada LO yang didukung dengan Laporan Persediaan dan tidak tercermin pada LRA.

Surplus /Defisit LO (Rp457.339.970.813)

D.11 Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp457.339.970.813 dan Rp375.739.758.544.

Pos Surplus/Defisit–LO adalah penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Tabel 180: Perbandingan Rincian Surplus/Defisit-LO TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	%
Surplus/defisit Dari Kegiatan Operasional	(459.768.331.137)	(376.088.632.828)	22,25
Surplus/defisit Dari Kegiatan Non Operasional	2.428.360.324	348874284	596,06
Surplus (Defisit) Lo	(457.339.970.813)	(375.739.758.544)	21,72

	PENJELASAN ATA	S POS-POS LAPO	RAN PERUBAH	AN EKUITAS				
Ekuitas Awal Rp163.324.631.271	E.1 Ekuitas Awal							
		Nilai ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp163.324.631.271 dan Rp147.233.168.165.						
	Nilai ekuitas awal n sebelumnya.	nerupakan nilai eku	uitas akhir pada p	periode pelaporar	ı tahun			
	Rincian Perbanding	an Ekuitas Awal pe	r 1 Januari 2024 (dan 2023 disajika	n pada			
	tabel berikut:							
	Tabel	181: Rincian Perbandinga	n Ekuitas Awal 1 Januar	i 2024 dan 2023				
	Akun Uraian Aku	n 1 Januari 2024	1 Januari 2023	Naik/Turun	%			
	391111 Ekuitas	163.324.631.271		16.091.463.106				
	Jumlah Ekuitas	163.324.631.271	147.233.168.165	16.091.463.106	10,93			
Surplus/Defisit - LO (Rp457.339.970.813)	E.2 Surplus/Defisit	-LO						
(11)0401.000.010.010)	Jumlah Defisit LO	untuk periode yang	g berakhir pada 3	31 Desember 202	24 dan			
	2023 adalah sebesar Rp457.339.970.813 dan Rp375.739.758.544.							
	Surplus/Defisit LO	merupakan selisih	kurang antara	surplus/defisit ke	egiatan			
	operasional, surplus	s/defisit kegiatan n	on operasional, s	ampai dengan po	os luar			
	biasa pada Tahun Anggaran Berjalan.							
	Defisit-LO TA 2024 yang lebih besar dari TA 2023 menunjukkan bahwa pada TA							
	2024 terdapat beban operasional dan non operasional yang lebih besar dibandingkan pada TA 2023.							
	Rincian penjelasan disajikan dalam Cata	•	•	·				

Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas (Rp1.639.438.791)

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.639.438.791 dan Rp439.882.261 dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 182: Rincian Perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas TA 2024 dan TA 2023

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	430.650	(430.650)	(100,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(662.758.740)	(440.312.911)	(222.445.829)	50,52
Koreksi Lain-Lain	(976.680.051)	0	(976.680.051)	-
Jumlah Ekuitas	(1.639.438.791)	(439.882.261)	(1.199.556.530)	272,70

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Jumlah Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp430.650.

Rincian perbandingan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 183: Rincian Perbandingan Koreksi Atas Reklasifikasi TA 2024 dan TA 2023

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	430.650	(430.650)	(100,00)
Jumlah Ekuitas	0	430.650	(430.650)	(100,00)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi (Rp662.758.740)

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp662.758.740 dan Rp440.312.911.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah akun yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah untuk mencatat koreksi atau penyesuaian terhadap nilai aset tetap yang tidak melalui proses revaluasi.

Rincian perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 184: Rincian Perbandingan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2024 dan TA 2023

Uraian	2024	2023	Naik/Turun	%
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(662.758.740)	(440.312.911)	(222.445.829)	50,52
Jumlah Ekuitas	(662.758.740)	(440.312.911)	(222.445.829)	50,52

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai Aset Tetap yang bukan berasal dari transaksi revaluasi/penilaian ulang aset.

Koreksi Lain-lain (Rp976.680.051)

E.3.3 Koreksi Lain-Lain

Jumlah Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp976.680.051 dan Rp0.

Koreksi Lain-lain adalah akun yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintah untuk mengoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi selain Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya. Koreksi Lain-lain digunakan untuk mengoreksi Kas, Piutang, dan Utang.

Koreksi Lain-lain pada TA 2024 sebesar Rp976.680.051 seluruhnya merupakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang berasal dari pencatatan jurnal manual Modul GLP Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja MENPAN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 185: Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024

Uraian	Koreksi		Total	
Oralan	Tambah	Kurang	Total	
Bersumber dari Jurnal Manual GLP				
Pengakuan Piutang Lainnya yang ditagihkan ke Pihak Ketiga		(24.211.302)	(24.211.302)	
Koreksi Nilai Piutang Lainnya yang merupakan hasil TPKN	68.189.852		43.978.550	
Pembatalan pengakuan Piutang Lainnya diyakini kebenarannya	951.187.827		995.166.377	
Penyesuaian Penyisihan Piutang TP/ TGR a.n. YS		(18.181.818)	976.984.559	
Pengembalian Belanja Modal TAYL		(304.508)	976.680.051	
Jumlah			976.680.051	

Adapun rincian Jurnal Manual adalah sebagai berikut:

Tabel 186: Rincian Jurnal Manual yang Memengaruhi Akun Koreksi Lain-lain TA 2024

Uraian	Debet	Kredit	Nominal
MENPAN: Pengakuan Piutang Lainnya berdasarkan LHR			
Inspektorat Kementerian PANRB	511129	391119	24.211.302
MENPAN: Koreksi nilai Piutang Lainnya yang merupakan hasil TPKN dan ditagihkan kepada Pegawai Non ASN Bukan Bendahara sesuai LHR Inspektorat Kementerian PANRB	391119	115212	68.189.852
MENPAN: Pembatalan pengakuan Piutang Lainnya, telah diyakini kebenarannya oleh TPKN sesuai LHR Inspektorat Kementerian PANRB	391119	115212	951.187.827
MENPAN: Koreksi Lainnya sebagai bentuk Penyesuaian Penyisihan Piutang	594931	391119	18.181.818
MENPAN: Jurnal manual eliminasi akun pengembalian belanja modal TAYL	425913	391119	304.508

Transaksi Antar Entitas

Rp509.720.562.431

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp509.720.562.431 dan Rp392.271.103.911.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dengan BUN. Transaksi Antar Entitas antara KL pengguna APBN dengan BUN diatur oleh Kementerian Keuangan. Transaksi Antar Entitas tersebut terjadi dikarenakan penagihan yang diajukan Kementerian PANRB berupa SPPB, SPM, SP3HL dan surat penagihan lainnya untuk dibayarkan oleh entitas BUN dalam bentuk SP2D.

Transaksi Antar Entitas (LPE) = Realisasi Pendapatan (DDEL) + Realisasi Belanja (DKEL) + Transfer masuk + Transfer keluar + Pengesahan Hibah.

Rincian Perbandingan Transaksi Antar Entitas pada periode TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 187: Rincian Perbandingan Transaksi Antar Entitas TA 2024 dan TA 2023				
Akun	Uraian	TA 2024	TA 2023	%
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	433.338.930.871	367.844.818.653	17,80
313121	Diterima dari Entitas Lain	(1.711.574.797)	(811.254.408)	110,98
313211	Transfer Keluar	(50.863.498.119)	(1.612.861.089)	3053,62
313221	Transfer Masuk	76.692.312.860	0	-
391131	Pengesahan Hibah Langsung	52.264.391.616	26.850.400.755	94,65
	Jumlah	509.720.562.431	392.271.103.911	29,94

Ditagihkan ke Entitas Lain

Rp433.338.930.871

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp433.338.930.871 dan Rp367.844.818.653.

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). DKEL terjadi dikarenakan penagihan yang diajukan Kementerian PANRB berupa SPPB, SPM, SP3HL dan surat penagihan lainnya untuk dibayarkan oleh entitas BUN dalam bentuk SP2D.

Rincian Perbandingan DKEL berdasarkan Satuan Kerja pada periode TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 188: Rincian Perbandingan DKEL Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Satuan Kerja	TA 2024	TA 2023	%
KASN (015416)	33.097.549.032	52.607.509.465	(37,09)
MENPAN (427950)	400.241.381.839	315.237.309.188	26,97
Jumlah	433.338.930.871	367.844.818.653	17,80

Berdasarkan tabel di atas, DKEL TA 2024 naik sebesar 17,80% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan Kementerian PANRB menagihkan transaksi keuangan lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.

Diterima dari Entitas Lain Rp1.711.574.797

E.4.2 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima Dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.711.574.797 dan Rp811.254.408.

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). DDEL merupakan penyeimbang transaksi dengan perbedaan entitas akuntansi, transaksinya akan diseimbangkan dengan Diterima dari Entitas Lainnya. DDEL berasal dari transaksi Pendapatan yang diterima dari Kementerian PANRB dan disetorkan kepada kas negara.

Rincian Perbandingan DDEL berdasarkan Satuan Kerja pada periodTA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 189: Rincian Perbandingan DDEL Berdasarkan Satuan Kerja TA 2024 dan TA 2023

Satuan Kerja	TA 2024	TA 2023	%
KASN (015416)	0	408.652.693	(100,00)
MENPAN (427950)	1.711.574.797	402.601.715	325,13
Jumlah	1.711.574.797	811.254.408	110,98

Berdasarkan tabel di atas DDEL TA 2024 naik sebesar 110,98% dibandingkan TA 2023, hal ini disebabkan Kementerian PANRB menerima Pendapatan berupa PNBP yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, disumbangkan paling banyak oleh pelaksanaan Lelang yang telah diungkapkan lebih rinci pada CaLK LRA Laporan Keuangan ini.

Transfer Keluar Rp50.863.498.119

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.863.498.119 dan Rp1.612.861.089.

Transfer keluar adalah pengeluaran dari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar satker dalam satu K/L maupun antar satker lintas K/L.

Rincian perbandingan Transfer Keluar berdasarkan Satuan Kerja pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 190: Rincian Perbandingan Transfer Keluar Per Satker TA 2024

Satuan Kerja	TA 2024	TA 2023	%
KASN (015416)	46.509.080.924	0	-
MENPAN (427950)	4.354.417.195	1.612.861.089	169,98
Jumlah	50.863.498.119	1.612.861.089	3.053,62

Berdasarkan tabel di atas, transaksi Transfer Keluar di masing-masing satker meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Rincian Transaksi Transfer Keluar TA 2024

dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 191: Rincian Transfer Keluar Per Satker TA 2024

Uraian Transaksi	Nominal	Tujuan Satker
Likuidasi Keluar Aset satker KASN	46.460.123.124	MENPAN
Transfer Keluar (Persediaan)	48.957.800	MENPAN
Transfer Keluar ATR	3.869.738.289	SETNEG
Transfer Keluar PM	484.678.906	BKN
Jumlah	50.863.498.119	

Pada Satker KASN Transfer Keluar ini berupa input menu Likuidasi Keluar pada

Modul Aset Aplikasi SAKTI dari satker KASN ke satker MENPAN.

Sedangkan Transfer Keluar pada satker MENPAN merupakan transfer online keluar antar anak satker baik atas penerimaan pelimpahan aset yang berasal dari satker KASN dan BRIN, serta pelimpahan aset ex-KASN ke BKN.

Rincian Transfer Keluar terdapat dalam Rincian Transfer Masuk terdapat dalam CaLK Neraca dan CALBMN pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Transfer Masuk Rp76.692.312.860

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp76.692.312.860 dan Rp0.

Transfer masuk adalah penerimaan dari entitas lain yang masih dalam satu entitas pelaporan pemerintah pusat, baik antar satker dalam satu K/L maupun antar satker lintas K/L.

Rincian Transfer Masuk per Satuan Kerja pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 192: Rincian Perbandingan Transfer Masuk Per Satker TA 2024

Satuan Kerja	TA 2024	TA 2023
KASN (015416)	0	0
MENPAN (427950)	76.692.312.860	0
Jumlah	76.692.312.860	0

Berdasarkan tabel di atas, selama TA 2023 tidak terdapat transaksi Transfer Masuk pada ke dua satker, sedangkan pada TA 2024 terdapat Transfer Masuk pada satker MENPAN yang merupakaan Likuidasi Masuk dari satker KASN serta pelimpahan aset dari BRIN.

Rincian Transaksi Masuk TA 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 193: Rincian Transfer Masuk Per Satker TA 2024

Uraian Transaksi	Nominal	Asal Satker
Transfer Masuk Aset	30.182.036.936	BRIN
Likuidasi Masuk Aset	46.460.123.124	KASN
Transfer Masuk Henti Guna Aset	1.195.000	BRIN
Transfer Masuk (Persediaan)	48.957.800	KASN
Jumlah	76.692.312.860	

Rincian Transfer Masuk terdapat dalam CaLK Neraca dan CALBMN pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

Pengesahan Hibah Langsung Rp52.264.391.616

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp52.264.391.616 dan Rp26.850.400.755.

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang, maupun jasa. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN.

Rincian Hibah Langsung per Satuan Kerja pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 194: Rincian Hibah Langsung Per Satker TA 2024

Satuan Kerja	TA 2024	TA 2023	%
KASN (015416)	0	386.100.647	(100,00)
MENPAN (427950)	52.264.391.616	26.464.300.108	97,49
Jumlah	52.264.391.616	26.850.400.755	94,65

Adapun rincian Hibah Langsung yang diterima Satker MENPAN adalah sebagai berikut:

Tabel 195: Rincian Hibah Langsung Satker MENPAN TA 2024

No.	Nama Donor	Dokumen	Nilai Realisasi Hibah
1	USAID	- SP3HL Nomor: B/25/S.KS.01/2024 tanggal 20 Februari 2024 - BAST Nomor: 139/USAID- INA/NAST-Service/DRG tanggal 22 Januari 2024	30.357.599.650
2	KOICA	- SP3HL Nomor: B/66/S.KS.01.2024 tanggal 25 April 2024 - BAST Nomor: KOICA/2024/088 tanggal 29 Januari 2024	21.453.898.466
3	Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia	- SP3HL B/296/S.KS.01/2024 tanggal 10 Desember 2024 - BAST Nomor: KO731/BAST/INT/Nov/2024 tanggal 30 September 2024	452.893.500
		Jumlah	52.264.391.616

Seluruh hibah yang diterima Satker MENPAN pada TA 2024 merupakan hibah jasa baik dari donor yang merupakan mitra kerja Kementerian PANRB.

Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp50.741.152.827

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 terjadi kenaikan ekuitas adalah masing-masing sebesar Rp50.741.152.827 dan Rp16.091.463.106.

Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Transaksi Antar Entitas.

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 196: Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Kementerian PANRB TA 2024

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK/TURUN	%
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	50.741.152.827	16.091.436.106	34.649.716.721	215,33
Jumlah	50.741.152.827	16.091.436.106	34.649.716.721	215,33

Berdasarkan tabel di atas, Ekuitas pada TA 2024 mengalami peningkatan sebanyak Rp34.649.716.721 atau 215,33% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Transaksi Antar Entitas yang meningkat sebesar Rp117.449.458.520 atau 29,94%.

Ekuitas Akhir Rp214.065.784.098

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp214.065.784.098 dan Rp163.324.631.271, naik sebesar Rp50.741.152.827 atau 31,07% dibanding periode sebelumnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Tindak Lanjut Temuan atas Pemeriksaan BPK TA 2023 2. Potensi kerugian negara yang telah diakui menjadi Piutang Lainnya pada periode Adjustment 2 atau periode 14 sebesar Rp1.540.600.696. Atas hal tersebut telah dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: a. Pembentukan TPKN Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 217 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TPKN telah memutuskan pengelolaan Piutang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut: 1. LHP Nomor: 266/PI.06.00/2024 tanggal 19 November 2024 2. LHP Nomor: 264/PI.06.00/2024 tanggal 19 November 2024 3. LHP Nomor: 265/PI.06.00/2024 tanggal 19 November 2024 4. LHP Nomor: 262/PI.06.00/2024 tanggal 19 November 2024 5. LHP Nomor: 263/PI.06.00/2024 tanggal 19 November 2024 b. Reviu APIP

Inspektorat Kementerian PANRB telah melaksanakan reviu atas Piutang Lainnya berdasarkan Surat Inspektur Kementerian PANRB Nomor: LAP-137/PI.02/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Piutang Lainnya pada Neraca Laporan Keuangan Kementerian PANRB Tahun 2024.

Atas hal tersebut, Bagian Keuangan dan Pengelolaan BMN telah menindaklanjuti dengan berkonsultasi dengan Tim Pembina Dit. APK Kemenkeu, kemudian melakukan penjurnalan melalui Modul GLP Aplikasi SAKTI atas Piutang Lainnya yang dikoreksi pencatatan sebesar Rp951.187.827 karena telah ditemukan bukti dokumen riil atas transaksi tersebut, selain itu Piutang yang ditagihkan ke Pegawai dan diakui sebagai Piutang TP/TGR sebesar Rp68.189.582, dan Piutang Lainnya yang ditagihkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp487.703.112.

Atas piutang TP/TGR telah seluruhnya disetorkan ke kas negara, untuk Piutang Lainnya yang ditagihkan ke Pihak Ketiga sebagian telah disetorkan ke kas negara sebagai Pengembalian Belanja TAYL.

Rincian dan dokumen yang disebutkan di atas terdapat dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

Terhadap Piutang Lainnya telah dilakukan Tindakan-tindakan untuk memproses hingga akun tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan baik dan peraturan yang berlaku, kronologi dari pencatatan Akun Piutang Lainnya dapat dijabarkan secara sederhana pada table dibawah

Tabel 197: Tabel Pengelolaan Piutang Lainnya pada Neraca Satker MENPAN TA 2024

No.	Periode	Transaksi	Modul		D/K		KETERANGA
1	31/12/2023	Berdasarkan LHPBPKRI TA 2023	GLP	1152112	D	1.540.600.696	NKF
				5211111	K	1.540.600.696	
							1.5
2	6/3/2024	Pembayaran piutanglainnya atas temuan BPK Tahun Anggaran 2023 yang di kembalikan sebagai pendapatan TAYL	GLP	425913	D	10.000.000	
	6/3/2024			425912	D	22.658.495	
				115212	K	32.658.495	
							1.5
3	9/18/2024	Pembayaran Piutang lainnya atas temuan BPK Tahun Anggaran 2023 yang dikembalikan sabagai pendapatan TAYL (CV Cahaya Mitra Abadi)		425912	!D	2.297.295	
				115212	K	2.297.295	
							1.5
4	17/12/2024	Pengakuan Piutang Lainnya yang belum di akui sebelumnya, merupakan fee pihak ketiga yang belumtar catat	GLP	115212	D	24211.302	Nilai Perolei atas pemeril Inspektorat
		Too piritak kengayang balan ita dalai		521111	K	24.211.302	порыныны
							1.5
5	12/31/2024	Pembayaran piutang lain nya atas temuan BPK Tahun Anggaran 2023 yang di kembalikan sebagai pendapatan TAYL		425912	D	22.775.417	
				115212	K	22.775.417	
							1.5
6	12/31/2024	Pengakuan Piutang TP/TGR ber dasar kan keputusan TPKN dan reviu APIP, yang harus diselesaikan oleh pegawai negari selain Bandahara	Piutan	115211	D	68.189.852	SisaPemba Pegawai yar jurnal, Jurna sebesar Rp3 sudah dilak sebelumnya Jurnah Tota Pembayarar Tabel 1.2) si Rp123.623.
				425791	K	68.189.852	
							1.4
7	12/31/2024	Pengakuan Piutang TP/TGR ber dasarkan keputusan TPKN dan reviu APIP, yangharus diselesaikan oleh pihak ke3	Piutan	115212	D	487.703.112	
	12/31/2024	отепринаккез	Fictori	425793	K	467.763.112	
						487.703.112	Pertanyaan yangharus disandingk Piutang Lai pihak ketig dikarnakan statusnyab
8	12/31/2024	Penghapusan PiutangLainnya dalam rangkapembatalan pengakuan (bukan TGR)	GLP	391119	D	951.187.827	Koreksi Per Pengakuan berdasarka
			_	115212	K	951.187.827	

Berdasarkan Piutang yang ditagihkan kepada Saudara YS, Bagian Keuangan dan Penatausahaan BMN Kementerian PANRB telah melakukan beberapa upaya penagihan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Piutang berdasarkan Keputusan KPA Kementerian PANRB Nomor 98 Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024.
- b. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pembina Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi.
- c. Melakukan pendekatan personal dengan Saudara YS beserta keluarga, dan Ketua RT lingkungan setempat.
- d. Kementerian PANRB telah membantu Saudara YS dalam pengajuan keikutsertaan dalam crash program sesuai IV Surat **KPKNL** Kepala Jakarta Nomor:S-3114/KNL.0704/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Persetujuan Crash Program berupa Keringanan Utang. Berdasarkan surat tersebut, Saudara YS diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan paling lambat tanggal 7 Desember 2024 sebesar Rp447.904.008. Sampai dengan batas waktu tersebut, YS gagal melunasi hutang dan hanya membayarkan sebesar Rp20.000.000 sebelum pajak. Sehingga Piutang berkurang sebesar Rp18.181.818 pada Neraca Kementerian PANRB TA 2024.
- e. Atas kegagalan pelunasan YS, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta mengeluarkan Surat Perintah Penyitaaan Nomor: SPS-04/PUPNC.10.04/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang memerintahkan Kepala KPKNL Jakarta IV untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara. Penyitaan atas barang jaminan YS direncanakan akan dilaksanakan pada Semester 1 Tahun 2025.

4. Aset Tak Berwujud senilai Rp80.000.000 berupa website Critical Occupation List atau Ragam Okupasi Kritikal yang memiliki alamat URL https://proyek-col-asn.netlify.app/about yang tercatat pada aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap sebagai BMN yang dikelola Kedeputian SDMA Kementerian PANRB dengan NUP 106 sejak tahun 2021. Aset Tak Berwujud ini telah ditelusuri keberadaannya berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran 45/BN.05/2024 Tanggal 9 Agustus Nomor 2024 ditandatangani oleh Tim BMN dengan mengetahui Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan. Saat ini Aset tak berwujud tersebut masih digunakan oleh Kedeputian SDMA Kementerian PANRB yang dinyatakan sesuai dengan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor: B/89/BN.02/2024 yang ditandatangani oleh perwakilan Tim BMN dengan perwakilan Kedeputian SDMA.

2. Likuidasi Satuan Kerja KASN

Pasca terbitnya peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2024 maka sejak tanggal 23 Agustus 2024 hingga 3
bulan ke depan seluruh pendanaan, pegawai, barang milik/kekayaan
negara, dan dokumen pada Sekretariat KASN dialihkan ke Kementerian
PANRB.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PANRB menunjuk Tim Likuidasi Satker KASN yang terdiri atas Pejabat/Pegawai KASN dan Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 378 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Likuidasi Satuan Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 31 Agustus 2024.

- Penutupan rekening Bendahara KASN disahkan pada Bulan Oktober 2024 berdasarkan Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: B.1009.e-INS/HEI/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Hal: Penutupan Rekening KASN.
- Persediaan KASN sebesar Rp48.957.800 dialihkan ke Kementerian PANRB berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan Nomor: BA-02/PL.02.01/10/2024 tanggal 27 September 2024.
 Pengalihan Persediaan dilakukan melalui mekanisme Transfer Keluar

pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024.

Rincian Persediaan yang dilimpahkan ke Kementerian PANRB tersedia pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap dan Aset Lainnya masing-masing sebesar Rp46.386.413.130 dan (Rp22.970.006) dialihkan ke Kementerian PANRB berdasarkan Berita Acara Likuidasi Nomor:BA-03/PL.02.01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Pengalihan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan melalui mekanisme Likuidasi pada Aplikasi SAKTI Modul Aset yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2024.

Rincian Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dilimpahkan ke Kementerian PANRB tersedia pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

- Pengalihan anggaran KASN ke Kementerian PANRB dalam rangka Likuidasi Satuan Kerja dilakukan dalam 2 tahap revisi DIPA, sebagai berikut:
 - a. Revisi DIPA Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran pemindahan blokir anggaran Automatic Adjustment (AA) sesuai Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.2/2024 sebesar Rp66.263.535.000.
 - b. Revisi DIPA Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran pemindahan sisa anggaran dan blokir UU Nomor 20 Tahun 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 sebesar Rp33.180.819.000.
- Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai berikut:
 - a. Surat Persetujuan Alih Status Barang Milik Negara pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepada Badan Kepegawaian Negara dari Menteri Keuangan Nomor S-208/MK.6/KNL.0705/2024 tanggal 26 November 2024.
 - b. Berita Acara Serah terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 73/S.BN.05/2024 – 19/PL.03.04/BA/A/2024 tanggal 09 Desember 2024.

Berdasarkan surat dan berita acara tersebut diatas Barang Milik Negara yang dialihkan Status Penggunaannya kepada BKN adalah berupa Peralatan dan Mesin sejumlah 633 NUP/barang dengan total nilai perolehan Rp3.322.727.728 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah). Adapun rincian barang yang dialihkan Status Penggunaannya tersaji dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

- BMN berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 387 NUP milik Satker KASN diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Komisi Aparatur Sipil Negara yang Diserahkan Ke Badan Kepagawaian Negara Tahun Anggaran 2024 Nomor: B/26/BN.02/2024 tanggal 6 September 2024, yang disahkan oleh perwakilan dari KASN, Kementerian PANRB, dan BKN. Rincian barang yang diserahterimakan tersaji dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.
- Atas saluran telepon milik Kementerian PANRB yang semula berjumlah
 66, telah dilakukan identifikasi dan penutupan. Saat ini tersisa 46 saluran telepon yang masih aktif digunakan.
- 3. Revisi DIPA masing-masing satker KL (048), adalah sebagai berikut:

Tabel 198: Daftar Revisi DIPA MENPAN per satker sampai dengan 31 Desember 2024

Satker	Jenis Revisi	Revisi Ke	Pagu
427950	RKAKL_AWAL	0	206.436.726.000
427950	RKAKL_AWAL	1	206.436.726.000
427950	RKAKL_AWAL	2	375.249.264.000
427950	RKAKL_AWAL	0	378.049.699.000
427950	RKAKL_AWAL	1	378.049.699.000
427950	RKAKL_AWAL	2	378.049.699.000
427950	DIPA_AWAL	0	378.049.699.000
427950	BACKUP_HISTORY	0	376.408.749.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	1	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	1	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	2	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	2	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	3	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	3	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	4	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	4	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	5	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	5	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	6	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	6	378.049.699.000
427950	SATKER_REVISI	1	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	7	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	7	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	8	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	8	378.049.699.000
427950	SATKER_REVISI	2	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	9	378.049.699.000
427950	DIPA_REVISI	9	378.049.699.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	10	400.378.371.000
427950	DIPA_REVISI	10	400.378.371.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	11	400.378.371.000
427950	DIPA_REVISI	11	400.378.371.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	12	433.461.087.000
427950	DIPA_REVISI	12	433.461.087.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	13	433.461.087.000
427950	DIPA_REVISI	13	433.461.087.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	14	423.999.423.000
427950	DIPA_REVISI	14	423.999.423.000
	USULAN_DIPA_REVIS	15	423.999.423.000
427950	DIPA_REVISI	15	423.999.423.000
427950	USULAN_DIPA_REVIS	16	417.285.288.000
427950	DIPA_REVISI	16	417.285.288.000
	USULAN_DIPA_REVIS	17	417.285.288.000
	DIPA_REVISI	17	417.285.288.000
	USULAN_DIPA_REVIS	18	417.285.288.000

Satker	JENIS REVISI	REVISI KE	PAGU
015416	DIPA Revisi	1	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	2	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	3	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	4	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	5	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	6	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	7	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	8	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	9	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	10	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	11	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	12	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	13	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	14	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	15	88.592.207.000
015416	DIPA Revisi	16	66.263.535.000

- 4. Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai berikut:
 - a. Surat Persetujuan Alih Status Barang Milik Negara pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepada Badan Kepegawaian Negara dari Menteri Keuangan Nomor S-309/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 5 Desember 2024.
 - b. Berita Acara Serah terima Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 03/S.BN.00/2024 B-13/II.2/PL.02.01/1/2024 tanggal 04 Januari 2024. Berdasarkan surat dan berita acara tersebut di atas Barang Milik Negara yang dialihkan Status Penggunaannya kepada Kementerian PANRB adalah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin dan Jalan serta Irigasi dengan total keseluruhan aset yang diserahkan sejumlah 326 NUP/barang/aset dengan total nilai perolehan Rp32.494.406.468 (tiga puluh dua miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus enam ribu empat ratus enam puluh delapan

rupiah). Adapun rincian barang yang dialihkan Status Penggunaannya tersaji dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

4. Transfer Masuk Aset dari BRIN

Saat ini sedang dilakukan pengurusan sertifikat tanah oleh tim BMN Kementerian PANRB terkait tanah yang telah dialihstatuskan dari BRIN. Terdapat 2 sertifikat tanah yang sedang dilakukan pengurusannya yaitu Sertifikat Hak Pakai No 34 untuk tanah mess Pekayon dan Sertifikat Hak Pakai No 35 untuk tanah Gedung Kantor Pekayon. Untuk Sertifikat Hak Pakai No 34 sedang dilakukan untuk langsung balik nama dari LAPAN ke Kementerian PANRB, sedangkan untuk Sertifikat Hak Pakai No 35 harus dilakukan pemecahan dari LAPAN ke BRIN terlebih dahulu, lalu selanjutnya dibalik nama ke Kementerian PANRB.

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (BA 047) TA 2024 (Unaudited) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan ini disertai Catatan atas Laporan Keuangan yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sesuai dengan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, CaLK ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Jakarta, Februari 2025 Kuasa Pengguna Anggaran

Reni Suzana

REPUBLIK INDONES

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 048

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM

Tgl Cetak : 18/02/25 8:32 AM

Halaman: 1

lap_lra_face_kl_new_poc

						.apaac	e_ki_flew_poc	
		2024				2023		
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%			REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	1,711,574,797	1,711,574,797	0	0	811,254,408	(811,254,408)	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,711,574,797	1,711,574,797	0	0	811,254,408	(811,254,408)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	1,711,574,797	1,711,574,797	0	0	811,254,408	(811,254,408)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	450,466,107,000	433,338,930,871	(17,127,176,129)	96	374,136,493,000	367,844,818,653	6,291,674,347	98
1. Belanja Pegawai	146,913,233,000	145,334,254,028	(1,578,978,972)	99	125,339,483,000	124,396,635,905	942,847,095	99
2. Belanja Barang	247,584,204,000	232,266,903,912	(15,317,300,088)	94	212,699,517,000	209,390,097,898	3,309,419,102	98
3. Belanja Modal	55,968,670,000	55,737,772,931	(230,897,069)	100	36,097,493,000	34,058,084,850	2,039,408,150	94
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 048

Tgl Data : 15/02/25 10:57 AM Tgl Cetak : 18/02/25 8:32 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_kl_new_poc

		2024				2023		
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	450,466,107,000	433,338,930,871	(17,127,176,129)	96	374,136,493,000	367,844,818,653	6,291,674,347	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

FINAL

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data 18/02/25 6:24 AM Tgl Cetak 18/02/25 8:32 AM

Halaman 1

			lap_neraca_k	d_komparatif_pod
NAMA PERKIRAAN	JUM	LAH	Kenaikan (Pen	urunan)
NAMA PERKIRAAN	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	980,460,983	440,132,021	540,328,962	122.77
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	49,569,744	(49,569,744)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	487,703,112	1,540,600,696	(1,052,897,584)	(68.34)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,438,516)	0	(2,438,516)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	485,264,596	1,540,600,696	(1,055,336,100)	(68.50)
Persediaan	702,153,743	1,142,794,896	(440,641,153)	(38.56)
JUMLAH ASET LANCAR	2,167,879,322	3,173,097,357	(1,005,218,035)	(31.68)
ASET TETAP				
Tanah	60,334,049,494	32,784,833,000	27,549,216,494	84.03
Peralatan dan Mesin	173,738,580,179	152,259,916,225	21,478,663,954	14.11
Gedung dan Bangunan	91,915,184,122	85,949,348,532	5,965,835,590	6.94
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,598,328,550	1,461,578,550	136,750,000	9.36
Aset Tetap Lainnya	1,447,364,549	1,351,922,885	95,441,664	7.06
AKUMULASI PENYUSUTAN	(143,207,232,329)	(138,934,673,202)	(4,272,559,127)	3.08
JUMLAH ASET TETAP	185,826,274,565	134,872,925,990	50,953,348,575	37.78
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	764,867,146	783,048,964	(18,181,818)	(2.32)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(764,867,146)	(783,048,964)	18,181,818	(2.32)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	0	0	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	46,447,825,380	36,436,921,600	10,010,903,780	27.47
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3,488,838,700	11,686,842,500	(8,198,003,800)	(70.15)
Aset Lain-lain	5,631,935,307	171,100,000	5,460,835,307	3,191.60
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(25,694,945,696)	(10,930,667,800)	(14,764,277,896)	135.07
JUMLAH ASET LAINNYA	29,873,653,691	37,364,196,300	(7,490,542,609)	(20.05
JUMLAH ASET	217,867,807,578	175,410,219,647	42,457,587,931	24.20
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,802,023,480	12,085,588,376	(8,283,564,896)	(68.54)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,802,023,480	12,085,588,376	(8,283,564,896)	(68.54)
JUMLAH KEWAJIBAN	3,802,023,480	12,085,588,376	(8,283,564,896)	(68.54)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	214,065,784,098	163,324,631,271	50,741,152,827	31.07
JUMLAH EKUITAS	214,065,784,098	163,324,631,271	50,741,152,827	31.07
JUMLAH EKUITAS	214,065,784,098	163,324,631,271	50,741,152,827	31.07

NERACA

TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data 18/02/25 6:24 AM Tgl Cetak 18/02/25 8:32 AM

Halaman 2

lap_neraca_kl_komparatif_poc

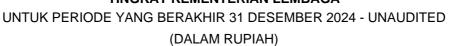
NAMA PERKIRAAN	JUM	LAH	Kenaikan (Penurunan)	
INAIVIA FERRIRAAIN	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	217,867,807,578	175,410,219,647	42,457,587,931	24.20

Keterangan:

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA





KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

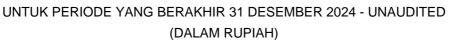
Tgl Data : 18/02/25 6:24 AM Tgl Cetak : 18/02/25 8:32 AM

Halaman : 1 lap_lo_kl_poc

	lap_lo_kl_poc			
URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	289,632,940	(289,632,940)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	289,632,940	(289,632,940)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	289,632,940	(289,632,940)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	145,347,317,028	124,252,951,905	21,094,365,123	16.977
Beban Persediaan	4,370,300,511	4,386,805,430	(16,504,919)	(0.376)
Beban Barang dan Jasa	131,983,450,323	98,332,313,508	33,651,136,815	34.222
Beban Pemeliharaan	13,007,938,923	11,956,601,748	1,051,337,175	8.793
Beban Perjalanan Dinas	134,985,384,602	115,149,970,547	19,835,414,055	17.226
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA





KEMENTERIAN/LEMBAGA

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 18/02/25 6:24 AM Tgl Cetak : 18/02/25 8:32 AM

Halaman : 2 lap_lo_kl_poc

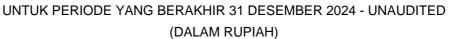
	lap_lo_kl_poc				
URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)	
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0		
Beban Subsidi	0	0	0		
Beban Hibah	0	0	0		
Beban Bantuan Sosial	0	0	0		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	30,071,501,234	22,299,622,630	7,771,878,604	34.852	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,438,516	0	2,438,516		
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0		
Beban Lain-Lain	0	0	0		
JUMLAH BEBAN	459,768,331,137	376,378,265,768	83,390,065,369	22.156	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(459,768,331,137)	(376,088,632,828)	(83,679,698,309)	22.25	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,277,215,460	238,077,654	1,039,137,806	436.47	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,433,000,000	284,182,998	1,148,817,002	404.253	
Beban Pelepasan Aset	155,784,540	46,105,344	109,679,196	237.888	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0		
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0		
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0		
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,151,144,864	110,796,630	1,040,348,234	938.971	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,186,319,364	114,796,630	1,071,522,734	933.41	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,174,500	4,000,000	31,174,500	779.362	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,428,360,324	348,874,284	2,079,486,040	596.056	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(457,339,970,813)	(375,739,758,544)	(81,600,212,269)	21.717	
POS LUAR BIASA	0	0	0		
Beban Luar Biasa	0	0	0		
POS LUAR BIASA	0	0	0		
SURPLUS/DEFISIT - LO	(457,339,970,813)	(375,739,758,544)	(81,600,212,269)	21.717	

Keterangan:

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA





KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Tgl Data : 18/02/25 6:24 AM Tgl Cetak : 18/02/25 8:32 AM

Halaman : 1 lap_lpe_kl_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	163,324,631,271	147,233,168,165	16,091,463,106	10.929
SURPLUS/DEFISIT-LO	(457,339,970,813)	(375,739,758,544)	(81,600,212,269)	21.717
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,639,438,791)	(439,882,261)	(1,199,556,530)	272.699
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	430,650	(430,650)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(662,758,740)	(440,312,911)	(222,445,829)	50.52
LAIN-LAIN	(976,680,051)	0	(976,680,051)	()
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	509,720,562,431	392,271,103,911	117,449,458,520	29.941
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	50,741,152,827	16,091,463,106	34,649,689,721	215.33
EKUITAS AKHIR	214,065,784,098	163,324,631,271	50,741,152,827	31.068

Keterangan:

FINAL



HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-03

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	378,049,699,000	378,049,699,000	0
2	Belanja	65,572,293,656	65,572,293,656	0
3	Pengembalian Belanja	-7,369,767	-7,369,767	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	49,569,744	49,569,744	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	600,000,000	600,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000,000	600,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	30,357,599,650	30,357,599,650	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-APR-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-04

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	378,049,699,000	378,049,699,000	0
2	Belanja	103,680,565,168	103,680,565,168	0
3	Pengembalian Belanja	-10,065,481	-10,065,481	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	49,569,744	49,569,744	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	600,000,000	600,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000,000	600,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	30,357,599,650	30,357,599,650	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 04-JUN-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-05

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	378,049,699,000	378,049,699,000	0
2	Belanja	125,589,273,496	125,589,273,496	0
3	Pengembalian Belanja	-20,568,989	-20,568,989	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	95,085,577	95,085,577	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	600,000,000	600,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000,000	600,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	30,357,599,650	30,357,599,650	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JUN-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	378,049,699,000	378,049,699,000	0
2	Belanja	163,232,438,468	163,232,438,468	0
3	Pengembalian Belanja	-35,619,146	-35,619,146	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	104,842,577	104,842,577	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,401,070,000	2,401,070,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,401,070,000	2,401,070,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	51,811,498,116	51,811,498,116	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19-JUL-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-07

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	378,049,699,000	378,049,699,000	0
2	Belanja	201,977,645,636	201,977,645,636	0
3	Pengembalian Belanja	-70,767,349	-70,767,349	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	106,842,577	106,842,577	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	51,811,498,116	51,811,498,116	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-AUG-24



HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-08

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	378,049,699,000	378,049,699,000	0
2	Belanja	231,999,445,607	231,999,445,607	0
3	Pengembalian Belanja	-122,369,903	-122,369,903	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	106,842,577	106,842,577	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	51,811,498,116	51,811,498,116	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-SEP-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	400,378,371,000	400,378,371,000	0
2	Belanja	264,806,564,715	264,806,564,715	0
3	Pengembalian Belanja	-220,794,669	-220,794,669	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,385,139,872	1,385,139,872	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	419,809,175	419,809,175	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	419,809,175	419,809,175	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	51,811,498,116	51,811,498,116	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-OCT-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-10

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	433,461,087,000	433,461,087,000	0
2	Belanja	306,117,941,405	306,117,941,405	0
3	Pengembalian Belanja	-271,175,360	-271,175,360	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,550,570,872	1,550,570,872	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	894,439,054	894,439,054	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	894,439,054	894,439,054	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	51,811,498,116	51,811,498,116	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-NOV-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-11

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	417,285,288,000	417,285,288,000	0
2	Belanja	329,708,454,456	329,708,454,456	0
3	Pengembalian Belanja	-466,133,610	-466,133,610	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,661,367,957	1,661,367,957	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	763,307,756	763,307,756	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	763,307,756	763,307,756	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	51,811,498,116	51,811,498,116	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-DEC-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 427950 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	417,285,288,000	417,285,288,000	0
2	Belanja	401,172,466,949	401,172,466,949	0
3	Pengembalian Belanja	-931,085,110	-931,085,110	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,711,574,797	1,711,574,797	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	52,264,391,616	52,264,391,616	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-25





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 015416 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	66263535000	66263535000	0
2	Belanja	33221410024	33221410024	0
3	Pengembalian Belanja	-123860992	-123860992	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-OCT-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 015416 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-04

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	88,592,207,000	88,592,207,000	0
2	Belanja	14,433,128,583	14,433,128,583	0
3	Pengembalian Belanja	-18,352,711	-18,352,711	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	90,000,000	90,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	90,000,000	90,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 30-MAY-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 015416 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-05

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	88,592,207,000	88,592,207,000	0
2	Belanja	18,325,701,780	18,325,701,780	0
3	Pengembalian Belanja	-71,122,970	-71,122,970	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,171,637,047	2,171,637,047	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,171,637,047	2,171,637,047	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20-JUN-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 015416 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-07

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	88592207000	88592207000	0
2	Belanja	28221883868	28221883868	0
3	Pengembalian Belanja	-121689442	-121689442	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	90000000	90000000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	90000000	90000000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-AUG-24





HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 015416 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-08

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	88592207000	88592207000	0
2	Belanja	30785459250	30785459250	0
3	Pengembalian Belanja	-122490992	-122490992	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	90000000	90000000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	90000000	90000000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 10-SEP-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA

Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 11 Utara Jafan Lapangan Banteng Timur Nomor 2--4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3849388; Faksimile (021) 3448390, Laman <u>www.djkn.kemenkeu.go.id</u>

BERITA ACARA

REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERIODE TAHUN 2024 UNAUDITED NOMOR: BAR-22/KN.2/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 7 Februari 2025 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Sulistyono
 NIP : 197108091997031001

Jabatan : Kasubdit PKBMN II Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Ario Wiriandhi

NIP : 198010152003121001

Jabatan : Kepala Biro Umum dan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Unit Akuntansi Pengguna Barang pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data terkait Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) periode Tahun 2024 Unaudited dengan hasil sebagai berikut:

Data BMN:

١.

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2024							
		1	Saldo Awal		Mutasi		Saldo Akhir		
1	POSISI BMN DI NERACA	Rp	161.693.074.686	Rp	51.220.168.613	Rp	212.913.243.299		
Α	ASET LANCAR	Rp	1.142.794.896	-Rp	440.641.153	Rp	702.153.743		
1	Persediaan	Rp	1.142.794.898	-Rp	440.641.153	Rp	702.153.743		
В	ASET TETAP	Rp	134.872.925.990	Rp	50.953.348.575	Rp	185.826.274.565		
1	Tanah	Rp	32.784.833.000	Rp	27.549.216.494	Rp	60.334.049.494		
2	Peralatan dan Mesin	Rp	152.259.916.225	Rp	21.478.663.954	Rp	173.738.580.179		
3	Gedung dan Bangunan	Rp	85.949.348.532	Rp	5.965.835.590	Rp	91,915,184,122		
4	Jalan dan Jembatan	Rp	-	Rp	126.829.000	Rp	126.829.000		
5	Irigasi	Rp	66.362.000	Rp	9.921.000	Rp	76.283.000		
6	Jaringan	Rp	1.395.216.550	Řр		Rp	1.395.216.550		
7	Aset Tetap Renovasi	Rp	-	Rp	-	Rp			
8	Aset Tetap Lainnya	Rp	1.351.922.885	Rp	95.441.664	Rр	1.447.364.549		
9	Konstruksi Datam Pengerjaan	₹p	-	Rp	-	Rр	•		
10	Akum. Penyusulan Aset Tetap	-Rp	138.934.673.202	-Rp	4.272.559.127	-Rp	143.207.232.329		
С	ASET LAINNYA	₽₽	25.677.353.800	Rp	707.461.191	Rp	26.384.814.991		
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	•	Rp		Rp			
2	Aset Tak Berwujud	Rp	36.436.921.600	Rp	10.010.903.780	Rp	46.447.825.380		
3	ATB Dalam Pengerjaan	Řр	•	Rp	•	Rp			
4	Aset Lain-lain 2)	Řр	171.100.000	Rp	5.460.835.307	Rp	5.631.935.307		

No	Akun Neraca		Nilai BMN Per	iode Se	mester II Tahun A	Anggar	an 2024
			Saldo Awal		Mutasi	1	Saldo Akhir
5	Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-Rp	10.930.667.800	-Rp	14.764.277.896	-Rp	25.694.945.696
II	BMN NON NERACA	Rp	791.308.607	Rр	76.241.810	Rp	867.550.417
Α	EKSTRAKOMPTABEL	Rp	791.308.607	Rp	76.241.810	Rp	867.550.417
1	BMN Ekstrakomptabel	Rp	791.308.607	Rp	76.241.810	Rp	867.550.417
2	Akum. Peny. Ekstrakomptabel	₽	360.175.142	Rp	888.255.169	Rp	528.080.027
TOT	AL (I + II)	Rp	162.484,383.293	Rp	51,296,410,423	Rp	213.780.793.716

Catalan:

^{*)} Nilal yang disejikan hanya nilal Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan Operasi Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

-2-

II. Data Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra:

1.21		Nilai BMN Periode Tahun 2024 Unaudited		
No	Akun Neraca	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
1	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	0	0
2	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	0	0	0
3	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	0	0
	TOTAL	0	0	0

Catatan:

III. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahun 2024 Unaudited, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Biro Umum dan Keuangan

a.n.Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan BMN II

Ario Wiriandhi

^{*)} Tidak Termasuk Aset Konsesi Jasa Pemerintah Partisipasi Mitra (BMN)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LANTAI 11, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3449230 pes. 4601, 3442948 FAKSIMILI (021) 3442948; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN I BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI PERIODE SEMESTER II TAHUN 2024 UNAUDITED NOMOR: BAR-22/KN.2/2025

I. Rekonsiliasi Saldo Awal Data Barang Milik Negara

		Nilai S	aldo Awal BMN S	Semeste	er II Tahun 2024 U	naudil	ed
No.	Akun Neraca		hir LBP Tahun 3 <i>Audited</i>	Saldo	Awai BMN pada SAKTI	Se	lisih
Α	ASET LANCAR	Rp	1.142.794.896	Rp	1.142.794.896	Rp	
1	Persediaan	Rp	1.142.794.896	Rp	1.142.794.896	Rp	-
В	ASET TETAP	Rp	134:872.925:990	Rp	134,872,925,990	Rp	The Albert 7
1	Tanah	Rp	32.784.833.000	Rp	32.784.833.000	Rp	-
2	Peralatan dan Mesin	Rp	152.259.916.225	Rp	152.259.916.225	Rp	-
3	Gedung dan Bangunan	Rp	85.949.348.532	Rp	85.949.348.532	Rp	-
4	Jalan dan Jembatan	Rp	•	Rp	-	Rp	-
5	lrigasi	Rp	66.362.000	Rp	68.362.000	Rp	-
6	Jaringan	Rp	1.395.216.550	Rp	1.395.216.550	Rp	•
7	Aset Tetap Lainnya	Rp	1.351.922.885	Rp	1.351.922.885	Rp	-
8	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Akum. Peny. Aset Tetap	-Rp	138.934.673.202	-Rp	138.934.673.202	Rp	•
C	PROPERTI INVESTASI	Rp		Rp		Rp.	V-1
1	Properti Investasi	Rp		Rp	-	Rp	
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Rp	•	Rp	-	Rp	•
D	ASET LAINNYA	Rp	25.677,353.800	Rp	25.677.353.800	Rp	; -
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	-	Rp	•	Rp	-
2	Aset Tak Berwujud	Rp	36.436.921.600	Rp	36.436.921.600	Rp	-
3	Aset Lain-lain *)	Rp	171,100.000	Rp	171.100.000	Rp	-
4	Akum. Peny. Aset Lainnya	-Rp	10.930.667.800	-Rp	10.930.667.800	Rp	-
E	TOTAL SALDO AWAL BMN 'PADA NERACA	Rp	161.693.074.686	Rp	161.693.074.686	Rp	1

Catatan:

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Yang Dihentikan dari Penggunaan Operasi Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN Tidak terdapat perbedaan saldo awal data BMN per 31 Desember 2024

Pemutakhiran Dan Rekonsiliasi Data BMN Periode Berjalan

a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara

No	Akun Neraca		lo Awal Per 01 anuari 2024		Mutasi		lo Akhir Per 31 sember 2024
1	POSISI BMN DI NERACA	Rp	161.693.074.686	Rp	51.220.168.613	Rp	212.913.243.299
11	ASET LANCAR	Rp	1.142.794.896	-Rp	440.641.153	Rp	702.153.743
1171	Persediaan	Rp	1.142.794.896	-Rp	440.641.153	Rp	702.153.743
13	ASET TETAP	Rp	134.872.925.990	Rp	50.953.348.575	Rp	185.826.274.565
1311	Tanah	Rp	32.784.833.000	Rp	27.549.216.494	Rp	60.334.049.494
1321	Peralatan dan Mesin	Rp	152.259.916.225	Rp	21.478.663.954	Rp	173.738.580.179
1371	Akum. Penyusutan	-Rp	124.837.739.902	1,16	2	-Rp	125.351.403.912
1331	Gedung dan Bangunan	Rp	85.949.348.532	Rp	85.949.348.532	Rp	91.915.184.122
1372	Akum. Penyusutan	-Rp	13.250.625.167			-Rp	16.818.457.554
1341	Jalan, irigasi, dan Jaringan	Rp	1.461.578.550	Rp	136.750.000	Rp	1.598.328.550
1373	Akum. Penyusutan	-Rp	835.252.570			-Rp	1.018.944.925
1351	Aset Tetap lainnya	Rp	1.351.922.885	Rp	95.441.664	Rp	1.447.364.549
1374	Akum. Penyusutan	-Rp	11.055.563			-Rp	18.425.938
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	-	Rp	-	Rp	
13811	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	Rp	-	Rp	12	Rp	
13821	Akum. Penyusutan	Rp	-	Rp	-	Rp	
1383	PROPERTI INVESTASI	Rp	-	Rp	-	Rp	
1383	Properti Investasi	Rp	-	Rp	=	Rp	
13841	Akum. Penyusutan	Rp	-1	Rp	-	Rp	
16	ASET LAINNYA	Rp	25.677.353.800	Rp	707.461.191	Rp	26.384.814.99
1611	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp		Rp		Rp	0.000,000,000,000,000,000,000,000
169111	Akum. Penyusutan	Rp	-	Rp	-	Rp	
1621	Aset Tak Berwujud	Rp	36.436.921.600			Rp	46.447.825.38
16931	Akum. Amortisasi	-Rp	10.759.567.800			-Rp	20.084.714.728
1661	Aset Lain-lain 7	Rp	171,100,000			Rp	5.631.935.30
169122	Akum. Penyusutan	Rp				-Rp	5.582.821.593
169321	Akum. Amortisasi	-Rp	171.100.000			-Rp	27.409.375
II	BMN NON NERACA	Rp	791.308.607	Rp	76.241.810	Rp	867.550.417
Α	EKSTRAKOMPTABEL	Rp	791.308.607	Rp	76.241.810	Rp	867.550.417
1	BMN Ekstrakomptabel	Rp	791.308.607	Rp	76.241.810	Rp	867.550.417
2	Akum. Penyusutan	-Rp	360.175.142	-Rp	888.255.169	-Rp	528.080.02
В	BPYBDS	Rp	-	Rp	-	Rp	
С	BARANG HILANG	Rp		Rp	-	Rp	
D	BARANG RUSAK BERAT	Rp		Rp	-	Rp	
Е	BARANG PERSEDIAAN YANG DISERAHKAN	Rp	-	Rp		Rp	
	TOTAL (I+II)	Rp	162.484.383.293	Rp	51.296.410.423	Rp	213.780.793.716

^{*)} Nilai yang disajikan hanya nilai Aset Tetap Yang Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Lain-lain berupa BMN.

b. Rekonsiliasi Data Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra

PE	RKIRAAN NERACA	SALDO AWAL PER	MUT	ASI	SALDO AKHIR PER
KODE	URAIAN	01 JANUARI 2024	TAMBAH	KURANG	31 DESEMBER 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
138121	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	0	0	0
138131	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
138211	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0

c. Rekonsiliasi Pengelolaan BMN

1) Penetapan Status Penggunaan BMN

NO	URAIAN			PKAN STATUS INAAN	12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12-	GGUN	(AN STATUS IAAN
		KUANTITAS		NILAI (Rp)*	KUANTITAS		VILAI (Rp)*
1	Tanah	2	Rp	27.549.216.494	1	Rp	32.784.833.000
2	Peralatan dan Mesin	125	Rp	44.333.462.415	14799	Rp	143.017.790.020
3	Gedung dan Bangunan	15	Rp	78.762.620.780	6	Rp	12.370.800.225
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	3	Rp	136.750.000	3	Rp	1.461.578.550
5	Aset Tetap lainnya**	0	Rp		3559	Rp	2.660.843.950
6	Aset Tak Berwujud	10	Rp	34.813.563.000	121	Rp	10.593.576.717
JUM	LAH	155	Rp	185.595.612.689	18489	Rp	202.889.422.462

^{*}nilai sebelum penyusutan

2) Pengelolaan BMN

		Jumlah Persetujuan					
No A 1 2 3 B 1 2	Jenis Pengelolaan	Telah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Total			
Α	Penggunaan						
1	Penetapan Status Penggunaan						
2	Penggunaan Sementara						
3	Dioperasikan oleh Pihak Lain						
В	Pemanfaatan						
1	Sewa						
2	Pinjam Pakai						
3	Kerja Sama Pemanfaatan						
4	BGS/BSG						
5	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)						
6	Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)						
С	Pemindahtanganan						
1	Penjualan BMN						
2	Tukar Menukar	((6))					
3	Hibah						
4	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat						
D	Pemusnahan						
E	Penghapusan						
	Total (A+B+C+D+E)						

^{**}tidak termasuk Aset Tetap renovasi

II. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengelolaan BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahun 2024 Unaudited adalah sebesar Rp 1.433.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Union Dandanatan Dari		Penerimaan		Keterangan
NO.	Uraian Pendapatan Dari	BLU	Non BLU	Total	Reterangan
1.	Penggunaan				
2.	Pemanfaatan				
3.	Pemindahtanganan		Rp 1.433.000.000	Rp 1.433.000.000	Hasil Penjualan BMN berupa Kendaraan Dinas melalui Lelang
4.	Kawasan				
5.	Klaim Asuransi BMN				
6.	Lainnya				
	Total				

III. Informasi penting lainnya

a. Jumlah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 1 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah Satker							
No	Uraian Satker	Non BLU	BLU	Total					
1	Satker KP	1	0	1					
2	Satker KD	0	0	0					
3	Satker DK	0		0					
4	Satker TP	0		0					
5	Satker UB	0	THE PARK	0					
	Total	1	0	1					

- b. Nilai BMN pada Satker BLU sebesar Rp 0.
- c. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN:
 - Penggunaan aplikasi SAKTI secara online dalam pengelolaan BMN yang terintegrasi dengan pengangaran dan keuangan secara langsung dan berjenjang sehingga berbeda teknis pelaksanaannya dengan aplikasi-aplikasi BMN sebelumnya;
 - Penerapan proses bisnis penatausahaan dalam transaksi pencatatan mulai dari perolehan, pengembangan, inventarisasi sampai dengan penghapusan aset sesuai dengan regulasi atau teknis pelaksanaannya pada aplikasi SAKTI
- d. Langkah tindak lanjut ke depan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian permasalahan penatausahaan BMN adalah:
 - Meningkatkan kemampuan teknis dalam penatausahaan BMN yang menggunakan aplikasi SAKTI melalui Bimbingan Teknis;
 - 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan admin aplikasi SAKTI melalui Direktorat SITP (Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan) untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BMN di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- e. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMN:
 - Telah dilakukan penelusuran oleh tim BMN Kementerian PANRB atas Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp80.000.000. ATB tersebut merupakan website Critical Occupation List atau Ragam Okupasi Kritikal yang memiliki alamat URL https://proyek-col-asn.netlify.app/about. Telah disusun Berita Acara Hasil Penelusuran Nomor 45/BN.05/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Tim BMN dengan mengetahui Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan
- f. Informasi lain yang dianggap perlu:

Kepala Biro Umum dan Keuangan

a.n.Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan BMN II

Ario Wiriandhi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LANTAI 11, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3449230 pes. 4601, 3442948 FAKSIMILI (021) 3442948; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019 s.d. 2023 PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 nomor 19/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 nomor 26c/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 nomor 55/S/IV-XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 nomor 18/S/IV-XV/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 nomor 28/S/IV-XV/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, BPK menemukan kondisi yang berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya.

Tindak lanjut atas temuan dimaksud sebagaimana terlampir.

Kepala Biro Umum dan Keuangan

a.n.Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kasubdit Perumusan Kebijakan BMN II

Ario Wiriandhi

LAMPIRAN II BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DAFTAR NILAI BMN PER PERKIRAAN NERACA

ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PER 31 DESEMBER 2024

lo Escion I	Persediaan	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Akum Penyueutan PM	Gedung Dan Bangunan	Akum Penyusutan GB	Jalan Irigasi dan Jaringan	Akum Penyusutan JU	Aset Tetap Lainnya	Akum Penyusutan ATL		Asel Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	Jana Participani		Akumulasi Penyusutan Properti Impestasi	Kemitraan	Akum Penyusutan Kemitraan	Aset Tak Berwujud	Amortisesi ATB	Aset Lain-lain	Akum Penyusutan ALL	Amortisasi ALL	Ekstrakomptabel
den Referred British	762,113,743	59.334.645.854	173.712.580.175	425,101,403,017	91.995.184.122	-10, \$10, 412, 554	1.588,171,310	-1.511.301.321	3,447,784,549	+15.423.91E	*,		Rp.	**		**		Fp. 41.447.323.280	-29 004.754.728	3.651385.007	4.802.821.800	£7.491,375	Pp. 887,556.41

a.n. Direktur

Kepala Biro Umum dan Keuangan Kasubdit PKBMN II

Ario Wiriandhi

LAMPIRAN III BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS LKPP TAHUN 2019 S.D. 2023 PER 31 DESEMBER 2024

No	ВА	Kementerian/Le mbaga	Tahun	Jenis Temuan	No. Sub Temuan	Judul Sub Temuan	Nilai Temuan	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	48	Kementerian PANRB	2019	SPI				NIHIL	
2	48	Kementerian PANRB	2020	SPI	Lampiran 135	AT belum didukung dokumen kepemilikan		KASN Tidak Menguasai Sertifikat Kepemilikan Tanah Cipinang dan Tanah Masih atas Hak Milik Pribadi	Telah dilakukan sertipikasi tanah seluruh bidang atas nama Pemerintah RI seluas 2.345m2
3	48	Kementerian PANRB	2021	SPI	E.6.1	Persediaan Kuantitas Negatif dan Saldo Negatif	-76.330.335	Terdapat 11 nup persediaan kuantitas negatif dan saldo negatif	Sudah ditindaklanjuti dengan pengecekan terkait BMN terkait, bahwa tidak ada kuantitas negatif maupun saldo negatif
4	48	Kementerian PANRB	2021	SPI	E.6.2	Barang Persediaan dengan Kuantitas Negatif, namun Saldo Nihil atau Positif	436.242	Terdapat 1 nup persediaan kuantitas negatif dan saldo nihil atau positif	Sudah ditindaklanjuti dengan pengecekan terkait BMN terkait, bahwa tidak ada kuantitas negatif maupun saldo negatif
5	48	Kementerian PANRB	2021	SPI	E.6.4	Barang Persediaan dengan Kuantitas Positif, namun Saldo Negatif	-186.074.859	Terdapat 7 nup persediaan kuantitas positif namun saldo negatif	Sudah ditindaklanjuti dengan pengecekan terkait BMN terkait, bahwa tidak ada kuantitas negatif maupun saldo negatif
6	48	Kementerian PANRB	2020	SPI	E.9.7	Daftar Aset Lainnya yang Belum Teridentifikasi Tindak Lanjut Perbaikan Data Anomali oleh K/L Terkait	70.399,999	Terdapat kesalahan pencatatan atas 1 buah software komputer	Telah dilakukan perbaikan dengan penghapusan pencatatan dan telah diperbaiki dengan penginputan nup baru. Telah dikurangi nilai 70.400.000 sehingga nilai akh 47.650.001
7	48	Kementerian PANRB	2022	SPI				NIHIL	
8	48	Kementerian PANRB	2023	SPI	E.9.8	Tidak ditemukan aset tak berwujud di Kementerian PANRB	80.000.000	Terdapat aset tak berwujud yang tidak ditemukan	Telah dilakukan penelusuran oleh tim BMN Kementerian PANRB dan telah disusun Berita Acara Hasil Penelusuran Nomor 45/BN.05/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Tim BMN dengan mengetahui Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan.

Kepala Biro Umum dan Keuangan

Allmanah

a.n. Direktur Kasubdit PKBMN II

Ario Wiriandhi

Rekapitulasi Atas Kepatuhan Terhadap Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 terkait Keharusan Sertipikasi BMN berupa tanah PER 31 DESEMBER 2024 PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

					TARGET SERTI	PIKASI BMN TA 2025			
No	ВА	Kementerian/L embaga	Jumlah tanah sudah bersertipikat an, Pemerintah RI c.q. KL s.d. Tahun 2024	NOMINATIF 2025 K1	NOMINATIF 2025 K2	PBT/PRODUK LAINNYA (K3)	UPDATE & VALIDASI DATA (K4)	Tanah belum bersertipikat namun tidak masuk target sertipikasi 2025	TOTAL (4+5+6+7+8+9)
				NUP	NUP	NUP	NUP		
1	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi				2 1		-	

Kepala Biro Umum dan Keuangan

Meranulu

a.n. Direktur Kasubdit PKBMN II

Ario Wiriandhi

Daftar Penetapan Rencana Pengasuransian BMN

KODE PB

: 048

NAMA PB

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NO	КРВ	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	LOKASI	TAHUN PEMBANGUNAN	NILAI PEROLEHAN	PENGGUNAAN DAN FUNGSI BANGUNAN	JANGKA WAKTU	BESARAN PREMI	PERTIMBANGAN	KETERANGAN
1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	JL. Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan	2004	Rp 35.417.946.17	Gedung kantor Kementerian PANRB	Feb - Des 2025 (12 bulan)	Rp 63.666.710	Perlindungan Aset dari rawan banjir, kebakaran dan gempa	Gedung milik sendiri
2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	JL. Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan	2007	Rp 23.381.674.44	Gedung kantor Kementerian PANRB	Feb - Des 2025 (12 bulan)	Rp 42,030.508	Perlindungan Aset dari rawan banjir, kebakaran dan gempa	Gedung milik sendiri
3	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	JL. Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan	2004	Rp 1.107,491,67	Kantin Reformasi Birokrasi, Poliklinik Kementerian PANRB dan Kantor Kas BRI	Feb - Des 2025 (12 bulan)	Rp 1.990.809	Perlindungan Aset dari rawan banjir, kebakaran dan gempa	Gedung milik sendiri
4	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	JL, Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan	1999	Rp 1,910,033.93	Masjid Kementerian PANRB	Feb - Des 2025 (12 bulan)	Rp 3.433.445	Perlindungan Aset dari rawan banjir, kebakaran dan gempa	Gedung milik sendiri
5	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	JL. Jenderal Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan	1990	Rp 65.138,442.85	Gedung kantor Kementerian PANRB	Feb - Des 2025 (12 bulan)	Rp 117.091.779	Perlindungan Aset dari rawan banjir, kebakaran dan gempa	Gedung milik Kementerian Setneg yang digunakan olek Kementerian PANRB

Kepala Biro Umum dan Keuangan

Alleranah

a.n. Direktur Kasubdit PKBMN II

Ario Wiriandhi

REKAPITULASI PERBANDINGAN NILAI BMN PADA LKKL DAN LBP

PER 31 DESEMBER 2024

BERDASARKAN PERKIRAAN NERACA

PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

		Nilai BMN	Periode Tahun 2024 (Unaudited)		Penjelasan selisih
No.	Akun Neraca	LKKL	LBP	Selisih	Penjelasan Sensin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)
A	ASET LANCAR	702.153.743	702.153.743	0	
1	Persediaan	702.153.743	702.153.743	0	
В	ASET TETAP	185.826.274.565	185.826,274,565	0	
1	Tanah	60.334.049.494	60.334.049.494	0	
2	Peralatan dan Mesin	173,738,580,179	173.738.580,179	0	
3	Akumulasi Penyusutan	-125,351,403,912	-125.351.403.912	0	
4	Gedung dan Bangunan	91.915.184.122	91.915.184.122	0	
5	Akumulasi Penyusutan	-16.818.457.554	-16.818,457,554	o	
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,598,328,550	1.598.328.550	O	
7	Akumulasi Penyusulan	-1.018.944.925	-1.018.944.925	0	
8	Aset Tetap Lainnya	1.447.364.549	1.447.364.549	.0	
9	Akumulasi Penyusulan	-18,425,938	-18,425,938	0	
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	
11	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	
12	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	0	0	
13	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	
C	PROPERTI INVESTASI	0	0	0	
1	Properti Investasi	0	0	0	
2	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	
C	ASET LAINNYA	-5.610.230,968	-5.610.230.968	0	
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	
3	Aset Tidak Berwujud	46.447.825.380	46,447,825,380	0	
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-20.084.714.728	-20.084.714.728	0	
5	Aset Lain-lain 7	5.631.935.307	5.631.935.307	0	
6	Akum. Penyusutan	-5.582.821.593	-5.582.821.593	0	
7	Akum. Amortisasi	-27.409.375	-27,409,375	0	
D	TOTAL NILAI BMN (Intrakomptabel)	180.918.197.340	180.918.197.340	0	

Kepala Biro Umum dan Keuangan

a.n. Direktur Kasubdit PKBMN II

Ario Wiriandhi

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI

Tgl, No. SP : 28 November 2023, DIPA-

048.01.1.427950/2024

Unit Organisasi

(01) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN

ÀPÁRATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI

Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota: (01.54) DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN KPPN

: (133) Jakarta IV

^ ^^

Satuan Kerja

: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN

APARATUR NEGARA

Alamat dan No Telp

 Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00889/DRPP/427950/2024

	J	enis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1		2	3	4	5	6
A	BF	Kas, BPP dan UM	1.879.131.334,00	78.418.691.487,00	80.297.822.821,00	0,00
	1.	BP Kas (Tunai & Bank)	104.480.939,00	45.188.534.146,00	45.293.015.085,00	0,00
	2.	BP UM (Voucher)	0,00	86.000.000,00	86,000.000,00	0,00
	3.	BP BPP	1.774.650.395,00	33.144.157.341,00	34.918.807.736,00	0,00
В	Bf	Selain Kas	1.879.131.334,00	39.372.126.215,00	41.251.257.549,00	0,00
	1,	BP UP*)	176,472,318,00	720.018.896,00	896.491.214,00	0,00
	2.	BP TUP*)	0,00	21.726.356.479,00	21.726.356.479,00	0,00
	3.	BP LS-Bendahara	1.699.551.950,00	16.278.029.128,00	17.977.581.078,00	0,00
	4.	BP Pajak	3.107.066,00	647.721.712,00	650.828.778,00	0,00
	5.	BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
L	6.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	00,0

^{*)} jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Hana Tunci di Brookee

	i. Dang Tunai di Brankas	кр.	0,00	
	2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinen rekening koran)
	3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	•
III.	Selisih Kas			
	1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rρ.	0,00	
	2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00	
	3. Selisih Kas	Rp.	0,00	-

0-

^{*)} jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

Pang diperiksa
Berdahara Pengeluaran

OHANU SUTOMO
NIP 199508152018011002

Mengetahui a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

PONTS

ROGO PAMUNGKAS

NIP 197704302008041001

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa tanggat 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650304279501000 dengan posisi seldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 00889/DRPP/427950/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara		
A. Saldo Kas Bendahara		
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rρ.	0,00
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3 Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :		
1 Saldo BP UP	Rp.	0,00
2 Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3 Saldo LS-Bendahara	Rρ.	0,00
4 Saldo Pajak	Rp.	0,60
5 Saldo Hibah	Rp.	0,00
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	00,0
C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)		
A. Kas yang dikuasal bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00
B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
III. Hasii Rekonsiliasi Internat		
A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 a. Saldo UP	Rp.	0,00
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Satdo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2 a. Saldo TUP	Rφ.	00,0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp	0,00
 Jumlah Saldo dan Kuitensi TUP 	Rp.	00,00
3 Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4 Jumleth (A1+A2+A3)	Rp.	0,00
B. Pembukuan menurut UAKPA		
1 Kas UP di Bendahara	Rp.	00,0
2 Kas TUP di Bendahara	Rρ.	0,00
3 Kas Lainnya di Bendahara		0,00
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA		
(III.A.4-III.B.4)	₹p.	0,00
IV. Penjelasan atas selisih		
A. Selisih Kas (II.B)		
0,00-		
B. Selisih Pembukuan UP (III.C)		
0,00-		
C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)		
0,00-		
O. Sefisih Pembukuan Lalnnya (III.C)		

0,00-

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00
B. TUP		
1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00
C. Lainnya		
1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-

2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-

3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-

4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui

a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

NIP 197704302006041001

KOTA JAKARTA SELATAN, Desember 2024

Bendahara Pengeluaran

DHANU SUTOMO

NIP 199508152018011002

Dicetak pada tanggal,09 Januari 2025

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I Wilayah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Satuan Kerja : 26 /KU.02.02/2023 No. Dokumen 01 January 2023 Tanggal 2023 Tahun Anggaran Jurnal Balik Beban Langganan Air Bulan Desember TA 2022 dibayar TA 2023 Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Koreksi Antar Beban Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Transfer Masuk Penghapusan Piutang Transfer Keluar Penyusutan Aset Reklasifikasi Neraca Kas di Bendahara Penerimaan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Rupiah Debet Rupiah Kredit Kode Akun Uraian Nama Akun D/K No 137.975 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar D 1 137.975 522113 Beban Langganan Air K Direkam oleh : Silvia Maulida Dibuat oleh : Silvia Maulida Disetujui oleh : Iqbal Fanhaz Tanggal : 01 Januari 2023 : 01 Januari 2023 Tanggal : 01 Januari 2023 Tanggal

menteria	an Negara	/Lembaga	14	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negari	a dan Reformasi Birokrasi	
selon I		*				
ilayah				ran		
atuan Ker	ja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nej	gara (427950)	
o. Dokum	en			27 /KU.02.02/2023		
inggal			:	01 January 2023		
hun Angi	garan		:	2023		
eterangar				Jurnal Balik Beban Langganan Listrik Bulan De	esember TA 2022 dibayar	TA 2023
ategori Ju	ırnal Peny	resuaian				
	Pendap	atan Diterima D	i Mul	ca	Koreksi Antar B	eban
	Pendap	atan yang Masi	h Har	us Diterima	Pendapatan Se	lisih Kurs Belum Terealisas
	Belanja	Dibayar Dimuk	a		Beban Selisih K	urs Belum Terealisasi
ν	Belanja	yang Masih Ha	rus D	ibayar	Pembentukan F	Piutang Jangka Panjang
	Penyisi	han Piutang			Pembentukan F	Piutang Jangka Pendek
	Pengha	pusan Piutang			Transfer Masul	
		utan Aset			Transfer Keluar	
		Bendahara Pene	rima:		Reklasifikasi N	eraca
	100000000000000000000000000000000000000	Bendahara Peng			Koreksi	
	Persed	7	Ciun			
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Bela	nja Barang Yang Masih Harus Dibayar	247.951,317	
	К	522111		Beban Langganan Listrik		247.951.317
ibuat olel anggal		Maulida nuari 2023		Disetujui oleh : Iqbal Fanhaz Tanggal : 01 Januari 2023	Direkam oleh Tanggal	: Silvia Maulida : 01 Januari 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN ; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Satuan Kerja 28 /KU.02.02/2023 No. Dokumen : 01 January 2023 Tanggal : 2023 Tahun Anggaran : Jurnal Balik Beban Langganan Telepon Bulan Desember TA 2022 dibayar TA 2023 Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Koreksi Antar Beban Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Penghapusan Piutang Transfer Masuk Transfer Keluar Penyusutan Aset Reklasifikasi Neraca Kas di Bendahara Penerimaan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Rupiah Debet Rupiah Kredit D/K Kode Akun Uraian Nama Akun No 7.012.710 212112 Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar 1 D 7.012.710 522112 Beban Langganan Telepon K Direkam oleh : Silvia Maulida : Iqbal Fanhaz Dibuat oleh : Silvia Maulida Disetujui oleh : 01 Januari 2023 : 01 Januari 2023 Tanggal : 01 Januari 2023 Tanggal Tanggal

				FORMULIR MEMO PENYESUAL	AN		
ementeri	an Negara	/Lembaga	1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara da	n Reformasi Birokras		
selon I			7				
Vilayah			27	*			
atuan Kei	rja		1	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	(427950)		
lo. Dokun	nen			29 /KU.02,02/2023			
anggal			:	01 January 2023			
ahun Ang	garan		:	2023			
eteranga	n		10	Jurnal Balik Belanja Barang Dibayar Dimuka Lisen	si Firewall Sophos TA	2022 XG330 - Gd. Cyber	
ategori J	urnal Peny	esuaian		_	_		
	Pendap	atan Diterima D	i Mu	ka	Koreksi Antar B	eban	
	Pendap	atan yang Masil	h Har	us Diterima	Pendapatan Se	lisih Kurs Belum Terealisas	
v	Belanja	Dibayar Dimuk	a		Beban Selisih k	Curs Belum Terealisasi	
	Belanja	yang Masih Ha	rus D	ibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		
	Penvisi	nan Piutang			Pembentukan Plutang Jangka Pendek		
		pusan Piutang			Transfer Masu	k	
		utan Aset			Transfer Kelua	r	
		sendahara Pene	eless w		Reklasifikasi N		
					Koreksi	61060	
		sendahara Peng	eluar	an	Koreksi		
	Persed	aan					
No	D/K	Kode Akun	T	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Ruplah Kredit	
1	D	523121	Beb	an Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.917.808		
	К	114112		Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka (Prepaid)		53.917.808	
Dibuat ole Tanggal		Maulida nuari 2023	•	Disetujui oleh : Iqbal Fanhaz Tanggal : 01 Januari 2023	Direkam oleh Tanggal	: Silvia Maulida : 01 Januari 2023	

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Satuan Kerja : 30 /KU.02.02/2023 No. Dokumen : 01 January 2023 Tanggal : 2023 Tahun Anggaran : Jurnal Balik Belanja Barang Dibayar Dimuka Lisensi Firewall Sophos TA 2022 XG330- Senopati Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Koreksi Antar Beban Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Pembentukan Piutang Jangka Panjang Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Transfer Masuk Penghapusan Piutang Transfer Keluar Penyusutan Aset Reklasifikasi Neraca Kas di Bendahara Penerimaan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Rupiah Debet Rupiah Kredit Kode Akun Uraian Nama Akun D/K No 56.547.945 D 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 114112 Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka (Prepaid) 56.547.945 K Disetujui oleh : Iqbal Fanhaz Direkam oleh : Silvia Maulida Dibuat oleh : Silvia Maulida Tanggal : 01 Januari 2023 : 01 Januari 2023 : 01 Januari 2023 Tanggal Tanggal

ementer	an Negara	/Lembaga	: Kementerian Pendayagunaa	n Aparatur Negara	dan Reformasi Birokrasi			
selon I			1 *					
/ilayah			4 *					
atuan Ke	rja		: Menteri Negara Pendayagu	naan Aparatur Neg	ara (427950)			
o. Dokun	nen		31 /KU.02.02/2023					
anggal			: 01 January 2023					
ahun Ang	ggaran		: 2023					
eteranga			; Jurnal Balik Beban Uang Ma	ikan PNS Bulan De	sember 2022			
ategori J	urnal Peny							
	Pendap	atan Diterima D) Muka		Koreksi Antar B			
	Pendap	atan yang Masi	h Harus Diterima			lisih Kurs Belum Terealisas		
Belanja Dibayar Dimuka			a		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
v Belanja yang Masih Harus Dibayar					Pembentukan F	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		
Penyisihan Piutang					Pembentukan F	Piutang Jangka Pendek		
	Pengha	pusan Piutang			Transfer Masul	4		
	Penyus	utan Aset			Transfer Keluar			
		Bendahara Pene	rimaan		Reklasifikasi N	eraca		
	100000000000000000000000000000000000000	Bendahara Peng			Koreksi			
			Eidh an					
	Persed	aan						
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama	Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Hari	us Dibayar	116.292.000			
	к	511129	Beban Uang Mal	an PNS		116.292.000		
					6. 1. 1.1	: Silvia Maulida		
ibuat ole		Maulida nuari 2023	Disetujui oleh : Iqbal Far Tanggal : 01 Janua		Direkam oleh Tanggal	: 01 Januari 2023		
anggal	:011a	Muan 2023	tanggar . Or Janua	11 2023	664			
	4	1.	11			1		
	1Km	1	California		1Rr	18/		

ementerian N	egara/Lembaga	-	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi				
elon I			*				
'ilayah		3					
ituan Kerja			Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega	ira (427950)			
o. Dokumen			32 /KU.02.02/2023				
anggal			O1 January 2023				
hun Anggara	n	1	2023				
eterangan			Jurnal Balik Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Tahun 2021 Yang Belum	Dibayarkan (Delayering)		
ategori Jurnal	Penyesuaian		1				
Pe	endapatan Diterima D	i Mul	ka	Koreksi Antar B			
Pe	endapatan yang Masi	h Har	us Diterima	Pendapatan Sel	isih Kurs Belum Terealisas		
Ве	elanja Dibayar Dimuk	а		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
v Be	elanja yang Masih Ha	rus D	ibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
Pe	enyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek				
Pe	enghapusan Piutang			Transfer Masul			
	enyusutan Aset			Transfer Keluar			
	is di Bendahara Pene	rima.	an .	Reklasifikasi Ne	eraca		
	is di Bendahara Peng			Koreksi			
	ersediaan	,21001					
No D	/K Kode Akun	Ι	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D 212111	Bela	nnja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	37.710.000			
	к 511124		Beban Tunjangan Fungsional PNS		37.710.000		
	Silvia Maulida 01 Januari 2023		Disetujui oleh : Iqbal Fanhaz Tanggal : 01 Januari 2023	Direkam aleh Tanggal	: Silvia Maulida : 01 Januari 2023		

	no Nognes	/Lembaga	7/4	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	dan Reformasi Birokrasi				
selon I	ian ivegara	/Lembaga	- 12	Vetteriterian ventralaginaan Abarata vettaria aan verania aa aa					
Vilayah			11						
atuan Ke	ei a		7.5	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neg.	ara (427950)				
lo. Dokun				53 /KU.02.02/2023					
anggal	ilen			01 January 2023					
ahun Ang	agaran		3	2023					
eteranga				Jurnal Balik Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Tahun 2022 Yang Belun	Dibayarkan (Delayering)			
	urnal Peny	resuaian	-	1 - The state of the control of the state of					
		atan Diterima C	i Muk	a	Koreksi Antar B	eban			
	Pendap	atan yang Masi	h Hari	us Diterima	Pendapatan Sel	lisih Kurs Belum Terealisas			
	Belania	Dibayar Dimuk	a		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
v Belanja yang Masih Harus Dibayar			rus Di	bayar	Pembentukan F	Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
Penyisihan Piutang					Pembentukan F	Pembentukan Piutang Jangka Pendek			
Penghapusan Piutang					Transfer Masuk				
		utan Aset			Transfer Keluar				
		Bendahara Pene	rimas	n	Reklasifikasi N	eraca			
					Koreksi				
		Bendahara Peng	eluar		1000000				
	Persed	aan							
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	212111	Bela	nja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	13.230.000				
	К	511124		Beban Tunjangan Fungsional PNS		13.230.000			

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Satuan Kerja : 34 /KU.02.02/2023 No. Dokumen : 01 January 2023 Tanggal Tahun Anggaran : Jurnal Balik Beban Uang Makan PPPK Bulan Desember 2022 Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Pembentukan Piutang Jangka Panjang Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Transfer Masuk Penghapusan Piutang Transfer Keluar Penyusutan Aset Reklasifikasi Neraca Kas di Bendahara Penerimaan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet Rupiah Kredit D/K No D 212111 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar 4.119.000 1 511628 Beban Uang Makan PPPK 4.119.000 K : Igbal Fanhaz Direkam oleh : Silvia Maulida Dibuat oleh : Silvia Maulida Disetujui oleh Tanggal : 01 Januari 2023 Tanggal : 01 Januari 2023 Tanggal : 01 Januari 2023

Eselon I Wileyah Satuan Ker No. Dokun		era/Lembaga	:	Kementerian	. Coadous					
Satuan Ke No. Dokun	rja			•	і менануввилави я	p aratur Negara	dan Reformasi Biri	okrasi		
		·								
Tananal										
ı ausBat	Tanggal : 08 April 2023									
Tahun Ang	garan		:	2022						
Keteranger			:	Belanja Tunja	ngan Fungsional P	NS Tahun 2022	Yang Belum Dibaya	erkan (Delavering)	,	
Kategori Ju		•						1		
<u></u>	Penda	patan Diterima	DI M	ıkə			Koreksi Antai	r Beban		
	Penda	patan yang Ma	islh Ha	rus Diterima			Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belanj	a Dibayar Dimu	ıka				Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
v Belanja yang Masih Harus Dibayar						Pembentukan Piutang Jangka Panjang				
	Penyisi	han Plutang					Pembentukan Plutang Jangka Pendek			
	Pengha	pusan Plutang	1				Transfer Masuk			
	Penyus	aten Aset					Transfer Kelui	a <i>t</i>		
	Kas di 1	Bendahara Pen	erlma	en .			Reklasifikasi Neraca			
	Kas di I	Bendahara Pen	geluar	an na			Koreksi			
	Persed		-			<u> </u>				
No	D/K	Kode Akun		Ur	elan Nama Akun		Ruplah Debat	Rupiah Kredit]	
	D	511124	Beba	1 Tunjangan Fu	ngsional PNS	· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13,230,000			
	ĸ	212111		Belanja Pegaw	al Yang Masih Har	us Dibayar		13.230.00D		
ibuat oleh anggal		Maulida ril 2023		Disatujul oleh Tanggal	: Iqbal Fanhaz : 08 April 2023		Direkam oleh Tanggal	: Slivia Maulida : 08 April 2023		

Bongst

Sh

Ames

		- -	FORMU	UR MEMO P	ENYESUAL	AN		
Kemente	erian Negar	ra/Lembaga	: Kementerian i	Pendayagunaan Aj	paratur Negara d	an Reformas) Birol	krasi	
Eselon I	_	-	: •					
Wilayah		: •						
Satuan K	an Kerja : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)							
No. Ock	rwen		: 24 /KU.02.0	2/2023				
Tanggal			: 08 April 2023					
Tahun Ai	nggeren		: 2022					
Keterang	zan		: Belanja Tunja:	ngan Fungsional Pi	NS Tahun 2021 Y	ang Belum Dibaya:	rkan (Delayering)	
Kategori	Jumai Per	yesusian				_		
	Pendar	oatan Olterima	Di Muka			Koreksi Antar	Beban	
-	Pender	estan yang Ma	sih Harus Diterima			Pendapatan S	elisih Kurs Belum 1	rerealisas
] Belanja	Dibayar Dimu	ka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
٧	Belanja	yang Masih H	arus Dibayar			Pembentukan Plutang Jangka Panjang		
	Penyist	han Plutang] Pembentukan	Plutang Jangka Pe	endek
Penghapusan Plutang						Transfer Masuk		
		iutan Aset	,	Transfer Keluar				
	·	Bendahara Pen						
					<u> </u>		eraca	
	r Kas di i	Bendahara Pen	Seinstau		<u> </u>	Koreksi		
	Persedi	iaan						
No	D/K	Kode Akun	Ua	ralan Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	391119	Koreksi Lainnya			37.710.000		
	К	212111	Beianja Pegaw	rai Yang Masih Ha	rus Dibayar		37.710.000	
Dibuat ol Tanggai	leh : Silvia : 08 Ap	Maulida orii 2023	Disetujui oleh Tanggal	: Iqbal Fanhaz : 08 April 2023		Direkam oleh Tanggal	: Silvia Maulida : 08 April 2023	
i			4	The T		Kingk		

	_		FORMUL	IR MEMO P	ENYESUAIA	.N		,	
	rian Negan	o/Lembaga	: Kementerlan P	endayagunaan Ap	aratur Negara da	n Reformasi Birok	rasi		
Eselon I			: -						
Wilayah			: -						
Satuan Ke	erja			a Pendayagunaan	Aparatur Negara	(427 95 0)			
No. Doku	men		: 25 /KU.02.02/2	2023					
Tanggal			: 08 April 2023						
Tahun An	egeran		: 2022						
Keterang			: Belanja Honor	arlum SE KPRBN Ta	shun 2021 Yang (Dibayar di Tahun 2	022		
Kategori.	Jurnal Pen	_							
	Pendap	atan Diterima	Di Muka			Koreksi Antar I	Beban		
	Pendap	atan yang Mas	ih Herus Diterima			Pendapatan Si	alisih Kurs Belum 1	[erealisas	
	Belanja Dibayar Dimuka					Beben Sellsih Kurs Belum Terealisasi			
	v Belanja yang Masih Harus Dibayar					Pembentukan Plutang Jangka Panjang			
Penyisihan Plutang						Pembentukan Plutang Jangka Pendek			
	Penghapusan Plutang					Transfer Masuk			
	Penyus	utan Aset				Transfer Keluar			
	Kas di E	Sendahara Pend	erlmaan			Reidasifikasi Neraca			
	Kas di E	endahara Penj	geluaran			Koreksi			
	Persedi	aan							
No	D/K	Keda Akun	Ur	alan Nama Akun		Ruplah Debet	Rupiah Kredit		
1	٥	391119	Koreksi Lalınıya	· <u></u> -		142.442.074			
	K	512111	Beban Vang	Honor Tetap			142.442.074		
Dibuat of Tanggal	eh : Silvia : 08 Ap	Maulida arti 2023	Disetujul oleh Tanggal	: Iqbal Fanhaz : 08 April 2023		Direkam oleh Tenggal	: Silvia Maulida : 08 April 2023		

		F	ORMULIR MEMO PEN	YESUAIAI	V			
Kementerian Ne	egara/Lembaga	1	Kementerian Pendayagunaan A	paratur Negara	ı dan Reformasi Birokras	ii (048)		
Eselon I		1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048.01)					
Wilayah			Instansi Pusat (0199)					
Satuan Kerja		*	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)					
No. Dokumen			35/KU.02.02/2023					
Tanggal			30 Juni 2023					
Tahun Anggarar	1		2023					
Keterangan		:	Eliminasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi atas Pengembalian Belanja TAYL yang menghasilkan aset tetap melalui setoran SSBP dari Penggantian Gorden Rumah Dinas Menteri					
Kategori Jurnal I	Penyesuaian	:						
Per	Pendapatan Diterima D		uka		Kas di Bendahara Pene	rimaan		
Per	ndapatan yang Masi	ih Ha	rus Diterima	Kas Lainnya di Bendaha	ira Pengeluaran			
Bel	anja Dibayar Dimuk	a		Kas Lainnya di Bendaha	ra Penerimaan			
Bel	anja yang Masih Ha	arus Dibayar			Persekot Gaji			
Per	nyisihan Piutang Tid	lak Te	ertagih		Selisih Kurs			
Per	nyusutan dan Amor	tisasi	i		Transfer			
Per	sediaan				Reklasifikasi			
Uai	ng Muka Belanja				Koreksi antar Beban			
Uta	ang Kelebihan Pemb	oayar	an Pendapatan	v	Koreksi Lainnya			
Per	Pembentukan/Koreksi/		lasifikasi Piutang		dst.			
No	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debit	Rupiah Kredit		
1	425913	Sept.	erimaan Kembali Belanja Modal T	Tahun	7.622.087			

No	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debit	Rupiah Kredit
1	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	7.622.087	
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		7.622.087

Direkam Tanggal: 30 Juni 2023

Muhammad Ilham Safaat

Disetujui Pejabat yang Berwenang,

		F	ORMULIR MEMO PI	ENYESUAIA	N		
Kementeria	an Negara/Lembaga		Kementerian Pendayagunaa	n Aparatur Negar	a dan Reformasi Birokras	i (048)	
Eselon I			Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048.01)				
Wilayah			Instansi Pusat (0199)				
Satuan Ker	ja	8	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)				
No. Dokum	en	1	36/KU.02.02/2023				
Tanggal		3	30 Juni 2023				
Tahun Ang	garan	4	2023				
Keterangar	1	:	Koreksi Beban Persediaan ka dimana pencatatan Persedia Obat-obatan (Barang Konsur	an Obat-obatan y	yang seharusnya menggu	nakan kodefikasi	
Kategori Ju	rnal Penyesuaian	1					
	Pendapatan Diterim	a Di Mu	ıka		Kas di Bendahara Pene	rimaan	
	Pendapatan yang M	asih Ha	rus Diterima		Kas Lainnya di Bendahara Penge		
	Belanja Dibayar Dim	uka			Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		
	Belanja yang Masih	Harus D	ibayar		Persekot Gaji		
	Penyisihan Piutang	ridak Te	ertagih	Selisih Kurs			
	Penyusutan dan Am	ortisasi			Transfer		
	Persediaan				Reklasifikasi		
	Uang Muka Belanja			v			
	Utang Kelebihan Pe	nbayar	an Pendapatan		Koreksi Lainnya		
	Pembentukan/Kore	ksi/Rekl	asifikasi Piutang		dst.		
No	Kode Akun		Uraian Nama Aku	in	Rupiah Debit	Rupiah Kredit	
1	593111	Beba	ın Persediaan Konsumsi		119.423.106		
	593149	Beba	ın Persediaan Lainnya			119.423.106	
Operators						setujui ng Berwenang,	
#	ad Ilham Safaat				Pejabat yan	agnungkas	

		FORMULIR N	NEMO PENYESU	AIAN				
Kementeri	an Negara/Lembaga	Kementerian Pendayagunaa	n Aparatur Negara dan	Reformasi Birokrasi				
selan I								
Nilayah		8 8						
iatuan Ker	rja	: Menteri Negara Pendayagur	naan Aparatur Negara (4	127950)				
No. Dokum	nen	42 /KU 02.02/2023						
Tanggal		14 November 2023						
Tahun Ang	garan	2023						
Keteranga	n				aan, dimana pencatatan Pers an namun dicatat sebagai Bai			
(ategori Ju	urnal Penyesuaian							
	Pendapatan Diterima	Di Muka		Kas di Bendahara Penerim	aan			
	Pendapatan yang Ma	sih Harus Diterima		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran				
	Belanja Dibayar Dimu	ka		Kas Lainnya di Bendahara	Penerimaan			
	Belanja yang Masih H	arus Dibayar		Persekot Gaji				
	Penyisihan Piutang Ti	dak Tertagih		Selisih Kurs				
	Penyusutan dan Amo	rtisasi		Transfer				
v	Persediaan			Reklasifikasi				
	Uang Muka Belanja			Koreksi Antar Beban				
	Utang Kelebihan Pem	bayaran Pendapatan		Koreksi Lainnya				
	Pembentukan/Koreks	si/Reklasifikasi Piutang		dst				
No	Kode Akun	Uraian Aku	n	Rupiah Debit	Rupiah Kredit			
	593113	Beban Persediaan Bahan un	tuk Pemeliharaan	4.200.000				
1			Consumsi		4.200.000			

		FORMULIR MEMO	O PENYESUA	AIMIN			
ementerian Negara/L	.embaga :	Kementerian Pendayagunaan Apar	atur Negara dan R	eforması Birokrası			
elon I		36					
ilayah							
ituan Kerja		Menteri Negara Pendayagunaan Ap	paratur Negara (4)	27950)			
o. Dokumen		/ KU,02.02/2023					
nggal		14 November 2023					
ihun Anggaran		2023					
eterangan	18	Koreksi Beban Persediaan karena p persediaan Barang Konsumsi oleh o dimutasi keluar sebagai barang hab	perator Modul Ko	omitmen namun sudah dilal	e GUP yang menghasilkan kukan pendetilan barang d		
ntegori Jurnal Penye	suaian :						
Pendapa	tan Diterima Di Mi	ka		Kas di Bendahara Penerim	aan		
Pendapa	tan yang Masih Ha	rus Diterima		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			
Belanja D	Dibayar Dimuka			Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan			
Belanja y	ang Masih Harus I	libayar		Persekot Gaji			
Penyisiha	n Piutang Tidak Te	ertagih		Selisih Kurs			
Penyusu	tan dan Amortisasi			Transfer			
v Persedia	an			Reklasifikasi			
Uang Mu	rka Belanja			Koreksi Antar Beban			
	lebihan Pembayar	an Pendapatan		Koreksi Lainnya			
	tukan/Kureksi/Rek			dst			
No Koo	le Akun	Uraian Akun		Rupiah Debit	Rupiah Kredit		
1 2	18111	Utang Yang Belum Diterima Tag	ihannya	6.000.000			
	93111	Beban Persediaan Konsun	nsi		6.000.000		

					N. 1	
				FORMULIR MEMO PENYESUAIA	M	
Kementeri	an Negar	a/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara da	in Reformasi Biroki	rasi
Eselon I			:			
Wilayah			*			
Satuan Ke	rja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	(427950)	
No. Dokur	nen			/KU.02.02/2023		
Tanggal			:	31 December 2023		
Tahun Ang	garan			2023		
Keteranga	n			Jurnal Penyesuaian Beban Langganan Telepon Bu	lan Desember TA 2	2023 dibayar TA 2024
Kategori J	urnal Per	iyesualan				
	Pendar	atan Diterima	Di M	uka	Koreksi Antar i	Beban
	Pendap	atan yang Mas	ih H	arus Diterima	Pendapatan Se	elisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja	Dibayar Dimul	ca		Beban Selisih K	Kurs Belum Terealisasi
v	Belanja	yang Masih Ha	arus	Dibayar	Pembentukan	Piutang Jangka Panjang
	Penyisi	han Piutang			Pembentukan	Piutang Jangka Pendek
	Pengha	apusan Piutang			Transfer Masu	k
	Penyus	sutan Aset			Transfer Kelua	r
	Kas di l	Bendahara Pen	erim	aan	Reklasifikasi N	eraca
	Kas di l	Bendahara Pen	gelua	iran	Kareksi	
	Persed		U amounted	Cones to the control of the control		
	reised	THE STATE OF THE S				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beb	an Langganan Telepon	6.645.498	
	K	212112		Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		6.645.498
Dibuat ole Tanggal		Maulida esember 2023		Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Tanggal : 31 Desember 2023	Direkam oleh Tanggal	: Silvia Maulida : 31 Desember 2023

			FC	RMULIR MEMO PENYEA1:M45	SHAIAN				
			FC	RIVIOLIK IVIEIVIO PENTEAT.IVI43	JUAIAIV				
Kementer	ian Negar	a/Lembaga	1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					
Eselon I			t						
Wilayah			:	8					
Satuan Ke	erja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Neg	gara (427950)				
No. Doku	men		1	/KU.02.02/2023					
Tanggal			1	31 December 2023					
Tahun An	ggaran		1	2023					
Keteranga	an		:	Jurnal Penyesuaian Beban Langganan Listrik B	ulan Desember TA 20.	23 dibayar TA 2024			
Kategori .	Jurnal Per	nyesuaian							
	Pendapatan Diterima			uka	Koreksi Antar	Beban			
	Pendapatan yang Mas			nrus Diterima	Pendapatan Selisih Kurs Belum Tereali				
	Belanja Dibayar Dimul				Beban Selisih I	Kurs Belum Terealisasi			
v	v Belanja yang Masih H			Dibayar	Pembentukan	Piutang Jangka Panjang			
	Penyisihan Piutang				Pembentukan	Piutang Jangka Pendek			
	Pengh	apusan Piutang			Transfer Masu	k			
	Penyu	sutan Aset			Transfer Kelua	r			
	Kas di	Bendahara Pen	erim	aan	Reklasifikasi Neraca				
	Kas di	Bendahara Pen	gelua	nran	Koreksi				
	Persec	liaan		5500					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	522111	Beb	an Langganan Listrik	233.903.615				
	К	212112		Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		233.903.615			
Dibuat of Tanggal	eh : Silvia : 31 D	n Maulida esember 2023		Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Tanggal : 31 Desember 2023	Direkam oleh Tanggal	: Silvia Maulida : 31 Desember 2023			

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Satuan Kerja /KU.02.02/2023 No. Dokumen 31 December 2023 Tanggal 2023 Tahun Anggaran Jurnal Penyesuaian Beban Uang Makan PNS Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Koreksi Antar Beban Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Transfer Masuk Penghapusan Piutang Transfer Keluar Penyusutan Aset Reklasifikasi Neraca Kas di Bendahara Penerimaan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Rupiah Debet Uraian Nama Akun Rupiah Kredit No D/K Kode Akun 24.195.000 Beban Uang Makan PNS D 511129 1 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar 24.195.000 212111 Direkam oleh : Silvia Maulida Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Dibuat oleh : Silvia Maulida : 31 Desember 2023 Tanggal : 31 Desember 2023 Tanggal : 31 Desember 2023 Tanggal

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Satuan Kerja : /KU.02.02/2023 No. Dokumen 31 December 2023 Tanggal 2023 Tahun Anggaran Jurnal Penyesuaian Beban Uang Makan PPPK Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Koreksi Antar Beban Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Pembentukan Piutang Jangka Panjang Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Plutang Transfer Masuk Penghapusan Piutang Transfer Keluar Penyusutan Aset Reklasifikasi Neraca Kas di Bendahara Penerimaan Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Persediaan Rupiah Debet Rupiah Kredit No D/K Kode Akun Uraian Nama Akun 3.230.000 Beban Uang Makan PPPK 1 511628 Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar 3.230.000 212111 Direkam oleh : Silvia Maulida Dibuat oleh : Silvia Maulida Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Tanggal : 31 Desember 2023 Tanggal : 31 Desember 2023 Tanggal : 31 Desember 2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Satuan Kerja : 0 / /KU.02.02/2023 No. Dokumen 31 December 2023 Tanggal Tahun Anggaran Jurnal Penyesuaian Kontrak BAST Nomor: 262/BAST/PPK.D.II.PANRB/2023 tentang Pekerjaan Keterangan Penyusunan Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik Perizinan dan Akreditas. Kategori Jurnal Penyesuaian Koreksi Antar Beban Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Pembentukan Piutang Jangka Panjang Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Transfer Masuk Penghapusan Piutang Transfer Keluar Penyusutan Aset Kas di Bendahara Penerimaan Reklasifikasi Neraca Kas di Bendahara Pengeluaran Koreksi Persediaan Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet Rupiah Kredit No D 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 58.800.000 1 58.800.000 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya : Silvia Maulida Dibuat oleh : Silvia Maulida Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Direkam oleh

: 31 Desember 2023

Tanggal

: 31 Desember 2023

Tanggal

Tanggal

: 31 Desember 2023

11(2)				FORMULIR MEMO PENYE	SUAIAN				
Kementer	rian Negar	ra/Lembaga		Kementerian Pendayagunaan Aparatur N	egara dan Reformasi	Birokrasi			
selon I			:						
Nilayah			:	*					
Satuan Ke	erja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatu	r Negara (427950)				
Vo. Doku	men		;	/\(\text{KU.02.02/2023}\)					
anggal			1	31 December 2023					
ahun An	iggaran		:	2023					
(eteranga	an		1	Jurnal Penyesuaian Kontrak BAST Nomor Penyusunan Rekomendasi Pemetaan Pro					
Categori .	Jurnal Per	nyesualan							
Pendapatan Diterim		Di M	uka	Koreksi Antar B	eban				
Pendapatan yang M			sih Ha	irus Diterima	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi				
Belanja Dibayar Dim			ka		Beban Selisih K	urs Belum Terealisasi			
	Belanja	a yang Masih H	arus	Dibayar	Pembentukan I	Piutang Jangka Panjang			
	Penyis	ihan Piutang			Pembentukan F	Piutang Jangka Pendek			
	Pengh	apusan Piutang			Transfer Masuk				
	Penyu	sutan Aset			Transfer Keluar				
	Kas di	Bendahara Pen	erim	v	v Reklasifikasi Neraca				
	Kas di	Bendahara Pen	gelua	ran	Koreksi				
	Persed				_				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	218111	Utai	ng Yang Belum Diterima Tagihannya	58.800.000				
	К	212191		Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		58.800.000			
Dibuat ol Tanggal	leh : Silvia	n Maulida esember 2023		Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Tanggal : 31 Desember 2023		: Silvia Maulida : 31 Desember 2023			

				FORMULIR MEMO PENYE	SUAIAN					
Kementer	rian Negar	a/Lembaga		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Ne	gara dan Reformasi	Birokrasi				
Eselon I				ten						
Nilayah			:							
iatuan Ke	erja			Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur	Negara (427950)					
No. Doku	men		:	() /KU.02.02/2023						
anggal				31 December 2023						
ahun An	ggaran		:	2023						
(eteranga	an		:	Jurnal Penyesuaian Kontrak Nomor BAST: Penyusunan Rekomendasi Pemetaan Pros	es Bisnis Tematik Bi	dang Kesehatan Digitalisasi Reka				
				Medis, Penyelenggaraan Sistem Rujukan (Online, dan Rekam N	Aedis Online.				
(ategori .		ıyesualan	D: 11		Koreksi Antar I	Rahan				
Pendapatan Diterima Di					_					
Pendapatan yang Masih				arus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
Belanja Dibayar Dimuk					Beban Selisih H	Curs Belum Terealisasi				
Belanja yang Masih Har				Dibayar	Pembentukan	Piutang Jangka Panjang				
	Penyis	ihan Piutang			Pembentukan	Piutang Jangka Pendek				
	Pengha	apusan Piutanį	3		Transfer Masu	k				
	Penyus	sutan Aset			Transfer Kelua	r				
	Kas di	Bendahara Per	nerim	ean v	Reklasifikasi N	eraca				
	Kas di	Bendahara Per	ngelua	nran	Koreksi					
	Persed	iaan								
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit				
1	D	218111	Uta	ng Yang Belum Diterima Tagihannya	59.100.000					
	К	212191		Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		59.100.000				
Dibuat ol Tanggal	eh : Silvia : 31 D	Maulida esember 2023	8	Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Tanggal : 31 Desember 2023	Direkam oleh Tanggal	: Silvia Maulida : 31 Desember 2023				
Ŷ	Am 23	2		trings.	An	ed				

			FORMULIR ME	MO PENYESU	JAIAN				
Kementer	ian Negai	ra/Lembaga	: Kementerian Pendayagur	naan Aparatur Nega	ra dan Reformasi Bi	irokrasi			
Eselon I									
Wilayah									
Satuan Ke	rja		: Menteri Negara Pendaya	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)					
No. Dokur	men		: ry / KU.02.02/2023						
Tanggal			: 31 December 2023						
Tahun An	ggaran		: 2023						
Keteranga	an		Jurnal Penyesuaian Kontr Pengadaan Barang Portal		O/BAST/PPK.D.II.PA	NRB/2023 tentang Pengerja			
Kategori J	lurnal Per	nyesuaian							
	Penda	patan Diterima	Di Muka		Koreksi Antar Be	ban			
	Penda	patan yang Ma	sih Harus Diterima		Pendapatan Selis	sih Kurs Belum Terealisasi			
	Belanja	a Dibayar Dimu	ka		Beban Selisih Kui	rs Belum Terealisasi			
	Belanja	a yang Masih H	arus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang				
	Penyis	ihan Piutang			Pembentukan Pi	utang Jangka Pendek			
	Pengh	apusan Piutang			Transfer Masuk				
	Penyu	sutan Aset			Transfer Keluar				
	Kas di	Bendahara Pen	erimaan	v	Reklasifikasi Ner	aca			
	Kas di	Bendahara Pen	geluaran		Koreksi				
	Persed	liaan							
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Al	kun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Ta	gihannya	10.911.296.000				
	К	212191	Utang Kepada Pihak Ket	tiga Lainnya		10.911.296.000			

haned

whent

gned

FORMULIR MEI The second of th	naan Aparatur Ne gunaan Aparatur ak BAST Nomor:	egara dan Reformasi Negara (427950) 1848/BAST-SDMA/PA Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ki	AN-RB/12/2023 tentang Pe eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
: - : Menteri Negara Pendayag : ' /KU.02.02/2023 : 31 December 2023 : 2023 : Jurnal Penyesuaian Kontra : Pengadaan Layanan Chati rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar	gunaan Aparatur ak BAST Nomor:	Negara (427950) 1848/BAST-SDMA/PA Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	AN-RB/12/2023 tentang Pe eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
: - : Menteri Negara Pendayag : ' /KU.02.02/2023 : 31 December 2023 : 2023 : Jurnal Penyesuaian Kontra : Pengadaan Layanan Chati rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar	ak BAST Nomor:	1848/BAST-SDMA/PA Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
: / /KU.02.02/2023 : 31 December 2023 : 2023 : Jurnal Penyesuaian Kontra : Pengadaan Layanan Chati rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar	ak BAST Nomor:	1848/BAST-SDMA/PA Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
: / /KU.02.02/2023 : 31 December 2023 : 2023 : Jurnal Penyesuaian Kontra : Pengadaan Layanan Chati rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar	ak BAST Nomor:	1848/BAST-SDMA/PA Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
: 31 December 2023 : 2023 Jurnal Penyesuaian Kontri Pengadaan Layanan Chati rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar		Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
: 2023 Jurnal Penyesuaian Kontri Pengadaan Layanan Chatl rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar		Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
Jurnal Penyesuaian Kontra Pengadaan Layanan Chati rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar		Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
Pengadaan Layanan Chati rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar		Koreksi Antar B Pendapatan Sel Beban Selisih Ko	eban lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
rima Di Muka g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar ng		Pendapatan Sel Beban Selisih Ki Pembentukan F	lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
g Masih Harus Diterima Dimuka sih Harus Dibayar ng		Pendapatan Sel Beban Selisih Ki Pembentukan F	lisih Kurs Belum Terealisasi urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
Dimuka sih Harus Dibayar ng		Beban Selisih Ko	urs Belum Terealisasi Piutang Jangka Panjang		
sih Harus Dibayar ng		Pembentukan F	Piutang Jangka Panjang		
ng		_			
		Pembentukan F			
itang	-	Pembentukan Piutang Jangka Pendek			
B	Transfer Masuk				
		Transfer Keluar			
Penerimaan	v	Reklasifikasi Ne	raca		
Pengeluaran		Koreksi			
kun Uraian Nama Ak	kun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
11 Utang Yang Belum Diterima Tag	gihannya	87.143.500			
91 Utang Kepada Pihak Keti	iga Lainnya		87.143.500		
	kun Uraian Nama Al Utang Yang Belum Diterima Tai Utang Kepada Pihak Ket	kun Uralan Nama Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Disetujui oleh : Rogo Pamungkas	A Penerimaan A Pengeluaran Koreksi Kun Uralan Nama Akun Rupiah Debet Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Disetujui oleh : Rogo Pamungkas Direkam oleh		

				FORMULIR MEMO PENY	ESUAIAN		
Kementer	ian Negai	ra/Lembaga		Kementerian Pendayagunaan Aparatur I	Negara dan Reformasi	Birokrasi	
selon I	nose des a re		1	2.5			
Vilayah				•			
Satuan Ke	rja		¥	Menteri Negara Pendayagunaan Aparati	ur Negara (427950)		
lo. Dokui	men		*	/KU.02.02/2023			
anggal			:	31 December 2023			
ahun An	ggaran		1	2023			
Keteranga	in		ė	Jurnal Penyesuaian Kontrak BAST Nomo Langganan Jaringan Internet.	r: 1925/PPK-BUK.I/PA	NRB/12/2023 tentang Pengadaa	
(ategori J	urnal Per	nyesuaian					
Pendapatan Diterima			Di M	uka	Koreksi Antar I	Beban	
	Penda	patan yang Ma	isih H	arus Diterima	Pendapatan Se	elisih Kurs Belum Terealisasi	
	Belanja	a Dibayar Dimo	uka		Beban Selisih I	Kurs Belum Terealisasi	
	Belanj	a yang Masih H	larus	Dibayar	Pembentukan	Piutang Jangka Panjang	
	Penyis	ihan Piutang			Pembentukan	Piutang Jangka Pendek	
	Pengh	apusan Piutang	g		Transfer Masuk		
	Penyu:	sutan Aset			Transfer Kelua	r	
	Kas di	Bendahara Per	nerim	aan v	Reklasifikasi N	eraca	
	Kas di	Bendahara Per	ngelus	aran	Koreksi		
	Persed		.65.00				
No	D/K	Kode Akun	T	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Uta	ng Yang Belum Diterima Tagihannya	210.983.000		
*			1	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		210.983.000	

			FORMULIR MEM	O PENYESUA	JAN					
Kementeri	an Negar	a/Lembaga	: Kementerian Pendayaguna	an Aparatur Negara	a dan Reformasi Birok	rasi				
Eselon 1			: *							
Wilayah			1 %							
Satuan Ker	ja		: Menteri Negara Pendayagu	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)						
No. Dokum	nen		: S /KU.02.02/2023	S /KU.02.02/2023						
anggal			: 31 December 2023	31 December 2023						
ahun Ang	garan		: 2023							
Keteranga	n		Jurnal Koreksi Saldo Akun U 00445/UP_TUP/427950/20		Oiterima Tagihannya (218111) Nomor Dokumen				
Kategori Ju	urnal Pen	iyesualan								
Pendapatan Diterim		atan Diterima	Di Muka		Koreksi Antar	Beban				
Pendapatan yang Ma			ih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terea					
	Belanja	Dibayar Dimu	ka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi					
	Belanja	yang Masih H	arus Dibayar		Pembentukan	Piutang Jangka Panjang				
	Penyisi	han Piutang			Pembentukan	Piutang Jangka Pendek				
	Pengha	pusan Piutang			Transfer Masu	k				
	Penyus	utan Aset			Transfer Keluar					
	Kas di I	Bendahara Pen	erimaan	maan Reklasifikasi Neraca						
	Kas di i	Bendahara Pen	geluaran	v	Koreksi					
	Persed	iaan	***************************************							
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama	Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit				
1	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagi	hannya	3.000.000					
	К	593111	Beban Persediaan I	Konsumsi		3.000.000				
	u nestru			10010041002	Disabass alab	: Silvia Maulida				
						: 31 Desember 2023				
Dibuat ole Tanggal		Maulida esember 2023	Disetujui oleh : Rogo Par Tanggal : 31 Desen		Direkam o Tanggal	An				

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIA	IN			
Kementer	ian Negar	a/Lembaga	. 1	Kementerian Pendayagunaan	Aparatur Negara da	n Reformasi Birokra	35i		
Eselon I									
Wilayah									
Satuan Ke	rja		;	Menteri Negara Pendayaguna	aan Aparatur Negara	(427950)			
No. Doku	men		: 1	F /KU.02.02/2023					
Tanggal			1 5	31 December 2023					
Tahun An	ggaran		E 8	2023					
Keterangan Jurnal Penyesuaian Belanja lisensi dengan umur 1 tahun yang manfaatnya mela sehingga pada tahun 2024 masih terdapat manfaat yang akan diterima									
Kategori I	lurnal Per	yesualan							
Pendapatan Diterima			i Muk	a		Koreksi Antar	Beban		
	Pendapatan yang Mas			us Diterima		Pendapatan Se	elisih Kurs Belum Tereali		
v	Belanja	Dibayar Dimuka	a			Beban Selisih I	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	Belanja	yang Masih Har	rus Di	bayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang				
	Penyisi	han Piutang Tida	ak Ter	c Tertagih Pembentukan Piutang Jangka					
	Penyus	utan dan Amorti	isasi	sasi Transfer Masuk			k		
	Persed	iaan		8		Transfer Keluar			
	Uang N	1uka Belanja				Reklasifikasi Neraca			
	Utang	Kelebihan Pemba	ayara	n Pendapatan		Koreksi			
	Pembe	ntukan/Koreksi/	rekla:	sifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Al	cun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	114112	В	elanja Barang Yang Dibayar I	Dimuka (Prepaid)	321.905.181			
	К	523199		Beban Pemeliharaan	Lainnya		321.905.181		

Direkam Tanggal : 31 Desember 2023 Operator Sakti

Silvia Mulida Br Lubis

Disetujui KPA/ Pejabat yang Berwenang

			FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN					
(ementerian N	egara/Lemi	oaga	Kementerian Pendayagunas	an Aparatur Negara da	ın Reformasi Birokra	si			
Selon I									
Milayah			1 *	s ·					
atuan Kerja			: Menteri Negara Pendayagu	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)					
No. Dokumen			: 14 /KU.02.02/2023						
Fanggal			: 31 December 2023						
Tahun Anggara	n		: 2023						
Ceterangan			: Jurnal koreksi Lebih Beban	Jang Makan PNS Desi	ember TA 2023 yang	dibayarkan TA 2024			
Kategori Jurna	l Penyesuai	ian			_				
	Pendag	atan Diterima	Di Muka		Koreksi Antar l	Beban			
	Pendag	oatan yang Mas	ih Harus Diterima		Pendapatan Se	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealis			
	Belanja	Dibayar Dimul	ka .		Beban Selisih i	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belanja	yang Masih Ha	arus Dibayar		Pembentukan	Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
	Penyisi	han Piutang Tic	dak Tertagih		Pembentukan Plutang Jangka Pendek				
	Penyus	utan daan Amo	ortisasi		Transfer Masuk				
	Persed	iaan			Transfer Kelua	Transfer Keluar			
	Uang N	Muka Belanja			Reklasifikasi N	eraca			
	_		bayaran Pendapatan		Koreksi				
	_		i/Reklasifikasi Piutang						
	Pembe	ntukan/koreks	y resiastissasi Fintang						
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama	Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Hari	us Dibayar	24.195.000				
	К	511129	Beban Uang Mal	kan PNS		24.195.000			

Direkam Tanggal : 31 Desember 2023 Operator Sakti Disetujui KPA/ Pejabat yang Berwenang

Rogo Pamungkas

			FORMULIR MEMO PENYESUAIAN	V		
Kementerian Ne	egara/Lem	baga	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	dan Reformasi Birok	rasi	
Eselon I			D 19*			
Vilayah						
atuan Kerja			: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega	ira (427950)		
No. Dokumen			: 15 /kU.02.02/2023			
Fanggal			: 31 December 2023			
Tahun Anggarai	n		: 2023			
Keterangan			: Jurnal Penyesuaian Beban Uang Makan PNS De	sember TA 2023 yan	ig dibayarkan TA 2024	
Kategori Jurnal	Penyesuai	an		33.11		
	Pendar	oatan Diterima	Di Muka	Koreksi Antar i	Beban	
	Pendag	oatan yang Mas	sih Harus Diterima	Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Be		
	Belanja	Dibayar Dimu	ka	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
v	Belanja	yang Masih H	arus Dibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		
	Penyis	han Piutang Ti	dak Tertagih	Pembentukan Piutang Jangka Pendek		
	Penyus	utan daan Am	ortisasi	Transfer Masuk		
	Persed	iaan		Transfer Kelua	ır	
	Uang N	Auka Belanja		Reklasifikasi N	eraca	
			bayaran Pendapatan	Koreksi		
			i/Reklasifikasi Piutang			
	10411100					
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	511129	Beban Uang Makan PNS	24.121.000		
	К	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		24.121.000	

Direkam Tanggal : 31 Desember 2023 Operator Sakti

D +1

Silvia Vaulida Br Lubis

Disetujui KPA/ Pejabat yang Berwenang

Hogo Domingkas

		FC	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon I Satuan No. Dok Tanggal	Kerja kumen Anggaran	; ; ;	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil N 001/2023 01 Januari 2023 2023 Jurnal Pembalik	unaan Apa		
KATEGO	ORI JURNAL	PENYESUAIAN:				
	Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panjang	g
	Pendapata	n Yang Masih Har	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/A	Aset Lainnya
	Belanja Dib	oayar Di Muka			Piutang Jangka Pendek	
✓	Belanja Yar	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihan	Piutang			Transfer Keluar	
	Penghapus	an Piutang			Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerimaa	an		Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Bend	dahara Pengeluar	an		Uang Muka Belanja	
	Persediaan	1			Perolehan Aset	
	Koreksi An	tar Beban			Koreksi Piutang/Utang	
	Pendapata	n Selisih Kurs Yan	ng Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
	•	in Selisih Kurs Yan sih Kurs Yang Belu			Hibah Langsung Penyesuaian Beban Pe	gawai
JURNAI	Beban Seli	sih Kurs Yang Belu				gawai
JURNAI	•	sih Kurs Yang Belu				gawai RUPIAH KREDIT
	Beban Seli	sih Kurs Yang Belu NAN : U	um Terealisasi		Penyesuaian Beban Pe	
NO	Beban Selis PENYESUA D/K	sih Kurs Yang Belu NAN : U	um Terealisasi PRAIAN NAMA AKUN vang Masih Harus Dibaya		Penyesuaian Beban Pe	
NO	Beban Seli: PENYESUA D/K D	AIAN : Belanja Barang y	um Terealisasi PRAIAN NAMA AKUN vang Masih Harus Dibaya		Penyesuaian Beban Pe	RUPIAH KREDIT
NO	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN : Belanja Barang y	um Terealisasi PRAIAN NAMA AKUN yang Masih Harus Dibaya		Penyesuaian Beban Pe	RUPIAH KREDIT
NO 1 Uraian Jurnal F	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN : Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi PRAIAN NAMA AKUN yang Masih Harus Dibaya		Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983	131.346.983
NO 1 Uraian Jurnal F	Beban Selis PENYESUA D/K D K	AIAN : Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi I <mark>RAIAN NAMA AKUN</mark> vang Masih Harus Dibaya In Listrik		Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983	131.346.983
NO 1 Uraian Jurnal F	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN : Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi I <mark>RAIAN NAMA AKUN</mark> vang Masih Harus Dibaya In Listrik		Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983	131.346.983
Uraian Jurnal F Desemi	Beban Selis PENYESUA D/K D K	AIAN : Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi I <mark>RAIAN NAMA AKUN</mark> yang Masih Harus Dibaya an Listrik		Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983	131.346.983 /ono pemakaian Bulan
Vraian Jurnal F Desemi	Beban Selis PENYESUA D/K D K	Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi I <mark>RAIAN NAMA AKUN</mark> vang Masih Harus Dibaya In Listrik	us Dibayar	Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983 Gedung KASN MT Hary Direkam ol	RUPIAH KREDIT 131.346.983 yono pemakaian Bulan eh:
Vraian Jurnal F Desemi	Beban Selis PENYESUA D/K D K Pembalik ataber 2022	Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi PRAIAN NAMA AKUN yang Masih Harus Dibaya an Listrik an Listrik yang Masih Har	us Dibayar	Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983 Gedung KASN MT Hary Direkam ol	RUPIAH KREDIT 131.346.983 yono pemakaian Bulan eh:
Vraian Jurnal F Desemi	Beban Selis PENYESUA D/K D K Pembalik ataber 2022	Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi PRAIAN NAMA AKUN yang Masih Harus Dibaya an Listrik an Listrik yang Masih Har	us Dibayar	Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983 Gedung KASN MT Hary Direkam ol	RUPIAH KREDIT 131.346.983 yono pemakaian Bulan eh:
Uraian Jurnal F Deseml	Beban Selis PENYESUA D/K D K Pembalik ataber 2022 oleh : s Akuntansi	Belanja Barang y Beban Langgana	um Terealisasi PRAIAN NAMA AKUN yang Masih Harus Dibaya an Listrik an Listrik yang Masih Har	us Dibayar angan APB	Penyesuaian Beban Pe RUPIAH DEBET 131.346.983 Gedung KASN MT Hary Direkam ole N Muda Operator S. Tasya Lianr NIP 199506	rupiah kredit 131.346.983 yono pemakaian Bulan eh : AKTI

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Kementerial Eselon I Satuan Kerja No. Dokuma Tanggal Tahun Angg Keterangan	ı ın	ra/Lembaga	 Kementerian Pendayagu Kementerian Pendayagu Komisi Aparatur Sipil Ne 002/2023 01 Januari 2023 2023 Jurnal Pembalik 	naan Apa		
KATEGORI J	URNAI	PENYESUAIAN				
Pen	dapata	ın Diterima Di Mı	uka		Piutang Jangka Panjang	B
Pen	dapata	ın Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/A	Aset Lainnya
Bela	nja Di	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pendek	
✓ Bela	nja Ya	ng Masih Harus I	Dibayar		Transfer Masuk	
Pen	yisihar	Piutang			Transfer Keluar	
Pen	ghapu	san Piutang			Koreksi Beban Aset	
Pen	yusuta	n Aset			Pendapatan dari Aloka:	si APBN-BLU
Kas	Di Ben	dahara Penerima	aan		Kas Lainnya di BLU	
Kas	di Ben	dahara Pengelua	ran		Uang Muka Belanja	
Pers	ediaai	n			Perolehan Aset	
Kor	eksi Ar	itar Beban			Koreksi Piutang/Utang	
Pen	dapata	ın Selisih Kurs Ya	ng Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
Beb	an Seli	sih Kurs Yang Be	um Terealisasi		Penyesuaian Beban Pe	gawai
NO NO	D/K	T	JRAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D		yang Masih Harus Dibayar		7.148.026	
	K	Beban Langgan				7.148.026
		%#437th				
Uraian :	1:1	too Diawa Lawasa	nan Listrik yang Masih Ha	rus Dibas	or Godung KASN Cinin	ang pomakajan Bulan
Desember 2		las bidya Laliggo	Hall LISUIK Yallg Wasiii Ha	rus Dibay	yar dedung KASN CIPIII	ang pemakalah bulah
Dibuat oleh			Disetujui oleh :		Direkam ole	
Petugas Akı	intans		Analis Pengelolaan Keua	ngan APB	N Muda Operator S/	AKTI
And	-				h	<u> </u>
Ayu Tri And	and the same of the	no concretation	Ginapiar Dian Raharjo		Tasya Liann	
NIP 199801 Tanggal : 01			NIP 19841123200901100 Tanggal : 01 Januari 2023			5242019022011 1 Januari 2023

		FORMULIR M	EMO PENYE	SUAIAN	
Eselon I Satuan No. Dok Tanggal	I Kerja kumen I Anggaran		ndayagunaan Apa	aratur Negara dan Refo aratur Negara dan Refo	
KATEGO	ORI JURNAI	PENYESUAIAN:			
	Pendapata	n Diterima Di Muka		Piutang Jangka Panjan	3
	Pendapata	n Yang Masih Harus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/	Aset Lainnya
	Belanja Dil	payar Di Muka		Piutang Jangka Pendek	
V	Belanja Ya	ng Masih Harus Dibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihar	Piutang		Transfer Keluar	
	Penghapu	an Piutang		Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta	n Aset		Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerimaan		Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengeluaran		Uang Muka Belanja	
	Persediaar	ř		Perolehan Aset	
	Koreksi Ar	tar Beban		Koreksi Piutang/Utang	
	Pendapata	n Selisih Kurs Yang Belum Terealisas	si =	Hibah Langsung	
	Beban Seli	sih Kurs Yang Belum Terealisasi		Penyesuaian Beban Pe	gawai
NO	D/K	URAIAN NAMA AKL	IN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Barang yang Masih Harus D		2.108.627	HOT MIT KILEDIT
	к	Beban Langganan Listrik			2.108.627
0.04650000000000000000000000000000000000		as Biaya Langganan Listrik yang M	lasih Harus Diba	yar Gedung KASN SME	SCO pemakaian Bulan
Dibuat		Disetujui oleh :	an Kauangan APB	Direkam ol	
Ayu Tri	Andini	Giyanjar Dial Ra	Marie Color A Programmer Color	Tasya Liang	ý J

Tanggal: 01 Januari 2023

NIP 199801232019122001 Tanggal: 01 Januari 2023

Tanggal: 01 Januari 2023

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN		
Eselon I Satuan No. Dok Tanggal	Kerja kumen I Anggaran	; ; ; ;	Kementerian Pendayagu Kementerian Pendayagu Komisi Aparatur Sipil Ne 004/2023 01 Januari 2023 2023 Jurnal Pembalik	ınaan Apa			
KATEGO	ORI JURNAL	PENYESUAIAN:					
	Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Jang	gka Panjang	<u> </u>
	Pendapata	n Yang Masih Har	rus Diterima		Pelepasan A	set Tetap/A	Aset Lainnya
	Belanja Dibayar Di Muka				Piutang Jang	gka Pendek	
V	Belanja Yar	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Ma	suk	
	Penyisihan	Piutang			Transfer Kel	uar	
	Penghapus	an Piutang			Koreksi Beba	an Aset	
	Penyusutar	n Aset			Pendapatan	dari Alokas	si APBN-BLU
	•	dahara Penerima	an		Kas Lainnya	di BLU	
]]Kas di Bend	dahara Pengeluar	an		Uang Muka	Belania	
	Persediaan				Perolehan A	983	
	Koreksi Ant				Koreksi Piut		
			g Belum Terealisasi		Hibah Langs		
					Penyesuaiar		rawai
	Ipepan sens	ih Kurs Yang Beli	im rerealisasi		Jrenyesuaiai	i bebaii reg	gawai
JURNAL	L PENYESUA	IAN:					
NO	D/K		RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH		RUPIAH KREDIT
1	D		rang Masih Harus Dibayar			345.942	
	К	Beban Langgana	n Telepon				345.942
Uraian	:						
Jurnal F	embalik ata	as Biaya Langgana	an Telepon yang Masih Ha	rus Dibaya	ar pemakaiar	Bulan Des	ember 2022
	esta traditi dil					o: 1 1	
Dibuat	oleh : s Akuntansi		Disetujui oleh : Analis Pengelolaan Keua	ngan APB		Direkam ole Operator SA	
\$						Ihr?	/]
Ayu Tri NIP 199	<u>Andini</u> 9801232019	122001	Ginanjar Dian Raharjo NIP 1984112320090110	07		<u>Tasya Liann</u> NIP 199506	<u>ni</u> 242019022011
	l : 01 Januar		Tanggal: 01 Januari 202				Januari 2023

FO	RMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
: : : :	Kementerian Pendayagu Komisi Aparatur Sipil Ne 005/2023 01 Januari 2023 2023	ınaan Apa		
	27		lo:	
				T
	is Diterima			
	payar		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
n Piutang			Transfer Keluar	
san Piutang			Koreksi Beban Aset	
an Aset			Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
ndahara Penerimaar	n		Kas Lainnya di BLU	
idahara Pengeluara	n		Uang Muka Belanja	
n			Perolehan Aset	
ntar Beban			Koreksi Piutang/Utang	
an Selisih Kurs Yang	Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
isih Kurs Yang Belur	m Terealisasi		Penyesuaian Beban Pe	gawai
ALANI .				
	AIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
Belanja Barang ya	ing Masih Harus Dibayar		1.048.000	
Beban Pengiriman	Surat Dinas Pos Pusat			1.048.000
tas Biaya Pengirima	in Surat Dinas Pos Pusat	yang Mas	ih Harus Dibayar pema	kaian Bulan Desember
	n Surat Dinas Pos Pusat Disetujui oleh: Analis Pengelolaan Keua		Direkam ole	eh :
i a i a i	ara/Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ara/Lembaga : Kementerian Pendayagu : Kementerian Pendayagu : Komisi Aparatur Sipil Ne : 005/2023 : 01 Januari 2023 : 2023 : Jurnal Pembalik AL PENYESUAIAN : Ian Diterima Di Muka Ian Yang Masih Harus Diterima Iibayar Di Muka Iang Masih Harus Dibayar In Piutang Iasan Piutang Iasan Piutang Iasan Piutang Iasan Penerimaan Indahara Penerimaan Indahara Pengeluaran Ian Intar Beban Ian Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi Ilisih Kurs Yang Belum Terealisasi	Example Services Serv	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo : Komisi Aparatur Sipil Negara : 005/2023 : 01 Januari 2023 : 2023 : Jurnal Pembalik AL PENYESUAIAN : Ian Diterima Di Muka Ian Yang Masih Harus Diterima Iibayar Di Muka Iang Masih Harus Dibayar In Piutang Iang Masih Harus Dibayar In Pendapatan dari Aloka Indahara Penerimaan Iang Masih Harus Dibayar Indahara Pengeluaran Iang Muka Belanja Iang Muka Bela

Tanggal: 01 Januari 2023

Tanggal: 01 Januari 2023

Tanggal: 01 Januari 2023

			FORM	ULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon I Satuan No. Dok Tanggal	Kerja kumen Anggaran	ra/Lembaga	: Keme : Komis : 06/20 : 01 Jan : 2023	nterian Pendaya ii Aparatur Sipil I	gunaan Apa	aratur Negara dan Refo aratur Negara dan Refo	
KATEGO	ORI JURNAI	. PENYESUAIAN	l:				
	Pendapata	n Diterima Di N	1uka			Piutang Jangka Panjan	g
✓	Pendapata	n Yang Masih H	larus Dite	rima		Pelepasan Aset Tetap/	Aset Lainnya
	Belanja Di	bayar Di Muka				Piutang Jangka Pendek	:
	Belanja Ya	ng Masih Harus	Dibayar			Transfer Masuk	
	Penyisihar	Piutang				Transfer Keluar	
	Penghapu	san Piutang				Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta	n Aset				Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerin	naan			Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengelu	aran			Uang Muka Belanja	
	Persediaar	1				Perolehan Aset	
	Koreksi An	itar Beban				Koreksi Piutang/Utang	
	Pendapata	an Selisih Kurs Y	ang Belun	n Terealisasi		Hibah Langsung	
		sih Kurs Yang B				Penyesuaian Beban Pe	gawai
	•				s)		
NO	D/K	AIAN:	ΠΡΑΙΔΝ	NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Pendapatan	Denda	Penyelesaian	Pekerjaan		NOT PAINTED IT
		Pemerintah			•	000000000000000000000000000000000000000	
	К	Pendapatan Y	ang Masih	Harus Diterima			44.119.246
Uraian	:						
Establishment.			n yang m	asih harus diter	ima atas d	enda keterlambatan p	enyelesaian pekerjaan
renovas	si gedung K	ASN					
Dibuat	oleh :		Disetu	ujui oleh :		Direkam ol	eh :
Petugas	s Akuntansi			Pengelolaan Ke	uangan APB	N Muda Operator S	AKTI
4			\			lh."	,
Ayu Tri	Andini 9801232019	9122001		<u>ijar Dian Raharjo</u> 98411232009011		<u>Tasya Lianr</u> NIP 199506	<u>ni</u> 5242019022011
Mario Mario	l : 01 Janua			gal : 01 Januari 20			1 Januari 2023

	FORMUL	IR MEMO PENYE	SUAIAN	
Kementerian Nega Eselon I Satuan Kerja No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran Keterangan	: Kemente			
KATEGORI JURNAL	. PENYESUAIAN :			
Pendapata	n Diterima Di Muka		Piutang Jangka Panjang	g
Pendapata	n Yang Masih Harus Diterim	a	Pelepasan Aset Tetap/	Aset Lainnya
✓ Belanja Dil	bayar Di Muka		Piutang Jangka Pendek	;
Belanja Ya	ng Masih Harus Dibayar		Transfer Masuk	
Penyisihar	Piutang		Transfer Keluar	
Penghapu	san Piutang		Koreksi Beban Aset	
Penyusuta	n Aset		Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
	dahara Penerimaan		Kas Lainnya di BLU	
Kas di Ben	dahara Pengeluaran		Uang Muka Belanja	
Persediaar	1		Perolehan Aset	
Koreksi An	tar Beban		Koreksi Piutang/Utang	
	n Selisih Kurs Yang Belum T	erealisasi	Hibah Langsung	
	sih Kurs Yang Belum Tereali		Penyesuaian Beban Pe	gawai
		(A		
NO D/K	AIAN : URAIAN NA	MA AKIIN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
NO D/K 1 D	Beban Pemeliharaan Perala		16.812.197	NOTALI KILEDI
К	Beban Dibayar Dimuka			16.812.197
Uraian :				
The state of the s	tas koreksi tambah Beban		engadaan Lisensi Forti	gate - kantor Smesco
dengan masa beria	aku 26/04/2022 s.d. 26/04/2	023		
Dibuat oleh :	Disetuju	oleh:	Direkam ol	eh:
Petugas Akuntansi	- 5	ngeloldan Keuangan APE	3N Muda Operator S	AKTI
Ayu Tri Andini	Ginanjar	Dian Raharjo	Tasya Liang	//
NIP 199801232019 Tanggal : 01 Janua		11232009011007 01 Januari 2023		5242019022011 1 Januari 2023
ianggai. Or Janua	i zozo	OL JUNIOUIT ROLD	i di ibbai i o	

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon Satuan No. Dol Tangga	Kerja kumen I Anggaran	; ; ; ;	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil No 08/2023 01 Januari 2023 2023 Jurnal Pembalik	unaan Apa		
KATEGO	ORI JURNAL	PENYESUAIAN :				
	Pendapata	ın Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panjang	g
	Pendapata	ın Yang Masih Har	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/	Aset Lainnya
1	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pendek	
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihar	Piutang			Transfer Keluar	
	Penghapu:	san Piutang			Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
	•	dahara Penerima	an		Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengeluar	an		Uang Muka Belanja	
] Persediaar				Perolehan Aset	
	Koreksi An	itar Beban			Koreksi Piutang/Utang	
]]Pendapata	an Selisih Kurs Yan	ig Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
		sih Kurs Yang Belu	-		Penyesuaian Beban Pe	gawai
	-			-		- (Contractor to
JURNA	L PENYESU/		RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D/K D		raan Peralatan dan Mesin	Lainnya	16.812.197	ROFIAN REDIT
-				0.0584400015 6 004	Anni Se Anni a De Anni a Se Anni	
	К	Beban Dibayar D	imuka			16.812.197
The State of the S	Pembalik a	tas koreksi tamb aku 26/04/2022 s.	oah Beban Dibayar Dimu d. 26/04/2023	ka atas Pe	engadaan Lisensi Fortig	ate - kantor Cipinang
Dibuat Petuga	oleh : s Akuntansi	í	Disetujui oleh : Analis Pengelolaan Keu	angan APB	Direkam ol N Muda Operator S	
NIP 199	Andini 9801232019 I : 01 Janua		Ginanjar Dian Raharjo NIP 1984112320090110 Tanggal : 01 Januari 202		(1890 B)	// <u>mi</u> 5242019022011 1 Januari 2023

		FC	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon I Satuan I No. Dok Tanggal	Kerja kumen I Anggaran	: : :	Kementerian Pendayagu Kementerian Pendayagu Komisi Aparatur Sipil Ne 09/2023 01 Januari 2023 2023 Jurnal Pembalik	ınaan Apa		
KATEGO	ORI JURNAL	PENYESUAIAN :				
	Pendapatar	n Diterima Di Mul	ka		Piutang Jangka Panjang	;
	Pendapatar	Yang Masih Har	us Diterima		Pelepasan Aset Tetap//	Aset Lainnya
V	Belanja Dib	ayar Di Muka			Piutang Jangka Pendek	
	Belanja Yan	g Masih Harus Di	ibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihan	Piutang			Transfer Keluar	
	Penghapus	an Piutang			Koreksi Beban Aset	
	Penyusutar	Aset			Pendapatan dari Aloka:	si APBN-BLU
	Kas Di Bend	lahara Penerimaa	in		Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Bend	ahara Pengeluara	an		Uang Muka Belanja	
	Persediaan				Perolehan Aset	
	Koreksi Ant	ar Beban			Koreksi Piutang/Utang	
] Pendapatar	n Selisih Kurs Yan	g Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
	1	ih Kurs Yang Belu			Penyesuaian Beban Pe	gawai
	•			33		
NO	D/K		RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1			raan Peralatan dan Mesin	Lainnya	64.383.072	
	К	Beban Dibayar D	imuka			64.383.072
					-	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Pembalik ata	is koreksi tambal ku 22/05/2022 s.	h Beban Dibayar Dimuka d. 22/05/2023	atas Peng	gadaan Lisensi Fortigate	- kantor MT Haryono
Dibuat of Petugas	oleh : s Akuntansi		Disetujui oleh : Analis Pengelolaan Keua	ngan APE	Direkam ole	

Ayu Tri Andini

NIP 199801232019122001 Tanggal: 01 Januari 2023 Ginanjar Dian Raharjo NIP 198411232009011007 Tanggal: 01 Januari 2023

Tasya Lianmi

NIP 199506242019022011 Tanggal: 01 Januari 2023

	FC	DRMULIR MEMO	O PENYE	SUAIAN	
Kementerian Negar Eselon I Satuan Kerja No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran Keterangan	:		agunaan Apa	aratur Negara dan Refo aratur Negara dan Refo	
KATEGORI JURNAL				ř	
Pendapata	n Diterima Di Mul	ka		Piutang Jangka Panjang	58
Pendapata	n Yang Masih Har	us Diterima		Pelepasan Aset Tetap/	Aset Lainnya
✓ Belanja Dib	ayar Di Muka			Piutang Jangka Pendek	
Belanja Yar	ng Masih Harus Di	bayar		Transfer Masuk	
Penyisihan	Piutang			Transfer Keluar	
Penghapus	an Piutang			Koreksi Beban Aset	
Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
Kas Di Ben	dahara Penerimaa	an		Kas Lainnya di BLU	
Kas di Bend	dahara Pengeluara	an		Uang Muka Belanja	
Persediaan	Ů.			Perolehan Aset	
Koreksi An	tar Beban			Koreksi Piutang/Utang	
Pendapata	n Selisih Kurs Yan	g Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
Beban Seli	sih Kurs Yang Belu	m Terealisasi		Penyesuaian Beban Pe	gawai
JURNAL PENYESUA	MAN:				
NO D/K	U	RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1 D	Beban Pemelihar	aan Peralatan dan Mes	in Lainnya	105.647.671	
К	Beban Dibayar D	imuka			105.647.671
Uraian :					
	2 s.d. 13/07/2023			gadaan Lisensi Fortigat Direkam ole N Muda Operator S.	eh:
Ayu Tri Andini		Ginamar Dian Rahario	<u>)</u>	Tasya Liang	, <u> </u>

Ginamar Dian Raharjo NIP 198411232009011007

NIP 199801232019122001

Tanggal: 01 Januari 2023

Tanggal: 01 Januari 2023

NIP 199506242019022011 Tanggal: 01 Januari 2023

		FORMULIR IV	IEMO DENIV	ECHAIAN	
		FORIVIOLIK IV	IEIVIO PEINT	ESUAIAN	
Eselon Satuan No. Do Tangga	I Kerja kumen I Anggaran		endayagunaan A _l r Sipil Negara	paratur Negara dan Refo paratur Negara dan Refo	
KATEG	ORI JURNAL	PENYESUAIAN:			
]Pendapata	n Diterima Di Muka		Piutang Jangka Panjan	g
	Pendapata	n Yang Masih Harus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/	Aset Lainnya
V	Belanja Dil	payar Di Muka		Piutang Jangka Pendek	
	Belanja Ya	ng Masih Harus Dibayar		Transfer Masuk	
	_ Penyisihan	Piutang		Transfer Keluar	
		an Piutang		Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta			Pendapatan dari Aloka	ei ADRN_RIII
	-	dahara Penerimaan		-	SI APBIN-BLO
				Kas Lainnya di BLU	
	-	dahara Pengeluaran		Uang Muka Belanja	
	Persediaar			Perolehan Aset	
	Koreksi An	tar Beban		Koreksi Piutang/Utang	
	Pendapata	n Selisih Kurs Yang Belum Terealisa	asi	Hibah Langsung	
	Beban Seli	sih Kurs Yang Belum Terealisasi		Penyesuaian Beban Pe	gawai
HIRNA	L PENYESUA	JAN .			
NO	D/K	URAIAN NAMA AK	UN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Pemeliharaan Peralatan da	n Mesin Lainnya	919.171	
	К	Beban Dibayar Dimuka			919.171
	A	M			
Uraian	:				
517		as koreksi tambah Beban Dibaya	ar Dimuka atas I	Pengadaan Lisensi Como	odo SSL dengan mas
berlaku	04/06/202	2 s.d. 05/06/2023			
Dibuat	oleh : s Akuntansi	Disetujui oleh :	an Keuangan AP	Direkam ole BN Muda Operator S	*****
cruga.	- manitarisi	Alla Cingelois	ALL REGISTING	Distributed Operator 5/	and the second

Ayu Tri Andini NIP 199801232019122001 Tanggal : 01 Januari 2023 Ginanjar Dian Raharjo NIP 198411232009011007 Tanggal : 01 Januari 2023

Tasya Lianmi

NIP 199506242019022011 Tanggal : 01 Januari 2023

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN			
Eselon I Satuan R No. Dok Tanggal	Kerja umen Inggaran	ra/Lembaga : : : :	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil No 12/2023 01 Januari 2023 2023 Jurnal Pembalik	unaan Apa				
KATEGO	RI JURNAL	. PENYESUAIAN :						
	Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panjai	ng		
	Pendapata	n Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap	/Aset Lainnya		
✓	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pende	k		
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk			
	Penyisihar	Piutang			Transfer Keluar			
	Penghapu	san Piutang			Koreksi Beban Aset			
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Alok	asi APBN-BLU		
	100	dahara Penerima	an		Kas Lainnya di BLU			
\equiv	Kas di Ben	dahara Pengeluar	ran		Uang Muka Belanja			
=	Persediaar				Perolehan Aset			
	Koreksi An			Koreksi Piutang/Utang				
			ng Belum Terealisasi		Hibah Langsung			
		sih Kurs Yang Bel			Penyesuaian Beban P	egawai		
				1	grade to the second			
	PENYESU		IRAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT		
NO 1	D/K D		raan Peralatan dan Mesin	Lainnya	3.396.438			
*	J	bedan r emeina	Tadiri Cidadan dan Mesin					
	К	Beban Dibayar D	Dimuka			3.396.438		
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			ih Beban Dibayar Dimuka	atas Peng	adaan 2 Zone Directo	r dengan masa berlaku		
Dibuat o	olah :		Disetujui oleh :		Direkam o	oleh :		
	Akuntansi		Analis Pengelolaan Keua	Direkam oleh : Juangan APBN Muda Operator SAKTI				
Ayu Tri		2122001	Ginahjar Dian Raharjo NIP 1984112320090110	007	Tasya Liar	// 		
NIP 199801232019122001 NIP 198411232009011007 Tanggal: 01 Januari 2023 Tanggal: 01 Januari 2023				Contract Contract	01 Januari 2023			

krasi krasi ya
уа
уа
уа
LU
H KREDIT
74.900.507
elanja Modal

Tanggal: 01 Januari 2023

Tanggal: 01 Januari 2023

Tanggal: 01 Januari 2023

		FC	DRMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN			
Eselon I Satuan I No. Dok Tanggal	Kerja kumen Anggaran	ra/Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil No 014/2023 31-Oct-23 2023 Jurnal Penyesuaian	unaan Apa				
KATEGO	ORI JURNAI	PENYESUAIAN :						
	Pendapata	n Diterima Di Mul	ka		Piutang Jangka Panj	ang		
	Pendapata	an Yang Masih Har	us Diterima		Pelepasan Aset Teta	p/Aset Lainnya		
	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pend	dek		
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	bayar		Transfer Masuk			
	Penyisihar	n Piutang			Transfer Keluar			
		san Piutang			Koreksi Beban Aset			
	Penyusuta				Pendapatan dari Ak	okasi APBN-BLU		
		idahara Penerima	an.		Kas Lainnya di BLU			
				Uang Muka Belanja				
		dahara Pengeluar	dii	Perolehan Aset				
	Persediaai			Koreksi Piutang/Utang				
		ntar Beban				ing		
	100000000000000000000000000000000000000		g Belum Terealisasi		Hibah Langsung			
	Beban Seli	isih Kurs Yang Belu	ım Terealisasi		Lain-lain			
JURNAL	L PENYESU	AIAN:						
NO	D/K	U	RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT		
1	D	Beban Persedian	Konsumsi		21.600.00	00		
	К	Beban Persedian	Bahan Baku			21.600.000		
V-0500/475547			Beban Persediaan Baha	n Baku b	erupa Cat sesuai BA	STP-01/PPK-CAT/06/2023		
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :	Direkam oleh :				
Petugas	s Akuntans	i	Analis Pengelolaan Keu	angan APE	BN Muda Operato	or SAKTI		
9					ly	<u>"</u>		
Ayu Tri		0122001	Ginanjar Dian Raharjo	007	Tasya Li	<u>anmi</u> 506242019022011		
Carte Comme	NIP 199801232019122001 NIP 198411232009011007 Tanggal : 01 Januari 2023 Tanggal : 01 Januari 2023					: 01 Januari 2023		

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN			
Eselon Satuan No. Do Tangga	I Kerja kumen I Anggaran	ra/Lembaga : : : : :	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil N 015/2023 31-Dec-23 2023 Jurnal Penyesuaian	gunaan Apa				
KATEG	ORI JURNAI	PENYESUAIAN :						
	Pendapata	ın Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panjai	ng		
	Pendapata	n Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap	/Aset Lainnya		
	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pende	k		
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk			
	Penyisihar	Piutang			Transfer Keluar			
	Penghapu	san Piutang			Koreksi Beban Aset			
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Alok	asi APBN-BLU		
	Kas Di Ben	dahara Penerima	an		Kas Lainnya di BLU			
	Kas di Ben	dahara Pengeluar	an		Uang Muka Belanja			
	Persediaar	ı			Perolehan Aset			
	Koreksi An	tar Beban		✓ Koreksi Piutang/Utang				
	Pendapata	n Selisih Kurs Yar	g Belum Terealisasi		Hibah Langsung			
	Beban Seli	sih Kurs Yang Beli	um Terealisasi		Lain-lain			
HIDNA	L PENYESU	A1AN						
NO	D/K	10	RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT		
1	D	Utang Yang Belu	m Diterima Tagihannya		66.129.600			
	К	Utang kepada Pi	hak Ketiga			66.129.600		
	uan Utang	atas Progress Pek ggal 31/12/2023	erjaan yang belum dilaks	anakan pe	mbayaran sesuai BAST	Nomor: BASTP-12/PPK		
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :		Direkam o	oleh :		
	s Akuntansi		Analis Pengelolaan Keu	angan APB	TO CONTRACT TO CON	0.527.2		
h					lhy	<u>"</u>		
Tasya L		2022011	Ginanjar Dian Raharjo NIP 1984112320090110	007	Tasya Liar	30000		
			Tanggal: 31 Desember					

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN		
Eselon I Satuan No. Dol Tangga	I Kerja kumen I Anggaran	ra/Lembaga : : : : : :	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil N 016/2023 31-Dec-23 2023 Jurnal Penyesuaian	gunaan Apa	7		
KATEGO	ORI JURNAL	PENYESUAIAN:					
] Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panja	ng	
	Pendapata	n Yang Masih Har	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap	/Aset Lainnya	
	Belanja Dib	payar Di Muka			Piutang Jangka Pende	ek	
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk		
	Penyisihan	Piutang			Transfer Keluar		
	Penghapus	an Piutang			Koreksi Beban Aset		
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Alol	asi APBN-BLU	
	Kas Di Ben	dahara Penerima	an		Kas Lainnya di BLU		
	Kas di Bend	dahara Pengeluar	an		Uang Muka Belanja	nja	
	Persediaar	1			Perolehan Aset		
	Koreksi An	tar Beban		1	Koreksi Piutang/Utar	g	
	Pendapata	n Selisih Kurs Yan	g Belum Terealisasi		Hibah Langsung		
	•	n Selisih Kurs Yan sih Kurs Yang Belu	-		Hibah Langsung Lain-lain		
ILIBNAI	Beban Seli:	sih Kurs Yang Belu	-				
JURNAI	•	sih Kurs Yang Belu	-			RUPIAH KREDIT	
	Beban Seli:	sih Kurs Yang Belu NAN : U	um Terealisasi		Lain-lain		
NO	Beban Selis L PENYESUA	AIAN: Utang Yang Belu	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya		Lain-lain RUPIAH DEBET		
NO	Beban Selis L PENYESUA	sih Kurs Yang Belu NAN : U	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya		Lain-lain RUPIAH DEBET		
NO 1	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN: Utang Yang Belu	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya		Lain-lain RUPIAH DEBET		
NO 1 Uraian	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN : Utang Yang Belu Utang Yang Belu Utang kepada Pi	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga	sanakan na	RUPIAH DEBET 50.400.000	50.400.000	
NO 1 Uraian Pengak	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN : Utang Yang Belu Utang Yang Belu Utang kepada Pi	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga	sanakan pe	RUPIAH DEBET 50.400.000	50.400.000	
NO 1 Uraian Pengak	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN : Utang Yang Belu Utang kepada Pil	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga	sanakan pe	RUPIAH DEBET 50.400.000	50.400.000	
NO 1 Uraian Pengak	Beban Selis L PENYESUA D/K D K	AIAN : Utang Yang Belu Utang kepada Pil	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga	sanakan pe	RUPIAH DEBET 50.400.000	50.400.000	
Uraian Pengak LDJBICF	Beban Selis L PENYESUA D/K D K : : : : : : : : : : : : : : : : :	Utang Yang Belu Utang Yang Belu Utang kepada Pil atas Progress Pek	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga erjaan yang belum dilaks 23 Disetujui oleh:		RUPIAH DEBET 50.400.000 mbayaran sesuai BAS	50.400.000 T Nomor: BASTP-4/PPK-	
Uraian Pengak LDJBICF	Beban Selis L PENYESUA D/K D K :	Utang Yang Belu Utang Yang Belu Utang kepada Pil atas Progress Pek	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga erjaan yang belum dilaks		RUPIAH DEBET 50.400.000 mbayaran sesuai BAS	50.400.000 T Nomor: BASTP-4/PPK-	
Uraian Pengak LDJBICF	Beban Selis L PENYESUA D/K D K : : : : : : : : : : : : : : : : :	Utang Yang Belu Utang Yang Belu Utang Kepada Pil atas Progress Pek	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga erjaan yang belum dilaks 23 Disetujui oleh:		RUPIAH DEBET 50.400.000 mbayaran sesuai BAS	50.400.000 T Nomor: BASTP-4/PPK-	
Uraian Pengak LDJBICF Dibuat Petuga:	Beban Selis L PENYESUA D/K D K : uan Utang a P/12/2023 T oleh : s Akuntansi	Utang Yang Belu Utang Yang Belu Utang Kepada Pil atas Progress Pek	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga serjaan yang belum dilaks 23 Disetujui oleh: Analis Rengelolaan Keu		RUPIAH DEBET 50.400.000 mbayaran sesuai BAS Direkam of Operator	50.400.000 T Nomor: BASTP-4/PPK- Dleh: SAKTI	
Uraian Pengak LDJBICF Dibuat Petugas	Beban Selis L PENYESUA D/K D K : uan Utang a P/12/2023 T oleh : s Akuntansi	Utang Yang Belu Utang Yang Belu Utang kepada Pil atas Progress Pek	RAIAN NAMA AKUN m Diterima Tagihannya hak Ketiga erjaan yang belum dilaks 23 Disetujui oleh:	angan APB	RUPIAH DEBET 50.400.000 mbayaran sesuai BAS N Muda Operator Tasya Liai NIP 1995	50.400.000 T Nomor: BASTP-4/PPK- Dleh: SAKTI	

]	FORMULIR MEMO	PENY	ESUAIAN	I	
Eselon Satuan No. Do Tangga	l Kerja okumen al Anggaran	ara/Lembaga	: Kementerian Pendayag : Kementerian Pendayag : Komisi Aparatur Sipil N : 017/2023 : 31-Dec-23 : 2023 : Jurnal Penyesuaian	unaan Ap	The second secon		
KATEG	ORI JURNA	L PENYESUAIAN	:				
	Pendapat	an Diterima Di M	uka		Piutang Jai	ngka Panjan	g
	Pendapat	an Yang Masih H	arus Diterima		Pelepasan	Aset Tetap/	Aset Lainnya
	Belanja Di	bayar Di Muka			Piutang Jar	ngka Pendek	
	Belanja Ya	ng Masih Harus	Dibayar		Transfer N	lasuk	
	Penyisihai	n Piutang			Transfer K	eluar	
	Penghapu	san Piutang			Koreksi Be	ban Aset	
	Penyusuta	an Aset			Pendapata	n dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ber	ndahara Penerim	aan		Kas Lainnya di BLU		
	Kas di Ben	dahara Pengelua	aran		Uang Muka Belanja		
	Persediaa	n			Perolehan Aset		
	Koreksi Ar	ntar Beban		V	✓ Koreksi Piutang/Utang		
	Pendapata	an Selisih Kurs Ya	ng Belum Terealisasi		Hibah Langsung		
	Beban Sel	isih Kurs Yang Be	lum Terealisasi		Lain-lain		
HIDNA	L PENYESU	A1AN .					
NO	D/K		URAIAN NAMA AKUN		RUPIAH	DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Utang Yang Bel	um Diterima Tagihannya		8	32.119.300	
	К	Utang kepada P	Pihak Ketiga				82.119.300
Uraian							
V 3 ZNY 150 EST CO.		atas Progress Pe Tanggal 31/12/2	kerjaan yang belum dilaks 023	anakan p	embayaran	sesuai BAST	Nomor:BASTP-4/PPK-
							
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :			Direkam ole	eh :
Petuga	s Akuntansi		Analis Pengelolaan Keua	ngan API	BN Muda	Operator SA	AKTI
lhi"							
Tasya L			Ginanjar Dian Raharjo			Tasya Liann	
7072074 - 445504	9506242019 J · 31 Deser		NIP 1984112320090110		NIP 199506242019022011		
Tanggal: 31 Desember 2023 Tanggal: 31 Desember 2023					. u.188a1 . 31	Describer 2025	

	FORMULIR MEMO PENYESUAIAN								
Eselon Satuan No. Do Tangga Tahun	Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja : Komisi Aparatur Sipil Negara No. Dokumen : 018/2023 Tanggal : 31-Dec-23 Tahun Anggaran : 2023 Keterangan : Jurnal Penyesuaian								
KATEG	ORI JURNAI	PENYESUAIAN :							
	Pendapata	n Diterima Di Μι	ıka		Piutang Ja	angka Panjan	g		
	Pendapata	an Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasar	Aset Tetap/	Aset Lainnya		
	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Ja	angka Pendek	(
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	Dibayar		Transfer I	Masuk			
	Penyisihan	Piutang			Transfer I	Celuar			
	Penghapus	san Piutang			Koreksi B	eban Aset			
	Penyusuta	n Aset			Pendapat	an dari Aloka	si APBN-BLU		
	Kas Di Ben	dahara Penerima	an		Kas Lainn	ya di BLU			
	Kas di Ben	dahara Pengeluai	ran		Uang Mul	ka Belanja	a Belanja		
	Persediaar	1			Perolehar	Aset			
	Koreksi An	tar Beban		/	Koreksi Pi	utang/Utang			
	Pendapata	ın Selisih Kurs Yar	ng Belum Terealisasi		Hibah Lan	gsung			
	Beban Seli	sih Kurs Yang Bel	um Terealisasi		Lain-lain				
HIDNIA	_ L PENYESU <i>A</i>	NAME.							
NO	D/K		RAIAN NAMA AKUN	****	RUPIA	H DEBET	RUPIAH KREDIT		
1	D	Utang Yang Belu	m Diterima Tagihannya		1	.02.071.100			
	К	Utang kepada Pi	hak Ketiga				102.071.100		
	700								
Uraian			1.1.1011	15 P W 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12					
U. 12.12 1. (2005)		atas Progress Pek Tanggal 31/12/20	erjaan yang belum dilaks 123	anakan pe	mbayaran	sesuai BAST	Nomor: BASTP-4/PPK-		
Dibuat			Disetujui oleh :			Direkam ole			
Petuga:	s Akuntansi		Analis Rengelolaan Keua	ingan APB	N Muda	Operator S/	AKTI		
h						ho	l		
Tasya L			Ginanjar Dian Raharjo			Tasya Liann			
	NIP 199506242019022011 NIP 198411232009011007 NIP 199506242019022011 Tanggal: 31 Desember 2023 Tanggal: 31 Desember 2023								

Perolehan Aset			
Koreksi Piutang/Utang			
Hibah Langsung			
T			
Т			
929			
nber			
<u>Tasya Lianmi</u>			
11007 NIP 199506242019022011 per 2023 Tanggal : 31 Desember 2023			

		FC	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN		
Eselon I Satuan No. Dok Tanggal	Kerja kumen I Anggaran	ra/Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil No 020/2023 31-Dec-23 2023 Jurnal Penyesuaian	unaan Apa			
KATEGO	ORI JURNAL	PENYESUAIAN:					
	Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Jar	ngka Panjang	S
	Pendapata	n Yang Masih Har	us Diterima		Pelepasan	Aset Tetap/	Aset Lainnya
	Belanja Dib	oayar Di Muka			Piutang Jar	ngka Pendek	
✓	Belanja Yar	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer M	lasuk	
	Penyisihan	Piutang			Transfer K	eluar	
	Penghapus	an Piutang			Koreksi Be	ban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapata	n dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerimaa	an		Kas Lainny	a di BLU	
	Kas di Bend	dahara Pengeluar	an		Uang Muka Belanja		
	Persediaar	1			Perolehan	Aset	
	Koreksi An	tar Beban			Koreksi Piutang/Utang		
	Pendapata	n Selisih Kurs Yan	g Belum Terealisasi		Hibah Lang	gsung	
	Beban Seli	sih Kurs Yang Belu	ım Terealisasi		Lain-lain		
HIDNIAI	L PENYESU <i>A</i>	MAN.					
NO	D/K		RAIAN NAMA AKUN		RUPIAI	H DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Belanja Langgan	an Listrik			2.058.285	
	к	Belanja Barang y	ang Masih Harus Dibayar				2.058.285
2023 se	uan Biaya I esuai Nota T	agihan Nomor: 2	yang Masih Harus Dibay 2/LLP-KUKM/Acct-Lis/I/20 Disetujui oleh : Analis Pengelolaan Keus	024 tangga	il 10 Januar		eh :
NIP 199	Tasya Lianmi Ginanjar Dian Raharjo Tasya Lianmi NIP 199506242019022011 NIP 198411232009011007 NIP 199506242019022011 Tanggal: 31 Desember 2023 Tanggal: 31 Desember 2023 Tanggal: 31 Desember 2023						

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon Satuan No. Dol Tangga	I Kerja kumen I Anggaran	ra/Lembaga : : : : :	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil N 021/2023 31 Desember 2023 2023 Jurnal Penyesuaian	unaan Apa		
KATEG	ORI JURNAL	PENYESUAIAN:				
	Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panjan	g
	Pendapata	n Yang Masih Hai	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap,	/Aset Lainnya
	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pende	k
✓	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihan	Piutang			Transfer Keluar	
	Penghapus	an Piutang			Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Aloka	asi APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerima	an		Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengeluar	an		Uang Muka Belanja	
	Persediaar	1			Perolehan Aset	
	Koreksi An	tar Beban			Koreksi Piutang/Utang	S.
] Pendapata	n Selisih Kurs Yan	g Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
	Beban Selis	sih Kurs Yang Belu	ım Terealisasi		Penyesuaian Beban Pe	egawai
ILIRNAI	L PENYESUA	MAN ·				
NO	D/K		RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Langgana	n Telepon		255.966	
	К	Belanja Barang y	ang Masih Harus Dibayar			255.966
	<u> </u>					
Uraian	:					
Jurnal P	embalik ata	as Biaya Langgana	n Telepon yang Masih Ha	rus Dibaya	ar pemakaian Bulan De	sember 2023
Dibuat	oleh •		Disetujui oleh :		Direkam ol	ah :
	Akuntansi		Analis Pengelolaan Kejia	ngan APB		
lh	~				Ihr!	, J
Tasya Li		022011	Ginanjar Dian Raharjo	07	Tasya Liani	
TOWN TO THE PROPERTY.	506242019 I : 31 Desem		NIP 1984112320090110 Tanggal : 31 Desember 2			5242019022011 1 Desember 2023

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon I Satuan No. Dol Tangga	Kerja Kumen I Anggaran	ra/Lembaga : : : : : :	Kementerian Pendaya Kementerian Pendaya Komisi Aparatur Sipil N 022/2023 31 Desember 2023 2023 Jurnal Penyesuaian	gunaan Ap	700	
KATEGO	ORI JURNAL	PENYESUAIAN :				
	Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panja	ang
	Pendapata	n Yang Masih Har	us Diterima		Pelepasan Aset Teta	p/Aset Lainnya
✓	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pend	lek
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihan	Piutang			Transfer Keluar	
	Penghapus	san Piutang			Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Alo	kasi APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerima	an		Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengeluar	an		Uang Muka Belanja	
	Persediaar	ı			Perolehan Aset	
	Koreksi An	tar Beban			Koreksi Piutang/Uta	ng
	Pendapata	n Selisih Kurs Yan	g Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
	Beban Seli	sih Kurs Yang Belu	ım Terealisasi		Penyesuaian Beban	Pegawai
	•			i.	-	
NO	D/K		RAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Dibayar D	imuka		21.735.54	4
	к	Beban Pemeliha	raan Peralatan dan Mesi	n Lainnya		21.735.544
Uraian						
		tas koreksi tamb iku 28/04/2023 s.	사용하는 그런 사용하게 되었다. 그런 경기를 가게 보고 하는 것이 되었다. 	ika atas Pe	engadaan Lisensi For	tigate - kantor SMESCO
dengan	mosa sene	20, 0 1, 2023 31				
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :		Direkam	oleh :
Petugas	s Akuntansi		Analis Rengelolaan Keu	iangan APE	BN Muda Operator	r SAKTI
lh	<u>"</u>				ly	1
Tasya L NIP 199	<u>ianmi</u> 9506242019	0022011	Ginanjar Dian Raharjo NIP 198411232009011	007	<u>Tasya Lia</u> NIP 1995	<u>inmi</u> 506242019022011
	l : 31 Desen	Salverana varia	Tanggal: 31 Desember	2023	Tanggal :	: 31 Desember 2023

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	1	
Eselon Satuan No. Do Tangga	l Kerja kumen al Anggaran	ra/Lembaga	Kementerian Pendayag Kementerian Pendayag Komisi Aparatur Sipil N 023/2023 31 Desember 2023 2023	unaan Ap			
KATEG	ORI JURNAI	PENYESUAIAN :					
	Pendapata	n Diterima Di Μι	ıka		Piutang Ja	ngka Panjang	3
	Pendapata	nn Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasan	Aset Tetap/	Aset Lainnya
_	Belanja Di	bayar Di Muka]Piutang Ja	ngka Pendek	
	Belanja Ya	ng Masih Harus [Dibayar		Transfer N	1asuk	
	Penyisihar	Piutang			Transfer K	eluar	
	Penghapus	san Piutang			Koreksi Be	ban Aset	
	Penyusuta	n Aset			_ Pendapata	n dari Aloka:	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerima	an		- Kas Lainny		
	Kas di Ben	dahara Pengelua	ran		- Uang Muk	a Belanja	
	Persediaar	1			_ Perolehan	Aset	
	Koreksi An	tar Beban			Koreksi Pit	itang/Utang	
	_ Pendapata	n Selisih Kurs Yar	ng Belum Terealisasi		Hibah Lan	gsung	
	_	sih Kurs Yang Bel			-	an Beban Pe	gawai
	-	= = =					
NO	D/K		IRAIAN NAMA AKUN		RUPIA	H DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Dibayar I				21.551.345	
	К	Beban Pemeliha	raan Peralatan dan Mesin	Lainnya			21.551.345
Uraian							
Affiliation assume		tas koreksi tamb iku 27/04/2023 s	ah Beban Dibayar Dimul	ka atas Pe	engadaan L	isensi Fortiga	ate - kantor Cipinang
dengan	i masa bene	IKU 2770472023 3	2770472024				
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :			Direkam ole	eh:
Petuga:	s Akuntansi		Analis Pengelolaan Keua	ingan APB	N Muda	Operator SA	AKTI
h						Jhy"	
Tasya L		022014	Ginanjar Dian Raharjo	07		Tasya Lianm	
National Contractor	9506242019 I : 31 Desen		NIP 1984112320090110 Tanggal : 31 Desember 2				242019022011 . Desember 2023

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon I Satuan No. Dok Tanggal	Kerja kumen Anggaran		 Kementerian Pendaya Kementerian Pendaya Komisi Aparatur Sipil N 024/2023 31 Desember 2023 2023 Jurnal Penyesuaian 	gunaan Apa	T	
KATEGO	ORI JURNAI	. PENYESUAIAN :				
	Pendapata	n Diterima Di Mu	uka		Piutang Jangka Panjan	g
	Pendapata	n Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap/	Aset Lainnya
V	Belanja Di	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pendel	<
	Belanja Ya	ng Masih Harus [Dibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihar	Piutang			Transfer Keluar	
	Penghapu	san Piutang			Koreksi Beban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerima	aan		Kas Lainnya di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengelua	ran		Uang Muka Belanja	
	Persediaar	n			Perolehan Aset	
	Koreksi Ar	itar Beban			Koreksi Piutang/Utang	
	Pendapata	an Selisih Kurs Ya	ng Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
	•	sih Kurs Yang Bel			Penyesuaian Beban Pe	gawai
the second secon	•			is like and a second		
NO	D/K		JRAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Dibayar			61.887.305	nor an initial
	1075				SALVONOS SENTENCIA DE LA SENTE	
	к	Beban Pemeliha	araan Peralatan dan Mesi	n Lainnya		61.887.305
Uraian						
			ah Beban Dibayar Dimuk	a atas Peng	adaan Lisensi Fortigate	e - kantor MT Haryono
dengan	masa bena	aku 23/05/2023 s	.a. 25/05/2024			
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :		Direkam ol	leh :
Petugas	s Akuntansi	i	Analis Pengelolaan Keu	iangan APB	N Muda Operator S	AKTI
th					line	, J
Tasya L			Ginanjar Dian Raharjo		Tasya Lian	
	9506242019 I : 31 Deser		NIP 198411232009011 Tanggal: 31 Desember			6242019022011 1 Desember 2023

		FOR	RMULIR MEMO PI	NYE	SUAIAI	V	
Eselon Satuan No. Do Tangga	I Kerja okumen al Anggaran	: Ko : Ko : O2 : 3:	ementerian Pendayaguna ementerian Pendayaguna omisi Aparatur Sipil Nega 25/2023 1 Desember 2023 023 urnal Penyesuaian	an Ap			
KATEG	ORI JURNAI	. PENYESUAIAN :					
	Pendapata	n Diterima Di Muka			Piutang Ja	ngka Panjan	g
	Pendapata	n Yang Masih Harus	Diterima		Pelepasar	Aset Tetap/	Aset Lainnya
V	Belanja Dil	payar Di Muka	[Piutang Ja	ngka Pendek	
	Belanja Ya	ng Masih Harus Diba	yar		Transfer N	Лasuk	
	Penyisihar	Piutang	[Transfer k	(eluar	
	Penghapu	san Piutang			Koreksi Be	eban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapat	an dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerimaan			Kas Lainny	/a di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengeluaran			Uang Mul	a Belanja	
	Persediaar	1			Perolehar	Aset	
	Koreksi An	tar Beban			Koreksi Pi	utang/Utang	
	Pendapata	n Selisih Kurs Yang B	elum Terealisasi		Hibah Lan	gsung	
	Beban Seli	sih Kurs Yang Belum	Terealisasi		Penyesua	an Beban Pe	gawai
HIDNA	L PENYESU/	MAN .					
NO	D/K		AN NAMA AKUN		RUPIA	H DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Dibayar Dimu	ıka			2.145.797	
	К	Beban Pemeliharaar	n Peralatan dan Mesin Lai	nnya			2.145.797
Uraian	•						
Jurnal	Pembalik at	as koreksi tambah B 6/2023 s.d. 17/06/20	eban Dibayar Dimuka ata 24	s Pen	gadaan Lise	ensi Comodo	SSL Wildcard dengan
Tasya L	s Akuntansi	Ar <u>Gi</u>	setujui oleh : nalis Pengelolaan Keuanga namar Dian Naharjo P 198411232009011007	n APB	N Muda	Direkam ole Operator SA Tasya Liann	AKTI
Tangga	l : 31 Desen	nber 2023 Ta	nggal: 31 Desember 202	3		Tanggal: 31	Desember 2023

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAI	1	
Eselon I Satuan No. Dol Tanggal	Kerja Kumen I Anggaran	ra/Lembaga : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Kementerian Pendaya Kementerian Pendaya Komisi Aparatur Sipil f 026/2023 31 Desember 2023 2023 Jurnal Penyesuaian	gunaan Apa			
KATEGO	ORI JURNAL	. PENYESUAIAN :					
	Pendapata	n Diterima Di Mu	ka		Piutang Ja	ngka Panjang	3
	Pendapata	n Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasan	Aset Tetap/	Aset Lainnya
✓	Belanja Dil	bayar Di Muka			Piutang Ja	ngka Pendek	
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer N	Masuk	
	Penyisihan	Piutang			Transfer K	eluar	
	Penghapu	san Piutang			Koreksi Be	ban Aset	
	Penyusuta	n Aset			Pendapata	an dari Aloka	si APBN-BLU
	Kas Di Ben	dahara Penerima	an		Kas Lainny	a di BLU	
	Kas di Ben	dahara Pengeluar	an		Uang Muk	a Belanja	
	Persediaar				Perolehan	Aset	
	Koreksi An					utang/Utang	
	JANUARIS AND		g Belum Terealisasi		Hibah Lan	2 10 10 10 10 10 10 10 1	
		sih Kurs Yang Beli	21			an Beban Pe	gawai
	Joesan sen	siir kars rang sek	in rerealisasi]		5
	L PENYESU/	1	DATAN SIASAA AKUSI		DUDIA	H DEBET	RUPIAH KREDIT
NO 1	D/K D	Beban Dibayar D	RAIAN NAMA AKUN		KUPIA	4.397.260	KOPIAH KREDIT
1	"	Deball Dibayar c	illiuka			4.557.200	
	К	Beban Pemeliha	raan Peralatan dan Mesi	n Lainnya			4.397.260
Uraian							
The second second second		tas koreksi tamba 1/2023 s.d. 17/11	h Beban Dibayar Dimuk	ka atas Pen	gadaan Lis	ensi Adobe C	Creative Cloud dengan
masa D	eriaku 17/1	.1/2025 5.0. 1//1.	1/2024				
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :			Direkam ole	eh :
Petuga:	s Akuntansi		Analis Pengelolaan Kei	uangan APB	N Muda	Operator SA	AKTI
h						Ihr!	!
10000 00000	<u>ianmi</u> 9506242019 I : 31 Deser		Ginanjar Dian Raharjo NIP 198411232009011 Tanggal : 31 Desember	.007			<u>ni</u> 5242019022011 1 Desember 2023

		F	ORMULIR MEMO	PENYE	SUAIAN	
Eselon I Satuan No. Dok Tanggal	Kerja Kumen I Anggaran	; ; ;	Kementerian Pendaya Kementerian Pendaya Komisi Aparatur Sipil N 027/2023 31 Desember 2023 2023 Jurnal Penyesuaian	gunaan Apa		
KATEGO	ORI JURNA	L PENYESUAIAN :				
	Pendapata	an Diterima Di Mu	ka		Piutang Jangka Panjar	ng
	Pendapata	an Yang Masih Ha	rus Diterima		Pelepasan Aset Tetap	/Aset Lainnya
1	Belanja Di	bayar Di Muka			Piutang Jangka Pende	k
	Belanja Ya	ng Masih Harus D	ibayar		Transfer Masuk	
	Penyisihar	n Piutang			Transfer Keluar	
	Penghapu	san Piutang			Koreksi Beban Aset	
]Penyusuta	n Aset			Pendapatan dari Alok	asi APBN-BLU
	Kas Di Ber	ndahara Penerima	an		Kas Lainnya di BLU	
]Kas di Ben	dahara Pengeluar	ran		Uang Muka Belanja	
	Persediaa	n			Perolehan Aset	
	Koreksi Ar	ntar Beban			Koreksi Piutang/Utan	S
] Pendapata	an Selisih Kurs Yar	ng Belum Terealisasi		Hibah Langsung	
	Beban Sel	isih Kurs Yang Beli	um Terealisasi		Penyesuaian Beban P	egawai
ΠΙΡΝΔΙ	L PENYESU	ΔΙΔΝ ·				
NO	D/K	1	IRAIAN NAMA AKUN		RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Beban Dibayar D	Dimuka		6.509.589	
						00.1000.000.000.000.000
	К	Beban Pemeliha	raan Peralatan dan Mesi	n Lainnya		6.509.589
Barrier Control	Pembalik a		h Beban Dibayar Dimuka	a atas Peng	adaan Lisensi Microso	ft 365 All Apps dengan
masa D	eriaku 17/l	07/2023 s.d. 17/0	1/2024			
Dibuat	oleh :		Disetujui oleh :		Direkam o	leh :
Petugas	s Akuntans	İ	Analis Pengelolaan Keu	angan APB	N Muda Operator	SAKTI
h					lh	// -]
Tasya L	ianmi		c: (c: a)			
	950624201		Ginamar Dian Raharjo NIP 198411232009011	007	Tasya Lian	<u>ımı</u> 6242019022011

				FORMULIR MEMO PENYESUA	AN				
Kement	erian Neg	ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	dan Reformasi Bir	rokrasi			
Eselon			1	*1					
Wilayah	1			*					
Satuan	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega	ara (427950)				
lo. Dok	umen		:	03/KU.02.02/2025	26.				
anggal			:	31 December 2024					
ahun A	nggaran		:	2024					
(eteran	gan		:	Pengakuan Piutang Lainnya yang ditagihkan ke Kementerian PANRB (poin 3.D) (simulasi jurnal	pada Pihak Ketiga no.2)	sesuai LHR Inspek	torat		
ategor	i Jurnal I	Penyesuaian							
	Penda	apatan Diterim	a Di N	Muka	Koreksi Anta	r Beban			
	Penda	apatan yang M	asih I	Harus Diterima	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisa				
	Belan	ja Dibayar Din	nuka		Beban Selisil	h Kurs Belum Terea	lisasi		
	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar	Pembentukai	n Piutang Jangka Pa	anjang		
	Penyi	sihan Piutang ⁻	Tidak	Tertagih Pembentukan Piutang Jang			endek		
	Penyu	sutan dan Am	ortisa	si Transfer Masuk					
	Perse	diaan			Transfer Kelu	ar			
	Uang	Muka Belanja			Reklasifikasi	Neraca			
	Utang	Kelebihan Per	mbaya	aran Pendapatan v	Koreksi				
	Pemb	entukan/Korek	si/rek	dasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	115212	Piuta	ang Lainnya	24,211,302				
	К	391119		Koreksi Lainnya		24,211,302			
Dibuat o	oleł : Asn	391119 a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 2024	Direkam oleh Tanggal	24,211,302 : Asna Veronika H : 31 Desember 20			

kia

AR:

ener

				FORMULIR MEMO PI	ENYESUAI	AN		
Kement	erian Neg	ara/Lembaga		Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara d	an Reformaci Bir	okraci	
Eselon I				-	rutui Negala u	an Kelonilasi bili	OKIASI	
Wilayah	i,			-				
Satuan I	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	a (427950)		
No. Dok	umen		;	04/KU.02.02/2025				
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun A	nggaran		:	2024				
Keteran	gan		:	Koreksi nilai Piutang Lainnya yang	merupakan ha	asil TPKN dan dita	agihkan kepada	Pegawai Non
Kategor	i Jurnal f	Penyesuaian		ASN Bukan Bendahara sesuai LHF	Inspektorat Ke	ementerian PANR	B (3.C.3) (simula	asi jurnal no.3)
	Penda	apatan Diterim	a Di N	Лuka		Koreksi Antai	r Beban	
	Penda	apatan yang M	asih H	larus Diterima		1	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi
	60	ja Dibayar Dim					n Kurs Belum Ter	
	Belan	ja yang Masih	Harus	s Dibayar		,	n Piutang Jangka	
	Penvi	sihan Piutang 1	Tidak	Tertagih			n Piutang Jangka	
		ısutan dan Amo				Transfer Mas		rendek
	2	diaan	J1 (13 u .					
	u seedeel K	50505W0				Transfer Kelu		
		Muka Belanja				Reklasifikasi	Neraca	
				ran Pendapatan	v	Koreksi		
	Pemb	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	391119	Korel	ksi Lainnya		68,189,852		
	К	115212		Piutang Lainnya			68,189,852	
Dibuat o		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember :		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				FORMULIR MEMO PE	NYESUAIA	٨N		
Kemente	erian Neg	ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	mtur Nogoro d	D-f ' D'		
Eselon I		,		-	iatui Negala u	an Kelormasi Bir	okrasi	
Wilayah								
Satuan k			18	Menteri Negara Pendayagunaan A	nametur Name	- (427050)		
No. Dok				05/KU.02.02/2025	paratur Negari	a (42/950)		
Tanggal				31 December 2024				
	nggaran			2024				
Keterang			:	Pengakuan Piutang TGR sesuai LH no.4)	R Inspektorat	Kementerian PAN	NRB (3.C.3) (simu	ılasi jurnal
Kategor	i Jurnal P	Penyesuaian		110.14)				
	Penda	patan Diterim	a Di N	Лиka		Koreksi Antar	r Beban	
	Penda	patan yang M	asih F	larus Diterima		Pendapatan S	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi
	Belan	ja Dibayar Din	nuka			Beban Selisih	n Kurs Belum Ter	ealisasi
	Belan	ja yang Masih	Harus Dibayar			Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyis	sihan Piutang ⁻	Tidak	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek
	Belanja yang M Penyisihan Piuta Penyusutan dan			si		Transfer Mas	uk	
	Perse	diaan				Transfer Keluar		
	Uang	Muka Belanja				Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	ran Pendapatan		Koreksi		
v	Pembe	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	152111	Piuta	ng TP/TGR		68,189,852		
	K	425791		Pendapatan Penyelesaian TP/	rgr .		68,189,852	
Dibuat o Tanggal		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaai : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				FORMULIR MEMO PE	NYESUAI	AN			
Kemente	rian Neg	ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Ap	aratur Nogara d	lo = D = f = 1 D1			
Eselon I		,,		-	aratur Negara 0	ian Kelormasi Bir	okrasi		
Wilayah									
Satuan Ke	eria			Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Nogar	m /4270F0\			
No. Doku				Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) 06/KU.02.02/2025					
Tanggal				31 December 2024					
Tahun An	ggaran		:	2024					
Keterang				Pembatalan pengakuan Piutang I Inspektorat Kementerian PANRB	Lainnya, telah d	iyakini kebenara	nnya oleh TPKN s	esuai LHR	
Kategori	Jurnal F	Penyesuaian		inspectoral terrenterial FANNS	(4.b) (Simulasi .	iumai 5)			
	Penda	patan Diterim	a Di N	Иuka		Koreksi Antai	r Beban		
	Penda	apatan yang M	asih H	larus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belur	n Terealisasi	
	Belan	ja Dibayar Din	nuka			Beban Selisil	h Kurs Belum Tere	ealisasi	
	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
	Penyi	sihan Piutang	Tidak	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek	
	Penyu	sutan dan Am	ortisa	si		Transfer Mas	uk		
	Perse	diaan				Transfer Kelu	ar		
	Uang	Muka Belanja		Reklasifikasi Neraca			Neraca		
	Utang	Kelebihan Per	mbaya	ıran Pendapatan		Koreksi			
v	Pemb	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	391119	Kore	ksi Lainnya		951,187,827			
	К	115212		Piutang Lainnya			951,187,827		
		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safa Tanggal : 31 Desember		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember		

				FORMULIR MEMO PI	ENYESUAL	AN				
Kement	erian Neg	ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Ap	aratur Negara (dan Reformasi Bir	rokrasi			
Eselon I	É		:							
Wilayah	1		:							
Satuan I	Kerja			Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)						
No. Dok	umen		:	07/KU.02.02/2025	10 ST	a = 52				
Tanggal			:	31 December 2024						
Tahun A	nggaran		:	2024						
Keteran	gan		:	Settlement penyetoran oleh debi	tur (Simulasi ju	rnal 6b)				
Kategor	i Jurnal F	Penyesuaian								
	Penda	apatan Diterim	a Di N	Muka		Koreksi Anta	r Beban			
	Penda	apatan yang M	asih I	Harus Diterima		Pendapatan	Selisih Kurs Belu	m Terealisas		
	Belan	ja Dibayar Din	nuka			Beban Selisi	n Kurs Belum Ter	ealisasi		
	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentuka	n Piutang Jangka	Panjang		
	Penyi	sihan Piutang	Tidak	Tertagih		Pembentukai	n Piutang Jangka	Pendek		
	Penyu	sutan dan Am	ortisa	si		Transfer Mas	uk			
	Perse	diaan				Transfer Kelu	ar			
	Uang	Muka Belanja				Reklasifikasi Neraca				
	Utang	Kelebihan Per	mbaya	aran Pendapatan	Koreksi					
v	Pemb	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang						
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	425791	Penc	lapatan Penyelesaian TP/TGR		68,189,852				
	К	152111		Piutang TP/TGR			68,189,852			
Dibuat o		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safa Tanggal : 31 Desember		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember			

				FORMULIR MEMO PE	NYESUAI	AN		
Kemente	rian Neg	gara/Lembaga	*	Kementerian Pendayagunaan Apa	aratur Negara d	lan Reformasi Bir	rokrasi	
Eselon I			1	102 21			ONIGGI	
Wilayah								
Satuan K	erja		8	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	ra (427950)		
No. Doku	ımen		:	08/KU.02.02/2025		ABAT Brown and Art and		
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun Ar	nggaran		•	2024				
Keterang	an		:	Settlement penyetoran oleh debit	tur (Simulasi jur	rnal 7b)		
Kategori	Jurnal F	Penyesuaian						
	Penda	apatan Diterima	a Di N	Лuka		Koreksi Antar	r Beban	
	Penda	apatan yang Ma	asih F	larus Diterima		Pendapatan !	Selisih Kurs Belu	m Terealisas
	Belan	ija Dibayar Dim	ıuka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	Belanja yang Masih			s Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyisihan Piutang			Tertagih			n Piutang Jangka	
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Mas		A Transfer
	Perse	diaan				Transfer Kelu		
	Uang	Muka Belanja				Reklasifikasi	127.20	
\equiv		VIN TO SUBSTANCE TO SUBSTANCE	nhava	ıran Pendapatan	V	Koreksi	INEIACA	
	n. comme			lasifikasi Piutang	V	Kolekzi		
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	425912	pene	rimaan kembali belanja barang TA	YL	22,775,417		
	K	115212		Piutang Lainnya			22,775,417	
Dibuat ol		a Veronika Halo Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember 2	manager and a second	Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				FORMULIR MEMO P	ENYESUAL	AN		
Kement	erian Neg	gara/Lembaga	1	Kementerian Pendayagunaan Ap	aratur Negara d	an Reformaci Bir	rokrasi	
Eselon I					area regula c	on neronnasi bii	OKIGSI	
Wilayah	i		:					
Satuan I	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	a (427950)		
No. Dok	umen			09/KU.02.02/2025		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun A	nggaran		:	2024				
Keteranį	gan		:	Settlement penyetoran oleh debi	tur (Simulasi ju	rnal 8b)		
Kategor	i Jurnal I	Penyesuaian			-5	W.		
	Penda	apatan Diterim	a Di N	Лиka		Koreksi Anta	r Beban	
	Penda	apatan yang M	asih E	Harus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belum Terealis	
	Belan	ja Dibayar Din	nuka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukai	n Piutang Jangka Panjang	
	Penyi	sihan Piutang 1	Tidak	Tertagih] Pembentukar	n Piutang Jangka Pendek	
	Penyu	isutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Mas	uk	
	Perse	diaan				Transfer Kelu	ar	
	Uang	Muka Belanja				Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	aran Pendapatan	v	Koreksi		
	Pemb	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	425912	pene	rimaan kembali belanja barang T	AYL	2,297,295		
	К	115212		Piutang Lainnya			2,297,295	
Dibuat o Tanggal		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safa Tanggal : 31 Desember	77.54	Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika Haloho : 31 Desember 2024	
	H	\$0.		AS'			gna	

			FORMULIR MEN	MO PENYESUAIAN		
ementer	ian Negar	a/Lembaga	: Kementerian Pendayagunaa	n Aparatur Negara dan Refor	masi Birokrasi	
selon I			: -			
Vilayah			: -			
atuan Ke	erja		: Menteri Negara Pendayagu	naan Aparatur Negara (42795	60)	
lo. Doku	men		: 10/KU.02.02/2025			
anggal			: 31 December 2024			
ahun An	ggaran		: 2024			
(eterang	an		: penyisihan piutang			
Kategori	Jurnal Pe	nyesuaian				
	Pendag	atan Diterima	Di Muka		Koreksi Antar	Beban
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima					elisih Kurs Belum Tere
	Belanja Dibayar Dimuka					Kurs Belum Terealisas
	Belani	a vang Masih	Harus Dibayar		Pembentukan	Piutang Jangka Panja
v		han Piutang T			Pembentukan	Piutang Jangka Pende
		utan dan Amo			Transfer Mas	uk
			01 (15 (15)		Transfer Kelu	
	Persec				Reklasifikasi	
		Vluka Belanja				Neraca
	Utang	Kelebihan Per	mbayaran Pendapatan	-01	Koreksi	
	Pembe	entukan/Korek	si/reklasifikasi Piutang			
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nan	na Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidal	c Tertagih - Piutang Lainnya	2,438,516	
	К	116212	Penyisihan Piutang Tid	ak Tertagih - Piutang Lainnya		2,438,516

Dibuat oleh : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh Tanggal : 31 Desember 2024

: M. Ilham Safaat

Tanggal

: 31 Desember 2024

31 Desember 2024 Tanggal

				FORMULIR MEMO PE	NYESUAI	AN			
Kemente	erian Neg	gara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	aratur Negara c	lan Reformasi Bir	robraci		
Eselon I			:			an nerormasi bii	OKIGSI		
Wilayah			:						
Satuan k	(erja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	a (427950)			
No. Dok	umen		:	11/KU.02.02/2025	5 M. 100 10116 575 av 200 000 55 ave.	* (
Tanggal			:	31 December 2024					
Tahun A	nggaran		1	2024					
Keterang			:	Pengakuan Utang atas Progress P Nomor: 1303/PPK-BUK.I/PANRB/1	ekerjaan yang 12/2024 Tangga	belum dilaksana al 31/12/2024	akan pembayarar	n sesuai BAST	
Kategor		Penyesuaian							
	Penda	apatan Diterim	a Di N	Лuka		Koreksi Anta	r Beban		
	Penda	apatan yang Ma	asih H	larus Diterima] Pendapatan	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi	
	Belan	ja Dibayar Dim	nuka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belan	ja yang Masih	Harus	Dibayar] Pembentukai	n Piutang Jangka	Panjang	
	Penyisihan Piutang			Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek	
	Penyu	isutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Mas	uk		
	Perse	diaan				Transfer Kelu	ar		
	Uang	Muka Belanja			v	Reklasifikasi	Neraca		
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	ran Pendapatan		Koreksi			
	Pemb	entukan/Koreks	si/rek	lasifikasi Piutang		•			
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	218111	Utan	g yang Belum Diterima Tagihannya	1	210,983,000			
	K	212191		Utang kepada Pihak Ketiga	a		210,983,000		
		a Veronika Hale Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember		

			FORMULIR MEMO PE	NYESUAIA	AN			
Kementerian N	egara/Lembaga		Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara d	an Reformasi Bir	okrasi		
Eselon I		ž.						
Wilayah		1	2					
Satuan Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	a (427950)			
No. Dokumen		:	12/KU.02.02/2025	1	(12/330)			
Tanggal		:	31 December 2024					
Tahun Anggara	n		2024					
Keterangan		:	Pengakuan Utang atas Progress P Nomor: 1305/PPK-BUK.I/PANRB/1	ekerjaan yang 2/2024 Tangga	belum dilaksana	kan pembayarar	sesuai BAST	
Kategori Jurna	l Penyesuaian			,				
Per	dapatan Diterim	a Di N	∕luka		Koreksi Antar	Beban		
Per	dapatan yang M	lasih H	Harus Diterima		Pendapatan S	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi	
Bel	anja Dibayar Din	nuka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Bel	anja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang	
Per	yisihan Piutang	Tidak	Tertagih	į.	Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek	
Per	yusutan dan Am	ortisa	si		Transfer Mas	uk		
Per	ediaan				Transfer Kelu	ar		
Uar	g Muka Belanja			v	Reklasifikasi Neraca			
Uta	ng Kelebihan Pe	mbaya	aran Pendapatan		Koreksi			
Pen	nbentukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang					
No D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	8	
1 D	218111	Utar	g yang Belum Diterima Tagihannya		20,000,000			
К	212191		Utang kepada Pihak Ketig	a		20,000,000		
	na Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember		

				FORMULIR MEMO PE	NYESUAI	AN		
Kemente	erian Neg	ara/Lembaga		Kementerian Pendayagunaan Ap	aratur Negara o	lan Roformasi Die	ralina al	
Eselon I		3 0 15		-	orottor rvegara t	ian kelomasi bir	окгаѕі	
Wilayah	i		:					
Satuan I	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	a (427950)		
No. Dok	umen		:	13/KU.02.02/2025	,	- (.2.556)		
Tanggal				31 December 2024				
Tahun A	nggaran		:	2024				
Keterang			:	Pengakuan Utang atas Progress I Nomor: 1304/PPK-BUK.I/PANRB/	Pekerjaan yang 12/2024 Tangga	belum dilaksana al 31/12/2024	akan pembayarar	ı sesuai BAS
Kategor	i Jurnal F	Penyesuaian			_			
	Penda	ipatan Diterim	a Di N	Лuka		Koreksi Antai	r Beban	
	Penda	patan yang M	asih F	larus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belu	m Terealisa:
	Belan	ja Dibayar Dim	nuka			Beban Selisil	n Kurs Belum Ter	ealisasi
	Belan	ja yang Masih	Harus	Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyis	sihan Piutang T	Tidak '	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Mas	uk	
	Perse	diaan				Transfer Kelu	ıar	
	Uang	Muka Belanja			v	Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	iran Pendapatan		Koreksi		
	Pembe	entukan/Koreks	si/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utan	g yang Belum Diterima Tagihanny	a	38,370,000		
	К	212191		Utang kepada Pihak Ketig	a		38,370,000	
Dibuat o Tanggal		a Veronika Halo Desember 2024 V		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				FORMULIR MEMO PE	NYESUAI	AN		
Kemente	erian Neg	ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	aratur Negara d	an Reformasi Bir	rokrasi	
Eselon I			:	7.				
Wilayah			ž	ti.				
Satuan K	(erja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	a (427950)		
No. Dok	umen		\$	14/KU.02.02/2025	S. L. P. Paracion and P. Parac	50		
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun A	nggaran		2	2024				
Keterang		en e	:	Pengakuan Utang atas Progress F Nomor: 1306/BAST/BI.PANRB/12/	Pekerjaan yang /2024 Tanggal S	belum dilaksana 31/12/2024	ikan pembayarar	n sesuai BAST
Kategor	i Jurnal P	enyesuaian						
	Penda	patan Diterima	a Di N	Лuka		Koreksi Antar	r Beban	
	Penda	patan yang Ma	asih F	Harus Diterima		Pendapatan S	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi
	Belanj	a Dibayar Dim	iuka			Beban Selisih	n Kurs Belum Ter	ealisasi
	Belanj	a yang Masih	Harus	s Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyis	ihan Piutang T	'idak '	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek
	Penyus	sutan dan Amo	ortisas	si		Transfer Mas	uk	
	Persed	liaan				Transfer Kelu	ar	
	Uang N	Muka Belanja			v Reklasifikasi Neraca			
	Utang	Kelebihan Pen	nbaya	aran Pendapatan	Koreksi			
	Pembe	entukan/Koreks	i/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utan	g yang Belum Diterima Tagihannya	à	8,000,000		
	К	212191		Utang kepada Pihak Ketig	a		8,000,000	
Dibuat ol Tanggal		Veronika Halo esember 2024	30/2003	Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 2024		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				FORMULIR MEMO PEN	IYESUAIA	N.		
Kement	erian Neg	ara/Lembaga		Kementerian Pendayagunaan Apara	itur Negara d	an Raformari Riv	enten al	
Eselon	l .			-	icui Negara u	an Reformasi bir	OKIASI	
Wilayah	1		:					
Satuan	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Ap	aratur Negar	(427050)		
No. Dok	umen			15/KU.02.02/2025	aratai wegan	(427550)		
Tanggal				31 December 2024				
Tahun A	nggaran			2024				
Keteran	gan		ı	Pengakuan Utang atas Progress Pek Nomor: 1307/BAST/BI.PANRB/12/20	erjaan yang l 024 Tanggal 3	belum dilaksana	akan pembayarar	sesuai BAST
Kategor	ri Jurnal P	enyesuaian				12, 12, 102 1		
	Penda	patan Diterim	a Di N	1uka 📗		Koreksi Antai	r Beban	
	Penda	patan yang M	asih F	arus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi
	Belan	ja Dibayar Dim	nuka		Beban Selisih Kurs Belum Tere			ealisasi
	Belan	ja yang Masih	Harus	Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyis	ihan Piutang 1	Гidak	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si [Transfer Mas	uk	
	Persec	diaan				Transfer Kelu	ar	
	Uang	Muka Belanja			ν	Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	ran Pendapatan		Koreksi		
V	Pembe	entukan/Korek	si/rek	asifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utan	g yang Belum Diterima Tagihannya		10,000,000		
	К	212191		Utang kepada Pihak Ketiga			10,000,000	
Dibuat o		a Veronika Hali Pesember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 202	24	Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				NYESUAIA			
erian Neg	gara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	aratur Negara d	an Reformaci Bir	okrasi	
			-	natui Negala u	an neionnasi bir	окгаѕт	
		1					
Cerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negar	a (427950)		
umen		:	16/KU.02.02/2025		,		
		:	31 December 2024				
nggaran		:	2024				
gan		:	Pengakuan Utang atas Progress P Nomor: 0816/BAST-SDMA/PAN-RE	Pekerjaan yang B/12/2024 Tang	belum dilaksana gal 31/12/2024	kan pembayarar	n sesuai BAST
	5.1 (4.1 (4.1 1 0.1 (4.4 (4.4 (4.4 (4.4 (4.4 (4.4 (4.4 (4			N			
					Koreksi Antar	Beban	
Penda	ipatan yang Ma	asih H	larus Diterima		Pendapatan S	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi
Belan	ja Dibayar Dim	luka			Beban Selisih	n Kurs Belum Ter	ealisasi
			Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
Penyis	sihan Piutang T	idak i	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek
Penyu	sutan dan Amo	ortisas	și .		Transfer Mas	uk	
Perse	diaan				Transfer Kelu	ar	
Uang	Muka Belanja			v	Reklasifikasi	Neraca	
Utang	Kelebihan Pen	nbaya	ran Pendapatan		Koreksi		
Pembe	entukan/Koreks	i/rekl	asifikasi Piutang				
D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
D	218111	Utan	g yang Belum Diterima Tagihannya	1	2,747,338,800		
К	212191		Utang kepada Pihak Ketig	a		2,747,338,800	
					Direkam oleh Tanggal		
	derja Jumen Jumen Jumal F Penda Belan Belan Penyis Penyu Persec Uang Utang Pembo D/K D K	derja Jumen Inggaran Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Pendapatan yang Masih Belanja Dibayar Dim Belanja yang Masih Penyisihan Piutang Tapenyusutan dan Amore Persediaan Uang Muka Belanja Utang Kelebihan Perpembentukan/Koreks D/K Kode Akun D 218111 K 212191	derja : Jumen : Jumen : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di M Pendapatan yang Masih H Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Penyisihan Piutang Tidak delah Penyusutan dan Amortisas Persediaan Uang Muka Belanja Utang Kelebihan Pembaya Pembentukan/Koreksi/rekl D/K Kode Akun D 218111 Utan	iderja : Menteri Negara Pendayagunaan alamen : 16/KU.02.02/2025 : 31 December 2024 : Pengakuan Utang atas Progress Pomor: 0816/BAST-SDMA/PAN-Resi Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan yang Masih Harus Diterima Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Dibayar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyusutan dan Amortisasi Persediaan Uang Muka Belanja Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang D/K Kode Akun Uraian Nama Akun D 218111 Utang yang Belum Diterima Tagihannya K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga	i Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara umen : 16/KU.02.02/2025 : 31 December 2024 : 2024 : Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang Nomor: 0816/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 Tang i Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan yang Masih Harus Diterima Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Dibayar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyusutan dan Amortisasi Persediaan Uang Muka Belanja Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang D/K Kode Akun Uraian Nama Akun D 218111 Utang yang Belum Diterima Tagihannya K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga	ierja : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Jamen : 16/KU.02.02/2025 Jan : 16/KU.02.024 Jan : Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksana Nomor: 0816/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 Tanggal 31/12/2024 Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pembentukar Penyusutan dan Amortisasi Transfer Mas Persediaan Transfer Kelu Uang Muka Belanja v Reklasifikasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Koreksi Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang D/K Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet D 218111 Utang yang Belum Diterima Tagihannya 2,747,338,800 K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga	i Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) Jamen : 16/KU.02.02/2025 Jan December 2024 Jan : Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayarar Nomor: 0816/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 Tanggal 31/12/2024 Jan : Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayarar Nomor: 0816/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 Tanggal 31/12/2024 Jan : Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayarar Nomor: 0816/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 Tanggal 31/12/2024 Jan : Pengakuan Utang Pengakan Pendapatan Pendapatan Selisih Kurs Belum Pendapatan Selisih Kurs Belum Ten Belanja Dibayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka Belanja Utang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Penyusutan dan Amortisasi Pengusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Pengusutan dan Amortisasi Transfer Keluar Uang Muka Belanja v Reklasifikasi Neraca Koreksi Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang D/K Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet Rupiah Kredit D 218111 Utang yang Belum Diterima Tagihannya 2,747,338,800 R 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Direkam oleh : Asna Veronika

				FORMULIR MEMO PENYESUA	IAN		
Kemente	erian Neg	ara/Lembaga	1	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	dan Reformasi Bir	okrasi	
Eselon I			3				
Wilayah			3	(40			
Satuan k	Kerja		3	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega	ara (427950)		
No. Dok	umen			17/KU.02.02/2025			
Tanggal				31 December 2024			
Tahun A	nggaran		:	2024			
Keterang	gan		:	Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yan Nomor: 0820/BAST-SDMA/PAN-RB/12/2024 Tai	g belum dilaksana nggal 31/12/2024	akan pembayaran	sesuai BAS
Kategor	i Jurnal P	enyesuaian					
	Penda	patan Diterim	a Di N	Иuka	Koreksi Antai	r Beban	
	Penda	patan yang Ma	asih I	Harus Diterima	Pendapatan :	Selisih Kurs Belun	n Terealisas
	Belan	ja Dibayar Dim	nuka		Beban Selisil	h Kurs Belum Tere	alisasi
	Belan	ia yang Masih	Haru	s Dibayar	Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyis	ihan Piutang T	Γidak	Tertagih	Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si	Transfer Mas	suk	
	Perse	diaan			Transfer Kelu	ıar	
	Uang	Muka Belanja			Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	aran Pendapatan v	Koreksi		
	Pembe	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang			
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utar	ng yang Belum Diterima Tagihannya	28,571,400		
	К	212191		Utang kepada Pihak Ketiga		28,571,400	
Dibuat o Tanggal		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 2024	Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

Kin

181

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN			
		ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi		
Eselon I			:	•				
Wilayah	1		:	•				
Satuan I	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan A	Aparatur Negara (4279	50)		
No. Dok	umen		:	18/KU.02.02/2025				
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun A	nggaran		:	2024				
Keterang			;	Pengakuan Utang atas Progress Po 322/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 Ta	ekerjaan yang belum anggal 27/12/2024	dilaksanakan per	mbayaran sesuai	BAST Nomor:
Kategor	ri Jurnal P	Penyesuaian						
	Penda	patan Diterim	a Di N	Лuka		Koreksi Anta	r Beban	
	Penda	patan yang M	asih F	Harus Diterima] Pendapatan	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi
	Belan	ja Dibayar Dim	nuka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belan	ja yang Masih	Harus	s Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyis	ihan Piutang T	idak	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka	Pendek
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Mas	uk	
	Persec	diaan				Transfer Kelu	ar	
	Uang	Muka Belanja			v	Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	ıran Pendapatan		Koreksi		
	Pembe	entukan/Koreks	i/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Aku	n	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utan	g yang Belum Diterima Tagihannya		16,600,000		
	K	212191		Utang kepada Pihak Ke	etiga		16,600,000	
Dibuat o Tanggal		a Veronika Haldesember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaal Tanggal : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				The second second				
				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN			
Kemente	erian Neg	ara/Lembaga	;	Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi		
Eselon I						Thosa Briokiasi		
Wilayah			:	*				
Satuan k	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan A	Aparatur Negara (4279)	50)		
No. Dok	umen		:	19/KU.02.02/2025		mora f		
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun Ai	nggaran		:	2024				
Keterang	gan		:	Pengakuan Utang atas Progress Po 323/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 Ta	ekerjaan yang belum o anggal 27/12/2024	dilaksanakan per	mbayaran sesuai	BAST Nomor:
Kategor	i Jurnal P	enyesuaian						
	Penda	patan Diterim	a Di N	Muka		Koreksi Antai	r Beban	
	Penda	patan yang Ma	asih I	Harus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi
	Belan	ja Dibayar Dim	uka			Beban Selisil	n Kurs Belum Ter	ealisasi
	Belanj	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukar	n Piutang Jangka	Panjang
	Penyis	ihan Piutang T	idak	Tertagih			n Piutang Jangka	
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Mas		, chack
	Persec			ā)		Transfer Kelu	0-27	
	March Control					V 1000 400 V		
	(50)	Muka Belanja			V	Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	aran Pendapatan		Koreksi		
	Pembe	entukan/Koreks	i/rek	dasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Aku	n	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utar	ng yang Belum Diterima Tagihannya		16,600,000		
	К	212191		Utang kepada Pihak Ke	etiga		16,600,000	
Dibuat o Tanggal		a Veronika Hali Jesember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember	

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN			
Kemente	erian Nega	ra/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Ap	paratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi		
Eselon I				-	raideal regard dan kero	imasi bilakiasi		
Wilayah	E		:	Table 1				
Satuan I	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negara (4279	50)		
No. Dok	umen		:	20/KU.02.02/2025		Té		
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun A	nggaran			2024				
Keterang	gan		:	Pengakuan Utang atas Progress dilaksanakan pembayaran sesua	Pekerjaan yang belum	T/DDV D II DANDE	2/2024 Tanagal 28/12/2024	
Kategor	i Jurnal Pe	enyesuaian		and and the in period yaran sesue	II DAST NOTIOL 324/BAS	I/PPK.D.II.PANKE	3/2024 Tanggal 28/12/2024	
	Pendap	atan Diterim	a Di I	Muka		Koreksi Anta	r Beban	
	Pendap	atan yang M	asih l	Harus Diterima		Pendapatan	Selisih Kurs Belum Terealisasi	
	Belanja	a Dibayar Dim	iuka			Beban Selisii	h Kurs Belum Terealisasi	
	Belanja	a yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang		
	Penyisi	han Piutang 1	idak	Tertagih		Pembentukan Piutang Jangka Pendek		
	Penyus	utan dan Amo	ortisa	si		Transfer Masuk		
	Persed	iaan				Transfer Kelu	ıar	
	Uang N	Лuka Belanja			V	Reklasifikasi	Neraca	
	Utang	Kelebihan Per	nbay	aran Pendapatan		Koreksi		
				klasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Ak	un	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utar	ng yang Belum Diterima Tagihanm	/a	16,600,000	• 1000-017-017-017-017-0	
	К	212191		Utang kepada Pihak	on the	,,	16,600,000	
					111111111111111111111111111111111111111		The second secon	
		Veronika Hal		Disetujui oleh : M. Ilham Safa		Direkam oleh	: Asna Veronika Haloho	
Tanggal	: 31 De	esember 2024	E.	Tanggal : 31 Desember	2024	Tanggal	: 31 Desember 2024	
	1			M				
	n/la			Att	>		lot	
	K	1		A The second sec			M.	
	13						V	
	U .						U	

				FORMULIR MEMO	PENYESHAIAN					
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LINILSOAIAN					
Kement	terian Neg	gara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	aratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi				
Eselon	1		\$	*						
Wilayal	n		:	*						
Satuan	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negara (4279	50)				
No. Dok	umen		:	21/KU.02.02/2025						
Tanggal			*	31 December 2024						
Tahun A	nggaran		1	2024						
Keteran			:	Pengakuan Utang atas Progress F 331/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 T	Pekerjaan yang belum anggal 31/12/2024	dilaksanakan per	mbayaran sesuai	BAST Nomor		
Katego	ri Jurnal I	Penyesuaian								
	Penda	apatan Diterim	a Di M	Иuka		Koreksi Anta	r Beban			
	Penda	apatan yang M	asih I	Harus Diterima] Pendapatan	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi		
	Belan	ija Dibayar Din	nuka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
	Belan	ija yang Masih	Haru	ıs Dibayar Pembentukan Piutang Jangk			n Piutang Jangka	Panjang		
	Penyi	sihan Piutang [*]	Γidak	Tertagih Pembent			ikan Piutang Jangka Pendek			
	Penyu	isutan dan Am	ortisa	si		Transfer Mas	uk			
	Perse	diaan				Transfer Kelu	ıar			
	Uang	Muka Belanja			ν	Reklasifikasi Neraca				
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	ran Pendapatan		Koreksi				
	Pemb	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang	*					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Aku	ın	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	218111	Utan	g yang Belum Diterima Tagihannya	9	16,600,000				
	К	212191		Utang kepada Pihak K	etiga		16,600,000			
Dibuat o		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember			

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN				
					· Littlesonini				
Kemente	rian Neg	ara/Lembaga	;	Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi			
Eselon I			1	•					
Wilayah	Wilayah : -								
Satuan Kerja : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)									
No. Doku	ımen		:	22/KU.02.02/2025					
Tanggal			:	31 December 2024					
Tahun Ar	nggaran		:	2024					
Keterang	an		:	Pengakuan Utang atas Progress Pe 327/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 Ta	ekerjaan yang belum danggal 30/12/2024	dilaksanakan per	mbayaran sesuai	BAST Nomor:	
Kategori	Jurnal F	Penyesuaian			33				
	Penda	patan Diterim	a Di N	Muka		Koreksi Anta	r Beban		
	Penda	ipatan yang M	asih H	Harus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi	
	Belan	ja Dibayar Dim	iuka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
	Penyi	sihan Piutang T	idak	Tertagih	_	Pembentukan Piutang Jangka Pendek			
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Masuk			
	Perse	diaan				Transfer Keluar			
	Uang	Muka Belanja			V	Reklasifikasi	Neraca		
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	aran Pendapatan		Koreksi			
	Pembe	entukan/Koreks	i/rek	lasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akur	n	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	8	
1	D	218111	Utan	ig yang Belum diterima Tagihannya		36,000,000			
	К	212191		Utang Kepada Pihak Ke	etiga		36,000,000		
Dibuat ol Tanggal		a Veronika Hali Desember 2024 (^	0.01000	Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember		

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN				
Kamanti	orian Noa	ara/Lembaga	722						
Eselon I		ara/ cembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apar	atur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi			
			:						
Wilayah			:						
Satuan I			4	Menteri Negara Pendayagunaan A	paratur Negara (4279)	50)			
No. Dok			:	23/KU.02.02/2025					
Tanggal			:	31 December 2024					
Tahun A	nggaran		:	2024					
Keterang			:	Pengakuan Utang atas Progress Pe 1807/BAST.I/D.IV/PANRB/12/2024	kerjaan yang belum Tanggal 27/12/2024	dilaksanakan per	mbayaran sesuai	BAST Nomor	
Kategor	i Jurnal F	Penyesuaian							
	Penda	patan Diterim	a Di N	Лuka		Koreksi Anta	r Beban		
	Penda	patan yang M	asih I	Harus Diterima		Pendapatan	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi	
	Belan	ja Dibayar Dim	uka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
	Penyis	sihan Piutang 1	idak	Tertagih	Pembentukan Piutang Jangka Pendek				
	Penyu	sutan dan Am	ortisa	si	Transfer Mas	uk			
	Perse	diaan		ı İ		Transfer Kelu	ar		
	Uang	Muka Belanja			V	Reklasifikasi	Neraca		
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	aran Pendapatan		Koreksi			
	Pembe	entukan/Korek	i/rek	lasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	ĺ	Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	218111	Utar	g yang Belum diterima Tagihannya		79,365,000			
	К	212191		Utang kepada pihak ke	tiga		79,365,000		
Dibuat o Tanggal		a Veronika Halo Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 20		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember		
	Age.	/					Gia		

				FORMULIR MEMO F	DENIVECTIATAN			
				TOMMOLIK MILIMO P	ENTESUAIAN			
Kemente	rian Neg	ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apara	atur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi		
Eselon I				70 mag 20 m				
Wilayah			:	÷				
Satuan K	erja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Ap	paratur Negara (4279)	50)		
No. Doku	ımen		:	24/KU.02.02/2025				
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun Ar	nggaran		:	2024				
Keterang	an		•	Pengakuan Utang atas Progress Pe 328/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 Tai	kerjaan yang belum onggal 30/12/2023	dilaksanakan per	nbayaran sesuai BAST Nomor	
Kategori	Jurnal P	Penyesuaian						
	Penda	patan Diterim	a Di N	Muka		Koreksi Antai	r Beban	
	Penda	apatan yang M	asih I	Harus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belum Terealisasi	
	Belan	ja Dibayar Dim	nuka			Beban Selisil	Kurs Belum Terealisasi	
	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang		
	Penyis	sihan Piutang 1	Γidak	Tertagih		Pembentukan Piutang Jangka Pendek		
	Penyu	sutan dan Am	ortisa	si		Transfer Masuk		
	Perse	diaan				Transfer Keluar		
	Uang	Muka Belanja		v		Reklasifikasi Neraca		
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	aran Pendapatan		Koreksi		
	Pembe	entukan/Korek	si/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utar	ng yang Belum diterima Tagihannya		53,400,000		
	K	212191		Utang kepada pihak ket	riga		53,400,000	
Dibuat ol Tanggal		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 20		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika Haloho : 31 Desember 2024	

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN			
Kemente	erian Nega	ra/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	aratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi		
Eselon I				.*	3-1-	That brokeds		
Wilayah			:					
Satuan K	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan	Aparatur Negara (4279	50)		
No. Dok	umen		:	25/KU.02.02/2025		235.60		
Tanggal			:	31 December 2024				
Tahun Ai	nggaran		:	2024				
Keterang	gan		:	Pengakuan Utang atas Progress F 1806/BAST.I/D/IV/PANR/12/2024	Pekerjaan yang belum Tanggal 27/12/2024	dilaksanakan per	mbayaran sesuai BAST Nomo	
Kategori	i Jurnal Pe	enyesuaian			,,			
	Pendap	atan Diterim	Di N	Лuka		Koreksi Anta	r Beban	
	Pendap	atan yang M	isih H	larus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belum Terealisas	
	Belanja	Dibayar Dim	uka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
Belanja yang Masih Harus Dibayar						Pembentukan Piutang Jangka Panjang		
	Penyisi	han Piutang 1	idak	Tertagih		Pembentukan Piutang Jangka Pendek		
	Penyus	utan dan Am	ortisa	si		Transfer Masuk		
	Persedi	aan				Transfer Kelu	ar	
	Uang N	Muka Belanja			v	Reklasifikasi	Neraca	
	Utang k	Kelebihan Per	nbaya	ran Pendapatan		Koreksi		
	Pember	ntukan/Korek	i/rek	lasifikasi Piutang		• 1000-00-00-00000		
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Aku	ın	Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	218111	Utar	g yang Belum diterima Tagihannya	1	78,310,500		
	К	212191		Utang kepada pihak k	etiga		78,310,500	
Dibuat ol Tanggal		Veronika Hali esember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember :		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika Haloho : 31 Desember 2024	

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I Wilayah Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen : 26/KU.02.02/2025 Tanggal : 31 December 2024 Tahun Anggaran Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran sesuai BAST Nomor: Keterangan 325/BAST/PPK.D.II.PANRB/2024 Tanggal 27/12/2024 Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Persediaan Transfer Keluar Uang Muka Belanja Reklasifikasi Neraca Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Koreksi Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet Rupiah Kredit No D/K 218111 112,100,000 1 D Utang yang Belum diterima Tagihannya 112,100,000 212191 Utang kepada pIhak ketiga : Asna Veronika Haloho Dibuat oleł : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Direkam oleh : 31 Desember 2024 : 31 Desember 2024 \: 31 Desember 2024 Tanggal Tanggal

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN					
Kemente	erian Neg	ara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi				
Eselon I			:	*						
Wilayah			:	•	•					
Satuan K	(erja		:	Menteri Negara Pendayagunaan A	paratur Negara (4279)	50)				
No. Doku	umen		:	27/KU.02.02/2025		SC 14.				
Tanggal			:	31 December 2024						
Tahun Ar	nggaran		:	2024						
Keterang	an		:	Pengakuan biaya Langganan Listri Pekayon pemakaian Bulan Desem	k yang Masih Harus D ber 2024 sesuai Nota	ibayar atas Gedi Tagihan Nomor A	ing Kemenpan RB GA/PUSAT/2025/-	dan 427950		
Kategori	i Jurnal P	enyesuaian								
	Penda	patan Diterima	Di N	Иuka		Koreksi Antai	r Beban			
	Penda	patan yang Ma	isih l	Harus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belun	n Terealisasi		
	Belan	ja Dibayar Dim	uka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
V	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang				
	Penyis	sihan Piutang T	idak	Tertagih		Pembentukar	n Piutang Jangka I	Pendek		
	Penyu	sutan dan Amo	rtisa	si	Transfer Mas	uk				
	Perse	diaan			Transfer Kelu	ar				
	Uang	Muka Belanja			Reklasifikasi Neraca					
	Utang	Kelebihan Per	nbaya	aran Pendapatan		Koreksi				
	Pemb	entukan/Koreks	i/rek	lasifikasi Piutang						
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Aku	n	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	522111	Bela	nja Langganan Listrik		249,438,591				
	К	212112		Utang kepada pihak ke	etiga		249,438,591			
Dibuat of Tanggal		a Veronika Halı Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaai Tanggal : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember 2			

				FORMULIR MEMO	PENYESUAIAN				
Kement	erian Neg	gara/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara dan Refo	rmasi Birokrasi			
Eselon I			:	-	and deli include	Thesi bhokiasi			
Wilayah	ì		;						
Satuan I	Kerja		:	Menteri Negara Pendayagunaan A	Aparatur Negara (4279)	50)			
No. Dok	umen		:	28/KU.02.02/2025		207			
Tanggal			:	31 December 2024					
Tahun A	nggaran		:	2024					
Keteran	gan		:	Pengakuan biaya Langganan Listri Desember 2024 sesuai Nota Tagih	ik yang Masih Harus D nan Nomor 82.JTN/01.2	ibayar atas Gedu 2025 Tanggal 6 J	ung Pekayon pem anuari 2025	akaian Bulan	
Kategor	i Jurnal F	Penyesuaian					4114011 2023		
	Penda	apatan Diterim	a Di I	Muka		Koreksi Anta	r Beban		
	Penda	apatan yang M	asih I	Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisas			
	Belan	ja Dibayar Dim	luka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
v	Belan	ja yang Masih	Haru	s Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
	Penyi	sihan Piutang T	idak	Tertagih	Pembentukan Piutang Jangka Pendek				
	Penyu	sutan dan Amo	ortisa	si		Transfer Mas			
	Perse	diaan			Transfer Keluar				
	Uang	Muka Belanja				Reklasifikasi	Neraca		
	Utang	Kelebihan Per	nbava	aran Pendapatan		Koreksi			
				klasifikasi Piutang		Koreksi			
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Aku	n	Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	522111	Bela	nja Langganan Listrik		18,427,270			
	К	212112		Utang kepada pihak ke	etiga		18,427,270		
Dibuat o Tanggal		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaa Tanggal : 31 Desember 2		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember		

			FORMULIR MEMO PE	NYESUAIAN					
Kemente	erian Neg	ara/Lembaga	. Verreit D. I.						
Eselon I		ara/Lembaga	: Kementerian Pendayagunaan Aparati	ur Negara dan Refor	masi Birokrasi				
			; -						
Wilayah : -									
Satuan I			: Menteri Negara Pendayagunaan Apa	ratur Negara (42795	(0)				
No. Dok			: 29/KU.02.02/2025						
Tanggal			: 31 December 2024						
Tahun A	nggaran		: 2024						
Keterang		D 125	Pengakuan biaya Langganan Telepon pemakaian Bulan Desember 2024 se	yang Masih Harus I suai Nota Tagihan N	Dibayar atas Ge Iomor 04202501	dung Kemenpan 0500427950000	RB 1 Tanggal 5		
Kategor	i Jurnal P	enyesuaian							
	Penda	patan Diterim	a Di Muka		Koreksi Antai	r Beban			
	Penda	patan yang Ma	asih Harus Diterima		Pendapatan :	Selisih Kurs Belu	m Terealisasi		
	Belan	ja Dibayar Dim	uka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
V	Belan	ja yang Masih	Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang				
	Penyis	ihan Piutang T	idak Tertagih	ertagih Pe			Pendek		
	Penyu	sutan dan Amo	ortisasi	nsi					
	Perse	diaan		Transfer Keluar					
	Uang	Muka Belanja					Reklasifikasi Neraca		
	Utang	Kelebihan Per	nbayaran Pendapatan		Koreksi				
	Pembe	entukan/Koreks	i/reklasifikasi Piutang						
No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	522111	Belanja Langganan Telepon		4,588,919				
	K	212112	Utang kepada pIhak ketig	а		4,588,919			
Dibuat o Tanggal		a Veronika Hali Desember 2024			Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika : 31 Desember			

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I Wilayah Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen 30/KU.02.02/2025 Tanggal 31 December 2024 Tahun Anggaran 2024 Keterangan Koreksi antar Beban persediaan, terdapat kesalahan kode barang persediaan meterai Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Persediaan Transfer Keluar Uang Muka Belanja Reklasifikasi Neraca Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Koreksi Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang Kode Akun Rupiah Debet No D/K Uraian Nama Akun Rupiah Kredit D 593111 Beban Persediaan Konsumsi 4,500,000 1 593121 Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges 4,500,000 : Asna Veronika Haloho Dibuat oleh: Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Direkam oleh : 31 Desember 2024 : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal Tanggal

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I Wilayah Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen 31/KU.02.02/2025 Tanggal 31 December 2024 Tahun Anggaran Keterangan Koreksi antar Beban persediaan, terdaoat kesalahan kode barang persediaan Klinik Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Persediaan Transfer Keluar Uang Muka Belanja Reklasifikasi Neraca Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Koreksi ٧ Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang Rupiah Debet Rupiah Kredit Kode Akun Uraian Nama Akun No D/K 209,124 593111 Beban Persediaan Konsumsi 1 D 209,124 K 593149 Beban PEersedian Lainnya : Asna Veronika Haloho Direkam oleh Dibuat oleh: Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : M. Ilham Safaat : 31 Desember 2024 : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I Wilayah Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen : 32/KU.02.02/2025 Tanggal : 31 December 2024 Tahun Anggaran 2024 Keterangan : Belanja Pegawai Uang Makan PPPK Desember 2024 yang dibayarkan di Januair 2025 Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Persediaan Transfer Keluar Uang Muka Belanja Reklasifikasi Neraca Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Koreksi

No	No D/K Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511628	Beban Uang Makan PPPK	4,441,000	
	К	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		4,441,000

Dibuat olel : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Direkam oleh : Asna Veronika Haloho Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024



Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I Wilayah Satuan Kerja Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen : 33/KU.02.02/2025 Tanggal 31 December 2024 Tahun Anggaran 2024 Keterangan : Koreksi atas pencatatan Aset Tetap Renovasi Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Transfer Keluar Persediaan Reklasifikasi Neraca Uang Muka Belanja Koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan v Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang

No	o D/K Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	41,192,100	
	К	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		41,192,100

Dibuat oleh : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : 31 Desember 2024 Tanggal

Tanggal

: M. Ilham Safaat

: 31 Desember 2024

Direkam oleh Tanggal

: Asna Veronika Haloho

: 31 Desember 2024

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I Wilayah Satuan Kerja : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen : 34/KU.02.02/2025 Tanggal 31 December 2024 Tahun Anggaran 2024 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja/Beban Uang Makan PNS Desember 2024 yang dibayarkan 2025 Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Persediaan Transfer Keluar Uang Muka Belanja Reklasifikasi Neraca Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Koreksi Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang Rupiah Kredit No D/K Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet D 511129 Beban /BelanjaUang Makan PNS 36.846.000 1 36.846.000 K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar : M. Ilham Safaat Direkam oleh : Asna Veronika Haloho Dibuat oleł : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : 31 Desember 2024 : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal Tanggal

				FORMULIR MEMO PENY	'ESUAIAN	N .			
ementeri	an Negar	a/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					
elon I	3000000 11 3 00		:						
'ilayah			•						
Satuan Kerja :				Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)					
o. Dokur	men		•	35/KU.02.02/2025					
Tanggal :				31 December 2024					
ahun Ang	ggaran		:	2024			10 1000000 100		
eteranga	ın		į.	Jurnal manual eliminasi akun penge pencatatan nilai berkurang aset lain	mbalian belar nya ATB softv	nja modal TAYL ya vare pada TA 202	ang baru dilakuk 4	an koreksi	
ategori	Jurnal Pe	enyesuaian		_					
	Pendap	oatan Diterima	Di	Muka		Koreksi Antar Beban			
	Penda	oatan yang Ma	sih	Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Be			elisih Kurs Belun	Terealisa	
Belanja Dibayar Dimuka				a Beban Selisih Kurs			Kurs Belum Tere	alisasi	
Belanja yang Masih Har				us Dibayar		Pembentukan	Piutang Jangka	Panjang	
	Penyis	ihan Piutang T	idal	k Tertagih Pembentukan Piutang			Piutang Jangka	Pendek	
		sutan dan Amo		Teansfor Macuk			uk		
	Persec			Ī		Transfer Keluar			
	150500000	Muka Belanja]		Reklasifikasi Neraca			
			nha	yaran Pendapatan	v	Koreksi			
				eklasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	425913	Pe	nerimaan Kembali Belanja Modal TAYI		346,500			
	К	391118		Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Re	valuasi		346,500		
Dibuat c Tanggal		a Veronika Ha Desember 202		Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 20		Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronik: : 31 Desember		

Win.

				FORMULIR MEMO PENYESUA	IAN				
Kementeria	an Negar	a/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	dan Reformasi Birol	krasi			
Eselon I			:						
Wilayah			:						
Satuan Kei	rja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)					
No. Dokun	nen		:	36/KU.02.02/2025					
Tanggal			:	31 December 2024					
Tahun Ang	garan		:	2024					
Keteranga	n		:	Jurnal manual eliminasi akun pengembalian l pencatatan nilai berkurang aset tetap Gedun	pelanja modal TAYL y g dan Bangunan pada	ang telah dilakukan koreksi a TA 2023 Audited			
Kategori .	lurnal Pe	enyesuaian							
	Pendap	atan Diterima	Di	Muka	Koreksi Antar				
	Pendap	oatan yang Ma	Pendapatan S	elisih Kurs Belum Terealisasi					
	Belanja	a Dibayar Dimu	uka		Beban Selisih	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belanja	a yang Masih I	Hari	us Dibayar	Pembentukar	Piutang Jangka Panjang			
		ihan Piutang Ti		ak Tertagih Pembentukan Piutang Jangka Pe					
		sutan dan Amo		Transfor Masuk					
	Persec			Transfer Keluar					
		Muka Belanja			Neraca				
			ala a	yaran Pendapatan v	Koreksi				
	Pembe	entukan/Koreks	si/re	eklasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	425913	Pe	nerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	304,508				
	К	391119		Koreksi Lainnya		304,508			
Dibuat o Tanggal		a Veronika Hal Desember 2024		Disetujui oleh : M. Ilham Safaat : 31 Desember 2024	Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika Haloho : 31 Desember 2024			
	King					Ashis			

				FORMULIR MEMO PE	NYESUAIA	N			
Kementeria	n Negara	a/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Ap	aratur Negara da	n Reformasi Birok	rasi		
Eselon I			:	¥					
Wilayah			;						
Satuan Kerj	a		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)					
No. Dokum	en		:	37/KU.02.02/2025					
Tanggal			:	31 December 2024					
Tahun Ang	garan		:	2024			ind partition of the supplementary of the supplemen		
Keterangar	1		:	Belanja lisensi dengan umur sar 2024, sehingga pada tahun 202	npai dengan 12 5 masih terdapat	bulan yang manfa manfaat yang ak	atnya melampaui tahun an diterima		
Kategori J	urnal Pe	nyesuaian							
	Pendap	atan Diterima	Di	Muka		Koreksi Antar	Beban		
	Pendap	atan yang Ma	sih	Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belanja	a Dibayar Dimu	uka			Beban Selisih	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	Belanja	a yang Masih I	Har	us Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang			
	Penyisi	han Piutang T	ida	k Tertagih		Pembentukan Piutang Jangka Pendek			
	Penyus	utan dan Amo	ortis	asi		Transfer Mass	uk		
	Persed	liaan				Transfer Kelua	ar		
	Uang N	Muka Belanja				Reklasifikasi	Neraca		
	2000		nba	yaran Pendapatan	ν	Koreksi			
	Pembe	entukan/Korek	si/n	eklasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit		
1	D	114112	Ве	elanja barang yang dibayar di muka	(prepaid)	980,460,983			
	К	521111		Beban Keperluan Perkan	toran		980,460,983		

Dibuat oleł : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Direkam oleh : Asna Veronika Haloho Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024 Tanggal : 31 Desember 2024

Pena

Al S

Jones

				FORMULIR MEMO PI	NYESUAIAN					
ementeria	an Negara/l	embaga	•	Kementerian Pendayagunaan Apa	ratur Negara dan R	eformasi Birokrasi				
selon I			:	*						
Vilayah			:							
atuan Ker	ja		:	Menteri Negara Pendayagunaan A	paratur Negara (4	27950)				
lo. Dokum	nen		:	40/KU.02.02/2025						
anggal			:	31 Desember 2024						
ahun Ang	garan		:	2024						
(eteranga	n		:	Koreksi Jurnal Penyesuaian Belan	a/Beban Uang Ma	kan PNS Desember	2024 yang dibayarkan 2			
(ategori Ju	urnal Penye	esuaian								
Pendapatan Diterima Di I			Di M	uka		Koreksi Antar E				
Pendapatan yang Masih H			h H	arus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi				
	Belanja [Dibayar Dimuk	a		Beban Selisih K	urs Belum Terealisasi				
		ang Masih Ha		Dibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang					
	6.3	an Piutang Tic		Dembertukan Riutang langka						
=		tan dan Amor				Transfer Masuk				
			tisd	51		Transfer Kelua	r			
	Persedia	an				Reklasifikasi N				
	Uang Mi	uka Belanja					eraca			
	Utang K	elebihan Pem	baya	aran Pendapatan	v	Koreksi				
	Pemben	tukan/Koreks	i/re	klasifikasi Piutang						
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	212111	Ве	lanja Pegawai yang Masih Harus Dib	ayar	36.846.000				
1		See Calling St. On		Beban /BelanjaUang Mak	2115		36.846.000			

Dibuat oleh : Asna Veronika Haloho Tanggal : 31 Desember 2024

ronika Haloho Disetujui oleh mber 2024 Tanggal : M. Ilham Safaat

: 31 Desember 2024

Direkam oleh Tanggal : Asna Veronika Haloho § 31 Desember 2024

Jana .

				FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Kementeria	n Negara,	/Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform	asi Birokrasi				
Eselon I			9						
Satuan Kerj	а		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950)				
No. Dokum	en			39/KU.02.02/2025					
Tanggal			:	31 Desember 2024					
Tahun Angg	garan			2024					
Keterangar	1		:	Koreksi Lainnya sebagai bentuk Penyesuaian Penyisihan Pi	utang				
Kategori Ju	rnal Pen	yesualan							
	Pendap	atan Diterima [M id	uka					
	Pendap	atan yang Masi	h Ha	arus Diterima	Pendapatan Se	lisih Kurs Belum Terealisasi			
	Belania	Dibayar Dimuk	а		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
				Dibayar	Pembentukan l	Piutang Jangka Panjang			
					Pembentukan l	Piutang Jangka Pendek			
					Transfer Masul	k			
			usa.		Transfer Kelua	r			
					1	craca			
				nan rendapatan	Koreksi				
	Pembe	ntukan/Koreks	/rel	klasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	594212	Bel	oan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	18.181.818				
	K	391119		Koreksi Lainnya		18.181.818			
Dibuat old Tanggal			ho	Disetujui oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 2024	Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika Haloho : 31 pesember 2024			
-	Eselon I Wilayah Satuan Kerj No. Dokum Tanggal Tahun Angg Keterangan Kategori Ju	Eselon I Wilayah Satuan Kerja No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran Keterangan Kategori Jurnal Pendap Pendap Belanja Belanja Penyus Persed Uang N Utang Pembe	Wilayah Satuan Kerja No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran Keterangan Reterangan Pendapatan Diterima D Pendapatan yang Masi Belanja Dibayar Dimuk Belanja yang Masih Ha Penyisihan Piutang Tid Penyusutan dan Amor Persediaan Uang Muka Belanja Utang Kelebihan Peml Pembentukan/Koreksi No D/K Kode Akun 1 D 594212 K 391119 Dibuat oleh: Asna Veronika Halo	Eselon I Wilayah Satuan Kerja No. Dokumen Tanggal Tahun Anggaran Keterangan Pendapatan Diterima Di M Pendapatan yang Masih Hau Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Penyusutan dan Amortisas Persediaan Uang Muka Belanja Utang Kelebihan Pembaya Pembentukan/Koreksi/rek No D/K Kode Akun 1 D 594212 Bel K 391119	Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reform Eselon I : - Wilayah : - Satuan Kerja : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen : 39/KU.02.02/2025 Tanggal : 31 Desember 2024 Tahun Anggaran : 2024 Keterangan : Koreksi Lainnya sebagai bentuk Penyesuaian Penyisihan Pin Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Pendapatan yang Masih Harus Diterima Belanja Dibayar Dimuka Belanja Dibayar Dimuka Belanja yang Masih Harus Dibayar Penyusutan dan Amortisasi Persediaan Uang Muka Belanja Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang No D/K Kode Akun Uraian Nama Akun 1 D 594212 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya Dibuat oleh : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : M. Ilham Safaat	Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I : - Wilayah : - Satuan Kerja : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen : 39/KU.02.02/2025 Tanggal : 31 Desember 2024 Tahun Anggaran : 2024 Keterangan : Koreksi Lainnya sebagai bentuk Penyesuaian Penyisihan Piutang Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka	Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eselon I : - Wilayah : - Wilayah : - Satuan Kerja : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427950) No. Dokumen : 39/KU 02.02/Z025 Tanggal : 31 Desember 2024 Tahun Anggaran : 2024 Keterangan : Koreksi Lainnya sebagai bentuk Penyesuaian Penyisihan Piutang Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka Koreksi Antar Beban Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Belanja yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pembentukan Piutang Jangka Pendek Penyusutan dan Amortisasi Transfer Masuk Transfer Masuk Persediaan Transfer Keluar Reklasifikasi Neraca Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan v Koreksi Pembentukan/Koreksi/reklasifikasi Piutang No D/K Kode Akun Uraian Nama Akun Rupiah Debet Rupiah Kredit 1 D 594212 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 18.181.818 Dibuat oleh : Asna Veronika Haloho Disetujui oleh : M. Ilhams Safaat Direkam oleh : Asna Veronika Haloho 31 Resember 2024		

				FORMULIR MEMO PEN	IYESUAIA	N		
(ementer	ian Negar	a/Lembaga	13	Kementerian Pendayagunaan Aparat	ur Negara dan	Reformasi Birokras	i	
Eselon I								
Wilayah			88					
Satuan Ke	rja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Apa	ratur Negara (4	427950)		
No. Dokur	nen			38/KU.02.02/2025				
Tanggal			:	31 Desember 2024				
Tahun Ang	ggaran		:	2024				
Keteranga	n		:	Koreksi atas memo jurnal nomor 25/ belum dilaksanakan pembayaran se 27/12/2024	Commence of the Commence of th	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Kategori J	urnal Pen	yesuaian						
Pendapatan Diterima Di				uka		Koreksi Antar I	Beban	
Pendapatan yang Masih			ih Ha	arus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Tereal		
	Belanja	Dibayar Dimu	ka			Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
	Belanja	yang Masih H	arus I	Dibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panja			
	Penyisi	han Piutang Tid	dak T	ertagih		Pembentukan	Piutang Jangka Pende	
	Penyus	utan dan Amoi	rtisas	i		Transfer Masu	k	
	Persed	iaan				Transfer Kelua	r	
	Uang N	Nuka Belanja				Reklasifikasi N	eraca	
	Utang	Kelebihan Pem	baya	ran Pendapatan	v	Koreksi		
	Pembe	ntukan/Koreks	i/rek	lasifikasi Piutang				
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun		Rupiah Debet	Rupiah Kredit	
1	D	212191	Utai	ng kepada Pihak Ketiga		78.310.000		
	К	218111		Utang yang Belum Diterima Tagih	annya		78.310.000	

: 31 Desember 2024 Tanggal

: 31 Desember 2024

Tanggal

: 31 Desember 2024





Tanggal



				FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
ementeri	an Negara/	Lembaga	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan R	eformasi Bi ro krasi				
selon I			:	*					
Vilayah :				5					
atuan Ker	rja		:	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (42	27950)				
lo. Dokun	nen		:	41/KU.02.02/2025					
anggal			:	31 Desember 2024					
ahun Ang	ggaran		:	2024					
(eteranga	n		:	Jurnal Penyesuaian Belanja/Beban Uang Makan PNS	Desember 2024 ya	ang dibayarkan 2025			
(ategori J	urnal Peny	esuaian							
Pendapatan Diterima Di M				uka	Koreksi Antar E	Beban			
	Pendapa	tan yang Mas	ih Ha	arus Diterima	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi				
	Belanja l	Dibayar Dimuk	(a		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
	Belanja	yang Masih Ha	arus	Dibayar	Pembentukan Piutang Jangka Panjang				
	Penyisih	an Piutang Tic	lak T	Tertagih	Pembentukan Piutang Jangka Pendek				
	Penyusu	tan dan Amor	tisas	si	Transfer Masu	k			
	Persedia	an			Transfer Kelua	r			
		uka Belanja			Reklasifikasi N	eraca			
				oran Pendanatan V	Koreksi				
	110000000000000000000000000000000000000			aran rendeparan] Noreks				
	Pember	ntukan/Koreks	i/rel	klasifikasi Piutang					
No	D/K	Kode Akun		Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit			
1	D	511129	Bel	ban /BelanjaUang Makan PNS	36.289.000				
	К	212111	1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		36.289.000			

Dibuat oleh : Asna Veronika Haloho Tanggal : 31 Desember 2024 Disetujui oleh

Tanggal

: M. Ilham Safaat : 31 Desember 2024 Direkam oleh Tanggal

: Asna Veronika Haloho

: 31 Desember 2024

Pain



pia

		FORMULIR MEMO PENYESUAIAN				
Kementerian Negara/	Lembaga	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo	ormasi Birokrasi			
Evelon I	NO. 11500 MOD	§ (8)				
Wilayah		8 8				
Satuan Kerja		Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (427)	950)			
No Dokumen		42/KU 02 02/2025				
Tanggal		31 December 2024				
Tahun Anggaran		2024				
Keterangan		Koreksi Lainnya sebagai bentuk Penyesuaian Penyisiha	n Plutang			
Kategori Jurnal Peny	esualan					
Pendapa	tan Diterima	Koreksi Antar Bel	ban			
Pendapa	tan yang Mas	Pendapatan Selis	sih Kurs Belum Terealisa			
	Dibayar Dimu	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi				
	ang Masih H	Pembentukan Pi	utang Jangka Panjang			
Penylaif an Piutang Tidak Tertagih Pembentukan Piutang Ja						
	an dan Amo		Transfer Masuk	en anno El carritto de actual e anguero de contrato.		
Parsedia		(1292)				
		COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	Transfer Keluar			
Carrier Contraction	ika Belanja		Reklasifikasi Ne	raca		
		bayaran Pendapatan v	Koreksi			
Pembent	ukan/Koreks	i/reklasifikasi Piutang				
No , D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Ruplah Debet	Rupiah Kredit		
1 , 0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	18,181,818			
, K	391119	Koreksi Lainnya		18,181,818		
ibunt o cit	eronika Halo ember 2024	ho Disetului oleh : M. Ilham Safaat Tanggal : 31 Desember 2024	Direkam oleh Tanggal	: Asna Veronika Halo : 31 Desember 2024		



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK/05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.6/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud.

B. ENTITAS PELAPORAN

BA 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

C. PERIODE PELAPORAN

Periode Pelaporan Barang Milik Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode Tahunan (Unaudited) Periode Tahun Anggaran 2024.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

- A. Penggolongan dan kodefikasi BMN telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2019 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- B. Kapitalisasi BMN telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4), yang menetapkan nilai minimum satuan kapitalisasi aset tetap meliputi:
 - 1. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 untuk :



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Peralatan dan Mesin; atau
- b. Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin; dan
- 2. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 untuk :
 - a. Gedung dan Bangunan; atau
 - b. Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan;

Selain itu, dengan memperhatikan Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pernyataan No. 7 mengenai Akuntansi Aset Tetap, disebutkan dalam Paragraf 50 bahwa pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah:

"Pengeluaran setelah saldo awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan."

- C. Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- D. Penyusutan BMN berupa Aset Tetap telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan ini dilakukan sebagai penyesuaian nilai akibat penurunan kapasitas dan manfaat dari aset tetap tersebut.
 - Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
 - Metode yang digunakan adalah metode garis lurus, yaitu mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap semester selama masa manfaat asset.



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

- Masa manfaat aset tetap mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- E. Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - Amortisasi dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu.
 - Metode yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan masa manfaat mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018, yang merupakan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Periode Tahunan (Unaudited) Tahun Anggaran 2024

Laporan ini mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara (BMN) yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada **Periode Tahunan** (*Unaudited*) **Periode Tahun Anggaran 2024** adalah sebesar **Rp335.515.068.618** (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah). Nilai ini merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut:

1. **Saldo Awal Laporan** sebesar **Rp274.622.028.799** (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

- Mutasi Tambah sebesar Rp160.703.144.185 (Seratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- Mutasi Kurang sebesar Rp99.810.104.366 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari dua jenis transaksi, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan.

- Transaksi Keuangan: Penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang diperoleh melalui pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan.
- Transaksi Non-Keuangan: Transaksi yang meliputi penambahan dan pengurangan BMN yang diperoleh dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun dengan menggunakan **sistem aplikasi** sebagai alat bantu guna mempermudah penatausahaan BMN, yang memungkinkan pengelolaan dan pencatatan yang lebih efisien. Laporan BMN ini terdiri atas:

- A. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAPB dan UAPA;
- B. Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Desember 2024;
- C. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal);
- D. Laporan Barang Persediaan;
- E. Laporan Barang Intrakomptabel;
- F. Laporan Barang Ekstrakomptabel;
- G. Laporan Barang Gabungan;
- H. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- I. Laporan Aset Tak Berwujud;
- J. Laporan Barang Rusak Berat;
- K. Laporan Barang Hibah DK/TP;
- L. Laporan Penyusutan Intrakomptabel;



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

- M. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel;
- N. Laporan Amortisasi ATB;
- O. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN;
- P. Daftar Barang Rusak Berat Diusulkan ke Pengelola;
- Q. Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat K/L;
- R. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan penjelasan selisihnya;
- S. Data/Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN.

IV. <u>RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2024</u>

A. Saldo Awal Tahun Anggaran 2024

Nilai Barang Milik Negara (BMN) per 1 Januari 2024 menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebesar **Rp274.622.028.799** (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Nilai ini merupakan gabungan dari aset **intrakomptabel** dan **ekstrakomptabel**.

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024Mutasi BMN per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp702.153.743 (Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Nilai ini terdiri dari saldo awal sebesar Rp923.599.646 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp221.445.903 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah).



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Barang Konsumsi	923.599.646		221.445.903	702.153.743
Jumlah	923.599.646	•	221.445.903	702.153.743

Penjelasan rincian:

- Saldo Awal Persediaan adalah nilai barang persediaan pada awal periode tahun anggaran 2024, yang tercatat sebesar Rp923.599.646.
- Mutasi Kurang mencatat pengurangan nilai persediaan selama periode tahun anggaran 2024 sebesar Rp221.445.903, yang disebabkan oleh pengurangan jumlah persediaan atau penghapusan barang yang sudah tidak terpakai atau rusak.
- Saldo Akhir Persediaan adalah nilai persediaan yang tercatat per 31
 Desember 2024, yang setelah mengalami pengurangan menjadi
 Rp702.153.743.

Kondisi Persediaan

Semua barang persediaan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kondisi baik, dan tidak ada yang dalam kondisi rusak ataupun usang.

2. Tanah

Saldo Tanah pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 sebesar **Rp60,334,049,494** (Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan total luasan tanah sejumlah **7472** m². Adapun jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Saldo Awal Tanah per 01 Januari 2024

Saldo awal tanah pada Kementerian PANRB per 01 Januari 2024 sebesar **Rp32,784,833,000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Rupiah) dengan total luasan tanah sejumlah **2,345 m²**, dengan rincian sebagai berikut:

JI	ENIS TRANSAKSI	IN	TRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL		
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI	
1	2	5	6	7	8	
000	Saldo Awal TAYL	2.345	32.784.833.000	0	0	
	TOTAL	2.345	32.784.833.000		0	

b. Mutasi Tambah Tanah periode tahun Anggaran 2024

Mutasi tambah tanah pada Kementerian PANRB periode tahun anggaran 2024 sebesar **Rp60,334,049,494** (Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan total luasan tanah sejumlah **7.472 m**², dengan rincian sebagai berikut:

JE	ENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
102	Transfer Masuk	5.127	27.549.216.494	0	0
131	Likuidasi Masuk	2.345	32.784.833.000	0	0
	TOTAL	7.472	60.334.049.494	0	0

c. Mutasi Kurang Tanah periode tahun Anggaran 2024

Mutasi kurang tanah pada Kementerian PANRB periode tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp32,784,833,000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan total luasan tanah sejumlah **2,345 m²**, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS TRANSAKSI		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
311	Likuidasi Keluar	-2.345	-32.784.833.000	0	0
	TOTAL	-2.345	-32.784.833.000	0	0

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 m^2 bidang dengan nilai sebesar **Rp0,00** (nol rupiah). Selain itu, jumlah bidang tanah yang



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah **0 m²** bidang dengan nilai sebesar **Rp0,00** (nol rupiah).

3. Peralatan dan Mesin

Saat ini, Peralatan dan Mesin menjadi salah satu unsur terbesar dari Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki oleh Kementerian PANRB. Saldo Peralatan dan Mesin gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp174,491,630,596 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan kuantitas sebanyak 13,921 NUP/Unit barang. Hal ini menjadikan Peralatan dan Mesin sebagai nilai terbesar dan kuantitas terbanyak dibandingkan jenis BMN lainnya..

Adapun rincian mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Awal Peralatan dan Mesin Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

Saldo awal Peralatan dan Mesin gabungan pada Kementerian PANRB periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp152,936,724,832** (Seratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan kuantitas sebanyak **13.664 NUP/Unit** barang.



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian saldo awal ini adalah sebagai berikut:

J	JENIS TRANSAKSI	INTR	AKOMPTABEL	EKST	RAKOMPTABEL
KOD E	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
301	ALAT BESAR				
000	Saldo Awal TAYL	39	4.169.836.400	0	0
302	ALAT ANGKUTAN				
000	Saldo Awal TAYL	192	37.683.073.000	2	1.890.000
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
000	Saldo Awal TAYL	38	352.771.156	4	2.475.180
304	ALAT PERTANIAN				
000	Saldo Awal TAYL	34	201.461.799	3	977.700
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA				
000	Saldo Awal TAYL	7.382	41.554.086.476	1.128	487.232.520
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
000	Saldo Awal TAYL	597	6.692.528.564	129	53.612.489
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
000	Saldo Awal TAYL	47	306.337.607	54	30.031.900
308	ALAT LABORATORIUM				
000	Saldo Awal TAYL	341	2.077.108.502	12	6.107.500
309	ALAT PERSENJATAAN				
000	Saldo Awal TAYL	39	157.381.601	2	440.000
310	KOMPUTER				
000	Saldo Awal TAYL	3.417	58.429.384.870	138	91.235.318
315	ALAT KESELAMATAN KERJA				
000	Saldo Awal TAYL	31	370.491.250	3	2.806.000
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
000	Saldo Awal TAYL	11	147.610.000	0	0
318	RAMBU-RAMBU				
000	Saldo Awal TAYL	16	22.300.000	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA				
000	Saldo Awal TAYL	5	95.545.000	0	0
	TOTAL	12.189	152.259.916.225	1.475	676.808.607
то	TAL KESELURUHAN		13.664		152.936.724.832

b. Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin gabungan pada Kementerian PANRB periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp62,691,271,404** (Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Rupiah) dengan kuantitas sebanyak **3.790 NUP/Unit** barang. Adapun rincian mutasi tambah tersebut adalah sebagai berikut:

J	IENIS TRANSAKSI	INTR	AKOMPTABEL	EKST	RAKOMPTABEL
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
301	ALAT BESAR				
102	Transfer Masuk	2	3.175.000	0	0
131	Likuidasi Masuk	12	948.431.000	0	0
302	ALAT ANGKUTAN				
101	Pembelian	32	21.054.013.000	0	0
131	Likuidasi Masuk	40	7.486.059.000	2	1.890.000
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
101	Pembelian	4	253.194.200	5	2.453.400
102	Transfer Masuk	1	1.100.000	0	0
131	Likuidasi Masuk	5	10.266.200	2	1.971.200
304	ALAT PERTANIAN				
131	Likuidasi Masuk	5	18.750.000	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA				
101	Pembelian	468	8.531.200.015	75	38.130.600
102	Transfer Masuk	205	862.861.657	16	11.777.000
107	Reklasifikasi Masuk	2	20.800.000	0	0
131	Likuidasi Masuk	1.412	5.930.084.520	231	181.172.100
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	7.381.500	0	0
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
101	Pembelian	71	963.735.600	50	34.199.420
102	Transfer Masuk	16	80.653.834	2	656.010
131	Likuidasi Masuk	122	1.203.842.838	34	9.536.000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
101	Pembelian	1	9.228.700	0	0
308	ALAT LABORATORIUM				
101	Pembelian	14	53.055.000	0	0
102	Transfer Masuk	5	11.111.500	0	0
131	Likuidasi Masuk	36	177.609.000	0	0
310	KOMPUTER				
101	Pembelian	361	7.108.503.200	8	3.890.000
102	Transfer Masuk	74	418.082.430	1	874.680
107	Reklasifikasi Masuk	9	680.850.764	2	910.800
131	Likuidasi Masuk Pengembangan Nilai	432	6.426.765.436	27	25.410.800
202	A set (Langsung)	0	48.450.000	0	0
311	ALAT EKSPLORASI				
102	Transfer Masuk	2	3.650.000	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA				
131	Likuidasi Masuk	4	65.545.000	0	0
	TOTAL	3.335	62.378.399.394	455	312.872.010
TC	OTAL KESELURUHAN		3.790		62.691.271.404



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

c. Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) periode Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp41.136.365.640** (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan kuantitas sebanyak **3.533 NUP/Unit** barang.



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Adapun rincian mutasi kurang tersebut adalah sebagai berikut:

	JENIS TRANSAKSI	INTR	INTRAKOMPTABEL		AKOMPTABEL
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
301	ALAT BESAR				
311	Likuidasi Keluar	(12)	(948.431.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(12.243.500)	0	0
302	ALAT ANGKUTAN				
302	Transfer Keluar	(5)	(1.094.286.000)	(1)	(945.000)
311	Likuidasi Keluar	(40)	(7.486.059.000)	(2)	(1.890.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(46)	(10.405.302.800)	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
302	Transfer Keluar	(1)	(2.706.000)	0	0
311	Likuidasi Keluar	(5)	(10.266.200)	(2)	(1.971.200)
304	ALAT PERTANIAN				
311	Likuidasi Keluar	(5)	(18.750.000)	0	0
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA				
302	Transfer Keluar	(616)	(2.206.663.428)	(6)	(5.343.300)
305	Koreksi Pencatatan	(4)	(7.381.500)	0	0
311	Likuidasi Keluar	(1.412)	(5.930.084.520)	(231)	(181.172.100)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(37)	(180.556.252)	(1)	(761.000)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
302	Transfer Keluar	(2)	(8.874.000)	0	0
311	Likuidasi Keluar	(122)	(1.203.842.838)	(34)	(9.536.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(55)	(178.381.450)	0	0
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(11.250.000)	0	0
308	ALAT LABORATORIUM				
302	Transfer Keluar	(2)	(3.910.000)	0	0
311	Likuidasi Keluar	(36)	(177.609.000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(11)	(48.298.840)	0	0
310	KOMPUTER				
304	Reklasifikasi Keluar	(30)	(905.036.081)	(22)	(9.600.800)
311	Likuidasi Keluar	(432)	(6.426.765.436)	(27)	(25.410.800)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(322)	(3.546.692.595)	0	0
315	ALAT KESELAMATAN KERJA				
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(20.800.000)	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA				
311	Likuidasi Keluar	(4)	(65.545.000)	0	0
	TOTAL	- 3.207	- 40.899.735.440	- 326	- 236.630.200
	TOTAL KESELURUHAN	-	3.533	- 4	1.136.365.640



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp91,928,585,122** (Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Dua Ribu) yang terdiri dari **16 NUP/Unit** Gedung dan Bangunan. Adapun jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Saldo Awal Gedung dan Bangunan Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)

Saldo Awal Gedung dan Bangunan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB periode tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp85,972,469,532** (Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari 11 NUP/unit Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS TRANSAKSI		IN	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI	
1	2	5	6	7	8	
401	BANGUNAN GEDUNG					
000	Saldo Awal TAYL	7	85.473.407.532	1	13.401.000	
402	MONUMEN					
000	Saldo Awal TAYL	0	0	2	9.720.000	
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI					
000	Saldo Awal TAYL	1	475.941.000	0	0	
	TOTAL	8	85.949.348.532	3	23.121.000	
TOTA	AL KESELURUHAN		11		85.972.469.532	

b. Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB periode tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp17,941,236,717 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri dari 17 NUP/unit Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

JI	JENIS TRANSAKSI		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI	
1	2	5	6	7	8	
401	BANGUNAN GEDUNG					
101	Pembelian	5	913.294.465	0	0	
102	Transfer Masuk	6	3.383.010.363	0	0	
131	Likuidasi Masuk	3	10.572.764.662	1	13.401.000	
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0	1.519.910.762	0	0	
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0	9.720.000	0	0	
214	Koreksi Susulan	0	913.294.465	0	0	
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI					
102	Transfer Masuk	1	139.900.000	0	0	
131	Likuidasi Masuk	1	475.941.000	0	0	
	TOTAL	16	17.927.835.717	1	13.401.000	
тот	AL KESELURUHAN		17		17.941.236.717	

c. Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB periode tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp11,985,121,127 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 12 NUP/unit Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

J	ENIS TRANSAKSI	IN	TRAKOMPTABEL	EKS	STRAKOMPTABEL
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
401	BANGUNAN GEDUNG				
305	Koreksi Pencatatan	(5)	(913.294.465)	0	0
311	Likuidasi Keluar	(3)	(10.572.764.662)	(1)	(13.401.000)
402	MONUMEN				
305	Koreksi Pencatatan	0	0	(2)	(9.720.000)
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI				
311	Likuidasi Keluar	(1)	(475.941.000)	0	0
	TOTAL	- 9	- 11.962.000.127	- 3	- 23.121.000
тот	AL KESELURUHAN	-	12	-	11.985.121.127



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

- 5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Kementerian PANRB per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp1,598,328,550** (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari 1 NUP/unit Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan total luasan 450 m² dan 5 NUP/unit Jalan, Irigasi dan Jaringan. Adapun jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB periode tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1,461,578,550 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) yang terdiri dari 3 NUP/unit Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut:

	JENIS TRANSAKSI	IN	INTRAKOMPTABEL		STRAKOMPTABEL
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
502	BANGUNAN AIR				
000	Saldo Awal TAYL	1	66.362.000	0	0
503	INSTALASI				
000	Saldo Awal TAYL	1	1.001.221.550	0	0
504	JARINGAN				
000	Saldo Awal TAYL	1	393.995.000	0	0
	TOTAL	3	1.461.578.550	-	-
TOT	AL KESELURUHAN		3		1.461.578.550

b. Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB periode tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp203,112,000 (Dua Ratus Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 NUP/unit Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan total luasan 450 m² dan 3 NUP/unit Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS TRANSAKSI		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	5	6	7	8
501	JALAN DAN JEMBATAN				
102	Transfer Masuk	450	126.829.000	0	0
502	BANGUNAN AIR				
102	Transfer Masuk	2	9.921.000	0	0
131	Likuidasi Masuk	1	66.362.000	0	0
	TOTAL	453	203.112.000	1	-

c. Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian PANRB periode tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp66,362,000 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 NUP/unit Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS TRANSAKSI		IN	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI	
1	2	5	6	7	8	
502	BANGUNAN AIR					
311	Likuidasi Keluar	(1)	(66.362.000)	0	0	
	TOTAL	- 1	- 66.362.000	-	-	
ТОТ	AL KESELURUHAN	-	1	•	66.362.000	

6. Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap Renovasi gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 (Nol Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp4,665,814,184 (Empat Miliar Enamratus Enampuluh Lima Juta Delapanratus Empatbelas Ribu Seratus Delapanpuluh Empat Rupiah) dan Rp4,665,814,184 (Empat Miliar Enamratus Enampuluh Lima Juta Delapanratus Empatbelas Ribu Seratus Delapanpuluh Empat Rupiah).

- a. Mutasi Tambah Aset Tetap Renovasi
 - 1) Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi pembelian (Transaksi 101). Selama periode Tahunan (*Unaudited*)



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

tahun anggaran 2024 telah dilakukan 20 transaksi aset tetap renovasi senilai sebesar Rp3,862,335,684 (Tiga Miliar Delapanratus Enampuluh Dua Juta Tigaratus Tigapuluh Lima Ribu Enamratus Delapanpuluh Empat Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
1	Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat Menteri dan Ruang Staff Ahli	51	199,493,750
2	Pengadaan Jasa Perencana Renovasi Ruang Kerja Deputi Kelem	52	39,738,000
3	Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu VIP Menteri Lantai 1	53	199,561,900
4	Peremajaan Instalasi Public Announcement Gedung Kementeria	54	198,301,500
5	Pengadaan Jasa Pelaksana Renovasi Rumah Dinas Menteri PAN	55	101,388,250
6	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	56	31,257,600
7	Pekerjaan Renovasi Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Setr	57	199,898,860
8	Renovasi Taman Rumdin	58	199,011,900
9	Renov Plang Nama Kementerian PANRB	59	99,700,200
10	Renov Lobby dan Ruang Kerja Balak	60	754,472,000
11	Renov Lobby Utama	61	448,511,046
12	Renov Ruang Kerja Staf Kepeg	62	199,555,800
13	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Lobby Utama	63	26,691,060
14	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Kerja De	64	29,748,000
15	Pengadaan Jasa Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Staff Kedeput	65	198,879,520
16	Renov Toilet Wanita Lt 1	66	139,604,478
17	Renov Toilet Pria Lt 1	67	199,650,150
18	Renov Ruang Yanlik	68	199,281,880
19	Renov Ruang Kabiro SDMOH	69	199,509,180
20	Renov Smoking Area	70	198,080,610
	Jumlah		3,862,335,684

2) Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Transaksi 105). Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 2 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp803,478,500 (Delapanratus Tiga Juta Empatratus Tujuhpuluh Delapan Ribu Limaratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	71	41,192,100
2	Renovasi Lobby dan Ruang Kerja Balak	72	762,286,400
	Jumlah		803,478,500

b. Mutasi Kurang Aset Tetap Renovasi

1) Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi Koreksi Pencatatan (Transaksi 305). Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 2 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp785,729,600 (Tujuhratus Delapanpuluh Lima Juta Tujuhratus Duapuluh Sembilan Ribu Enam ratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	56	31,257,600
2	Renovasi Lobby dan Ruang Kerja Balak	60	754,472,000
	Jumlah		785,729,600

2) Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (Transaksi 264). Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 1 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp10,346,295 (Sepuluh Juta Tigaratus Empatpuluh Enam Ribu Duaratus Sembilanpuluh Lima Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
1	Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu VIP Menteri Lantai 1	53	10,346,295
	Jumlah		10,346,295

3) Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi Transfer Keluar (Transaksi 302). Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 20 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp3,869,738,289 (Tiga Miliar Delapanratus Enampuluh Sembilan Juta Tujuhratus Tigapuluh Delapan Ribu



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Duaratus Delapanpuluh Sembilan Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
1	Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat Menteri dan Ruang Staff Ahli	51	199,493,750
2	Pengadaan Jasa Perencana Renovasi Ruang Kerja Deputi Kelem	52	39,738,000
3	Pekerjaan Renovasi Ruang Tunggu VIP Menteri Lantai 1	53	189,215,605
4	Peremajaan Instalasi Public Announcement Gedung Kementeri	54	198,301,500
5	Pengadaan Jasa Pelaksana Renovasi Rumah Dinas Menteri PAN	55	101,388,250
6	Pekerjaan Renovasi Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Set	57	199,898,860
7	Renovasi Taman Rumdin	58	199,011,900
8	Renov Plang Nama Kementerian PANRB	59	99,700,200
9	Renov Lobby Utama	61	448,511,046
10	Renov Ruang Kerja Staf Kepeg	62	199,555,800
11	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Lobby Utama	63	26,691,060
12	Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Kerja De	64	29,748,000
13	Pengadaan Jasa Pelaksana Renovasi Ruang Kerja Staff Kedeput	65	198,879,520
14	Renov Toilet Wanita Lt 1	66	139,604,478
15	Renov Toilet Pria Lt 1	67	199,650,150
16	Renov Ruang Yanlik	68	199,281,880
17	Renov Ruang Kabiro SDMOH	69	199,509,180
18	Renov Smoking Area	70	198,080,610
19	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	71	41,192,100
20	Renov Lobby dan Ruang Kerja Balak	72	762,286,400
	Jumlah		3,869,738,289

7. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara per 31 Desember 2024 sebesar **Rp1,561,864,549** (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). Dengan kuantitas 4,490 Unit.

a. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1,466,422,885 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan kuantitas 3,398 unit.



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

- Mutasi tambah sebesar Rp Rp332,711,449 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan kuantitas 2,800 unit.
 - Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi Pembelian (Transaksi 101). Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan transaksi aset tetap renovasi senilai sebesar Rp54,900,600 (Limapuluh Empat Juta Sembilanratus Ribu Enamratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

	URAIAN		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		
KODE AKUN	KODE BARANG	KUANTITAS	NILAI (RP)	KUANTITAS	NILAI (RP)		
601	Bahan Perpustakaan	396	54,900,600	0	0		
	TOTAL	396	54,900,600	ı	-		
TOTAL KESELURUHAN		396		54,900,600			

2) Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi **Transfer Masuks (Transaksi 102)**. Selama periode Tahunan (*Unaudited*) tahun anggaran 2024 telah dilakukan transaksi aset tetap renovasi senilai sebesar Rp40,541,064 (Empatpuluh Juta Limaratus Empatpuluh Satu Ribu Enampuluh Empat Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

	URAIAN	INTRAK	OMPTA BEL	EKSTRAKO	MPTABEL
KODE AKUN	KODE BARANG	KUANTITAS	NILAI (RP)	KUANTITAS	NILAI (RP)
601	Bahan Perpustakaan	696	40,541,064	0	0
	TOTAL	696	40,541,064	ı	-
TOTAL KESELURUHAN			696	4	10,541,064

3) Pencatatan aset tetap renovasi dilakukan melalui menu transaksi **Transfer Masuk (Transaksi 131)**. Selama periode Tahunan (*Unaudited*) tahun anggaran 2024 telah dilakukan transaksi aset tetap renovasi senilai sebesar Rp40,541,064 (Empatpuluh Juta Limaratus Empatpuluh Satu Ribu Enampuluh Empat Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

	URAIAN	INTRAK	OMPTA BEL	EKSTRAKO	MPTABEL
KODE AKUN	KODE BARANG	KUANTITAS	NILAI (RP)	KUANTITAS	NILAI (RP)
601	Bahan Perpustakaan	696	40,541,064	0	0
	TOTAL	696	40,541,064	1	-
TOTAL KESELURUHAN			696	4	10,541,064

- c. Mutasi kurang sebesar Rp237,269,785 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan kuantitas 2,800 unit.
 - Transfer Masuk (Transaksi 131). Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan transaksi aset tetap renovasi senilai sebesar Rp237,269,785 (Duaratus Tigapuluh Tujuh Juta Duaratus Enampuluh Sembilan Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Lima Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

	URAIAN	INTRAK	OMPTABEL	EKSTRAKO	MPTABEL
KODE AKUN	KODE BARANG	KUANTITAS	NILAI (RP)	KUANTITAS	NILAI (RP)
601	Bahan Perpustakaan	1708	237,269,785	0	0
	TOTAL	1708	237,269,785	ı	-
TOTAL KESELURUHAN		1	708	23	37,269,785

8. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan mutasi tambah sebesar Rp12,637,504,300 (Duabelas Miliar Enamratus Tigapuluh Tujuh Juta Limaratus Empat Ribu Tigaratus Rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp12,637,504,300 (Duabelas Miliar Enamratus Tigapuluh Tujuh Juta Limaratus Empat Ribu Tigaratus Rupiah).

a. Mutasi Tambah KDP



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Mutasi Tambah KDP pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12,637,504,300 (Duabelas Miliar Enam ratus Tigapuluh Tujuh Juta Limaratus Empat Ribu Tiga ratus Rupiah) yang meliputi:

Perolehan/Penambahan KDP (Transaksi 502)
 Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 1 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp3,846,274,320 (Tiga Miliar Delapanratus Empatpuluh Enam Juta Duaratus Tujuhpuluh Empat Ribu Tigaratus Duapuluh Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
Aset Tak I	Berwujud Dalam Pengerjaan		
1	Termin I Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas Dalam Rangka Mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan Di Bidang Aparatur Negara Yang Terintegrasi Dengan Layanan Dasar Kepegawaian	2	3,846,274,320
	Jumlah		3,846,274,320

2) Pengembangan KDP (Transaksi 503)

Selama periode Tahunan *(Unaudited)* tahun anggaran 2024 telah dilakukan 3 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp2,765,087,700 (Dua Miliar Tujuh ratus Enam puluh Lima Juta Delapan puluh Tujuh Ribu Tujuh ratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
Gedung	dan Bangunan Dalam Pengerjaan		
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	2	9,934,500
2	Renov Lobby dan Ruang Kerja Balak	3	7,814,400
Aset Tak	Berwujud Dalam Pengerjaan		
3	Termin III Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas Dalam Rangka Mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan Di Bidang Aparatur Negara Yang Terintegrasi Dengan Layanan Dasar Kepegawaian	2	2,747,338,800
	Jumlah		2,765,087,700

3) Koreksi Nilai KDP Bertambah (Transaksi 504)

Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 1 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp4,395,742,080 (Empat Miliar Tigaratus Sembilanpuluh Lima Juta Tujuhratus Empatpuluh Dua Ribu Delapanpuluh Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
Aset Tak I	Berwujud Dalam Pengerjaan		
1	Termin II Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas Dalam Rangka Mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan Di Bidang Aparatur Negara Yang Terintegrasi Dengan Layanan Dasar Kepegawaian	2	4,395,742,080
	Jumlah		4,395,742,080

4) Perolehan Lainnya KDP

Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 3 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp826,921,700 (Delapanratus Duapuluh Enam Juta Sembilanratus Duapuluh Satu Ribu Tujuhratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
Gedung d	an Bangunan Dalam Pengerjaan		
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	2	31,257,600
2	Renov Lobby dan Ruang Kerja Balak	3	754,472,000
Aset Teta	p Lainnya Dalam Pengerjaan		
3	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	3	41,192,100
	Jumlah		826,921,700

5) Reklasifikasi Masuk KDP (Transaksi 514)

Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan transaksi ini dengan nilai sebesar Rp803,478,500 (Delapanratus Tiga Juta Empatratus Tujuhpuluh Delapan Ribu Limaratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG	
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan				
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	4	41,192,100	
2	Renov Lobby dan Ruang Kerja Balak	5	762,286,400	
Jumlah			803,478,500	

b. Mutasi Kurang KDP

Mutasi Kurang KDP pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12,637,504,300 (Duabelas Miliar Enamratus Tigapuluh Tujuh Juta Limaratus Empat Ribu Tigaratus Rupiah) yang meliputi:

1) Reklasifikasi Keluar KDP (Transaksi 513)

Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan transaksi ini dengan nilai sebesar Rp803,478,500 (Delapanratus Tiga Juta Empatratus Tujuhpuluh Delapan Ribu Limaratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG	
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan				
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	4	41,192,100	
2	Renov Lobby dan Ruang Kerja Balak	5	762,286,400	
Jumlah			803,478,500	



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

2) Koreksi Pencatatan KDP (Transaksi 517) Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan transaksi ini dengan nilai sebesar Rp41,192,100 (Empatpuluh Satu Juta Seratus Sembilanpuluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG
Aset Teta	p Lainnya Dalam Pengerjaan		
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	3	41,192,100
	Jumlah		41,192,100

3) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)

Selama periode Tahunan (Unaudited) tahun anggaran 2024 telah dilakukan 3 transaksi ini dengan nilai sebesar Rp41,192,100 (Empatpuluh Satu Juta Seratus Sembilanpuluh Dua Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri seperti sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS TRANSAKSI	NUP	NILAI BARANG	KETERANGAN						
Aset	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan									
1	Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas Dalam Rangka Mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan Di Bidang Aparatur Negara Yang Terintegrasi Dengan Layanan Dasar Kepegawaian	2	10,989,355,200	Didefinitifkan Software Komputer NUP 134						
Aset	Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan									
1	Jasa Perencana Renovasi Lobby Utama	4	41,192,100	Didefinitifkan menjadi Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi NUP 4						
2	Renov Lobby dan Ruang Kerja Balak	5	762,286,400	Didefinitifkan menjadi Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi NUP 5						
	Jumlah		11,792,833,700							



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

9. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp52,079,760,687** (Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 318 (Tiga Ratus Delapan Belas) buah/NUP aset.

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

b. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp36,423,199,900 (Tigapuluh Enam Miliar Empatratus Duapuluh Tiga Juta Seratus Sembilanpuluh Sembilan Ribu Sembilanratus Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari 78 (Tujuh Puluh Delapan) buah/NUP aset.

1) Mutasi tambah

Mutasi Tambah aset yang berupa Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp18,402,827,874** (Delapanbelas Miliar Empatratus Dua Juta Delapanratus Duapuluh Tujuh Ribu Delapanratus Tujuhpuluh Empat Rupiah) yang terdiri dari 102 (Seratus Dua) unit/NUP aset, dengan rincian sebagai berikut:

 a) Pembelian (Transaksi 101) sebesar Rp4,395,742,080 (Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) buah/NUP aset.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		IN	TRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	1	4.395.742.080	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	1	4.395.742.080	0	0



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

b) Penyelesaian Pembangunan KDP (Transaksi 105) sebesar Rp10,989,355,200 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) buah/NUP aset.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	1	10.989.355.200	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	1	10.989.355.200	0	0

c) Perolehan Lainnya (Transaksi 112) sebesar Rp198,579,000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) buah/NUP aset.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	1	198.579.000	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	1	198.579.000	0	0

d) Likuidasi Masuk (Transaksi 131) sebesar Rp2,191,682,377 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 58 (Lima Puluh Delapan) buah/NUP aset.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		IN	TRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	58	2.191.682.377	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	58	2.191.682.377	0	0

Adapun likuidasi masuk tersebut merupakan likuidasi masuk dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian PANRB sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

e) Pengembangan Nilai Aset Langsung (Transaksi 202) sebesar Rp394,593,900 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri dari 4 (Empat) buah/NUP aset.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	4	394.593.900	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	4	394.593.900	0	0

f) Reklasifikasi Masuk (Transaksi 107) sebesar Rp232,875,317 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang terdiri dari 41 (Empat Puluh Satu) buah/NUP aset.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKS TRAKO MPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	41	232,875,317	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	41	232,875,317	0	0
	TOTAL		232,875,317		0

2) Mutasi Kurang

Mutasi Kurang aset yang berupa Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp8,391,924,094** (Delapan Miliar Tigaratus Sembilanpuluh Satu Juta Sembilanratus Duapuluh Empat Ribu Sembilanpuluh Empat Rupiah) yang terdiri dari 123 (Seratus Dua Puluh Tiga) unit/NUP aset, dengan rincian sebagai berikut:

 a) Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (Transaksi 264) sebesar Rp346,500 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) buah/NUP aset.



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	1	(346.500)	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	1	(346.500)	0	0

 b) Koreksi Pencatatan (Transaksi 305) sebesar Rp4,395,742,080 (Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) buah/NUP aset.

AKUN NERA	AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		STRAKOMPTABEL
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	1	(4.395.742.080)	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	1	(4.395.742.080)	0	0

c) Penghentian Aset Dari Penggunaan (Transaksi 405) sebesar Rp1,804,153,137 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 64 (Enam Puluh Empat) buah/NUP aset.

AKUN N	AKUN NERACA / KELO MPO K BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKO MPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI	
1	2	3	4	5	6	
162151	Software	64	(1,804,153,137)	0	0	
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	64	(1,804,153,137)	0	0	

d) Penghentian Aset Dari Penggunaan (Transaksi 405) sebesar Rp2,191,682,377 (Dua Miliar Seratus Sembilanpuluh Satu Juta Enamratus Delapanpuluh Dua Ribu Tigaratus Tujuhpuluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 64 (Enam Puluh Empat) buah/NUP aset.



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKO MPTABEL		EKSTRAKO MPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	58	2,191,682,377	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	58	2,191,682,377	0	0

c. Aset Tak Berwujud Lainnya

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp13,721,700 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari 9 (Sembilan) unit/NUP aset.

1) Saldo Awal

Saldo awal Aset Tak Berwujud Lainnya per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 dengan jumlah aset 0.

2) Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud Lainnya berasal dari likuidasi masuk (Transaksi 131) sebesar Rp13,721,700 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari 9 (Sembilan) unit/NUP aset, dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		MPOK BARANG INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY NILAI		QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	9	13.721.700	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	9	13.721.700	0	0

Adapun likuidasi masuk tersebut merupakan likuidasi masuk dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian PANRB sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA-03/PL.02.01/10/2024 – B/53/S.BN.05/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

3) Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang terhadap Aset Tak Berwujud Lainnya selama periode Tahun Anggaran 2024.



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

d. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5,631,935,307 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 252 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) unit/NUP aset

 Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31,325,000 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1 (Satu) buah/NUP.

a) Saldo Awal

Saldo awal Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 dengan jumlah aset 0.

b) Mutasi Tambah

Mutasi tambah pada Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berasal dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya (transaksi 188) sebesar Rp1,804,153,137 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 64 (Enam Puluh Empat) buah/NUP Aset Tak Berwujud.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY NILAI		QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
162151	Software	64	(1.804.153.137)	0	0
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	64	(1.804.153.137)	0	0

c) Mutasi Kurang

Mutasi kurang pada Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berasal dari reklasifikasi dari



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

aset tetap ke aset lainnya (transaksi 188) sebesar Rp1,772,828,137 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 63 (Enam Puluh Tiga) buah/NUP.

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY NILAI		QTY	NILAI
1	2	3	3 4		6
8.01.01	ASET TAK BERWUJUD	63	(1.772.828.137)	0	0

2) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Saldo Aset tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5,600,610,307 (Lima Miliar Enam Ratus Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) buah/NUP aset.

a) Saldo Awal

Saldo awal Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp0 dengan jumlah aset 0.

b) Mutasi Tambah

Mutasi tambah pada Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp14,467,148,937 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 504 (Lima Ratus Empat) buah/NUP Aset Tak Berwujud.

 Likuidasi Masuk Henti Guna (Transaksi 132) sebesar Rp67,800,000 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari 12 (Dua Belas) buah/NUP aset, dengan rincian sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		IN	TRAKOMPTABEL	EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	QTY NILAI		NILAI
1	2	3	4	5	6
132111	Peralatan dan Mesin	12	67.800.000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	8	65.800.000	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	2.000.000	0	0

Transfer Masuk Henti Guna (Transaksi 192) sebesar Rp83,662,500 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam ratus Enam Puluh Dua ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri dari 26 (Dua Puluh Enam) buah/NUP aset, dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERA	AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		STRAKOMPTABEL
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
132111	Peralatan dan Mesin	13	82.467.500	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR	1	1.100.000	0	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	1	1.402.500	0	0
3.06.01	ALAT STUDIO	3	6.150.000	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	7	67.160.000	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	1	6.655.000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	13	1.195.000	0	0
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN T	13	1.195.000	0	0
	TOTAL		26	·	83.662.500

Penghentian Aset Dari Penggunaan (Transaksi 401) sebesar Rp14,315,686,437 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari 466 (Empat Ratus Empat Puluh Enam) buah/NUP aset



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
132111	Peralatan dan Mesin	465	(14.314.925.437)	1	(761.000)
3.01.03	ALAT BANTU	3	(12.243.500)	0	0
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT	46	(10.405.302.800)	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR	15	(86.659.083)	1	(761.000)
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	22	(93.897.169)	0	0
3.06.01	ALAT STUDIO	19	(46.748.700)	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	36	(131.632.750)	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	3	(11.250.000)	0	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIU	10	(46.652.000)	0	0
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LIN	1	(1.646.840)	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	216	(2.893.623.251)	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	94	(585.269.344)	0	0
	TOTAL	466		(1	4.315.686.437)

c) Mutasi Kurang

Mutasi Kurang yang berasal dari Pencatatan Barang yang Akan Dihapuskan (Transaksi 911) sebesar Rp8,866,538,630 (Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari 253 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) buah/NUP aset, dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG		I INTRAKOMPTAREL I		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI	QTY	NILAI
1	2	3	4	5	6
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunal	252	(8,865,777,630)	1	(761,000)
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT I	34	(6,541,467,500)	0	0
3.05.01	ALAT KANTOR	10	(34,201,725)	1	(761,000)
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	13	(58,097,000)	0	0
3.06.01	ALAT STUDIO	5	(7,022,900)	0	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	(9,439,750)	0	0
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	3	(11,250,000)	0	0
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIU	5	(24,402,000)	0	0
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LIN	1	(1,646,840)	0	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	129	(1,901,468,865)	0	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	47	(276,781,050)	0	0
	TOTAL		253		(8,866,538,630)



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

BMN Berupa Aset Bersejarah Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.

10. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Per 31 Desember 2024

Penyusutan BMN berupa Aset Tetap telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Masa manfaat Aset Tetap berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.6/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi ATB dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu dan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Akumulasi Penyusutan Aset Intrakomptabel
 Merupakan penyusutan terhadap aset dengan nilai perolehan di atas
 nilai kapitalisasi yang ditetapkan yaitu aset-aset yang diperoleh dengan
 nilai perolehan diatas satu juta rupiah untuk peralatan dan mesin dan
 di bawah dua puluh lima juta rupiah untuk asset Gedung dan bangunan.
- 2. Akumulasi Penyusutan Aset Ekstrakomptabel



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Merupakan penyusutan terhadap aset dengan nilai perolehan di atas nilai kapitalisasi yang ditetapkan yaitu aset-aset yang diperoleh dengan nilai perolehan dibawah satu juta rupiah untuk peralatan dan mesin dan di bawah dua puluh lima juta rupiah untuk aset Gedung dan bangunan.

- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
 Merupakan penyusutan terhadap asset yang bersifat tak berwujud
 (bukan termasuk aset berwujud seperti peralatan dan mesin, gedung
 dan bangunan, atau aset tetap lainnya).
- 4. Untuk detail tabel akumulasi penyusutan aset intrakomptabel, akumulasi penyusutan aset ekstrakomptabel, dan akumulasi amortisasi aset tak berwujud dalam dilihat dalam laporan yang terlampir.
- Barang Milik Negara pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Per 31 Desember 2024
 - a. BMN per akun neraca

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp212,913,243,299 (Duaratus Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Neraca	Intrakomptab	el	Ekstrakompta	Ekstrakomptabel		n
INO	Oralan Neraca	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Ι	Aset Lancar						
1	Persediaan	702,153,743	0.18%	-	0.00%	702,153,743	0.18%
	Sub Jumlah(1)	702,153,743	0.18%	•	0.00%	702,153,743	0.18%
Ш	Aset Tetap						
1	Tanah	60,334,049,494	15.77%	-	0.00%	60,334,049,494	15.77%
2	Peralatan dan Mesin	173,738,580,179	45.40%	753,050,417	0.20%	174,491,630,596	45.60%
3	Gedung dan Bangunan	91,915,184,122	24.02%	-	0.00%	91,915,184,122	24.02%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,598,328,550	0.42%		0.00%	1,395,216,550	0.36%
5	Aset Tetap Lainnya	1,447,364,549	0.38%	114,500,000	0.03%	1,561,864,549	0.41%
6	KDP	•	0.00%		0.00%		0.00%
	Sub Jumlah(2)	329,033,506,894	85.98%	867,550,417	0.23%	329,697,945,311	86.15%
Ш	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	0.00%	-	0.00%		0.00%
2	Aset Tak Berwujud	46,447,825,380	12.14%	•	0.00%	46,447,825,380	12.14%
3	Aset Lain-lain	5,631,935,307	1.47%	-	0.00%	5,631,935,307	1.47%
	Sub Jumlah(3)	52,079,760,687	13.61%		0.00%	52,079,760,687	13.61%
	Total	381,815,421,324	99.77%	867,550,417	0.23%	382,682,971,741	100.00%

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Per 31 Desember 2024 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomp	tabel	Gabungan	
IVO	Oralan Neraca	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	125,351,403,912	73.99%	528,080,027	0.31%	125,879,483,939	74.30%
2	Gedung dan Bangunan	16,818,457,554	9.93%	-	0.00%	16,818,457,554	9.93%
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,018,944,925	0.60%	-	0.00%	1,018,944,925	0.60%
4	Aset Tetap Lainnya	18,425,938	0.01%	-	0.00%	-	0.00%
	Sub Jumlah(1)	143,207,232,329	84.53%	528,080,027	0.31%	143,716,886,418	84.83%
Ш	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	0.00%	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	20,084,714,728	11.86%	-	-	20,084,714,728	11.86%
3	Aset Lain-lain	5,610,230,968	3.31%	-	-	5,610,230,968	3.31%
	Sub Jumlah(2)	25,694,945,696	15.17%	-	-	25,694,945,696	15.17%
	Total	168,902,178,025	99.70%	528,080,027	0.31%	169,411,832,114	100.00%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN NERACA	LAP. BARANG	LAP.KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan	702,153,743	702,153,743	-
2	Tanah	60,334,049,494	60,334,049,494	ı
3	Peralatan dan mesin	173,738,580,179	173,738,580,179	ı
4	Gedung dan Bangunan	91,915,184,122	91,915,184,122	ı
5	Jalan,Irigasi dan Jaringan	1,598,328,550	1,598,328,550	ı
6	Aset Tetap Lainya	1,447,364,549	1,447,364,549	ı
7	Aset Tetap Renovasi	-	ı	ı
8	Aset Tak Berwujud	46,447,825,380	46,447,825,380	ı
	Aset Lain - Lain yang tidak			
	digunakan dalam operasi			
9	pemerintahan	5,631,935,307	5,631,935,307	-
	TOTAL	381,815,421,324	381,815,421,324	-

^{*)} Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah. Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

V. <u>INFORMASI BMN LAINNYA</u>

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 3 (tiga) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkemban	gan
			Rupiah	Persentase
1	2021	Rp247,913,199,324	Rp0	0%
2	2022	Rp261,596,823,293	Rp13,683,623,969	6%
3	2023	Rp276,321,634,076	Rp14,724,810,783	6%
3	2024	Rp335,515,068,618	Rp59,193,434,542	21%



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

B. BMN Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tidak memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi, sehingga tidak ada BMN dari dana dekonsentrasi pada Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

C. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

- Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), sehingga tidak ada BMN yang dikelola oleh satuan kerja BLU.
- D. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999).Tidak ada BMN yang berasal dari dana Belanja Lain-lain pada Satker Menteri
- E. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Selama Tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum mengajukan pengusulan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang

F. BMN Berupa BPYBDS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak memiliki BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

- G. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN
 - Permasalahan—permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :
 - Penggunaan aplikasi SAKTI secara online dalam pengelolaan BMN yang terintegrasi dengan pengangaran dan keuangan secara langsung dan berjenjang sehingga berbeda teknis pelaksanaannya dengan aplikasiaplikasi BMN sebelumnya;
 - 2. Penerapan proses bisnis penatausahaan dalam transaksi pencatatan mulai dari perolehan, pengembangan, inventarisasi sampai dengan



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

penghapusan aset sesuai dengan regulasi atau teknis pelaksanaannya pada aplikasi SAKTI

- H. Langkah-langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :
 - Meningkatkan kemampuan teknis dalam penatausahaan BMN yang menggunakan aplikasi SAKTI melalui Bimbingan Teknis;
 - Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan admin aplikasi SAKTI melalui Direktorat SITP (Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan) untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan BMN di Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

VI. KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- A. "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah."
- B. "Keputusan mengenai Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional."
- C. Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi)BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

- 1. Tanah,
- 2. Gedung dan bangunan, dan
- 3. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - a. Jalan dan jembatan, dan
 - b. Bangunan air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2020. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali dilaksanakan terhadap BMN yang Aset Tetap Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga). Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian selain Tanah. Untuk satker /Eselon I Satker Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, pelaksanaan penilaian kembali BMN Mulai tahun 2017 dan selesai di tahun 2017. Dengan rincian sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Rekapitulasi Hasil Penilaian Kembali BMN Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Per 31 Desember 2017

	No Uraian		Nilai BMN			
No			Nilai Buku Administrasi	Nilai Wajar		
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Rp27.541.781.405	Rp56.622.616.000		
2.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Rp119.677.211	Rp202.291.000		
	Total	3	Rp27.661.458.616	Rp56.824.907.000		

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan;
- 2. Menelusuri kembali aset Tetap yang menjadi obyek penilaian kembali BMN; dan
- 3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak di temukan dan barang dalam sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2019 yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebanyak 2 NUP dengan total nilai kenaikan nilai BMN sebesar Rp5.291.283.000,00 yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp56.622.616.000,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp61.913.899.000,00.

Selain itu juga terdapat satu NUP Bangunan Gudang Tertutup Permanen yang dilakukan Penilaian Kembali BMN Tahun 2020 dengan total nilai kenaikan nilai BMN untuk satu NUP Bangunan Gudang Tertutup Permanen tersebut sebesar Rp276.303.000.

VII. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2023.

Sesuai laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Lembaga/lembaga tahun 2020-2023, terdapat temuan terkait penatausahaan dan pengelolaan persediaan. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2020-2023 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

Rekapitulisasi Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2023

Pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Per 31 Desember 2024

NO	Tahun	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1	2020	Terdapat satu bidang tanah pada	Telah melakukan
		satuan kerja KASN asal perolehan	pengurusan
		dari penetapan berdasarkan	pendaftaran
		putusan pengadilan yang	kepemilikan hak atas
		berkekuatan hukum tetap dan	tanah sebagai hak pakai
		bersertipikat atas nama pihak lain,	pada Pemerintah RI
		yang memerlukan pengurusan	
		pendaftaran kepemilikan hak atas	
		tanah sebagai hak pakai pada	
		Pemerintah RI c.q. Kementerian	
		Pendayagunaan Aparatur Negara	
		Dan Reformasi Birokrasi.	
2	2021	Terdapat 11 nup persediaan	Telah dilakukan
		kuantitas negatif dan saldo negatif	pengecekan terkait
			BMN terkait, bahwa
			tidak ada kuantitas
			negatif maupun saldo
			negatif
3	2022	Nihil	Nihil
4	2023	Tidak ditemukan 1 NUP aset tak	Telah dilakukan
		berwujud di Kementerian PANRB	penelusuran oleh tim
			BMN Kementerian
			PANRB dan telah



PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

	disusun Berita Acara
	Hasil Penelusuran
	Nomor 45/BN.05/2024
	Tanggal 9 Agustus
	2024 yang
	ditandatangani oleh
	Tim BMN dengan
	mengetahui Kepala
	Bagian Rumah Tangga
	dan Layanan
	Pengadaan.

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KL

PERIODE TA. 2024 UNAUDITED

Kode BA dan Nama BA: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI

Objek Penelaahan	Kondi	si LK	Seharusnya
Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			_
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		<u></u>	 -
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
Pernyataan telah di reviu oleh APIP	√		-
2. Pemyataan Tanggung Jawab	√		Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE face	√	ĺ	Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
Neraca Percobaan Akruai	√		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	1	_	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON			
	Sama	Tidak	Seharusnya
Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk 1.	-t		Sama
perbandingan dengan tahun 2019? Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, u	raikan dalam	Lampiron	Telaah dan
penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTA	NSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		√	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	 		Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi		•	
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >>		ſ	Tidak
Akun Non Ref)	+	√	
Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		١, ١	Tidak
<u> </u>		√	<u>.</u>
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN	1	I	
AKUN ASET (1xxxxx) Adakan akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di k/L tersebut, misai Persediaan Amunisi	Ada	Tidak	Seharusnya
1. yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan		√	Tidak
Kesehatan di Kemendstek Dikti Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx		→	Tidak
hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi,			
Akun Dibayar aimuka (prepaid) dan Dang Muka Belanja Knusus BUN (Transaksi Hiban, Bunga, Subsial, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	+		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		V	Tidak

1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211) Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neroco Percobaon saldo awal) Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan	Tidak Seharusnya Ya/Tidak Ya Tidak
Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neroco Percobaan saldo awal)	Ya/Tidak Ya
1 Percobaan saldo awal $)$ $$	Ya
2. Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2024? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2024) √	Tidak
Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan? √	i iuak
Sehubungan terbitnyo Surat S-876/PB/2024 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan h sehingga soldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan y disahkan.	,
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx) Ada Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI √	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap √	Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	Ada/Tidak
Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya 5. berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya √	Ya
Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	Ya
sanoo akun 391151 manya perasaraan sensin akumaiasi penyasutah aset yang anakakan rekias keluaraan rekias masak keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi rekias keluar dan rekias masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri d papuncusian di Anlikasi C mkon	1 7
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)	
Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	0
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen TKTM secara absolut tsb ?	_
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)	
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx) Ada Tidak	Seharusnya
Adakah akun 41xxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ? √	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS) Ada Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx √	Tidak
2. Adakah akun 421x∞ khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621 √	Tidak_
3. Adakah akun 422∞ khusus BUN? Yaitu 4221∞ √	Tidak
Adakah akun 425∞x khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 4. 425773, 425774, 425815, 425998 √	Tidak

Akun	Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain- lain/transfer TAYL		√	Tidak
Peng	ecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
Akun	Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaa	h Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjumal?		√	Ya/Tidak
AKUI	N BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELA	AH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"	İ	V	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnyo, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Jika 1	TDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa 8LU)		√ √	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√ -	Tidak
	h Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai ediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			0
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			0
3.	isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			- -
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
apak	k mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sa ah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmar I lainnya.		per satker	
5	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
Tetaj Aplik	Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi a o/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker asi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan d esuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07	tersebut bel	um melaki	ukan update
6	Apakah terdapat pengeluaran belanjan untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		✓	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		V	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah akun "nuil" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "nuil" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		<	Tidak
9. Apakah seluruh akun bemilai positif, kecuali Beban Penyisihan Plutang	√		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Po			
piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlaha	n pada LO da	pat bemila	ni Negatif).
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang 10. (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya
Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih d	<u> </u>	dak ada, ke	mungkinan
salah dalam menjumal penyisihan piutang.		•	_
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Ada	Tidak	\$eharusnya
Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenan	n dokumen :	sumbernyo).
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awai" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
Apabila perhitungan no. 2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jumal menggunakan aku	ın 391111	-	
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	1		L··
Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
Contoh 1: Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan olel	<u> </u>	aldo Awal	
Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.		:	
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesala	ihan pencata	tan utang :	senilai
Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikore	ksi di tahun l	berjalan.	
NERACA			
···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ya	Tidak	Seharusnya
Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjumaian akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belur	_	engan me	
dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jumal tersebut dapat ditelusuri dengan			
Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JR	RNUMUM", k	emudian f	ilter kode akun
register (D/K) dan Akun Beban (D/K)	Ι		•
Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2024 dengan 31 Desember 2019 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?	√	 `	Ya
		:	

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN	N		
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaba	ın awal "TIDAK", mak	a jawa ba n	sub pertanyaan
seharusnya juga "TIDAK"			, - ···
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√.		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√ √		Ada/Tidak
Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	- √		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√	-	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√.		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesualan Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		-√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	T V		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√	-	Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan pe	nyusutan/amortisasi S	emester l	
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		1	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		√	Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	J	· · · · ·	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√	_	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2024 di e-Rekon&LK?			Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Manitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon	Internal Sawai"	<u> </u>	
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK?		,	Tidak
		√	
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Valid	lasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
	Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai			
1.	Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")		√	Tidak
	MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1	Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		
<u> </u>	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	TIOBK		
3	Berapa Total Nilai BViN dengan Nilai Perolehan Minus? (dilsi nilai rupiahnya)		0	
4	Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak	 -	- √
5	Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		0	
6	Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		0	
	LAPORAN REALISASI ANGCARAN			
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2.	Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraco Percobaan Kas?		√	Tidak
Penge	ecekan TDK		·	
1,	Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		,	Tidak
			-√	
2.	Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3.	Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4.	Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			Tidak
5.	Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif			Tidak
э.	tidak bersaldo		√	TIUAK
6.	Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√_	Tidak
e-Rek	con&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA .	Aktif, Tidak Al	ktif Bersald	do dan tidak
aktif :	tidak bersaldo			
	SAIKONS dan PENGAWASAN JEMUAN BPK JAHUN-JAHUN SE	-HLI I KANIV	γΛ	
				. I. tut - state to
	h ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuar Inggrapak dalambaya	i yang berulai	ng. Dibaw	an ini adalan
	h-contoh telaahnya.	J	-t-1-1-	6 -1
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		
2.	Apakah telah dilakukan Jurnal Take-in Reval dengan benar ?	√		
	ebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2024		:	
	nyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-	Ya	Tidak	Seharusnya
	ng satker) Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opnome Persediaan ?			Ya
1.	Apakah semua jumai manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen	√		 :
2.	pendukung terkait?	√		Ya
3.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4.	Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5.	Adakan PNBP digunakan langsung?		√	Tidak
6.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	√		Ya
7.	Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8.	Apakah sudah pengakuan akuntansi piutang lainnya sudah sesuai?	√		Ya
			:	
			:	
			:	

	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kese	suaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
	Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecul	kupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2.	Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3.	Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format?	√		Ya
4.	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	Į,	-	Ya
5.	Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	√		Ada
Akun	Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenara	ın seluruh ak	un tsb., bil	a perlu
band	ingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Karan.		÷	
7.	Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan?	√		Ya
8.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		. Ya
9	Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	√		Ya
	ANALISIS LAINNYA			
Anali	sis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2.	Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	√		Ya
3	Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2024 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2024	√		Ya
4.	Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban</i> persediaan terlampir)	√		Ya
	Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-1		<u> </u>	
Kecu	kupan pengungkapan pada CaLK-LRA	Ada	Tidak	j
1.	Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19		√	
2.	Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	o	•	
3	Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
4.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
5.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
6.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√	
Kecu	kupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7.	Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
8.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
9.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√	
Kecu	kupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Tídak	1

10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID- 19.		√
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		√
Kecui	kupan pengungkapan pada CaLK - Neraca	Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		√
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		√
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		V
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		V

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK" Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

(Iqbal Fanhaz)

NIP 198410062006041003

Jakarta, 18 Februari 2025

Penelaah,

(Sri Susanti)

NIP 198211232011012001

NOTA KESEPAKATAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024 YANG MASUK DALAM LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

Nomor: NK- 048/ COPN /2025

Pada hari ini, tanggal 11 Februari 2025, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rekonsiliasi secara daring untuk menyepakati dan menyetujui angka terkait rincian output (RO) Prioritas Nasional, sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangka pelaporan rincian output dari Program Prioritas Nasional untuk pengungkapan pada Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Kementerian/Lembaga menyetujui akan melaporkan dan mengungkapkan secara memadai pada Laporan Keuangan Tahun 2024 atas rincian output dari Program Prioritas Nasional sesuai dengan angka dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian PAN RB

Sri Susanti

menterian PPN/Bappenas

irdini

Direktorat Jenderal Anggaran

Itjok Henandarto

KEUANGAN Direktorat Jenderal Rerbendaharaan

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANG

JENDERAL PERB

ENAS

Mohamad Hadad

Lampiran Nota Kesepakatan

No	ВА	Nama BA	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	4350	UAB	'004	Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	Layanan	3.490.000.000	2.670.341.967	76,51	7	8	114,29	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp3.159.267.868) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
2	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6189	PBL	'004	Pembanguna n alat ukur Birokrasi Berkelas Dunia	Rekomendasi Kebijakan	2.856.700.000	2.357.817.533	82,54	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp2.536.832.846) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
3	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6190	UAE	'001	Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	Laporan	2.002.000.000	1.919.234.642	95,87	98.000	92.932	94,83	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp1.939.506.143) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
4	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6191	PEA	'001	Koordinasi percepatan pelaksanaan kebijakan RB Nasional	Kegiatan	6.778.000.000	6.232.631.148	91,95	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp6.374.155.338) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
5	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	СО	6192	PEA	'001	Koordinasi Percepatan Implementas	Kegiatan	4.582.694.000	3.143.584.229	68,6	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara

No	ВА	Nama BA	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		dan Transformasi Pelayanan Publik					i Kebijakan SPBE								Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp3.709.478.112) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
6	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6193	PBL	'001	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam	Rekomendasi Kebijakan	625.000.000	578.591.944	92,57	2	2	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp619.625.369) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
7	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6193	PBL	'002	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Perekonomia n, Kemaritiman dan Investasi	Rekomendasi Kebijakan	625.000.000	493.300.951	78,93	3	3	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
8	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6193	PBL	'003	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Pembanguna n Manusia dan Kebudayaan	Rekomendasi Kebijakan	625.000.000	521.697.000	95,01	3	3	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
9	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6194	UAI	'008	Fasilitasi Penerapan Pembelajara n Terintegrasi melalui Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN	Lembaga	3.100.000.000	2.850.748.613	91,96	138	183	132,61	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya . Realisasi Volume RO melebihi dari

No	ВА	Nama BA	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Target Volume RO dikarenakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah secara sistem.
10	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	'007	Piloting Persiapan Penerapan Manajemen Penghargaan ASN Berbasis Kinerja	Lembaga	5.400.000.000	5.173.707.277	95,81	10	12	120,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya . Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah secara sistem.
11	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	'005	Penguatan Budaya Kerja ASN	Lembaga	3.000.000.000	2.701.870.834	90,06	624	627	100,48	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya . Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO

No	ВА	Nama BA	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	tidak dapat dirubah secara sistem.
12	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	'006	Fasilitasi Penerapan Manajemen Talenta ASN	Lembaga	3.600.000.000	3.291.757.800	91,44	138	138	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya .
13	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	'003	Koordinasi Piloting Implementas i Pengadaan CASN yang Fleksibel	Lembaga	8.700.000.000	7.586.177.076	87,20	10	14	140,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya. Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah
14	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6194	UAI	'004	Fasilitasi Penerapan Platform Tunggal Manajemen Pegawai ASN	Lembaga	12.500.000.000	12.338.233.659	98.71	138	194	140,58	secara sistem. Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya Realisasi Volume RO melebihi dari Target Volume RO dikarnakan realisasi lapangan/riil melebihi

No	ВА	Nama BA	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	ekspektasi dan Target Volume RO tidak dapat dirubah secara sistem.
15	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6195	UAB	'001	Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS)	Sistem Informasi	1.750.000.000	1.579.148.148	90,24	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp1.731.090.685) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
16	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	СО	6195	UAI	'003	Peningkatan Penerapan MPP Digital	Pemda	3.000.000.000	2.188.872.024	72,96	25	25	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
17	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6196	QIC	'001	Penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah	Lembaga	2.098.918.000	2.105.404.626	100,31	65	65	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
18	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6198	UAE	'003	Penanganan dan Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelengga raan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Laporan	548.382.000	548.378.669	100,00	320	320	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp545.568.720) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
19	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	СО	6198	UAE	'002	Pengawasan Netralitas Pegawai ASN	Laporan	649.051.000	649.048.470	100,00	1	1	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara

No	ВА	Nama BA	Kode PN	Uraian PN	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode KRO	Kode RO	Uraian RO	Satuan RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		dan Transformasi Pelayanan Publik					dalam Penyelengga raan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024								Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp647.786.014) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.
20	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	со	6198	UAE	'001	Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Laporan	299.999.000	299.996.084	100,00	36	36	100,00	Terdapat perbedaan realisasi anggaran antara Monsakti dengan LRA (Realisasi Net: Rp297.047.696) diantaranya berupa pengembalian belanja dan hal lainnya.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian PAN RB

Sri Susanti

Kementerian PPN/Bappenas

Direktorat Jenderal Anggaran

Itjok Henandarto

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Mohamad Hadad